

# **LAPORAN KINERJA**

## **(LAKIN)**

---



## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Gorontalo Tahun 2023 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi dan misi yang dibebankan kepada KPPN Gorontalo dalam kurun waktu tahun 2023. LAKIN KPPN Gorontalo Tahun 2023 disusun guna memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 dengan berpedoman pada Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 yang disempurnakan dengan Keputusan Menteri keuangan Nomor 14/KMK.09/2017.

Laporan ini memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi KPPN Gorontalo serta Rencana Strategis KPPN Gorontalo. Pada LAKIN KPPN Gorontalo ini dijelaskan upaya dalam meraih keberhasilan, mengatasi hambatan serta jalannya pelaksanaan program/kegiatan KPPN Gorontalo selama tahun 2023. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) serta umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

Tingkat pencapaian sasaran dan tujuan serta hasil yang diperoleh pada tahun 2023 berorientasi pada pencapaian visi dan misi. Keberhasilan tahun 2023 akan menjadi tolok ukur untuk peningkatan kinerja KPPN Gorontalo tahun 2024.

Gorontalo, 18 Januari 2024  
Kepala KPPN Gorontalo



Ditandatangani Secara Elektronik

Arief Rokhman

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LAKIN) KPPN Gorontalo 2023 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis KPPN Gorontalo dan Rencana Kinerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2023. Penyusunan LAKIN KPPN Gorontalo Tahun 2023 ini pada hakikatnya merupakan pertanggungjawaban atas pencapaian tugas/sasaran strategis instansi selama tahun 2023.

Maksud dan tujuan pembuatan LAKIN adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu syarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya (*good governance*) yang dilandasi tugas dan fungsi KPPN Gorontalo sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara wajib untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan yang dipercayakan kepadanya. Laporan Kinerja merupakan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja yang dilakukan selama kurun waktu satu tahun. Dalam organisasi pemerintah, proses penyusunan Laporan Kinerja tersebut harus dilakukan secara integral.

Dalam mencapai sasaran agar kebijakan, program, dan seluruh kegiatan dapat terarah diperlukan suatu visi. KPPN Gorontalo mempunyai visi yaitu: “Menjadi Pengelola Perbendaharaan di Daerah yang Profesional, Modern, Transparan, dan Akuntabel”.

Untuk mewujudkan visi tersebut KPPN Gorontalo menetapkan misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Layanan Perbendaharaan yang Profesional, Modern, dan Transparan
2. Mewujudkan Pengelolaan Kas yang *Prudent*, Efisien, dan Optimal
3. Mewujudkan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara yang Akuntabel, Transparan, dan Tepat Waktu
4. Mengembangkan Kapasitas Pendukung Sistem Perbendaharaan yang Andal, Profesional, dan Modern

KPPN Gorontalo mempunyai tujuan yaitu menatausahakan dana APBN secara cepat, tepat, dan akurat dengan pelayanan prima melalui sistem informasi yang transparan kepada masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut KPPN Gorontalo mempunyai sasaran strategis antara lain: pelaksanaan belanja negara yang optimal dan proposional; pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel; pemenuhan tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi;

kepatuhan penggunaan layanan yang tinggi, pelayanan prima, penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara yang andal dan akurat, peningkatan pemahaman mitra kerja, optimalisasi monitoring dan evaluasi, pengembangan SDM yang berkompetensi tinggi, optimalisasi sistem pengelolaan kinerja.

Tingginya tingkat ekspektasi kepuasan pelanggan yang sering tidak berbanding lurus dengan tingkat pemahaman dan respon satker mitra kerja atas aturan dan aplikasi terbaru merupakan tantangan KPPN Gorontalo sehingga diperlukan perencanaan, koordinasi, dan komunikasi yang lebih intensif lagi antara KPPN Gorontalo, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo, Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan, serta satker mitra kerja.

Pencapaian kinerja KPPN Gorontalo pada tahun 2023 dapat dilihat dari pencapaian indikator-indikator sebagai berikut:

1. Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L terealisasi sebesar 95 dari target 90.
2. Indeks kualitas LK Kuasa BUN KKPN terealisasi sebesar 4 dari target 3.
3. Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN terealisasi sebesar 4.84 dari target 4.66.
4. Persentase tingkat implementasi standardisasi kompetensi pejabat perbendaharaan terealisasi sebesar 95% dari target 93%.
5. Tingkat efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan terealisasi sebesar 96.55 dari target 89.
6. Persentase akurasi perencanaan kas terealisasi sebesar 97,97% dari target 80%.
7. Tingkat kualitas penyelesaian SP2D terealisasi sebesar 5 dari target 3.
8. Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah terealisasi sebesar 99.51 dari target 90.
9. Indeks kualitas implementasi Digipay terealisasi sebesar 4 dari target 3.1.
10. Indeks kualitas pelaksanaan rekonsiliasi tingkat UAKPA terealisasi sebesar 4 dari target 3.25.
11. Indeks kualitas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara K/L terealisasi sebesar 4 dari target 3.
12. Tingkat implementasi penajaman tugas Treasury dan Financial Advisory terealisasi sebesar 99,62 % dari target 80%.
13. Tingkat kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization terealisasi sebesar 89,26 dari target 85.
14. Tingkat implementasi Learning Organization terealisasi sebesar 100 dari target 85.
15. Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal terealisasi sebesar 91,28 dari target 86.

16. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN terealisasi sebesar 96,79 dari target 95.5%.
17. Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB terealisasi sebesar 96 dari target 84.
18. Persentase kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan terealisasi sebesar 120% dari target 100%

Dalam pembuatan Laporan Kinerja (LAKIN) menghasilkan laporan yang akurat, perlu dilakukan sosialisasi kepada seluruh pimpinan dan pegawai tentang visi, misi, tujuan, sasaran, dan target yang akan dicapai yang kemudian hal tersebut dijadikan landasan/acuan dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari.



## DAFTAR ISI

|                                                             |             |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                  | <b>i</b>    |
| <b>IKHTISAR EKSEKUTIF .....</b>                             | <b>ii</b>   |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                     | <b>v</b>    |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>                                   | <b>vi</b>   |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                                   | <b>vii</b>  |
| <b>DAFTAR GRAFIK .....</b>                                  | <b>viii</b> |
| <b>Bab I Pendahuluan .....</b>                              | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang .....                                     | 1           |
| B. Tugas,Fungsi, dan Struktur Organisasi .....              | 1           |
| C. Peran Strategis .....                                    | 4           |
| D. Sistematika Laporan.....                                 | 10          |
| <b>Bab II Perencanaan Kinerja .....</b>                     | <b>11</b>   |
| A. Rencana Strategis .....                                  | 11          |
| B. Penetapan/Perjanjian Kinerja .....                       | 14          |
| <b>Bab III Akuntabilitas Kinerja .....</b>                  | <b>20</b>   |
| Capaian Kinerja Organisasi .....                            | 20          |
| 1. Nilai Kinerja Organisasi KPPN Gorontalo Tahun 2023 ..... | 20          |
| 2. Nilai Kinerja Setiap Perspektif .....                    | 21          |
| 3. Tabel Menyeluruh atas Nilai Kinerja Organisasi .....     | 23          |
| 4. Sasaran Strategis.....                                   | 27          |
| 5. Penjelasan Capaian IKU .....                             | 34          |
| 6. Inisiatif Strategis.....                                 | 90          |
| Realisasi Anggaran.....                                     | 91          |
| Kinerja Lainnya .....                                       | 91          |
| 1. Inovasi Manajemen/Pelayanan .....                        | 91          |
| 2. Inisiatif Pemberantasan Korupsi.....                     | 103         |
| 3. Penghargaan.....                                         | 103         |
| <b>Bab IV Penutup .....</b>                                 | <b>102</b>  |
| <b>Lampiran</b>                                             |             |



## DAFTAR GAMBAR

|                                                                                     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1.1 Bagan Organisasi KPPN Tipe A1.....                                              | 2   |
| 2.1 Peta Strategi dan Sasaran Strategis KPPN Gorontalo Tahun 2023 .....             | 15  |
| 3.1 Peta Strategi KPPN Gorontalo 2023 .....                                         | 28  |
| 3.2 Aplikasi Telegram .....                                                         | 92  |
| 3.3 Aplikasi Manjo .....                                                            | 93  |
| 3.4 Aplikasi Manjo .....                                                            | 93  |
| 3.5 Aplikasi Mini KPPN .....                                                        | 94  |
| 3.6 Aplikasi Mini KPPN .....                                                        | 94  |
| 3.7 Si Weruh .....                                                                  | 96  |
| 3.8 Si Jaga .....                                                                   | 97  |
| 3.9 <i>Treasury Classroom</i> KPPN Gorontalo .....                                  | 97  |
| 3.10 Kopen .....                                                                    | 98  |
| 3.11 Sareo .....                                                                    | 99  |
| 3.12 Rombukiya .....                                                                | 100 |
| 3.13 Rombukiya .....                                                                | 100 |
| 3.14 LosDol .....                                                                   | 101 |
| 3.15 Call me KPPN Gorontalo .....                                                   | 101 |
| 3.16 Motivasi pagi Gorontalo Pasti .....                                            | 102 |
| 3.17 Penandatanganan Pakta Integritas .....                                         | 103 |
| 3.18 Perolehan Penghargaan Kinerja Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Terbaik ..... | 104 |



## DAFTAR TABEL

|                                                                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.1 Statistik Pegawai KPPN Gorontalo .....                                                                        | 3  |
| 2.1 Target Kinerja Kinerja KPPN Gorontalo .....                                                                   | 13 |
| 2.2 Tabel Perjanjian Kinerja KPPN Gorontalo Tahun 2023 .....                                                      | 15 |
| 2.3 Inisiatif Strategis KPPN Gorontalo Tahun 2023.....                                                            | 18 |
| 3.1 Bobot Perspektif.....                                                                                         | 20 |
| 3.2 Rekapitulasi Nilai Perspektif KPPN Gorontalo .....                                                            | 20 |
| 3.3 <i>Stakeholder Perspective</i> .....                                                                          | 22 |
| 3.4 <i>Customer Perspective</i> .....                                                                             | 22 |
| 3.4 <i>Stakeholder Perspective</i> .....                                                                          | 22 |
| 3.5 <i>Internal Process Perspective</i> .....                                                                     | 21 |
| 3.6 <i>Learning and Growth Perspective</i> .....                                                                  | 24 |
| 3.7 Nilai Kinerja Organisasi KPPN Gorontalo 2023 .....                                                            | 25 |
| 3.8 IKU SS Perbendaharaan Negara yang Optimal dan Akuntabel .....                                                 | 29 |
| 3.9 IKU SS Dukungan manajemen yang efektif .....                                                                  | 29 |
| 3.10 IKU SS Komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang berkesinambungan .....                                    | 30 |
| 3.11 IKU SS Pengelolaan Pengeluaran Negara yang Prudent, Efektif dan Efisien .....                                | 30 |
| 3.12 IKU SS Pelaksanaan Anggaran yang Optimal .....                                                               | 31 |
| 3.13 IKU SS Pertanggungjawaban Keuangan Negara yang Transparan dan Akuntabel .....                                | 31 |
| 3.14 IKU SS Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif .....                | 32 |
| 3.15 IKU SS Organisasi dan SDM yang Unggul dan Adaptif .....                                                      | 33 |
| 3.16 IKU SS Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Andal .....                                               | 33 |
| 3.17 Penjelasan Capaian IKU Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L.....                                           | 34 |
| 3.18 Perbandingan Target dan Realisasi IKU Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L .....                           | 39 |
| 3.19 Penjelasan Capaian IKU Indeks kualitas LK Kuasa BUN KPPN .....                                               | 41 |
| 3.20 Penjelasan Capaian IKU Kepuasan Satker Terhadap Layanan KPPN .....                                           | 43 |
| 3.21 Perbandingan Target dan Realisasi IKU Kepuasan Satker Terhadap Layanan KPPN ..                               | 43 |
| 3.22 Penjelasan Capaian IKU Persentase Tingkat Implementasi Standardisasi Kompetensi Pejabat Perbendaharaan ..... | 46 |
| 3.23 Penjelasan Capaian IKU Tingkat Efektivitas Edukasi di Bidang Pengelolaan Perbendaharaan .....                | 48 |



|                                                                                                                                |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 3.24 Perbandingan Target dan Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Edukasi di Bidang<br>Pengelolaan Perbendaharaan .....           | 49  |
| 3.25 Penjelasan Capaian Persentase Akurasi Perencanaan Kas .....                                                               | 51  |
| 3.26 Penjelasan Capaian Tingkat kualitas penyelesaian SP2D .....                                                               | 54  |
| 3.27 Penjelasan Capaian IKU Nilai Kinerja Penyaluran Dana Transfer ke Daerah.....                                              | 62  |
| 3.28 Perbandingan Target dan Realisasi IKU Nilai Kinerja Penyaluran Dana Transfer ke<br>Daerah .....                           | 63  |
| 3.29 Penjelasan Capaian IKU Indeks Kualitas Implementasi Digipay .....                                                         | 66  |
| 3.30 Penjelasan Capaian Persentase Akurasi Perencanaan Kas .....                                                               | 69  |
| 3.31 Penjelasan Capaian Indeks Kualitas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara K/L .....                                         | 70  |
| 3.32 Penjelasan Capaian IKU Tingkat Implementasi Penajaman Tugas Treasury dan Financial<br>Advisory .....                      | 74  |
| 3.33 Perbandingan Target dan Realisasi IKU Tingkat kualitas pengelolaan kinerja berbasis<br>Strategy Focused Organization..... | 77  |
| 3.34 Penjelasan Capaian Tingkat Implementasi Learning Organization.....                                                        | 80  |
| 3.35 Perbandingan Target dan Realisasi IKU Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Tugas<br>Kepatuhan Internal .....                  | 82  |
| 3.36 Penjelasan Capaian IKU Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN .....                                                | 84  |
| 3.37 Perbandingan Target dan Realisasi IKU Persentase kualitas pelaksanaan anggaran<br>KPPN .....                              | 84  |
| 3.38 Penjelasan Capaian IKU LK UAKPA/UAKPB.....                                                                                | 86  |
| 3.39 Perbandingan Target dan Realisasi IKU Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan<br>Pengadaan .....                          | 94  |
| 3.40 Refinement IKU 2023 .....                                                                                                 | 96  |
| 3.41 Pagu dan Realisasi Belanja KPPN Gorontalo 2019-2023 .....                                                                 | 102 |

## DAFTAR GRAFIK

|                                                                                   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.1 Nilai Kinerja Organisasi KPPN Gorontalo 2019-2023 .....                       | 19 |
| 3.2 Capaian IKU LK UAKPA 2019-2023 .....                                          | 35 |
| 3.3 Capaian IKU Capaian IKU Kepuasan Satker Terhadap Layanan KPPN 2019-2023 ..... | 37 |
| 3.4 Capaian IKU Kepuasan Satker Terhadap Layanan KPPN 2019-2023 .....             | 40 |
| 3.5 Capaian IKU SAKTI 2018-2023 .....                                             | 45 |
| 3.6 Capaian IKU Akurasi Perencanaan Kas 2019-2023 .....                           | 46 |
| 3.7 Capaian IKU IKPA 2019-2023 .....                                              | 54 |
| 3.8 Capaian IKU DAK dan Dana Desa KPPN 2018-2023 .....                            | 61 |
| 3.9 Capaian IKU Rekonsiliasi UAKPA 2019-2023 .....                                | 66 |
| 3.10 Capaian IKU LPJ Bendahara 2019-2023 .....                                    | 69 |
| 3.11 Capaian IKU <i>Strategy Focused Organization</i> 2019-2023 .....             | 70 |
| 3.12 Capaian IKU Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal 2019-2023 .....    | 73 |
| 3.13 Capaian IKU <i>Hard Competency</i> 2019-2023 .....                           | 75 |
| 3.14 Capaian IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran 2019-2023 .....                    | 77 |
| 3.15 Capaian IKU Pengelolaan BMN 2019-2023 .....                                  | 87 |

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2023 disusun sebagai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 yang disempurnakan dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/KMK.09/2017. LAKIN disusun berdasarkan realisasi capaian IKU Kemenkeu-Tree sebagaimana yang tercantum dalam Kontrak Kinerja tahun 2023. LAKIN juga merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis KPPN sebagai instansi vertikal DJPb yang sepenuhnya dan benar-benar menunjukkan kinerja KPPN.

#### B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 262/PMK.01/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, KPPN Gorontalo mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Perbendaharaan dan Bendaharawan Umum Negara (BUN), Penyaluran Pembiayaan atas Beban Anggaran, serta Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran melalui dan dari Kas Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut KPPN Gorontalo menyelenggarakan fungsi:

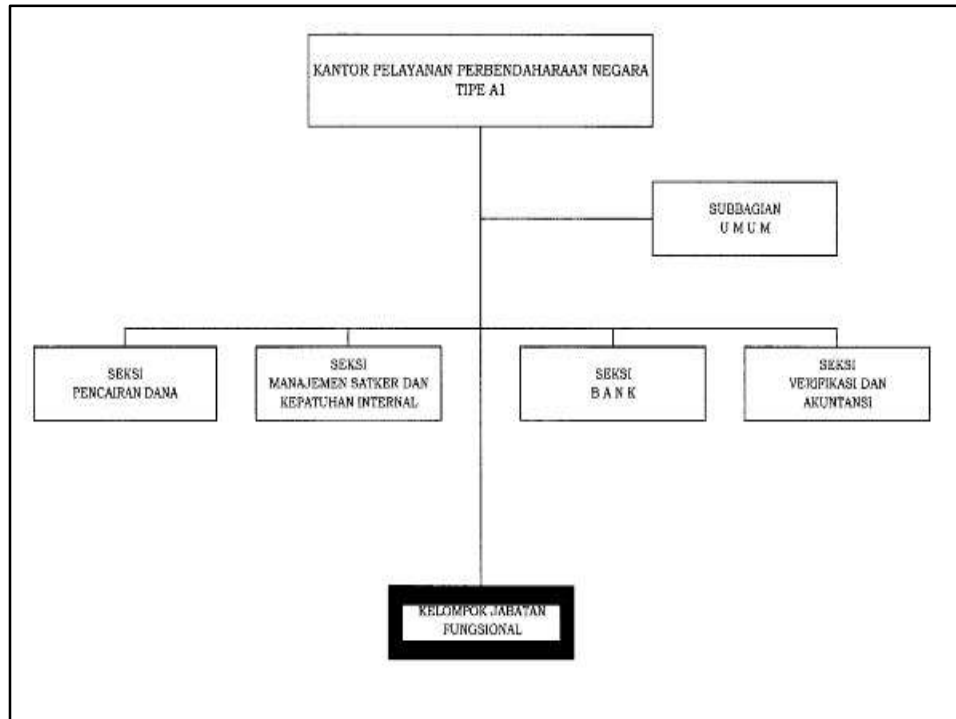
1. pengujian terhadap surat perintah pembayaran berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari kas negara atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN);
3. penyaluran pembiayaan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
4. penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara melalui dan dari kas negara;
5. penyusunan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara;
6. pelaksanaan verifikasi transaksi keuangan dan akuntansi serta pertanggungjawaban bendahara;
7. pembinaan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
8. pelaksanaan tugas kepatuhan internal;
9. pelaksanaan manajemen mutu layanan;

10. pelaksanaan manajemen hubungan pengguna layanan (*customer relationship management*);
11. pelaksanaan tugas dan penyusunan laporan Pembina Pengelola Perbendaharaan (*treasury management representative*);
12. pelaksanaan dukungan penyelenggaraan sertifikasi bendahara;
13. pengelolaan rencana penarikan dana;
14. pengelolaan rekening pemerintah;
15. pelaksanaan fasilitasi Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Daerah;
16. pelaksanaan layanan bantuan (*helpdesk*) penerimaan negara;
17. pelaksanaan sistem akuntabilitas dan kinerja;
18. pelaksanaan monitoring dan evaluasi Kredit Program;
19. pelaksanaan kehumasan dan layanan Keterbukaan Informasi Publik (PIK); dan
20. pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

KPPN Gorontalo merupakan KPPN Tipe A1 yang terdiri dari:

- 1) Subbagian Umum;
- 2) Seksi Pencairan Dana;
- 3) Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal;
- 4) Seksi Bank;
- 5) Seksi Verifikasi dan Akuntansi; dan
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional.

**Gambar 1.1**  
**Bagan Organisasi KPPN Tipe A1**



Pada 31 Desember 2023, jumlah pegawai KPPN Gorontalo sejumlah 22 orang yang terdiri dari 7 perempuan dan 15 laki-laki.

**Tabel 1.1**  
**Statistik Pegawai KPPN Gorontalo**

| Seksi                |                  | Jenis Kelamin | Jumlah |
|----------------------|------------------|---------------|--------|
| Kepala Kantor        |                  | Laki-Laki     | 1      |
| Fungsional           |                  | Laki-Laki     | 2      |
| Subbagian Umum       | Kepala Subbagian | Laki-Laki     | 1      |
|                      | Pelaksana        | Laki-Laki     | 2      |
|                      |                  | Perempuan     | 1      |
| Seksi Pencairan Dana | Kepala Seksi     | Laki-Laki     | 1      |
|                      | Pelaksana        | Laki-Laki     | 2      |
|                      |                  | Perempuan     | 3      |
| Seksi MSKI           | Kepala Seksi     | Laki-Laki     | 1      |
|                      | Pelaksana        | Laki-Laki     | 1      |
|                      |                  | Perempuan     | 1      |
| Seksi Bank           | Kepala Seksi     | Laki-Laki     | 1      |
|                      | Pelaksana        | Laki-Laki     | 1      |
|                      |                  | Perempuan     | 1      |
| Seksi Vera           | Kepala Seksi     | Laki-Laki     | 1      |

|               |           |           |    |
|---------------|-----------|-----------|----|
|               | Pelaksana | Laki-Laki | 1  |
|               |           | Perempuan | 1  |
| TOTAL PEGAWAI |           |           | 22 |

KPPN Gorontalo terus meningkatkan kinerjanya baik dengan pelatihan formal seperti *e-learning*, *focus group discussion*, maupun sosialisasi-sosialisasi dan pelatihan informal seperti *capacity building* untuk meningkatkan kinerja dan kerjasama seluruh pegawai.

### C. Peran Strategis KPPN Gorontalo

Peran strategis KPPN Gorontalo selaras dengan tugas yang diembannya yaitu :

1. Melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan Bendahara Umum Negara (BUN);
2. Melaksanakan penyaluran pembiayaan atas beban anggaran; dan
3. Melaksanakan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan yang dijalankan oleh KPPN Gorontalo juga merupakan implementasi dari kebijakan yang merupakan turunan dari kebijakan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Penjabaran dari kebijakan dan strategi tersebut meliputi:

1. Aspek Pelaksanaan Anggaran
  - a. Ditinjau dari aspek pelaksanaan anggaran, KPPN merupakan garda terdepan dalam implementasi kebijakan fiskal, khususnya belanja pemerintah. Dengan demikian, baik buruknya kualitas pelaksanaan tugas dan kualitas pelayanan di KPPN akan ikut mempengaruhi tingkat penyerapan serta pola penyerapan belanja pemerintah. Dengan adanya SPAN dan menyusul segera diimplementasikan SAKTI maka seluruh prosedur pencairan dana menjadi modern, sederhana, aman, dan terintegrasi. Hal berikutnya yang menjadi krusial adalah kesiapan dari para pengelola keuangan di satker. Peningkatan Fungsi manajemen satker di KPPN merupakan strategi yang tepat. Jika kompetensi dan kapasitas satker cukup baik maka risiko perubahan yang telah dicanangkan semakin berkurang.
  - b. Dampak dari pola penyerapan anggaran yang tidak proporsional dan tidak sesuai dengan perencanaan akan sangat berpengaruh tidak hanya pada kekokohan fiskal, namun juga terhadap stabilitas keuangan serta pergerakan roda perekonomian di sektor riil. Pada akhirnya, hasil dari monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran ini dapat berfungsi sebagai masukan dalam proses perencanaan anggaran periode berikutnya maupun dalam rangka *reward* dan *punishment* kepada kementerian/lembaga.
2. Aspek Pengelolaan Kas



- a. Di bidang pengelolaan kas, peran Ditjen Perbendaharaan sangat signifikan karena dapat menentukan besaran beban utang pemerintah, arah, dan strategi pembiayaan dan utang, keputusan dan kebijakan lain terkait transaksi Surat Berharga Negara (SBN) termasuk *issuance, buyback, swap, debt switch*, dan lainnya. Dengan konsep *Asset Liability Management* (ALM) maka keterkaitan antara *Debt Management* dan *Cash Management* semakin konkrit dan jelas.
  - b. Dalam hal perencanaan kas, Ditjen Perbendaharaan berperan dalam menentukan aliran kas keluar sehingga dapat menentukan dan merencanakan dengan baik kebutuhan untuk membiayai kekurangan kas yang mungkin terjadi.
  - c. Menentukan posisi kas pada berbagai waktu sehingga dapat memperkirakan terjadinya surplus atau defisit sedini mungkin.
3. Aspek Pertanggungjawaban Laporan Keuangan Pemerintah
- a. Peranan yang tidak kalah penting yang dilaksanakan oleh KPPN adalah penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan terkait penggunaan dana APBN, baik laporan keuangan kementerian/lembaga selaku pengguna anggaran, maupun laporan keuangan pemerintah selaku Bendahara Umum Negara bendahara umum negara.
  - b. Sesuai pasal 1 Undang-Undang 15 Tahun 2004 dijelaskan bahwa Tanggung Jawab Keuangan Negara merupakan kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. Peran ini dilaksanakan oleh Ditjen Perbendaharaan dari tingkat KPPN (Satuan Kerja), tingkat Kantor Wilayah, sampai tingkat Kantor Pusat (Eselon I).
  - c. Sejalan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standard Akuntansi Pemerintahan yang diikuti dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219 Tahun 2013 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, maka tahun 2014 adalah tahun terakhir penerapan akuntansi berbasis cash toward accrual. Mulai tahun 2015 pertanggungjawaban Laporan Keuangan Pemerintah harus sudah menggunakan akuntansi berbasis akrual. Direktorat Jenderal Perbendaharaan menjadi motor penggerak penyusunan laporan sekaligus pembina kementerian negara/lembaga untuk melaksanakan akuntansi berbasis akrual.
4. Aspek Modernisasi Pengelolaan Keuangan Negara
- a. Dengan diimplementasikannya Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara (SPAN) awal Januari 2015 sebagai wujud pengelolaan keuangan negara yang modern dengan dukungan informasi teknologi yang terkini menjadikan Direktorat Jenderal

Perbendaharaan sebagai pionir terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang efisien, transparan, dan akuntabel.

- b. Kemudahan dan percepatan layanan terkait pencairan/realisasi APBN menjadikan Kementerian Keuangan khususnya Direktorat Jenderal Perbendaharaan berperan penting dalam percepatan pembangunan.

Berdasarkan data peran strategis DJPB, KPPN Gorontalo telah melakukan langkah-langkah strategis dan inovasi pada tahun 2023 untuk meningkatkan perekonomian dan mempermudah satker-satker dalam melakukan pelayanan di KPPN, seperti:

- 1) Goraka

Inovasi yang bertujuan mengevaluasi hasil capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran satuan kerja lingkup KPPN secara berkala dalam bentuk rapat satker, sekaligus penghargaan kepada satker yang telah memiliki IKPA dengan capaian yang sudah memenuhi target.

- 2) Si Weruh

Salah satu cara meningkatkan pemantauan terhadap integritas pegawai dan kinerja organisasi adalah dengan mengenali para pegawainya (know your employee), untuk itu diperlukan ajang untuk saling mengenal antar pegawai sebagai salah satu bentuk pengawasan secara tidak langsung terhadap pegawai apabila ada indikasi ketidakwajaran.

- 3) Café Molango

Inovasi KPPN Gorontalo yang mendukung dalam meningkatkan kualitas nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran satuan kerja lingkup KPPN Gorontalo. Cafe Molango ini bertujuan untuk mengetahui apa saja masalah-masalah yang dihadapi satker dengan nilai IKPA yang masih kurang dari target saat memenuhi nilai masing-masing indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran di satuan kerja tersebut sehingga dapat memberikan arahan dan pendampingan untuk membantu mengatasi masalah tersebut

- 4) KESAT

KESAT merupakan singkatan dari Kemenkeu Satu Kemenkeu Terpercaya. Inovasi ini muncul untuk mendukung sinergi dan kolaborasi antar unit kemenkeu terutama di daerah. Diharapkan dengan KESAT ini, masyarakat ataupun stakeholder yang berada di sekitar kita merasakan manfaat dan mengenal kemenkeu secara lebih dalam dan lebih dekat. KESAT nantinya akan berisi pegawai kemenkeu dari perwakilan unit kerjanya yang mengkoordinir pegawai kemenkeu dari masing-masing unit kerja

untuk melakukan suatu program kerja dan kegiatan yang akan disusun dan direncanakan bersama

5) Klinik Digipay

Inovasi “Klinik Digipay” merupakan inovasi kolaborasi dengan perbankan yang memberikan pelayanan ke Stakeholder/Satuan Kerja dalam bentuk bimtek langsung/Offline dengan materi seperti menjalankan Aplikasi Digipay, permasalahan User Aplikasi Digipay dan permasalahan pembayaran transaksi melalui Aplikasi Digipay baik menggunakan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) atau Virtual Account (VA). Diharapkan dengan inovasi ini dapat membantu adanya perubahan paradigma baru terhadap Satuan Kerja, terutama dalam penggunaan Uang Persediaan (UP) dalam transaksi pembelian barang/jasa dengan menggunakan KKP atau UA. Sehingga kebiasaan lama dengan menggunakan Uang Cash akan ditinggalkan, dengan demikian pembayaran transaksi dari manual menjadi digital

6) Website Intress KPPN Gorontalo

Inovasi berbasis website yang dikembangkan oleh KPPN Gorontalo dengan tipe dashboard, berisikan fitur produk layanan, informasi kegiatan dan inovasi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Gorontalo serta produk UMKM secara digital. Inovasi ini mempermudah satker mendapatkan informasi layanan sekaligus menyampaikan dokumen layanan kepada KPPN Gorontalo.

7) LOS DOL

Inovasi “LOSDOL (Layanan Online Satker KPPN Gorontalo)” adalah salah satu bentuk layanan KPPN Gorontalo kepada mitra kerja yang berbentuk layanan konsultasi “oneononemeeting” via aplikasi zoom atau ms-teams yang bertujuan untuk memperoleh solusi secara lebih komprehensif dan interaktif atas setiap permasalahan atau hal-hal baru yang dirasakurang lengkap apabila hanya disampaikan melalui surat, nota dinas, atau WA Grup

8) CUCUP Podcast

Cucup Podcast adalah acara podcast dari KPPN Gorontalo yang ditayangkan setiap bulan di youtube KPPN Gorontalo. Acara ini mengundang Guest star/narasumber yang berasal dari internal KPPN Gorontalo dan juga dari satker/mitra kerja KPPN Gorontalo. Podcast cucup memberikan manfaat kepada seluruh penikmatnya dengan memberikan informasi terkini terkait dengan perbendahraan/materi lain yang relevan serta menarik.

## 9) Mohimoa

Mohimo'a merupakan inovasi yang menyediakan fasilitas bagi satker mitra untuk berkonsultasi secara Bersama/simultan dalam satu tempat, sehingga menjangkau banyak customer dan lebih cepat mendapat solusi. Dari satu tempat inilah satker yang memiliki masalah yang sama dapat teratasi. Mohimo'a diharapkan permasalahan yang dimiliki oleh satker lebih cepat untuk diatasi.

## 10) Rombukiya

Sebagai bentuk nyata upaya untuk selalu menjaga institusi dari adanya pelanggaran kode etik/kode perilaku oleh pegawai, maka KPPN Gorontalo menginisiasi pelaksanaan kegiatan bertukar pikiran untuk saling menasihati dan meneguhkan kembali komitmen untuk menjaga nilai-nilai etika sebagai ASN. Kepada setiap pegawai juga dibekali dengan buku saku kode etik pegawai sebagai pengingat untuk selalu menjaga kode etik dan kode perilaku. Selain itu, sebagai bentuk pengingat juga dipasang banner dalam Bahasa local yang berisi seruan untuk menjaga integritas.

## 11) Si Jaga

Salah satu cara untuk menjaga dan memelihara aset serta menghindari kemungkinan terhentinya layanan karena gangguan alam adalah dengan pro aktif melakukan mitigasi atas potensi kejadian yang dapat berdampak pada terganggunya pencapaian visi dan misi organisasi. KPPN Gorontalo selalu proaktif dalam usaha memitigasi risiko gangguan alam misalnya kebakaran.

#### D. Sistematika Laporan

LAKIN Tahun 2023 KPPN Gorontalo mempunyai sistematika sebagai berikut:

##### BAB I PENDAHULUAN

Berisi penjelasan umum organisasi, dengan penekanan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi organisasi.

##### BAB II PERENCANAAN KINERJA

Berisi ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2023.

##### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Berisi capaian kinerja organisasi, realisasi anggaran, dan kinerja lainnya.

##### BAB IV PENUTUP

Berisi simpulan umum atas capaian kinerja organisasi, baik kinerja utama maupun kinerja lainnya serta menyajikan langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja organisasi.

##### LAMPIRAN

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. Rencana Strategis

Sebagai implementasi dari Visi Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang telah ditetapkan, yaitu “Menjadi Pengelola Perbendaharaan Negara yang Unggul di Tingkat Dunia”, maka visi KPPN Gorontalo menyesuaikan dengan ruang lingkup, tugas pokok dan fungsi yang ada. Secara spesifik bahwa tugas KPPN sebagai pengelola perbendaharaan negara di daerah dan menjadi kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) atau kuasanya Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berdasarkan Undang-undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Visi ini disusun untuk memberi arah yang jelas dan fokus kepada KPPN Gorontalo sebagai upaya meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan organisasi. Visi ini disusun dengan bahasa yang mudah dipahami oleh seluruh unsur dalam organisasi sehingga mampu menggerakkan seluruh elemen dari organisasi secara sinergi ke satu arah yang sama.

Visi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Gorontalo yaitu:

**“Menjadi Pengelola Perbendaharaan Negara di Daerah yang Profesional, Modern, Transparan dan Akuntabel”**

**Pengelola perbendaharaan negara di daerah** artinya KPPN Gorontalo mempunyai tugas melaksanakan amanat UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sesuai peran dan fungsinya selaku Kuasa Bendahara Umum Negara di daerah.

**Profesional** memiliki makna bahwa dalam bekerja, Pimpinan dan seluruh Pegawai di lingkungan KPPN Gorontalo melakukannya dengan tuntas dan akurat berdasarkan kompetensi terbaik dan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.

**Modern** artinya dukungan kemajuan Teknologi Informasi digunakan untuk mendukung jalannya proses bisnis untuk memberikan layanan terbaik kepada para pemangku kepentingan.

**Transparan dan Akuntabel** artinya selalu memberikan informasi yang lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan yang dilandasi dengan komitmen dan integritas yang tinggi.



Untuk mewujudkan visinya, KPPN Gorontalo akan mempunyai misi yang sejalan dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang meliputi:

1. Mewujudkan Layanan Perbendaharaan yang Profesional, Modern, dan Transparan

Layanan perbendaharaan yang professional ditujukan untuk memberikan kualitas layanan terbaik dengan dukungan sumberdaya dan sarana/prasarana terbaik. Transparansi dan akuntabilitas merupakan wujud pertanggung jawaban dan jaminan dari profesionalitas layanan perbendaharaan yang telah disampaikan. Ukuran profesional, transparan, dan akuntabel tentu harus ditetapkan dengan standar yang jelas dengan kinerja yang terukur.

2. Mewujudkan Pengelolaan Kas yang *Prudent*, Efisien, dan Optimal

Sebagai pengelola kas negara (*fund manager*), maka penguatan kinerja dilaksanakan untuk mewujudkan pengelolaan kas yang optimal melalui perencanaan kas yang efektif untuk menghindari *cash mismatch*; dan penata usahaan penerimaan negara yang efektif dan akuntabel.

3. Mewujudkan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara yang Akuntabel, Transparan, dan Tepat Waktu

Akuntansi dan pelaporan keuangan diwujudkan sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan keuangan negara sejak proses penganggaran, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban, untuk mewujudkan akuntabilitas, transparansi dalam pengelolaan keuangan, serta mendukung pengambilan kebijakan strategis organisasi. Pengelolaan keuangan dan kekayaan, utang dan aset pemerintah yang baik tercermin di dalam laporan keuangan pemerintah yang akuntabel, transparan, tepat waktu, dan akurat menggunakan standar akuntansi berbasis akrual, sehingga memiliki peran yang sangat signifikan dalam menjaga stabilitas fiskal dan kredibilitas pemerintah di mata masyarakat serta internasional.

4. Mengembangkan Kapasitas Pendukung Sistem Perbendaharaan yang Andal, Profesional, dan Modern

Mengimplementasikan peraturan-peraturan di bidang perbendaharaan serta memberikan dukungan teknis di bidang teknologi informasi perbendaharaan dan basis data sesuai *best practice* yang andal, terotomasi, terintegrasi, mudah diterapkan (*applicable*), dan memenuhi aspek keamanan melalui implementasi SPAN, serta penyelenggaraan jabatan fungsional yang mendukung terselenggaranya fungsi-fungsi perbendaharaan secara efektif, efisien, akuntabel, dan transparan.



Untuk mewujudkan visi dan misi, KPPN Gorontalo menetapkan Proyeksi Target Kinerja mengikuti target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Direktorat Jenderal Perbendaharaan tahun 2020-2024, yaitu:

**Tabel 2.1**  
**Target Kinerja KPPN Gorontalo**

| No. | Sasaran Strategis                                                | Indikator Kinerja                                                               | Target            |                                                 |
|-----|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|
|     |                                                                  |                                                                                 | 2023              | UIC                                             |
| 1.  | Perbendaharaan Negara yang optimal dan akuntabel                 | Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L                                          | 90                | Seksi MSKI                                      |
|     |                                                                  | Indeks kualitas LK Kuasa BUN KKPN                                               | 3<br>(Skala 4)    | Seksi Vera                                      |
| 2.  | Dukungan manajemen yang efektif                                  | Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN                                    | 4,66<br>(Skala 5) | Seksi PD, Seksi Bank, Seksi MSKI dan Seksi Vera |
| 3.  | Komunikasi, edukasi dan standardisasi yang berkesinambungan      | Persentase tingkat implementasi standardisasi kompetensi pejabat perbendaharaan | 93%               | Seksi MSKI                                      |
|     |                                                                  | Tingkat efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan                | 89                | Seksi MSKI dan PTPN                             |
| 4.  | Pengelolaan pengeluaran negara yang prudent, efektif dan efisien | Persentase akurasi perencanaan kas                                              | 80%               | Seksi PD, Seksi Bank dan Seksi MSKI             |
|     |                                                                  | Tingkat kualitas penyelesaian SP2D                                              | 3<br>(skala 5)    | Seksi PD dan Seksi Bank                         |
| 5.  | Pelaksanaan anggaran yang optimal                                | Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah                                | 90                | Seksi Bank dan Seksi Vera                       |
|     |                                                                  | Indeks kualitas implementasi <i>Digipay</i>                                     | 3,1<br>(skala 4)  | Seksi MSKI                                      |
| 6.  | Pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan dan akuntabel | Indeks kualitas pelaksanaan rekonsiliasi tingkat UAKPA                          | 3,25<br>(skala 4) | Seksi Vera                                      |
|     |                                                                  | Indeks kualitas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara K/L                        | 3<br>(skala 4)    | Seksi Vera                                      |

|    |                                                                                  |                                                                                    |       |                |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|
| 7. | Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif | Tingkat implementasi penajaman tugas <i>Treasury</i> dan <i>Financial Advisory</i> | 80%   | Seluruh Unit   |
| 8. | Organisasi dan SDM yang unggul dan adaptif                                       | Tingkat kualitas pengelolaan kinerja berbasis <i>Strategy Focused Organization</i> | 85    | Subbagian Umum |
|    |                                                                                  | Tingkat implementasi <i>Learning Organization</i>                                  | 85    | Subbagian Umum |
|    |                                                                                  | Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal                          | 86    | Seksi MSKI     |
| 9. | Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang andal                                | Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN                                      | 95,5% | Subbagian Umum |
|    |                                                                                  | Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB                                          | 84    | Subbagian Umum |
|    |                                                                                  | Persentase kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan                                  | 100%  | Subbagian Umum |

## B. Penetapan/Perjanjian Kinerja

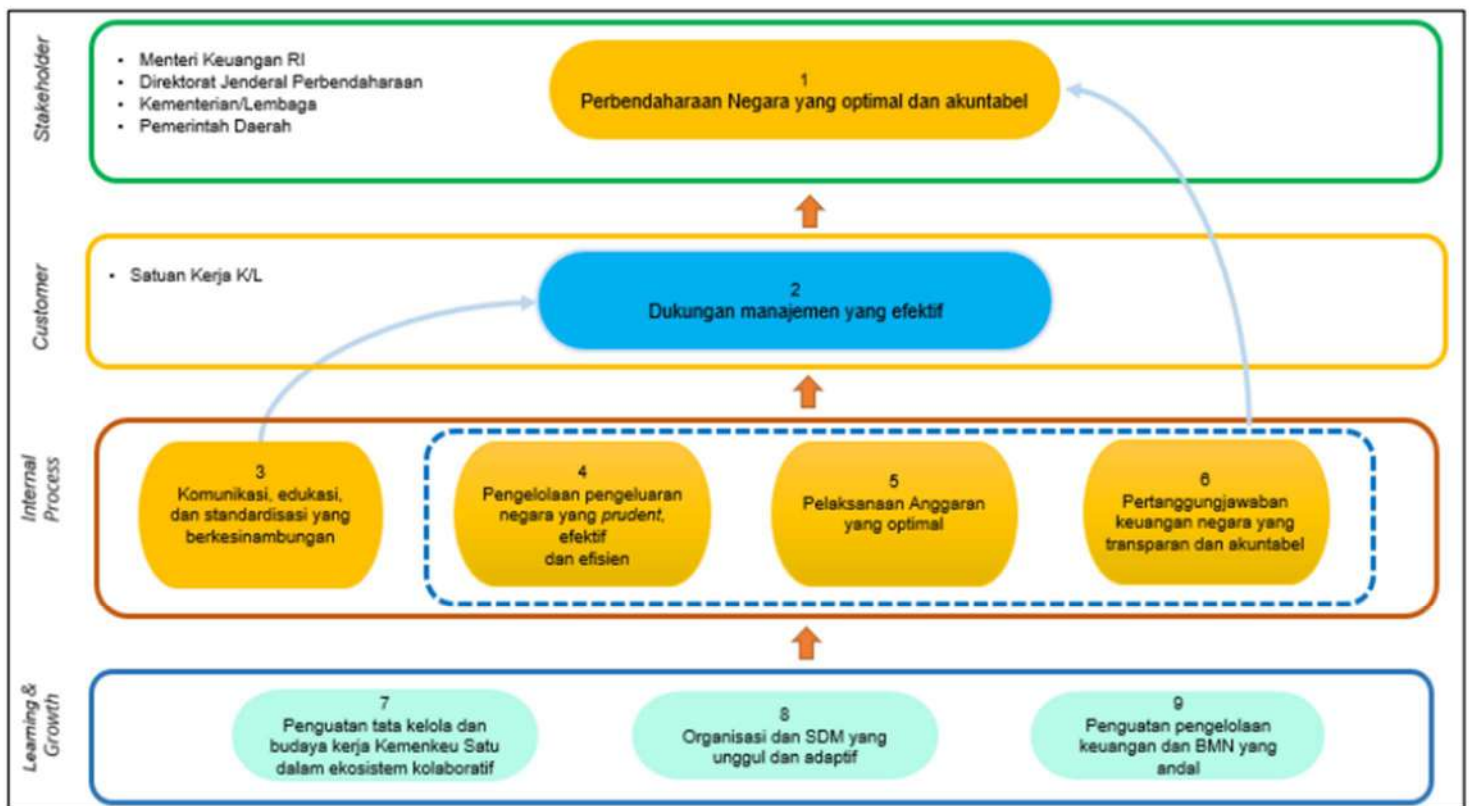
Penetapan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Penetapan kinerja KPPN Gorontalo telah dibuat awal tahun anggaran yang memuat kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai sasaran sesuai program yang ditetapkan dan indikator keberhasilan pencapaiannya. Rencana kinerja tersebut merupakan target yang harus dilaksanakan dan akan menjadi ukuran kerja unit masing-masing serta pertanggungjawaban dalam Laporan Kinerja (LAKIN) KPPN Gorontalo pada akhir tahun anggaran, sebagaimana tabel berikut.

Gambar 2.1

## Peta Strategi dan Sasaran Strategis KPPN Gorontalo Tahun 2023

## Peta Strategi



Tabel 2.2

Tabel Perjanjian Kinerja KPPN Gorontalo Tahun 2023

| No  | Sasaran Strategis                                           | Indikator Kinerja Utama                                                              | Target            |
|-----|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| (1) | (2)                                                         | (3)                                                                                  | (4)               |
| 1.  | Perbendaharaan Negara yang optimal dan akuntabel            | 1a-CP Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L                                         | 90                |
|     |                                                             | 1b-N Indeks kualitas LK Kuasa BUN KPPN                                               | 3<br>(Skala 4)    |
| 2.  | Dukungan manajemen yang efektif                             | 2a-N Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN                                    | 4,66<br>(Skala 5) |
| 3.  | Komunikasi, edukasi dan standardisasi yang berkesinambungan | 3a-N Persentase tingkat implementasi standardisasi kompetensi pejabat perbendaharaan | 93%               |

| No  | Sasaran Strategis                                                                | Indikator Kinerja Utama                                                                  | Target            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| (1) | (2)                                                                              | (3)                                                                                      | (4)               |
|     |                                                                                  | 3b-N Tingkat efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan                    | 89                |
| 4.  | Pengelolaan pengeluaran negara yang prudent, efektif dan efisien                 | 4a-CP Persentase akurasi perencanaan kas                                                 | 80%               |
|     |                                                                                  | 4b-N Tingkat kualitas penyelesaian SP2D                                                  | 3<br>(skala 5)    |
| 5.  | Pelaksanaan anggaran yang optimal                                                | 5a-CP Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah                                   | 90                |
|     |                                                                                  | 5b-N Indeks kualitas implementasi <i>Digipay</i>                                         | 3,1<br>(skala 4)  |
| 6.  | Pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan dan akuntabel                 | 6a-CP Indeks kualitas pelaksanaan rekonsiliasi tingkat UAKPA                             | 3,25<br>(skala 4) |
|     |                                                                                  | 6b-N Indeks kualitas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara K/L                            | 3<br>(skala 4)    |
| 7.  | Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif | 7a-CP Tingkat implementasi penajaman tugas <i>Treasury</i> dan <i>Financial Advisory</i> | 80%               |
| 8.  | Organisasi dan SDM yang unggul dan adaptif                                       | 8a-N Tingkat kualitas pengelolaan kinerja berbasis <i>Strategy Focused Organization</i>  | 85                |
|     |                                                                                  | 8b-N Tingkat implementasi <i>Learning Organization</i>                                   | 85                |
|     |                                                                                  | 8c-N Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal                           | 86                |
| 9.  |                                                                                  | 9a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN                                      | 95,5%             |

| No  | Sasaran Strategis                                 | Indikator Kinerja Utama                                | Target |
|-----|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|
| (1) | (2)                                               | (3)                                                    | (4)    |
|     | Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang andal | 9b-N Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB         | 84     |
|     |                                                   | 9c-N Persentase kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan | 100%   |

**Program/Kegiatan****Anggaran**

Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko

- |                                                            |    |             |
|------------------------------------------------------------|----|-------------|
| 1. Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko       | Rp | 4.894.000   |
| 2. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi                  | Rp | 169.586.000 |
| 3. Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko       | Rp | 12.788.000  |
| 4. Pengelolaan Kas dan Pembiayaan Negara                   | Rp | 6.770.000   |
| 5. Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara | Rp | 2.000.000   |

**Program Dukungan Manajemen**

- |                                                       |    |               |
|-------------------------------------------------------|----|---------------|
| 6. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum                | Rp | 1.643.317.000 |
| 7. Pengelolaan komunikasi dan informasi <i>public</i> | Rp | 10.500.000    |
| 8. Pengelolaan Organisasi dan SDM                     | Rp | 300.498.000   |

Pada tahun 2023, terdapat Indikator Kinerja Utama Baru antara lain:

1. Indeks kualitas LK Kuasa BUN KKPN.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.05/2016 tanggal 30 Desember 2016, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, KPPN selaku UAKBUN-Daerah melakukan penyusunan Laporan Keuangan tingkat UAKBUN-Daerah berupa Laporan Arus Kas, Neraca KUN, Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca SAU.

KPPN menyusun laporan keuangan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Penyusunan Dan Penyampaian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara.



Selanjutnya, KPPN menyusun laporan Keuangan dengan sistematika dan lampiran sesuai Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-6193/PB/2017 tanggal 17 Juli 2017 hal Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Kuasa BUN-Daerah dan Koordinator Kuasa BUN-Kanwil.

LK Kuasa BUN tingkat Daerah tersebut secara periodik disampaikan kepada Kanwil DJPb, Dit. PKN (selaku UAPBUN-AP) dan Dit. APK Ditjen Perbendaharaan.

Untuk mewujudkan kualitas penyusunan LK pada KPPN, Kanwil DJPb memberikan penilaian terhadap Kualitas LK dimaksud berdasarkan Nota Dinas Direktur APK Nomor ND-11/PB.6/2021 tanggal 6 Januari 2021 hal Kriteria Penilaian Laporan Keuangan Tingkat UAKBUN-D KPPN dan Laporan Keuangan Tingkat UAKKBUN Kanwil Ditjen Perbendaharaan berdasarkan empat kriteria, yaitu: (1) akurasi data (70%); (2) ketepatan waktu (2%); kelengkapan (3%); dan (4) Tingkat Partisipasi (25%). Penilaian LK unaudited berkontribusi sebesar 70% dan audited sebesar 30%. Hasil penilaian tersebut dituangkan dalam Keputusan Kepala Kanwil DJPb.

2. Persentase tingkat implementasi standardisasi kompetensi pejabat perbendaharaan.

Penilaian kompetensi bagi PPK/PPSPM adalah rangkaian proses penilaian secara objektif untuk menilai pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui ujian atau pengakuan atas kepemilikan sertifikat pelatihan/keahlian sesuai PMK Nomor 211/PMK.05/2019 tentang Tata Cara Penilaian Kompetensi bagi PPK dan PPSPM pada Satuan Kerja Pengelola APBN

Sertifikasi Bendahara adalah proses penilaian karakter, kompetensi, dan kemampuan atas keahlian dan keterampilan untuk menjadi Bendahara yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui Ujian Sertifikasi.

Tingkat implementasi diukur berdasarkan tahapan pelaksanaan penilaian kompetensi PPK/PPSPM dan sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja wilayah pembayaran masing-masing KPPN, yang meliputi:

- Akselerasi verifikasi usulan peserta penilaian kompetensi PPK/PPSPM dan Sertifikasi Bendahara.
- Akselerasi penyelenggaraan refreshment oleh Unit Pelaksana Penilaian Kompetensi PPK/PPSPM.
- Pemenuhan Sertifikat BNT bagi Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu..

3. Persentase akurasi perencanaan kas.

Perencanaan Kas (Renkas) KPPN yang diperoleh dari RPD harian tingkat Satker serta pemutakhirannya yang disampaikan kepada Kepala KPPN oleh KPA secara otomatis



melalui aplikasi SAKTI menggunakan fitur Scheduled Payment Date. Perencanaan Kas KPPN dinyatakan akurat apabila deviasi tagihan atas RPD Harian satker berada dalam batas kewajaran sebagaimana ditentukan dalam target IKU. Deviasi yang diperhitungkan adalah deviasi unit tagihan dan deviasi nilai tagihan yang masing-masing mempunyai bobot yang ditentukan. Pemberian dispensasi RPD, baik nilai maupun waktu, tetap diperhitungkan dalam formulasi akurasi RPD Harian dengan menggunakan rasio pemberian dispensasi terhadap total RPD Harian pada suatu periode.

Persentase RPD Harian dengan Scheduled Payment Date yang akurat adalah selisih antara akurasi maksimal (100%) dengan rata - rata tingkat deviasi seluruh tagihan pada periode tertentu dengan memperhitungkan tingkat dispensasi sebagai faktor pengurang

4. Tingkat kualitas penyelesaian SP2D.

SPM Satker yang diproses menjadi SP2D merupakan mekanisme pengujian oleh KPPN yang bersifat formal dan substantif terhadap Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan oleh Satuan Kerja untuk diterbitkan menjadi SP2D. Penyelesaian SP2D dinyatakan tepat waktu bila memenuhi janji layanan sebagaimana surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-7283/PB.1/2018. SPM satker yang diproses menjadi SP2D secara tepat waktu diukur berdasarkan jumlah penyelesaian SPM Satker yang diproses oleh Seksi Pencairan Dana untuk selanjutnya diterbitkan SP2D atau approval oleh Seksi Bank SPM yang diproses menjadi SP2D diselesaikan dalam waktu 1 (satu) jam, dengan prasyarat kondisi yang telah ditentukan.

Efektivitas penyaluran dana SP2D yang akurat adalah penyaluran dana SP2D kepada para penerima yang tidak di-retur oleh Bank Operasional dan dihitung berdasarkan jumlah penerima pada SP2D yang tidak diretur oleh Bank/Pos Operasional dibandingkan dengan jumlah penerima SP2D yang diterbitkan oleh KPPN (termasuk data penerima pada SP2D Perbaikan retur).

Efektifitas kecepatan penyelesaian retur SP2D diukur berdasarkan penyaluran dana yang akurat dan kecepatan penyelesaian retur SP2D yang diterbitkan KPPN.

5. Indeks kualitas pelaksanaan rekonsiliasi tingkat UAKPA.

Kepatuhan satker dalam melakukan rekonsiliasi dan menjaga kualitas data laporan keuangan, diukur melalui aplikasi MonSAKTI, meliputi kelengkapan data dan penyelesaian transaksi serta rekonsiliasi eksternal UAKPA.

Kelengkapan Data dan Penyelesaian Transaksi pada Aplikasi MonSAKTI terdapat fitur todolist yang menampilkan data dan transaksi terkait pelaporan keuangan yang harus diselesaikan satker setiap periode rekonsiliasi, terdiri dari: 1. Persediaan/Aset belum diditilkan 2. RK Persediaan/Aset belum RM 3. Persediaan/Aset belum validasi approve

Capaian kelengkapan data dan penyelesaian transaksi diperoleh dari jumlah satker yang terbebas dari validasi todolist sebagaimana dimaksud.

Rekonsiliasi Eksternal : 1. Ketepatan waktu rekonsiliasi Perbandingan jumlah Satker yang melakukan rekonsiliasi laporan keuangan secara tepat waktu dengan jumlah satker yang wajib melakukan rekonsiliasi laporan keuangan (dihitung berdasar jumlah satker yang mendapatkan SHR tidak kena sanksi pada periode rekonsiliasi berkenaan) 2. Keandalan rekonsiliasi: Perbandingan jumlah satker yang melakukan rekonsiliasi laporan keuangan secara andal, dengan jumlah satker yang wajib melakukan rekonsiliasi laporan keuangan Keandalan data dihitung berdasarkan jumlah satker yang tidak memiliki TDK (Transaksi Dalam Konfirmasi) belanja bruto dan TDK Kas di Bendahara Pengeluaran (ambang batas suspen 0%) sesuai dengan SHR (Surat Hasil Rekonsiliasi) yang diterbitkan.

6. Indeks kualitas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara K/L.

Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara oleh Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN yang menggunakan aplikasi pengelolaan rekening yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan c.q. DJPb.

Berdasar Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-3303/PB/2018, pengelolaan rekening tersebut menggunakan aplikasi SPRINT (Sistem Pengelolaan Rekening Terintegrasi) sejak 2018. Sebagaimana ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN, penyampaian LPJ bendahara beserta lampirannya kepada KPPN dilaksanakan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setelah bulan yang bersangkutan berakhir. LPJ Bendahara dinyatakan andal jika LPJ tersebut telah diverifikasi dan dinyatakan benar oleh Kuasa BUN KPPN sesuai indikator verifikasi LPJ yang telah ditetapkan.

7. Tingkat implementasi penajaman tugas *Treasury* dan *Financial Advisory*.

Instansi vertikal DJPb telah mengalami pengembangan tugas dan fungsi, terutama sebagai Treasurer, Regional Chief Economist dan Financial Advisor, sehingga dapat terlibat lebih dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di daerah. Untuk itu, telah diimplementasikan Shadow Organization sebagai bentuk penajaman tugas dan fungsi di Unit Kerja Kantor Vertikal DJPb.

IKU ini merupakan wujud sinergi dan kolaborasi dalam percepatan penajaman tugas agar organisasi DJPb makin baik dalam menghadapi serta mengantisipasi perkembangan perekonomian regional, nasional, dan global. IKU ini bersifat direct cascading dari Dirjen

Perbendaharaan ke Sekretaris DJPb dan indirect cascading dari Dirjen Perbendaharaan ke seluruh Kepala Kanwil DJPb dan seluruh Kepala KPPN. IKU ini juga bersifat direct cascading dari Kepala KPPN ke seluruh Pejabat Pengawas di lingkup KPPN. Direct cascading tersebut sebagai wujud Kemenkeu Satu - DJPb Satu - KPPN Satu dengan tujuan agar terjadi percepatan penajaman tugas DJPb. Direct cascading tersebut merupakan tanggung renteng/kolektif tanpa pengurangan nilai sebagaimana diatur pada KMK-300/2022 tentang Manajemen Kinerja di lingkungan Kemenkeu.

#### 8. Tingkat implementasi *Learning Organization*

Tingkat Implementasi learning organization merupakan nilai yang merepresentasikan tingkat implementasi unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai learning organization. Learning organization (organisasi pembelajar) adalah organisasi yang secara terus menerus dan terencana memfasilitasi anggotanya agar mampu terus menerus berkembang dan mentransformasi diri baik secara kolektif maupun individual dalam usaha mencapai hasil yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan yang dirasakan bersama antara organisasi dan individu di dalamnya (KEP-140/PP/2017).

Dokumen bukti diunggah pada Aplikasi Training Modul Learning Organization. Selanjutnya, dokumen tersebut akan diverifikasi oleh Tim Implementasi LO Pusat pada Bagian SDM Sekretariat DJPb.

#### 9. Persentase kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan

Kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan di tahun 2023 berfokus pada proses pengajuan sertifikasi, pemanfaatan aplikasi BMN dan pemanfaatan aplikasi pengadaan.

Dalam rangka pengamanan BMN berupa tanah di Kementerian Keuangan, maka seluruh BMN berupa tanah yang dikuasai Kementerian Keuangan harus disertifikatkan atas nama pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Keuangan. Komponen ini bertujuan untuk memastikan BMN berupa tanah di Kementerian Keuangan yang belum bersertifikat telah diajukan ke Kantor Pertanahan untuk disertifikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Keuangan. Pemanfaatan Aplikasi BMN: Mengukur penggunaan aplikasi BMN (e-sewa BMN) oleh Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Keuangan. Pemanfaatan Sistem Pengadaan: Persentase dukungan ITKP yang dijadikan IKU Mandatory di tahun 2023 berfokus pada pemanfaatan sistem aplikasi pengadaan.

**Tabel 2.3**  
**Inisiatif Strategis KPPN Gorontalo Tahun 2023**

| No. | SS/IKU                                                                                                                                                                             | Inisiatif Strategis                                                                                    | Output/<br>Outcome                                                                                                              | Trajectory                                                  |                 | Periode Pelaksanaan | Penang-<br>gung<br>Jawab                                                        |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                        |                                                                                                                                 | Kegiatan                                                    | Output          |                     |                                                                                 |
| 1.  | SS: Pelaksanaan Anggaran Yang Optimal<br><br>IKU: Indeks Kualitas Implementasi Digipay                                                                                             | Pemenuhan Indikator Tingkat Implementasi Digipay                                                       | Pemenuhan indikator-indikator pengukuran tingkat implementasi <i>Learning Organization</i> dengan metode <i>self assessment</i> | Q1: Penandatanganan MoU dengan Satker mitra kerja/perbankan | Q1: 10%         | 31 Maret 2023       | Kepala Kantor, kepala Seksi MSKI                                                |
|     |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                        |                                                                                                                                 | Q2: Penandatanganan MoU dengan Satker mitra kerja/perbankan | Q2: 15%         | 30 Juni 2023        |                                                                                 |
|     |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                        |                                                                                                                                 | Q3: Penandatanganan MoU dengan Satker mitra kerja/perbankan | Q3: 20%         | 30 September 2023   |                                                                                 |
|     |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                        |                                                                                                                                 | Q4: Penandatanganan MoU dengan Satker mitra kerja/perbankan | Q4: 25%         | 31 Desember 2023    |                                                                                 |
| 2.  | SS: Penguatan Tata Kelola Dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu Dalam Ekosistem Kolaborati<br><br>IKU: Tingkat implementasi penajaman tugas <i>Treasury</i> dan <i>Financial Advisory</i> | Pemenuhan Indikator Tingkat Implementasi Penajaman Tugas <i>Treasury</i> dan <i>Financial Advisory</i> | Peningkatan Kompetensi SDM Penunjang Fungsi <i>Treasury</i> dan <i>Financial Advisory</i>                                       | Semester 1: FGD dengan instansi pembina                     | Q1: Laporan FGD | 30 Juni 2023        | Kepala Kantor, Kepala Subbagian Umum, <i>Head of Financial Advisor Division</i> |
|     |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                        |                                                                                                                                 | Semester 2: FGD dengan pemerintah daerah                    | Q2: Laporan FGD | 31 Desember 2023    |                                                                                 |

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

##### 1. Nilai Kinerja Organisasi KPPN Gorontalo Tahun 2023

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) adalah nilai keseluruhan capaian IKU suatu organisasi dengan memperhitungkan bobot IKU dan bobot perspektif. Nilai Kinerja Organisasi menunjukkan konsolidasi dari seluruh nilai perspektif atau seluruh realisasi IKU dalam satu Peta Strategi. NKO digunakan untuk menilai kinerja unit atau pegawai yang memiliki peta strategi. Perhitungan NKO mengacu pada Kontrak Kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun dan memperhatikan adanya addendum KK.

Formula menghitung NKO:

$$NKO = \sum (Np \times \text{Bobot Perspektif})$$

Bobot perspektif di lingkungan Kementerian Keuangan ditentukan sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Bobot Perspektif**

| Perspektif          | Bobot |
|---------------------|-------|
| Stakeholder         | 30%   |
| Customer            | 20%   |
| Internal Process    | 25%   |
| Learning and Growth | 25%   |

Nilai Kinerja Organisasi KPPN Gorontalo Tahun 2023 adalah 111,83% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Rekapitulasi Nilai Perspektif KPPN Gorontalo**

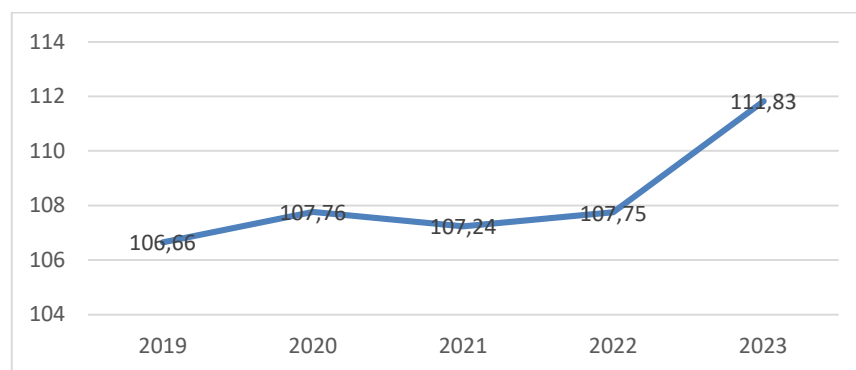
| Perspektif               | Nilai  | Bobot | Hasil   |
|--------------------------|--------|-------|---------|
| Stakeholder              | 112.78 | 30%   | 33.83   |
| Customer                 | 103.76 | 20%   | 20.75   |
| Internal Process         | 115.15 | 25%   | 28.79   |
| Learning and Growth      | 113.82 | 25%   | 28.46   |
| Nilai Kinerja Organisasi |        |       | 111.83% |



### Perbandingan Nilai Kinerja Organisasi

Nilai Kinerja Organisasi KPPN Gorontalo mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Pada Tahun 2019 Nilai Kinerja Organisasi sebesar 106,66%, pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 1.1% menjadi 107.76%, mengalami penurunan pada tahun ini 2021 sebesar 0.52% menjadi 107.24%, kemudian mulai mengalami kenaikan kembali pada 2022 sebesar 0.51% menjadi 107,75%, dan pada tahun 2023 semakin meningkat dengan kenaikan sebesar 4,08% menjadi 111,83%.

**Grafik 3.1**  
**Nilai Kinerja Organisasi KPPN Gorontalo Tahun 2019-2023**



## 2. Nilai Kinerja Setiap Perspektif

Peta Strategi terdiri dari sejumlah Sasaran Strategis (SS) yang dikelompokkan dalam berbagai perspektif. Perspektif adalah cara pandang yang digunakan dalam *Balance Score Card* (BSC) untuk mengelola kinerja organisasi. Ada 4 perspektif dalam BSC Kemenkeu yaitu:

### a. Perspektif *Stakeholder*

Perspektif ini mencakup SS yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan sehingga dinilai berhasil dari sudut pandang stakeholder. Stakeholder (pemangku kepentingan) adalah pihak internal maupun eksternal yang secara langsung atau tidak langsung memiliki kepentingan atas output atau outcome dari suatu organisasi, namun tidak menggunakan layanan organisasi secara langsung.

**Tabel 3.3**  
**Stakeholder Perspective**

| No       | Kode IKU                                                | IKU                                    | Target | Realisasi | Pol | V/C | Bobot IKU | Bobot Tertimbang | Indeks Capaian IKU/NSS/Np |
|----------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|-----------|-----|-----|-----------|------------------|---------------------------|
| <b>I</b> | <b>Stakeholder Perspektif (30%)</b>                     |                                        |        |           |     |     |           |                  | <b>112.78</b>             |
| <b>1</b> | <b>Perbendaharaan Negara yang optimal dan akuntabel</b> |                                        |        |           |     |     |           |                  | 112.78                    |
| 1        | 1a-N                                                    | Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L | 90.00  | 95.00     | Max | PM  | 14%       | 50%              | 105.56                    |
| 2        | 1b-N                                                    | Nilai kualitas LK Kuasa BUN KPPN       | 3.00   | 4.00      | Max | PM  | 14%       | 50%              | 120.00                    |

b. Perspektif Customer

Perspektif ini mencakup SS yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan customer dan/atau harapan organisasi terhadap customer. Customer (pengguna layanan) merupakan pihak luar yang terkait langsung dengan pelayanan suatu organisasi.

**Tabel 3.4**  
**Customer Perspective**

| No        | Kode IKU                               | IKU                                          | Target | Realisasi | Pol | V/C | Bobot IKU | Bobot Tertimbang | Indeks Capaian IKU/NSS/Np |
|-----------|----------------------------------------|----------------------------------------------|--------|-----------|-----|-----|-----------|------------------|---------------------------|
| <b>II</b> | <b>Customer Perspektif (20%)</b>       |                                              |        |           |     |     |           |                  | <b>103.76</b>             |
| <b>2</b>  | <b>Dukungan manajemen yang efektif</b> |                                              |        |           |     |     |           |                  | 103.76                    |
| 3         | 2a-N                                   | Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN | 4.66   | 4.84      | Max | PM  | 14%       | 100%             | 103.76                    |

c. Perspektif Internal Process

Perspektif ini mencakup SS yang ingin diwujudkan melalui rangkaian proses yang dikelola organisasi dalam memberikan layanan serta menciptakan nilai bagi *stakeholder* dan *customer* (*value chain*).

**Tabel 3.5**  
**Internal Process Perspective**

| No                                                                        | Kode IKU | IKU                                                                             | Target | Realisasi | Pol | V/C | Bobot IKU | Bobot Tertimbang | Indeks Capaian IKU/NSS/Np |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----|-----|-----------|------------------|---------------------------|
| <b>III Internal Process (25%)</b>                                         |          |                                                                                 |        |           |     |     |           |                  | <b>115.15%</b>            |
| <b>3 Komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang berkesinambungan</b>     |          |                                                                                 |        |           |     |     |           |                  | 105.32%                   |
| 4                                                                         | 3a-N     | Persentase tingkat implementasi standardisasi kompetensi pejabat perbendaharaan | 93.00  | 95.00     | Max | PM  | 14%       | 50%              | 102.15                    |
| 5                                                                         | 3b-N     | Tingkat efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan                | 89.00  | 95.55     | Max | PM  | 14%       | 50%              | 108.48                    |
| <b>4 Pengelolaan pengeluaran negara yang prudent, efektif dan efisien</b> |          |                                                                                 |        |           |     |     |           |                  | 120.00                    |
| 6                                                                         | 4a-CP    | Persentase akurasi perencanaan kas                                              | 80.00  | 97.97     | Max | PM  | 14%       | 50%              | 120.00                    |
| 7                                                                         | 4b-N     | Tingkat kualitas penyelesaian SP2D                                              | 3.00   | 5.00      | Max | PM  | 14%       | 50%              | 120.00                    |
| <b>5 Pelaksanaan anggaran yang optimal</b>                                |          |                                                                                 |        |           |     |     |           |                  | 115.28                    |
| 8                                                                         | 5a-CP    | Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Des                   | 90.00  | 99.51     | Max | PM  | 14%       | 50,00%           | 110.56                    |
| 9                                                                         | 5b-N     | Indeks kualitas Implementasi Digipay                                            | 3.15   | 4.00      | Max | PM  | 14%       | 50,00%           | 120.00                    |
| <b>6 Pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan dan akuntabel</b> |          |                                                                                 |        |           |     |     |           |                  | 120.00                    |
| 10                                                                        | 6a-CP    | Indeks Kualitas Pelaksanaan Rekonsiliasi tingkat UAKPA                          | 3.25   | 4.00      | Max | PM  | 14%       | 50%              | 120.00                    |
| 11                                                                        | 6b-N     | Indeks kualitas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara K/L                        | 3.00   | 4.00      | Max | PM  | 14%       | 50%              | 120.00                    |

d. Perspektif *Learning and Growth*

Perspektif ini mencakup SS yang berupa kondisi ideal atas sumber daya internal organisasi yang ingin diwujudkan atau yang seharusnya dimiliki oleh organisasi untuk menjalankan proses bisnis guna menghasilkan output atau outcome organisasi yang sesuai dengan harapan customer dan stakeholder.

Tabel 3.6

***Learning and Growth Perspective***

| No                                                                                        | Kode IKU | IKU                                                                                | Target | Realisasi | Pol | V/C | Bobot IKU | Bobot Tertimbang | Indeks Capaian IKU/NSS/Np |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----|-----|-----------|------------------|---------------------------|
| <b>IV Learning and Growth Perspektif (25%)</b>                                            |          |                                                                                    |        |           |     |     |           |                  | <b>113.82</b>             |
| <b>7 Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif</b> |          |                                                                                    |        |           |     |     |           |                  | 120.00                    |
| 12                                                                                        | 7a-CP    | Tingkat implementasi penajaman tugas <i>Treasury</i> dan <i>Financial Advisory</i> | 80.00  | 99.72     | Max | PM  | 14%       | 100%             | 120.00                    |
| <b>8 Organisasi dan SDM yang unggul dan adaptif</b>                                       |          |                                                                                    |        |           |     |     |           |                  | 109.59                    |
| 13                                                                                        | 8a-N     | Tingkat kualitas pengelolaan kinerja berbasis <i>Strategy Focused Organization</i> | 85.00  | 89.26     | Max | PM  | 14%       | 33,33%           | 105.01                    |
| 14                                                                                        | 8b-N     | Tingkat Implementasi <i>Learning Organization</i>                                  | 85.00  | 100.00    | Max | PM  | 14%       | 33,33%           | 117.65                    |
| 15                                                                                        | 8c-N     | Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal                          | 86.00  | 91.28     | Max | PM  | 14%       | 33,33%           | 106.14                    |
| <b>9 Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang andal</b>                                |          |                                                                                    |        |           |     |     |           |                  | 111.87                    |
| 16                                                                                        | 9a-CP    | Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN                                      | 95.50  | 99.98     | Max | PM  | 14%       | 33,33%           | 104.69                    |
| 17                                                                                        | 9b-N     | Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB                                          | 84.00  | 96.00     | Max | PM  | 14%       | 33,33%           | 114.29                    |

|    |      |                                                   |        |        |     |    |     |        |        |
|----|------|---------------------------------------------------|--------|--------|-----|----|-----|--------|--------|
| 18 | 9c-N | Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan | 100.00 | 120.00 | Max | PM | 14% | 33,33% | 120.00 |
|----|------|---------------------------------------------------|--------|--------|-----|----|-----|--------|--------|

### 3. Tabel Menyeluruh atas Nilai Kinerja Organisasi

Tabel 3.7

#### Nilai Kinerja Organisasi KPPN Gorontalo 2021

| No                                    | Kode IKU                                                                | IKU                                                                             | Target | Realisasi | Pol | V/C | Bobot IKU | Bobot Tertimbang | Indeks Capaian IKU/NSS/Np |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----|-----|-----------|------------------|---------------------------|
| <b>I Stakeholder Perspektif (30%)</b> |                                                                         |                                                                                 |        |           |     |     |           |                  | <b>112.78</b>             |
| 1                                     | <b>Perbendaharaan Negara yang optimal dan akuntabel</b>                 |                                                                                 |        |           |     |     |           |                  | 112.78                    |
| 1                                     | 1a-N                                                                    | Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L                                          | 90.00  | 95.00     | Max | PM  | 14%       | 50%              | 105.56                    |
| 2                                     | 1b-N                                                                    | Nilai kualitas LK Kuasa BUN KPPN                                                | 3.00   | 4.00      | Max | PM  | 14%       | 50%              | 120.00                    |
| <b>II Customer Perspektif (20%)</b>   |                                                                         |                                                                                 |        |           |     |     |           |                  | <b>103.76</b>             |
| 2                                     | <b>Dukungan manajemen yang efektif</b>                                  |                                                                                 |        |           |     |     |           |                  | 103.76                    |
| 3                                     | 2a-N                                                                    | Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN                                    | 4.66   | 4.84      | Max | PM  | 14%       | 100%             | 103.76                    |
| <b>III Internal Process (25%)</b>     |                                                                         |                                                                                 |        |           |     |     |           |                  | <b>115.15%</b>            |
| 3                                     | <b>Komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang berkesinambungan</b>     |                                                                                 |        |           |     |     |           |                  | 105.32%                   |
| 4                                     | 3a-N                                                                    | Persentase tingkat implementasi standardisasi kompetensi pejabat perbendaharaan | 93.00  | 95.00     | Max | PM  | 14%       | 50%              | 102.15                    |
| 5                                     | 3b-N                                                                    | Tingkat efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan                | 89.00  | 95.55     | Max | PM  | 14%       | 50%              | 108.48                    |
| 4                                     | <b>Pengelolaan pengeluaran negara yang prudent, efektif dan efisien</b> |                                                                                 |        |           |     |     |           |                  | 120.00                    |
| 6                                     | 4a-CP                                                                   | Persentase akurasi perencanaan kas                                              | 80.00  | 97.97     | Max | PM  | 14%       | 50%              | 120.00                    |



|                                                                                           |       |                                                                                    |       |        |     |    |     |        |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----|----|-----|--------|---------------|
| 7                                                                                         | 4b-N  | Tingkat kualitas penyelesaian SP2D                                                 | 3.00  | 5.00   | Max | PM | 14% | 50%    | 120.00        |
| <b>5 Pelaksanaan anggaran yang optimal</b>                                                |       |                                                                                    |       |        |     |    |     |        | <b>115.28</b> |
| 8                                                                                         | 5a-CP | Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Des                      | 90.00 | 99.51  | Max | PM | 14% | 50,00% | 110.56        |
| 9                                                                                         | 5b-N  | Indeks kualitas Implementasi <i>Digipay</i>                                        | 3.15  | 4.00   | Max | PM | 14% | 50,00% | 120.00        |
| <b>6 Pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan dan akuntabel</b>                 |       |                                                                                    |       |        |     |    |     |        | <b>120.00</b> |
| 10                                                                                        | 6a-CP | Indeks Kualitas Pelaksanaan Rekonsiliasi tingkat UAKPA                             | 3.25  | 4.00   | Max | PM | 14% | 50%    | 120.00        |
| 11                                                                                        | 6b-N  | Indeks kualitas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara K/L                           | 3.00  | 4.00   | Max | PM | 14% | 50%    | 120.00        |
| <b>IV Learning and Growth Perspektif (25%)</b>                                            |       |                                                                                    |       |        |     |    |     |        | <b>113.82</b> |
| <b>7 Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif</b> |       |                                                                                    |       |        |     |    |     |        | <b>120.00</b> |
| 12                                                                                        | 7a-CP | Tingkat implementasi penajaman tugas <i>Treasury</i> dan <i>Financial Advisory</i> | 80.00 | 99.72  | Max | PM | 14% | 100%   | 120.00        |
| <b>8 Organisasi dan SDM yang unggul dan adaptif</b>                                       |       |                                                                                    |       |        |     |    |     |        | <b>109.59</b> |
| 13                                                                                        | 8a-N  | Tingkat kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization        | 85.00 | 89.26  | Max | PM | 14% | 33,33% | 105.01        |
| 14                                                                                        | 8b-N  | Tingkat Implementasi <i>Learning Organization</i>                                  | 85.00 | 100.00 | Max | PM | 14% | 33,33% | 117.65        |
| 15                                                                                        | 8c-N  | Nilai hasil evaluasi                                                               | 86.00 | 91.28  | Max | PM | 14% | 33,33% | 106.14        |

|    |                                                   |                                                   |        |        |     |    |     |        |        |
|----|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|--------|-----|----|-----|--------|--------|
|    |                                                   | pelaksanaan tugas kepatuhan internal              |        |        |     |    |     |        |        |
| 9  | Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang andal |                                                   |        |        |     |    |     |        | 111.87 |
| 16 | 9a-CP                                             | Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN     | 95.50  | 99.98  | Max | PM | 14% | 33,33% | 104.69 |
| 17 | 9b-N                                              | Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB         | 84.00  | 96.00  | Max | PM | 14% | 33,33% | 114.29 |
| 18 | 9c-N                                              | Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan | 100.00 | 120.00 | Max | PM | 14% | 33,33% | 120.00 |

#### 4. Sasaran Strategis

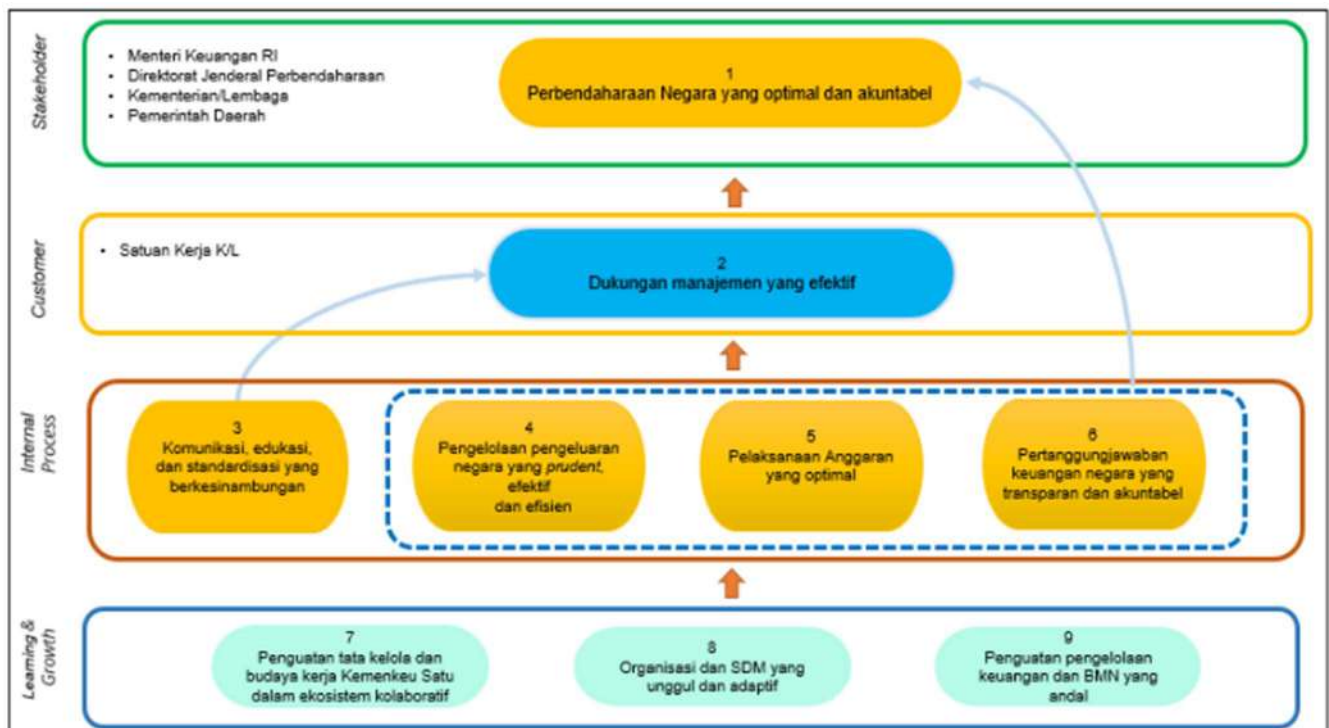
##### a. Definisi Sasaran Strategis

Sasaran Strategis adalah pernyataan mengenai apa yang harus dimiliki, dijalankan, dihasilkan atau dicapai organisasi.

Sasaran Strategis hanya disusun pada unit yang memiliki peta strategi. SS harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) Singkat dan jelas  
Pernyataan SS tidak berupa paragraf atau kalimat. Penjelasan terhadap uraian SS dapat dijelaskan dalam manual IKU. Pernyataan SS tidak memiliki pemahaman ganda dan selaras dengan deskripsi SS pada manual IKU.
- 2) Merefleksikan kondisi ideal dan realistis yang ingin dicapai  
Pernyataan SS menggambarkan kondisi seharusnya yang ingin dicapai sesuai potensi.
- 3) Dituliskan dalam bentuk pernyataan kondisional.  
Pernyataan SS bersifat kualitatif (bukan kuantitatif).

**Gambar 3.1**  
**Peta Strategi KPPN Gorontalo 2021**



## b. IKU dalam Capaian Sasaran Strategis Beserta Target dan Realisasi

### 1) Perbendaharaan Negara yang Optimal dan Akuntabel

Perbendaharaan Negara yang Optimal dan Akuntabel artinya DJPb melakukan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara secara optimal dan akuntabel. Keuangan negara dikelola secara optimal dalam mencapai output dan outcome sesuai dengan tujuan dan prioritas pembangunan pada APBN. DJPb juga mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah disampaikan secara tepat waktu dan disusun mengikuti standar akuntansi pemerintahan.

**Tabel 3.8**

**IKU SS Perbendaharaan Negara yang Optimal dan Akuntabel**

| Kode IKU | IKU                                    | Target | Realisasi |
|----------|----------------------------------------|--------|-----------|
| 1a-N     | Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L | 90.00  | 95.00     |
| 1b-N     | Nilai kualitas LK Kuasa BUN KPPN       | 3.00   | 4.00      |

### 2) Dukungan manajemen yang efektif

DJPb memberikan dukungan manajemen yang efektif dalam upaya mensukseskan dan mewujudkan program, output, atau outcome. Dukungan

manajemen dilakukan dalam bentuk kegiatan-kegiatan pendukung pelaksanaan fungsi DJPb dan Kementerian Keuangan yang dilaksanakan oleh unit terkait. Tugas dan fungsi Ditjen Perbendaharaan diantaranya meliputi pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas negara, dan penyusunan laporan keuangan pemerintah. Pengolahan dan analisis data dan informasi dapat menghasilkan rekomendasi berkualitas yang dapat menjadi pilihan dalam pengambilan kebijakan keuangan negara. Data dan informasi yang diolah dan dianalisis tidak hanya data pusat tetapi juga pada tingkat regional sebagai upaya mewujudkan pembangunan nasional melalui pembangunan di daerah.

Sebagaimana undang undang tentang Pelayanan Publik, setiap institusi penyelenggara negara dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

Pelayanan publik adalah serangkaian kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai peraturan atas barang/jasa/pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara negara.

Dalam rangka mendapatkan penyelenggara negara yang mampu melayani masyarakat dan mampu meletakkan pondasi yang diperlukan bangsa untuk memenangkan persaingan global, diperlukan birokrasi yang agile, efisien, dan efektif, yaitu yang fleksibel, lincah dan cepat dalam merespon perubahan, serta mampu menggunakan sumber daya yang tersedia dengan seminimal mungkin untuk mendapatkan target/output yang telah ditetapkan secara optimal.

**Tabel 3.9**  
**IKU SS Dukungan manajemen yang efektif**

| Kode IKU | IKU                                          | Target | Realisasi |
|----------|----------------------------------------------|--------|-----------|
| 2a-N     | Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN | 4.66   | 4.84      |

3) Komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang berkesinambungan

Komunikasi dan edukasi merupakan upaya untuk meningkatkan pemahaman stakeholders atas peraturan dan kebijakan di bidang perbendaharaan untuk memperkuat implementasi peraturan dan kebijakan dalam rangka mendorong tercapainya tujuan organisasi.

Standardisasi bertujuan untuk mewujudkan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola perbendaharaan melalui peningkatan kompetensi pengelola perbendaharaan berdasarkan kualifikasi kompetensi yang

dipersyaratkan dalam rangka mendukung terwujudnya pengelolaan APBN yang semakin berkualitas di seluruh Kementerian/Lembaga sehingga dapat menghasilkan output dan outcome yang maksimal sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Standardisasi pengelola perbendaharaan dimaksud dilaksanakan melalui program pengembangan kapasitas, uji kompetensi, sertifikasi kompetensi, dan pengembangan profesi jabatan fungsional di bidang perbendaharaan.

Dalam rangka memenuhi tuntutan perkembangan tata kelola keuangan yang bersifat dinamis, dibutuhkan strategi komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang tidak tambal sulam serta berorientasi pada usaha membuat satker mampu menguasai secara menyeluruh aspek filosofi sampai dengan aspek teknis pengelolaan perbendaharaan.

Tabel 3.10

**IKU SS Komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang berkesinambungan**

| Kode IKU | IKU                                                                             | Target | Realisasi |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| 3a-N     | Persentase tingkat implementasi standardisasi kompetensi pejabat perbendaharaan | 93.00  | 95.00     |
| 3b-N     | Tingkat efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan                | 89.00  | 95.55     |

## 4) Pengelolaan pengeluaran negara yang prudent, efektif dan efisien

Pengelolaan pengeluaran negara yang prudent, efektif dan efisien diwujudkan dengan menjaga pengeluaran negara yang dilakukan Kementerian Negara/Lembaga dengan penuh kehati-hatian, agar setiap Rupiah yang keluar dari kas negara dapat dipertanggungjawabkan serta memberi multiplier effect terhadap seluruh perekonomian Indonesia.

Tata cara pengelolaan pengeluaran negara secara efektif dan efisien dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan prioritas dan tujuan nasional.

Tabel 3.11

**IKU SS Pengelolaan pengeluaran negara yang prudent, efektif dan efisien**

| Kode IKU | IKU                                | Target | Realisasi |
|----------|------------------------------------|--------|-----------|
| 4a-CP    | Persentase akurasi perencanaan kas | 80.00  | 97.97     |
| 4b-N     | Tingkat kualitas penyelesaian SP2D | 3.00   | 5.00      |



## 5) Pelaksanaan Anggaran yang optimal

Pelaksanaan anggaran yang optimal diwujudkan dengan memastikan proses pengelolaan perbendaharaan dilakukan sesuai dengan ketentuan dan dapat mencapai output yang telah ditetapkan, dan perlu dilakukan langkah-langkah strategis secara komprehensif atas pelaksanaan anggaran kepada Internal DJPb maupun para Stakeholder.

Langkah-langkah strategis tersebut disusun dan dievaluasi secara periodik dan terukur, sehingga secara langsung dapat berdampak terhadap peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran internal DJPb maupun Kementerian/Lembaga.

Tabel 3.12

## IKU SS Pelaksanaan Anggaran yang optimal

| Kode IKU | IKU                                                           | Target | Realisasi |
|----------|---------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| 5a-CP    | Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Des | 90.00  | 99.51     |
| 5b-N     | Indeks kualitas Implementasi Digipay                          | 3.15   | 4.00      |

## 6) Pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan dan akuntabel

Akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara diwujudkan dengan penyusunan laporan keuangan oleh Pemerintah Pusat. Penyusunan laporan keuangan Pemerintah harus disusun secara profesional dan modern. Kualitas laporan keuangan Pemerintah dapat diidentifikasi dari ketepatan waktu penyelesaian LKPP, penyelesaian rekomendasi BPK, serta opini audit yang baik dari BPK..

Tabel 3.13

## IKU SS Pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan dan akuntabel

| Kode IKU | IKU                                                      | Target | Realisasi |
|----------|----------------------------------------------------------|--------|-----------|
| 6a-CP    | Indeks Kualitas Pelaksanaan Rekonsiliasi tingkat UAKPA   | 3.25   | 4.00      |
| 6b-N     | Indeks kualitas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara K/L | 3.00   | 4.00      |



- 7) Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif

Pemerintahan di masa depan akan dipengaruhi oleh tiga aspek, yaitu: work (proses bisnis), workforce (SDM), dan workplace (tempat bekerja). Dimana ketiga aspek tersebut akan sangat erat kaitannya dengan pemanfaatan teknologi sebagai enabler. Untuk itu, diperlukan penguatan ketiga sumber daya tersebut secara terintegrasi melalui penguatan Budaya Kerja Kemenkeu Satu.

**Tabel 3.14**

**IKU SS Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif**

| Kode IKU | IKU                                                                         | Target | Realisasi |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| 7a-CP    | Tingkat implementasi penajaman tugas <i>Treasury dan Financial Advisory</i> | 80.00  | 99.72     |

- 8) Organisasi dan SDM yang unggul dan adaptif

Organisasi yang unggul dan adaptif adalah organisasi yang mampu mewadahi dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuan. Dengan demikian organisasi beserta proses bisnis di dalamnya akan bersifat dinamis dan fleksibel sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan. SDM yang unggul dan optimal adalah SDM yang memiliki kepemimpinan yang tepat, mengetahui apa yang akan dilakukan untuk semua informasi yang diterima dan kompetensi yang dibutuhkan untuk keberhasilan organisasi serta melakukan pekerjaan dengan penuh semangat, efektif, efisien dan produktif, sesuai dengan proses kerja yang benar agar mencapai hasil kerja yang optimal.

**Tabel 3.15**

**IKU SS Organisasi dan SDM yang unggul dan adaptif**

| Kode IKU | IKU                                                                                | Target | Realisasi |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| 8a-N     | Tingkat kualitas pengelolaan kinerja berbasis <i>Strategy Focused Organization</i> | 85.00  | 89.26     |
| 8b-N     | Tingkat Implementasi <i>Learning Organization</i>                                  | 85.00  | 100.00    |

|      |                                                           |       |       |
|------|-----------------------------------------------------------|-------|-------|
| 8c-N | Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal | 86.00 | 91.28 |
|------|-----------------------------------------------------------|-------|-------|

9) Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang andal

Pengelolaan keuangan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring anggaran selama satu tahun anggaran yang selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada para stakeholder. Kualitas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, tercermin dari opini yang diberikan oleh BPK. Keandalan dalam proses pengelolaan dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara. Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA) harus dikelola secara efektif dan efisien, sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel) dalam rangka mencapai output yang diharapkan.

Pengelolaan BMN meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Keandalan pengelolaan BMN dilakukan dengan proses kerja dalam manajemen asset yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi fisik, lokasi, nilai, jumlah/volume, legal dan ekonomis yang dimiliki asset tersebut.

**Tabel 3.16**

**IKU SS Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang andal**

| Kode IKU | IKU                                               | Target | Realisasi |
|----------|---------------------------------------------------|--------|-----------|
| 9a-CP    | Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN     | 95.50  | 99.98     |
| 9b-N     | Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB         | 84.00  | 96.00     |
| 9c-N     | Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan | 100.00 | 120.00    |

**c. Penjelasan Capaian IKU**

**1. Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L**

Dalam rangka memonitor perkembangan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran Satker, diperlukan suatu alat penilaian kualitas/kinerja

yang sekaligus dapat berperan sebagai katalis perubahan perilaku dan pola pikir Satker dalam pelaksanaan anggaran.

Persentase Kinerja Pelaksanaan Anggaran mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran secara kuantitatif, yang dapat terwakili oleh aspek pelaksanaan anggaran meliputi:

1. Aspek Kualitas Perencanaan, dengan indikator sebagai berikut:
  - a. Revisi DIPA
  - b. Deviasi Halaman III
2. Aspek Kepatuhan Kualitas Pelaksanaan, dengan indikator:
  - a. Penyerapan anggaran
  - b. Belanja kontraktual
  - c. Penyelesaian tagihan
  - d. UP dan TUP
  - e. Dispensasi
3. Aspek Kualitas Hasil, dengan indikator:
  - a. Capaian output

Rincian variabel/indikator, tata cara dan bobot perhitungan untuk setiap aspek diatur dalam ketentuan mengenai Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga yang ditetapkan Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Formula :

$$\text{Nilai Kinerja pelaksanaan anggaran K/L} = \frac{\text{Hasil penilaian IKPA tingkat Nasional sebagai BUN pada Aplikasi OMSPAN}}{\text{BUN Nasional}}$$

Nilai IKPA tingkat nasional pada Aplikasi OM-SPAN diperoleh dengan menjumlahkan seluruh nilai kinerja indikator dikalikan dengan bobot masing-masing indikator. Nilai indikator dihitung berdasarkan akumulasi data transaksi seluruh K/L. Dalam hal pada salah satu atau beberapa indikator kinerja yang tidak memiliki transaksi, maka nilai akhir IKPA K/L/Unit Eselon I/Satker dihitung dengan mengalikan konversi bobot IKPA.

Nilai IKPA pada Aplikasi OM-SPAN dihitung berdasarkan data transaksi pelaksanaan anggaran pada seluruh indikator kinerja seluruh KL yang diambil dari Aplikasi SPAN dan SAKTI.

Dihitung dengan formula yang ditetapkan dalam Perdirjen No 5 Tahun 2022

\*) Keterangan:

a. Konversi bobot bernilai 100 persen apabila terdapat data transaksi atas seluruh indikator yang dinilai.

b. Konversi bobot bernilai di bawah 100 persen apabila terdapat indikator yang tidak dinilai dan/atau tidak data transaksinya pada periode tertentu.

Penjelasan detail indikator dan Tata cara perhitungan nilai IKPA diatur dalam ketentuan mengenai Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga yang ditetapkan oleh DJPb.

Khusus perhitungan capaian IKPA untuk triwulan I mengacu pada ketentuan peralihan sebagaimana diatur pada pasal 25 PER-5/PB/2022.

#### Nilai Indikator:

Metode penilaian IKPA pada Aplikasi OMSPAN adalah sebagai berikut:

$$\text{IKPA} = \sum [ 10\% (\text{REV}) + 10\% (\text{HAL3}) + 20\% (\text{REAL}) + 10\% (\text{KTR}) + 10\% (\text{TAG}) + 10\% (\text{PUP}) + 5\% (\text{DSPM}) + 25\% (\text{CO}) ] \times 100$$

Keterangan :

IKPA: Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satker

REV: Indeks kinerja yang dihitung berdasarkan frekuensi Revisi DIPA dalam kewenangan pagu tetap (yang disahkan oleh Kanwil DJPb/Direktorat PA/DJA) yang dibatasi hanya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) triwulan. Indeks kinerja merupakan nilai rata-rata indeks Revisi DIPA dari Satker yang ada di bawah kewenangan Kanwil yang nilai masing-masingnya dihitung dengan menggunakan formula =  $(1/\text{Jumlah Revisi DIPA})$ , dengan ketentuan: (i) Jumlah Revisi DIPA merupakan jumlah frekuensi revisi DIPA pada periode triwulan bersangkutan; (ii) apabila jumlah revisi DIPA = 0 maka satker diberikan indeks revisi DIPA maksimal atau 1.

HAL3: Indeks kinerja terkait akurasi rencana penarikan dana sebagaimana tertuang dalam halaman III DIPA, dihitung dengan formula =  $1 - \text{rata2 per bulan} [(Jreal-Jrenc)/Jrenc]$ , dengan ketentuan: (i) Jreal merupakan nilai total realisasi anggaran, (ii) Jrenc merupakan jumlah rencana penarikan dana sebagaimana tertuang dalam halaman III DIPA, (iii) hasil  $[(Jreal-Jrenc)/Jrenc]$  maksimal bernilai

1, serta (iv) dalam kondisi hasil  $[(J_{\text{real}} - J_{\text{renc}})/J_{\text{renc}}]$  menunjukkan #DIV/0, maka nilainya dikonversi menjadi 1 apabila ada nilai realisasi dan menjadi 0 apabila tidak ada nilai realisasi; (v) hasil  $[(J_{\text{real}} - J_{\text{renc}})/J_{\text{renc}}]$  bernilai absolut (mengabaikan tanda plus atau minus). Data rencana penarikan dana yang menjadi dasar perhitungan indeks setiap triwulannya adalah data Halaman III yang dimutakhirkan melalui revisi administrasi Halaman III DIPA sebelum batas waktu yang ditetapkan, yaitu 13 Februari, 16 April, 16 Juli, dan 15 Oktober. Indeks RPD pada Halaman III DIPA dikunci setiap awal periode triwulanan dan tidak dapat lagi disesuaikan/dimutakhirkan pada periode berikutnya.

**REAL:** Indeks kinerja terkait penyerapan anggaran dihitung berdasarkan persentase penyerapan anggaran (kumulatif) atas pagu DIPA terhadap target penyerapan anggaran triwulanan dengan menggunakan formula = % Penyerapan Tw ke-n (kumulatif)/% Target Realisasi Triwulan ke-n (kumulatif). Target realisasi penyerapan anggaran K/L ditetapkan berdasarkan rata-rata kemampuan daya serap anggaran K/L secara rata-rata dalam 3 tahun (dlh. tahun 2018 s.d. 2020) ditambah akres sebesar 10% dari pagu DIPA yang dibagi per triwulan secara progresif: 2% (Q1) – 3% (Q2) – 5% (Q3). Sedangkan target penyerapan anggaran pada Q4 dipertahankan dengan kinerja optimal minimal 90%.

**KTR:** Indeks kinerja terkait ketepatan waktu penyampaian data kontrak, yang dihitung dengan formula =  $\sum \text{Kontrak yang disampaikan tepat waktu} / \sum \text{Total Kontrak}$ . Dengan ketentuan, data kontrak dinyatakan disampaikan tepat waktu apabila disampaikan paling lambat 5 HK setelah kontrak ditandatangani.

**TAG:** Indeks kinerja terkait ketepatan waktu penyelesaian tagihan, yang dihitung dengan formula =  $\sum \text{Tagihan LS non BP Kontraktual yang disampaikan tepat waktu} / \sum \text{Total Tagihan LS non BP Kontraktual}$ . Dengan ketentuan: Tagihan dianggap tepat waktu apabila diselesaikan pembayarannya paling lama 17 HK setelah muncul hak (BAST/BAP/BAPP).

**PUP:** Indeks kinerja terkait dengan ketepatan waktu pertanggungjawaban UP dihitung berdasarkan 2 aspek, yaitu: (i) Pertanggungjawaban UP dan TUP tepat waktu dalam 1 (satu) bulan sesuai dengan status yang dapat dipantau pada Kartu Pengawasan (Karwas) UP dan TUP, dan (ii) Sisa dana UP dan TUP yang belum disetor ke Kas Negara pada akhir tahun anggaran sebagai penalti nilai. Indeks dihitung dengan formula =  $\sum \text{SPM GUP dan PTUP yang disampaikan tepat}$



waktu/ $\Sigma$ Total SPM GUP dan PTUP pada TW I s/d III, dan dengan formula = ( $\Sigma$ SPM GUP dan PTUP yang disampaikan tepat waktu/ $\Sigma$ Total SPM GUP dan PTUP) - penalti keterlambatan penyeteroran sisa UP di akhir tahun. Dengan ketentuan, Pertanggungjawaban UP dinyatakan dipertanggungjawabkan secara tepat waktu apabila disampaikan tidak lebih dari 1 bulan sejak tanggal SPM UP, SPM TUP, atau tanggal SPM GUP terakhir.

DSPM: Indeks kinerja terkait dispensasi penyampaian SPM dihitung berdasarkan kategori jumlah SPM yang mendapatkan dispensasi karena melewati batas waktu penyampaian SPM sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai Pedoman Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran.

CO: Indeks kinerja terkait realisasi volume rincian output yang dihitung berdasarkan nilai komposit dari komponen (1) nilai kinerja atas ketepatan waktu penyampaian data capaian output: dan (2) nilai kinerja atas capaian RO. Ketepatan waktu penyampaian data CO paling lambat 5 (lima) hari kerja pertama pada bulan berikutnya.

**Tabel 3.17**

**Penjelasan Capaian IKU Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L**

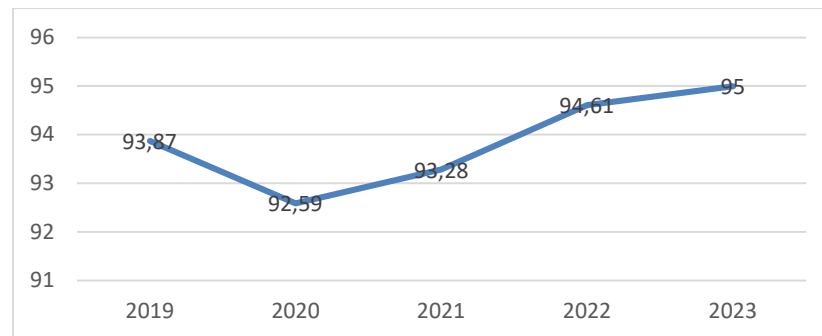
| Keterangan               | Bobot (%) | Nilai  | Nilai Akhir |
|--------------------------|-----------|--------|-------------|
| Revisi DIPA              | 10        | 99.94  | 9.99        |
| Deviasi Halaman III DIPA | 10        | 76.78  | 7.68        |
| Penyerapan Anggaran      | 20        | 95.53  | 19.11       |
| Belanja Kontraktual      | 10        | 91.97  | 9.20        |
| Penyelesaian Tagihan     | 10        | 98.98  | 9.90        |
| Pengelolaan UP dan TUP   | 10        | 96.25  | 9.63        |
| Dispensasi SPM           | 5         | 90.00  | 4.50        |
| Capaian Output           | 25        | 100.00 | 25          |
| Nilai Total              |           | 95.00  |             |
| Konversi Bobot           |           | 100%   |             |
| Nilai Akhir              |           | 95.00  |             |

Capaian IKU ini telah melebihi target yang telah ditetapkan pada awal tahun. Sementara capaian IKU ini pada tahun 2019 sebesar 93.87, pada tahun 2020 sebesar 92.59%, pada tahun 2021 sebesar 93.28%, pada tahun 2022 sebesar 94.61%, dan pada tahun 2023 sebesar 95%.



Grafik 3.2

## Capaian IKU Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L 2019-2023



Tabel 3.18

## Perbandingan Target dan Realisasi IKU Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L

| IKU                                    | 2019   |       | 2020   |       | 2021   |       | 2022   |       | 2023   |       |
|----------------------------------------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|
|                                        | Target | Real. | Target | Real. | Target | Real. | Target | Real. | Target | Real. |
| Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L | 80     | 93.87 | 88     | 92.59 | 89     | 93.28 | 89     | 94.61 | 90     | 95.00 |

**Tujuan IKU:**

Mendorong KPPN untuk melakukan langkah-langkah nyata dalam usaha meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran K/L

**Isu Utama:**

Indikator Deviasi pada halaman III DIPA nilainya cukup rendah.

KPA K/L merupakan salah satu komponen dalam kinerja KPPN yang dapat mempengaruhi persepsi stakeholders dalam melakukan penilaian atas kinerja KPPN secara keseluruhan.

**Tindakan yang telah dilaksanakan**

- Melakukan reuiu pelaksanaan anggaran setiap bulan.
- Mengadakan *sharing session* terkait IKPA di awal tahun.
- Menekan nilai UP mendekati dengan besaran GUP yang sering diajukan pada tahun sebelumnya.
- Mengingatkan satker pada saat batas-batas akhir pengajuan SPM.

### Rekomendasi Rencana Aksi

- Mengoptimalkan penggunaan Sosial Media KPPN Gorontalo untuk membagikan informasi terbaru terkait IKPA.
- Secara berkala melakukan sharing session dan monev IKPA.
- Membuat Rapot Satker dan memberikan penghargaan.

## 2. Indeks kualitas LK Kuasa BUN KPPN

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.05/2016 tanggal 30 Desember 2016, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, KPPN selaku UAKBUN-Daerah melakukan penyusunan Laporan Keuangan tingkat UAKBUN-Daerah berupa Laporan Arus Kas, Neraca KUN, Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca SAU. KPPN menyusun laporan keuangan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Penyusunan Dan Penyampaian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara. Selanjutnya, KPPN menyusun laporan Keuangan dengan sistematika dan lampiran sesuai Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-6193/PB/2017 tanggal 17 Juli 2017 hal Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Kuasa BUN-Daerah dan Koordinator Kuasa BUN-Kanwil. LK Kuasa BUN tingkat Daerah tersebut secara periodik disampaikan kepada Kanwil DJPb, Dit. PKN (selaku UAPBUN-AP) dan Dit. APK Ditjen Perbendaharaan.

Untuk mewujudkan kualitas penyusunan LK pada KPPN, Kanwil DJPb memberikan penilaian terhadap Kualitas LK dimaksud berdasarkan Nota Dinas Direktur APK Nomor ND-11/PB.6/2021 tanggal 6 Januari 2021 hal Kriteria Penilaian Laporan Keuangan Tingkat UAKBUN-D KPPN dan Laporan Keuangan Tingkat UAKKBUN Kanwil Ditjen Perbendaharaan berdasarkan empat kriteria, yaitu: (1) akurasi data (70%); (2) ketepatan waktu (2%); kelengkapan (3%); dan (4) Tingkat Partisipasi (25%). Penilaian LK unaudited berkontribusi sebesar 70% dan audited sebesar 30%. Hasil penilaian tersebut dituangkan dalam Keputusan Kepala Kanwil DJPb

Formula:

$$\text{Capaian IKU} = \text{INDEKS} (a + b) / 2$$

a: Persentase jumlah satker yang tidak terdapat selisih TKTM Aset dan Persediaan pada periode pelaporan semesteran. Nilai capaian semester I diperoleh dari data LK Audited 2022 dan nilai capaian semester II diperoleh dari data LK Semester I 2023

Nilai a meliputi data Semester I dan II, sehingga nilai a = (Semester I dan Semester II)/2

Indeks 1 = 0 -70%

Indeks 2 = 71%-80%

Indeks 3 = 81%-90%

Indeks 4 = 91%-100%

b: Hasil penilaian kualitas LKBUN KPPN yang dilakukan oleh Kanwil DJPb

Indeks 1 = <90

Indeks 2 = 90-93

Indeks 3 = 94-96

Indeks 4 = 97-100

**Tabel 3.19**  
**Penjelasan Capaian IKU Indeks kualitas LK Kuasa BUN KPPN**

| Keterangan          | Bobot (%) | Nilai   |
|---------------------|-----------|---------|
| Akurasi Data        | 50        | 99.689  |
| Ketepatan Waktu     | 2         | 100.000 |
| Kelengkapan Dokumen | 3         | 98.600  |
| Partisipasi         | 45        | 99.719  |
| Nilai Akhir         |           | 99.676  |
| Capaian Indeks      |           | 4       |

Capaian IKU ini telah melebihi target yang telah ditetapkan pada awal tahun.

IKU ini merupakan formulasi IKU baru di tahun 2023 sehingga belum memiliki data capaian historis.

#### **Tujuan IKU:**

Mewujudkan kualitas penyusunan LK Kuasa BUN tingkat KPPN

#### **Isu Utama:**

Nilai LK Kuasa BUN KPPN dipengaruhi oleh validitas data transaksi baik pengeluaran maupun penerimaan. Target IKU ini terdapat di TRIWULAN IV.

#### **Tindakan yang telah dilaksanakan**

- Pelaksanaan rekonsiliasi internal harian.
- Monitoring data suspend atas penerimaan negara pada Aplikasi OM SPAN.
- Pelaksanaan analisis Neraca Percobaan dan Neraca lajur detail segmen satker. Memastikan tidak terdapat penggunaan akun/CoA yang salah pada transaksi di satker dan membuat Nota Dinas ke Seksi terkait, jika di temukan kesalahan penggunaan akun/CoA.

#### **Rekomendasi Rencana Aksi**

- Memberikan pendampingan.
- Monitoring data dan menginformasikan melalui WAG.
- Monitoring data suspend dan menginformasikan kepada satker terkait.

### **3. Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN**

Indeks kepuasan satker terhadap layanan adalah rata-rata tingkat kepuasan satker terhadap seluruh produk layanan perbendaharaan dari KPPN yang mereka gunakan dan memanfaatkan, meliputi proses Pencairan Dana, layanan bimbingan dan konsultasi, konfirmasi surat setoran, dan penyelesaian rekonsiliasi realisasi anggaran.

Indeks kepuasan satker diukur melalui survei oleh masing-masing KPPN dengan metode sampling kepada responden terpilih dari seluruh mitra kerja yang dilayani oleh masing-masing unit eselon IV KPPN.

Indeks Pengukuran menggunakan skala 1-5 sebagai berikut :

- 5 = Sangat Puas
- 4 = Puas
- 3 = Cukup Puas
- 2 = Kurang Puas
- 1 = Tidak Puas

Target IKU ini telah ditetapkan oleh kantor pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Indikator Kinerja Utama ini bersifat Average dan Semesteran.

Tabel 3.20

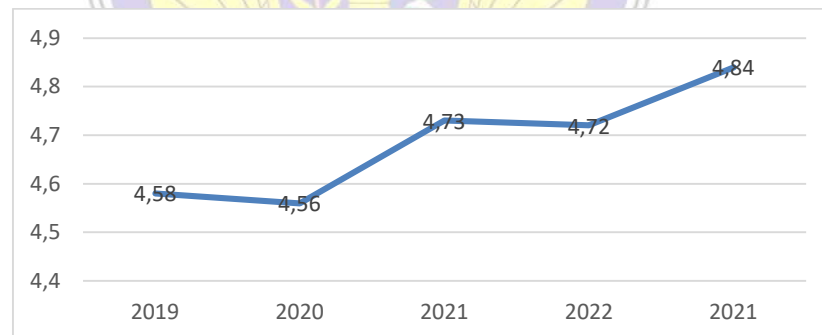
**Penjelasan Capaian IKU Kepuasan Satker Terhadap Layanan KPPN**

| Keterangan                               | Capaian     |
|------------------------------------------|-------------|
| Semester I                               | 4,82        |
| Semester II                              | 4,85        |
| Rata-rata / indeks kepuasan layanan KPPN | <b>4,84</b> |

Capaian IKU ini telah melebihi target yang telah ditetapkan pada awal tahun. Sementara capaian IKU ini pada tahun 2019 4,58; pada tahun 2020 sebesar 4,56, pada tahun 2021 sebesar 4,73; pada tahun 2022 sebesar 4,72; serta di tahun 2023 sebesar 4,84.

Grafik 3.3

**Capaian IKU Kepuasan Satker Terhadap Layanan KPPN 2019-2023**



Tabel 3.21

**Perbandingan Target dan Realisasi IKU Kepuasan Satker Terhadap Layanan KPPN**

| IKU                                          | 2019   |       | 2020   |       | 2021   |       | 2022   |       | 2023   |       |
|----------------------------------------------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|
|                                              | Target | Real. | Target | Real. | Target | Real. | Target | Real. | Target | Real. |
| Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN | 4.10   | 4.58  | 4.55   | 4.56  | 4.64   | 4.73  | 4.65   | 4.72  | 4.66   | 4.84  |



**Tujuan IKU:**

IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat kualitas pelayanan yang diberikan oleh KPPN kepada mitra kerja.

**Isu Utama:**

Tingkat kepuasan satker terhadap layanan KPPN tidak hanya ditentukan oleh kualitas layanan KPPN namun juga terkait berbagai aspek misalnya kehandalan sistem aplikasi dan kebijakan lain yang berada diluar wewenang KPPN, akibatnya tingkat kepuasan atas layanan KPPN juga dipengaruhi oleh kepuasan stakeholder atas kebijakan-kebijakan yang berada diluar kewenangan KPPN (misalnya kehandalan sistem SPAN, dll). Selain itu, segmen informasi layanan masih perlu ditingkatkan.

**Tindakan yang telah dilaksanakan**

- Melakukan analisa atas hasil survey untuk memetakan kelemahan pelayanan dan menyusun rekomendasi untuk perbaikan pada masing-masing unit.
- Melakukan evaluasi terhadap hasil survei periode sebelumnya.
- Melaksanakan/melengkapai sarana dan informasi sebagai tindakan perbaikan atas hasil survei periode sebelumnya yang masih kurang
- Melakukan tindakan perbaikan atas hasil survei periode sebelumnya yang masih kurang.
- Semaksimal mungkin membantu satker dalam menghadapi permasalahan aplikasi.

**Rekomendasi Rencana Aksi**

- Melakukan Sosialisasi inovasi-inovasi pelayanan yang diberikan KPPN.
- Memanfaatkan media sosial KPPN untuk melakukan publikasi yang intensif.

#### **4. Persentase tingkat implementasi standardisasi kompetensi pejabat perbendaharaan**

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh pengguna anggaran/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.

Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh pengguna anggaran/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.

Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah Nonkementerian.

Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Negara dalam pelaksanaan APBN pada kantor / Satker Kementerian Negara/Lembaga.

Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah orang yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.

PPK/PPSPM/Bendahara Tersertifikasi adalah PPK/PPSPM/Bendahara termasuk calon PPK/PPSPM/Bendahara yang lulus penilaian kompetensi bagi PPK/PPSPM dan/atau sertifikasi bagi Bendahara melalui mekanisme konversi, uji kompetensi atau refreshment.

Penilaian kompetensi bagi PPK/PPSPM adalah rangkaian proses penilaian secara objektif untuk menilai pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui ujian atau pengakuan atas kepemilikan sertifikat pelatihan/ keahlian sesuai PMK Nomor 211/PMK.05/2019 tentang Tata Cara Penilaian Kompetensi bagi PPK dan PPSPM pada Satuan Kerja Pengelola APBN

Sertifikasi Bendahara adalah proses penilaian karakter, kompetensi, dan kemampuan atas keahlian dan keterampilan untuk menjadi Bendahara yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui Ujian Sertifikasi.

Tingkat implementasi diukur berdasarkan tahapan pelaksanaan penilaian kompetensi PPK/PPSPM dan sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja wilayah pembayaran masing-masing KPPN, yang meliputi:

- Akselerasi verifikasi usulan peserta penilaian kompetensi PPK/PPSPM dan Sertifikasi Bendahara.
- Akselerasi penyelenggaraan refreshment oleh Unit Pelaksana Penilaian Kompetensi PPK/PPSPM.

- Pemenuhan Sertifikat BNT bagi Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu.

**Formula:**

**(persentase akselerasi verifikasi usulan x bobot) + (persentase akselerasi refreshment x bobot) + (persentase pemenuhan BNT x bobot)**

| No | Komponen Pengukuran                                                                                           | Bobot       | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Akselerasi verifikasi usulan peserta penilaian kompetensi PPK/PPSPM dan Sertifikasi Bendahara                 | 40%         | Akselerasi verifikasi usulan oleh KPPN, dihitung dari jumlah usulan yang telah diverifikasi oleh KPPN paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah diusulkan oleh Admin Satker, dibagi dengan jumlah usulan yang diajukan oleh Admin Satker <b>pada</b> semester berkenaan.                                                                                                                                              |
| 2  | Akselerasi Penyelenggaraan Refreshment oleh Unit Pelaksana Penilaian Kompetensi PPK/PPSPM                     | 30%         | Akselerasi penyelenggaraan refreshment, dihitung dari akumulasi jumlah peserta dengan status usulan "Konversi" dan "Konversi Refreshment" dibagi dengan jumlah peserta yang sudah memiliki nomor register Sertifikat Kompetensi (PNT dan/atau SNT) ditambahkan dengan jumlah peserta dengan status "Refreshment (PPK/PPSPM/Tagihan)" yang ditetapkan oleh Unit Penyelenggara <b>sampai dengan</b> semester berkenaan. |
| 3  | Pemenuhan Sertifikat BNT bagi Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu | 30%         | Persentase pemenuhan Sertifikat BNT bagi Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu, dihitung dari jumlah Bendahara Aktif yang sudah memiliki sertifikat BNT dibagi jumlah Bendahara Aktif di wilayah kerja KPPN <b>pada</b> semester berkenaan.                                                                                                                                 |
|    | <b>JUMLAH</b>                                                                                                 | <b>100%</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Capaian IKU ini telah melebihi target yang telah ditetapkan pada awal tahun.

IKU ini merupakan formulasi IKU baru di tahun 2023 sehingga belum memiliki data capaian historis.

**Tabel 3.22**

**Penjelasan Capaian IKU Persentase Tingkat Implementasi Standardisasi Kompetensi Pejabat Perbendaharaan**

| Keterangan  | Capaian    |
|-------------|------------|
| Semester I  | 98%        |
| Semester II | 95%        |
| Capaian IKU | <b>95%</b> |

**Tujuan:**

Mendorong KPPN untuk melakukan langkah-langkah terukur dalam usaha meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran pada satker pengelola APBN melalui pemenuhan implementasi standarisasi kapasitas pejabat perbendaharaan.

**Isu Utama:**

Standarisasi kompetensi pejabat perbendaharaan yaitu pelaksanaan penilaian kompetensi bagi PPK dan PPSPM pada satker pengelola APBN sesuai dengan PMK Nomor 211/PMK.05/2019 tentang Tata Cara Penilaian Kompetensi Bagi Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

**Tindakan yang telah dilaksanakan**

- Menyampaikan pengumuman setiap ada pembukaan pelatihan Pejabat perbendaharaan.
- Pendampingan satker dan melayani konsultasi satker.

**Rekomendasi Rencana Aksi**

- Proaktif memberikan informasi dan mendorong pejabat perbendaharaan untuk mendaftarkan refreshment atau pelatihan.

**5. Tingkat Efektivitas Edukasi di Bidang Pengelolaan Perbendaharaan**

Salah satu Tugas Pokok Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Terampil sesuai dengan PermenPANRB 51/2018 adalah melaksanakan kegiatan pembinaan/bimbingan teknis di bidang perbendaharaan kepada customer. Tingkat pemahaman customer merupakan tingkat daya tangkap peserta (customer) terhadap segala materi yang diberikan pada pelatihan teknis (bimtek atau yang dipersamakan dengan itu). Tolok ukur hasil pelatihan teknis didasarkan pada peningkatan pemahaman peserta atas materi yang diberikan dalam pelatihan untuk satu periode. Ruang lingkup pelatihan teknis meliputi semua kegiatan pembinaan yang diselenggarakan oleh KPPN. Kegiatan bimtek/sosialisasi diukur dengan post test dan kuesioner. Dalam hal tidak terdapat kegiatan bimtek/sosialisasi dalam satu semester, maka capaiannya

adalah N/A. total nilai efektivitas edukasi dan komunikasi dibobot sebagai berikut:  
hasil post test 60% sedangkan hasil kuesioner 40%.

Formula perhitungan capaian IKU ini adalah

Indeks Tingkat Efektifitas Edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan ((60%  
hasil post test + 40% hasil kuesioner))

$0 < x \leq 20$  = tidak efektif

$20 < x \leq 40$  = kurang efektif

$40 < x \leq 60$  = cukup efektif

$60 < x \leq 80$  = efektif

$80 < x \leq 100$  = sangat efektif

Target IKU ini telah ditetapkan oleh kantor pusat Direktorat Jenderal  
Perbendaharaan. Indikator Kinerja Utama ini bersifat Average dan Semesteran.

**Tabel 3.23**

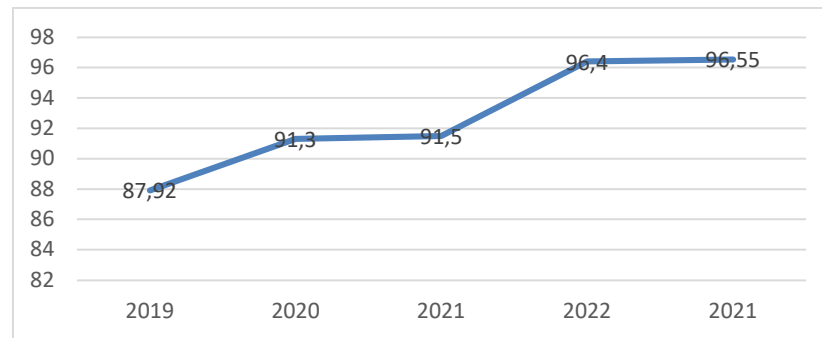
**Penjelasan Capaian IKU Tingkat Efektivitas Edukasi di Bidang Pengelolaan  
Perbendaharaan**

| Keterangan                                  | Capaian      |
|---------------------------------------------|--------------|
| Semester I                                  | 95,59        |
| Semester II                                 | 97,50        |
| Rata-rata / indeks kepuasan layanan<br>KPPN | <b>96,55</b> |

Capaian IKU ini telah melebihi target yang telah ditetapkan pada awal tahun.  
Capaian IKU ini pada tahun 2019 sebesar 87,92; tahun 2020 meningkat dengan  
capaian sebesar 91,3; kemudian pada tahun 2021 sebesar 91,5; pada tahun 2022  
sebesar 96,4; kemudian meningkat pada tahun 2023 menjadi 96,55.

**Grafik 3.4**

**Capaian IKU Tingkat Efektivitas Edukasi di Bidang Pengelolaan  
Perbendaharaan 2019-2023**



Tabel 3.24

**Perbandingan Target dan Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Edukasi di Bidang  
Pengelolaan Perbendaharaan**

| IKU                                          | 2019   |       | 2020   |       | 2021   |       | 2022   |       | 2023   |       |
|----------------------------------------------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|
|                                              | Target | Real. | Target | Real. | Target | Real. | Target | Real. | Target | Real. |
| Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN | 80     | 87,92 | 87     | 91,3  | 87,5   | 91,5  | 88,5   | 96,4  | 89     | 96,55 |

**Tujuan IKU:**

Mengukur tingkat efektivitas pelaksanaan pembinaan teknis perbendaharaan.

**Isu Utama:**

Efektivitas edukasi dan komunikasi diukur melalui pengisian kuesioner atau pelaksanaan pretest dan post test pada saat dilaksanakan kegiatan sosialisasi ataupun bimtek. Selain itu juga berkurangnya pertanyaan dan permasalahan yang diajukan ke KPPN.

**Tindakan yang telah dilaksanakan**

- Mengadakan sosialisasi dan bimtek terutama apabila terdapat peraturan baru atau update aplikasi.
- Pendampingan apabila terdapat masalah.

**Rekomendasi Rencana Aksi**



- Pelatihan/GKM kepada semua pegawai agar pengetahuan terupdate dan dapat membimbing satker.
- Sosialisasi kepada satker atas peraturan terbaru.
- Pendampingan satker yang ada masalah.

## 6. Persentase Akurasi Perencanaan Kas

Perencanaan Kas (Renkas) KPPN yang diperoleh dari RPD harian tingkat Satker serta pemutakhirannya yang disampaikan kepada Kepala KPPN oleh KPA secara otomatis melalui aplikasi SAKTI menggunakan fitur Scheduled Payment Date.

Perencanaan Kas KPPN dinyatakan akurat apabila deviasi tagihan atas RPD Harian satker berada dalam batas kewajaran sebagaimana ditentukan dalam target IKU.

Deviasi yang diperhitungkan adalah deviasi unit tagihan dan deviasi nilai tagihan yang masing-masing mempunyai bobot yang ditentukan.

Pemberian dispensasi RPD, baik nilai maupun waktu, tetap diperhitungkan dalam formulasi akurasi RPD

Harian dengan menggunakan rasio pemberian dispensasi terhadap total RPD Harian pada suatu periode.

Persentase RPD Harian dengan Scheduled Payment Date yang akurat adalah selisih antara akurasi maksimal (100%) dengan rata - rata tingkat deviasi seluruh tagihan pada periode tertentu dengan memperhitungkan tingkat dispensasi sebagai faktor pengurang.

Formula perhitungan capaian IKU

$$(((100\% - ((\text{Rata - Rata Deviasi Unit RPD harian KPPN per periode} \times 0,3) + ((\text{Rata - Rata Deviasi Nilai RPD harian KPPN per periode} \times 0,7)))) - (\text{Rasio Dispensasi RPD harian KPPN per periode} \times 0,01))$$

Keterangan:

- a. Data perhitungan deviasi hanya menggunakan data tagihan yang memiliki Scheduled Payment Date
- b. RPD manual yang disampaikan oleh Satker akses langsung SPAN dikecualikan dari perhitungan.
- c. Perhitungan deviasi diperoleh dari Aplikasi MONSAKTI
- d. Pengukuran capaian di triwulan I hanya berdasarkan hasil capaian deviasi pada bulan Maret 2023.

Capaian IKU ini telah melebihi target yang telah ditetapkan pada awal tahun. IKU ini merupakan formulasi IKU baru di tahun 2023 sehingga belum memiliki data capaian historis

**Tabel 3.25**  
**Penjelasan Capaian Persentase Akurasi Perencanaan Kas**

|         | Triwulan I | Triwulan II | Triwulan III | Triwulan IV |
|---------|------------|-------------|--------------|-------------|
| Capaian | N/A        | 97,65%      | 96%          | 98%         |

**Tujuan IKU:**

Untuk mengoptimalkan peran KPPN dalam dukungan perencanaan Kas Pemerintah Pusat serta melakukan pembinaan dan supervisi terhadap akurasi perencanaan kas satker.

**Isu Utama:**

Ketepatan penyampaian RPD oleh satker wujud garansi kualitas perencanaan satuan kerja. Sesuai ketentuan baru tentang RPD (PMK 197/PMK.05/2017) penyampaian/pelaksanaan RPD telah banyak diberikan kemudahan-kemudahan bagi satker, antara lain penyampaian SPM tanpa RPD namun dilengkapi adanya Surat Pernyataan KPA ttg penundaan pencairan diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam pengelolaan RPD, baik di satker maupun KPPN. Update Renkas Melalui SPRINT.

**Implikasi:**

RPD dapat lebih akurat.

**Tindakan yang telah dilaksanakan**

- Sosialisasi tentang ketentuan baru RPD (PMK 197/PMK.05/2017).
- Sosialisasi langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran tahun 2023, salah satu materinya terkait perencanaan kas
- Sosialisasi dan bimtek secara intensif
- Perlu dilakukan kegiatan pendampingan khususnya terhadap satker dengan pagu besar

- Menyampaikan teguran kepada satker yang tidak memenuhi RPD sesuai yang telah disampaikan
- Mengundang satker ke KPPN untuk didampingi input renkas di SPRINT.

#### **Rekomendasi Rencana Aksi**

- Memberikan bimtek kepada satker
- Berkoordinasi dengan Kanwil DJPb
- Secara aktif melakukan updating data perencanaan kas yang disampaikan oleh satker

### **7. Tingkat kualitas penyelesaian SP2D**

SPM Satker yang diproses menjadi SP2D merupakan mekanisme pengujian oleh KPPN yang bersifat formal dan substantif terhadap Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan oleh Satuan Kerja untuk diterbitkan menjadi SP2D. Penyelesaian SP2D dinyatakan tepat waktu bila memenuhi janji layanan sebagaimana surat Dirjen Perbendaharaan nomor S-7283/PB.1/2018.

Komponen A:

SPM Satker yang diproses menjadi SP2D merupakan mekanisme pengujian oleh KPPN yang bersifat formal dan substantif terhadap Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan oleh Satuan Kerja untuk diterbitkan menjadi SP2D. Penyelesaian SP2D dinyatakan tepat waktu bila memenuhi janji layanan sebagaimana surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-7283/PB.1/2018. SPM satker yang diproses menjadi SP2D secara tepat waktu diukur berdasarkan jumlah penyelesaian SPM Satker yang diproses oleh Seksi Pencairan Dana untuk selanjutnya diterbitkan SP2D atau approval oleh Seksi Bank

SPM yang diproses menjadi SP2D diselesaikan dalam waktu 1 (satu) jam, dengan prasyarat kondisi sebagai berikut:

- a. Jenis SPM yang masuk adalah UP/GUP/TUP/PTUP dan LS Non Gaji
- b. ADK SPM masuk ke SPAN pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 12.00 waktu setempat.
- c. Tidak di saat load pekerjaan KPPN sedang tinggi, sebagai contoh pada akhir tahun anggaran, pada saat pengajuan gaji 13, dan pada saat pengajuan pembayaran THR.
- d. Tidak termasuk SPM dengan penerima >100

e. Data supplier, Kontrak, dan/atau RPD sudah masuk dalam SPM

f. Tidak dalam keadaan force majeure

Komponen B:

Efektivitas penyaluran dana SP2D yang akurat KPPN diukur berdasarkan penyaluran dana yang akurat dan kecepatan penyelesaian retur SP2D yang diterbitkan KPPN.

Efektivitas penyaluran dana SP2D yang akurat diukur berdasarkan penyaluran dana SP2D yang akurat.

Efektivitas penyaluran dana SP2D yang akurat adalah penyaluran dana SP2D kepada para penerima yang tidak di-retur oleh Bank Operasional dan dihitung berdasarkan jumlah penerima pada SP2D yang tidak diretur oleh Bank/Pos Operasional dibandingkan dengan jumlah penerima SP2D yang diterbitkan oleh KPPN (termasuk data penerima pada SP2D Perbaikan retur)

Komponen C:

Efektivitas kecepatan penyelesaian retur SP2D diukur berdasarkan penyaluran dana yang akurat dan kecepatan penyelesaian retur SP2D yang diterbitkan KPPN.

Efektivitas kecepatan penyelesaian retur SP2D diukur berdasarkan kecepatan penyelesaian retur SP2D.

Retur SP2D adalah penolakan/pengembalian pemindahbukuan dan/transfer pencairan dana APBN dari Bank penerima kepada Bank Operasional karena nama, alamat, nomor rekening, dan/atau nama bank yang dituju tidak sesuai dengan data rekening Bank penerima atau rekening penerima tidak aktif.

Kecepatan Penyelesaian Retur yang dilakukan oleh seluruh KPPN di Indonesia untuk meningkatkan pengelolaan pengeluaran APBN dalam rangka meningkatkan pelayanan dengan tepat waktu, tepat jumlah, serta tepat sasaran kepada satuan kerja/stakeholder.

**Formula:**

|                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Capaian Komponen A + Capaian Komponen B + Capaian Komponen C</b> |
| <b>3</b>                                                            |

**Komponen A: Penyelesaian SP2D secara tepat waktu**

|                                                                                                                                                               |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| $\frac{\sum \text{SP2D sesuai kriteria yang diterbitkan tepat waktu oleh KPPN}}{\sum \text{SP2D yang seharusnya sesuai kriteria yang diterbitkan oleh KPPN}}$ | $\times 100\%$ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|

**Komponen B: Efektivitas Penyaluran dana SP2D yang akurat**

|                                                                                                                                                                 |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| $\frac{\sum \text{penerima pada SP2D yang diterbitkan} - \sum \text{penerima pada SP2D yang diretur oleh BO}}{\sum \text{penerima pada SP2D yang diterbitkan}}$ | X 100% |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|

### Komponen C: Efektivitas kecepatan penyelesaian retur SP2D

|                                                                                                                                                                               |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| $\frac{\{[n \text{ SP2D-P I1} * 1] + [n \text{ SP2D-P I2} * 2] + [n \text{ SP2D-P I3} * 3] + [n \text{ SP2D-P I4} * 4] + [n \text{ SP2D-P I5} * 5]\}}{\sum n \text{ SP2D-P}}$ | X 100% |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|

Capaian IKU ini telah melebihi target yang telah ditetapkan pada awal tahun. IKU ini merupakan formulasi IKU baru di tahun 2023 sehingga belum memiliki data capaian historis

**Tabel 3.26**

### Penjelasan Capaian Tingkat kualitas penyelesaian SP2D

|         | Triwulan I | Triwulan II | Triwulan III | Triwulan IV |
|---------|------------|-------------|--------------|-------------|
| Capaian | 5          | 5           | 5            | 5           |

#### Tujuan IKU:

Mengukur waktu tingkat kualitas penyelesaian SPM yang diajukan oleh Satker.

#### Isu Utama:

Capaian IKU Tingkat kualitas penyelesaian SP2D yang sekarang mempertimbangkan 3 komponen (dulu 1), yaitu Penyelesaian SP2D secara tepat waktu, Efektivitas Penyaluran dana SP2D yang akurat, serta Efektivitas kecepatan penyelesaian retur SP2D. Selain itu, walaupun capaian IKU telah melampaui target yang ditentukan, masih perlu dicermati ketika jumlah SPM yang disampaikan overload. Adanya pengajuan SPM banyak penerima dengan data rekening pada supplier yang sudah tidak aktif.

#### Implikasi:

- Potensi terjadinya retur
- Apabila SPM yang masuk dalam jumlah banyak target IKU belum tentu akan tercapai.

#### Tindakan yang telah dilaksanakan

- Membangun komunikasi antar petugas terkait Pengumuman PPR di grup whatsapp kantor



- Mengatur tahapan proses validasi SPM untuk memberikan waktu dalam proses penyelesaian SPM
- Melaporkan melalui HAI DJPb

#### **Rekomendasi Rencana Aksi**

- Koordinasi internal Seksi PD dan Seksi Bank.
- Melaporkan ke Dit. SITP

### **8. Nilai Kinerja Penyaluran Dana Transfer ke Daerah**

Dalam rangka memastikan pelaksanaan anggaran penyaluran DAK fisik, DAK Nonfisik, dan Dana Desa berjalan dengan efisien dan efektif, diperlukan suatu alat penilaian kualitas/kinerja seluruh stakeholder dalam pelaksanaan anggaran penyaluran DAK Fisik, DAK Nonfisik, dan Dana Desa yang menjadi kewenangan Ditjen Perbendaharaan.

Nilai Kualitas Kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah pada KPPN diukur dengan menggunakan beberapa variabel sebagai berikut :

1. Ketepatan waktu penyampaian dokumen persyaratan oleh pemda dhi. syarat penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa. (SYARAT)
2. Tingkat akurasi penyusunan proyeksi penyaluran dana Transfer Ke Daerah oleh KPPN. (PROYEKSI)
3. Ketepatan waktu penyelesaian SPP dan SPM penyaluran dana Transfer ke Daerah hingga menjadi SP2D oleh KPPN. (TAGIHAN)
4. Ketepatan waktu penyampaian laporan pemantauan dan evaluasi penyaluran DAK dan Dana Desa. (MONEV)
5. Kelengkapan dan Ketepatan waktu penyampaian LK tingkat UAKPA BUN TKD. (LK-UAKPA)
6. Nilai Penyaluran dana transfer ke daerah dan ketepatan waktu perekaman capaian rincian output Transfer Ke Daerah yang telah memperhitungkan nilai output. (REAL) .

#### **Formula IKU:**

$$\text{NKP TKDD} = [0,10 (\text{SYARAT}) + (0,15 (\text{PROYEKSI}) + 0,25 (\text{TAGIHAN}) + 0,10 (\text{MONEV}) + 0,20 (\text{LK-UAKPA}) + 0,20 (\text{REAL})] \times 100$$

Keterangan:



NKP TKDD adalah nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah (Seluruh jenis dana Transfer Ke Daerah) pada tingkat nasional yang disalurkan oleh Ditjen Perbendaharaan..

SYARAT adalah rata-rata nilai ketepatan waktu penyampaian (dhi. pengajuan permintaan penyaluran melalui aplikasi OMSPAN) dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa dan DAK Fisik oleh pemda per subbidang dengan mengacu pada ketentuan mengenai petunjuk teknis penyaluran Dana Desa dan DAK Fisik pada Ditjen Perbendaharaan.

Penentuan nilai ketepatan waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa dan DAK Fisik per subbidang per tahap penyaluran (Nilai Ketepatan Waktu Pengajuan Permintaan Penyaluran) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

100 = dokumen persyaratan disampaikan/diunggah secara benar & lengkap paling lambat 60 hr kalender sebelum batas waktu yang ditentukan.

97 = dokumen persyaratan disampaikan/diunggah secara benar & lengkap kurang dari 30 hr kalender sebelum batas waktu yang ditentukan.

95 = dokumen persyaratan disampaikan/diunggah secara benar & lengkap kurang 15 hr kalender sebelum batas waktu yang ditentukan.

93 = dokumen persyaratan disampaikan/diunggah secara benar & lengkap kurang dari 7 hari kalender batas waktu yang ditentukan.

90 = dokumen persyaratan disampaikan/diunggah secara benar & lengkap 7 hari kalender sampai dengan batas waktu yang ditentukan.

75 = dokumen persyaratan terlambat disampaikan/diunggah (apabila terdapat dispensasi)

SYARAT = Rata-rata nilai ketepatan waktu penyampaian =  $\sum \text{NKWPDP DFDD} / \text{Jumlah penyaluran DFDD per tahap penyaluran yang siap disalurkan.}$

\*NKWPDP : Nilai Ketepatan Waktu Penyampaian Dokumen Persyaratan Penyaluran

Data yang digunakan dalam perhitungan nilai indikator "SYARAT" bersifat data kumulatif, artinya untuk menghitung nilai indikator pada suatu periode triwulan, maka digunakan data dari awal tahun hingga periode triwulan berkenaan, bukan hanya data pada triwulan terkait. Dalam hal dalam periode tertentu tidak terdapat transaksi/aktivitas penyampaian dokumen persyaratan maka nilai indikator syarat diberikan sebesar target.

**PROYEKSI** Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pengelolaan dana Transfer ke Daerah, KPA BUN Penyaluran TKD menyampaikan Proyeksi melalui Rencana Penarikan Dana (RPD) bulanan dengan basis proyeksi halaman III DIPA pada seluruh DIPA TKD yang dikelola oleh KPPN BUN Penyaluran TKD serta pemutakhirannya kepada Koordinator KPA BUN Penyaluran Transfer Ke Daerah secara otomatis pada Aplikasi SAKTI. RPD bulanan pada Aplikasi Sakti disusun dengan memperhatikan tahapan, persentase, nilai, periode dan kesiapan Pemda dalam menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran. KPA BUN Penyaluran Transfer Ke Daerah berkoordinasi dengan Pemda untuk mendapatkan informasi terkait kesiapan Pemda dalam memenuhi dokumen persyaratan penyaluran, selain itu KPA BUN Penyaluran Transfer Ke Daerah memperhatikan Nota Dinas Rekomendasi Penyaluran dari DJPK terkait dengan rekomendasi penyaluran Dana TKD.

Proyeksi dinyatakan akurat apabila deviasi antara rencana penarikan dana dengan realisasinya maksimal 15%. Persentase proyeksi yang akurat adalah selisih antara akurasi maksimal (100%) dengan rata - rata tingkat deviasi proyeksi penyaluran pada periode tertentu. Periode data proyeksi KPA BUN Penyaluran Transfer Ke Daerah dilaporkan pada setiap 5 Hari Kerja sebelum bulan berkenaan berakhir dengan melakukan penginputan data proyeksi halaman III DIPA pada aplikasi SAKTI.

% Akurasi =  $100\% - (\text{Rata - Rata Deviasi Proyeksi Penyaluran TKD per periode})$

Tingkat deviasi proyeksi diperoleh dari:

Deviasi = [Rencana / Realisasi] x 100%

Penentuan nilai indeks proyeksi penyaluran DAKDD dihitung dengan ketentuan sistem layering deviasi sebagai berikut:

100 = deviasi per periode sampai dengan 15%;

95 = deviasi per periode di atas 15% sampai dengan 20%;

90 = deviasi per periode di atas 20% sampai dengan 25%;

75 = deviasi per periode di atas 25%

Cetakan proyeksi pada aplikasi SAKTI disampaikan kepada Koordinator KPA BUN Penyaluran TKD melalui Portal TKD dengan alamat <http://10.242.231.124> dalam bentuk softfile (.pdf) yang telah ditandatangani KPA paling lambat 5 HK sebelum akhir bulan berkenaan.

Perhitungan PROYEKSI atas 3 DIPA yang dikelola oleh KPPN diperoleh melalui rata-rata deviasi dari ketiga DIPA pada periode berkenaan.

Data yang digunakan dalam perhitungan nilai indikator "PROYEKSI" bersifat tidak kumulatif, artinya untuk menghitung nilai indikator pada suatu periode triwulan, maka digunakan data pada triwulan berkenaan saja tanpa memperhitungkan data triwulan sebelumnya.

**TAGIHAN** adalah indeks ketepatan waktu penyaluran dana Transfer Ke Daerah oleh KPPN selaku KPA BUN Penyaluran TKD, dengan kriteria sebagai berikut:

- a. penyelesaian tagihan DAK Fisik dan Dana Desa oleh KPPN selaku KPA BUN Penyaluran TKD dilakukan paling lambat 5 HK setelah dokumen persyaratan diajukan kepada KPPN selaku KPA BUN Penyaluran TKD dengan lengkap dan benar.
- b. penyelesaian tagihan selain DAK Fisik dan Dana Desa yang berdasarkan rekomendasi dari DJPK oleh KPPN selaku KPA BUN Penyaluran TKD, dilakukan paling lambat 5 HK setelah ND Rekomendasi dari Direktorat Pelaksanaan Anggaran.
- c. Ketepatan waktu penyelesaian retur SP2D penyaluran dana Transfer Ke Daerah selain yang dikecualikan berdasarkan PER-9/PB/2018 tanggal 28 Juni 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

TAGIHAN = ((Jumlah tagihan TKD yang diselesaikan proses pembayarannya tepat waktu / jumlah seluruh tagihan TKD yang diproses KPPN) x 0,8) + ((Jumlah retur yang diselesaikan tepat waktu/jumlah total retur) x 0,2)

Data yang digunakan dalam perhitungan nilai indikator "TAGIHAN" bersifat tidak kumulatif, artinya untuk menghitung nilai indikator pada suatu periode triwulan, maka digunakan data pada triwulan berkenaan saja tanpa memperhitungkan data triwulan sebelumnya.

MONEV adalah nilai ketepatan waktu penyampaian laporan pemantauan dan evaluasi penyaluran dana Transfer Ke Daerah yang disampaikan secara triwulanan oleh KPPN kepada Kanwil dan ditembuskan kepada Koordinator KPA BUN Penyaluran TKD sesuai ketentuan SE 72/PB/2017 tentang Petunjuk teknis pemantauan dan evaluasi penyaluran DAK Fisik, DAK Nonfisik, dan Dana Desa yang dilaksanakan oleh Ditjen Perbendaharaan dan/atau Nota Dinas yang diterbitkan oleh Direktorat Pelaksanaan Anggaran. Sesuai ketentuan tersebut, Laporan pemantauan dan evaluasi penyaluran Transfer Ke Daerah oleh KPA BUN Penyaluran TKD disampaikan kepada Kanwil DJPb dan Koordinator KPA Penyaluran melalui Nadine dan Portal TKD melalui url <http://10.242.231.124> paling lambat 5 HK setelah periode triwulanan berakhir dan/atau sesuai dengan Nota Dinas Direktorat Pelaksanaan Anggaran.

Penentuan nilai ketepatan waktu penyampaian laporan pemantauan dan evaluasi penyaluran dana Transfer Ke Daerah oleh KPPN dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

100 = dokumen laporan monev disampaikan 5-4 Hari kerja sebelum batas waktu yang ditentukan.

95 = dokumen laporan monev disampaikan 3-1 Hari kerja sebelum batas waktu yang ditentukan.

90 = dokumen laporan monev disampaikan tepat pada batas waktu yang ditentukan.

65 = dokumen laporan monev disampaikan terlambat sesudah batas waktu yang ditentukan.

0,00 = dokumen laporan monev tidak disampaikan sampai dengan akhir triwulan penilaian.

Data yang digunakan dalam perhitungan nilai indikator "MONEV" bersifat tidak kumulatif, artinya untuk menghitung nilai indikator pada suatu periode triwulan, maka digunakan data pada triwulan berkenaan saja tanpa memperhitungkan data triwulan sebelumnya dengan basis periode penyampaian laporan bukan periode laporan (historical report).

LK-UAKPA adalah Nilai kelengkapan, pengungkapan laporan keuangan yang memadai dan ketepatan waktu penyampaian LK BUN tingkat UAKPA KPA BUN Penyaluran TKD sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.05/2015 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan PMK 221/PMK.05/2016 serta PMK 229/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah. KPPN BUN penyaluran TKD menyampaikan 3 Laporan Keuangan kepada Koordinator KPA BUN Penyaluran TKD sesuai batas waktu yang telah ditetapkan. Perhitungan atas indikator LK UAKPA dihitung secara rata-rata dari nilai tiap Laporan Keuangan yang disampaikan oleh KPPN selaku KPA BUN Penyaluran TKD.

$$LK-UAKPA = \{(nilai\ ketepatan\ waktu \times 0,1) + (nilai\ kelengkapan\ dan\ pengungkapan\ laporan\ keuangan\ yang\ memadai \times 0,9)\}$$

LK tingkat UAKPA BUN disampaikan kepada UAKKPA melalui Nadine dan Portal <http://10.242.231.124/> sesuai ketentuan batas waktu yang ditentukan di atas atau ditentukan lain oleh surat Dirjen Perbendaharaan/ Direktorat APK.

Data yang digunakan dalam perhitungan nilai indikator "LK-UAKPA" bersifat tidak kumulatif, artinya untuk menghitung nilai indikator pada suatu periode triwulan, maka hanya digunakan data pada periode triwulan berkenaan dengan basis periode penyampaian laporan bukan periode laporan (historical report).



Dalam kondisi normal, batas waktu mengacu pada PMK 221/PMK.05/2016 dan kelengkapan mengacu pada PMK 83/PMK.05/2018. Namun dalam kondisi tertentu batas waktu penyampaian LK dapat juga diatur dengan Nota Dinas/Surat yang diterbitkan Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan.

Perhitungan LK UAKPA sesuai dengan Kertas Kerja Penilaian LK UAKPA sebagaimana tidak terpisahkan dari manual IKU Nilai Kinerja Penyaluran Transfer Ke Daerah.

#### REAL

adalah Nilai penyaluran dana dan ketepatan waktu perekaman capaian rincian output Transfer Ke Daerah. Perhitungan nilai persentase penyaluran dana terbatas pada jenis dana transfer DAK Fisik, Dana Desa, dan DAK Nonfisik (BOSP).

Perhitungan nilai capaian indikator REAL dengan formula :

$$\text{REAL} = [((\text{Jumlah Penyaluran TKD}^* / \text{Pagu Alokasi TKD}^*) \times 0,8) + ((\text{Rata-Rata Nilai Ketepatan Waktu Perekaman Capaian Rincian Output}) \times 0,2)]$$

Keterangan :

- TKD\* = TKD dengan jenis tertentu antara lain DAK Fisik, Dana Desa, dan DAK Nonfisik (BOSP)

Perhitungan nilai indikator "REAL" dilakukan dengan rincian sebagai berikut:

##### 1. Penyaluran TKD\*:

Perhitungan nilai persentase penyaluran dilakukan tiap semester dengan jenis konsolidasi periode Take Last Known, dengan rincian nilai target sebagai berikut:

Dalam hal nilai realisasi penyaluran TKD lebih dari target yang ditetapkan maka tetap diberikan nilai maksimal (100). Sebaliknya apabila kurang diberikan nilai sebesar rasio antara capaian realisasi dengan target pada periode penilaian.

##### 2. Rata-rata nilai ketepatan waktu perekaman rincian capaian output:

Perhitungan nilai ketepatan waktu perekaman capaian output dihitung setiap triwulan sesuai dengan batas waktu perekaman capaian rincian output pada aplikasi SMART-BUN tiap periode



paling lambat setiap tanggal 3 bulan berikutnya. Penilaian rata-rata ketepatan waktu sebagai berikut:

- 100 = perekaman dilakukan tanggal 1 s.d 3 bulan berikutnya tiap periode pelaporan
- 95 = perekaman dilakukan tanggal 4 s.d 5 bulan berikutnya tiap periode pelaporan
- 90 = perekaman dilakukan tanggal 6 s.10 bulan berikutnya tiap periode pelaporan
- 0 = perekaman dilakukan setelah tanggal 10 bulan berikutnya tiap periode pelaporan

Data yang digunakan dalam perhitungan bersifat tidak kumulatif, artinya untuk menghitung ketepatan waktu pada suatu periode triwulan, maka digunakan data pada triwulan berkenaan saja tanpa memperhitungkan data triwulan sebelumnya.

Target IKU ini telah ditetapkan Oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Indikator Kinerja Utama ini bersifat average, sehingga realisasi tahun 2023 merupakan hasil pembagian secara merata atas realisasi selama empat triwulan. Berikut tabel perhitungan realisasi IKU ini.

**Tabel 3.27**

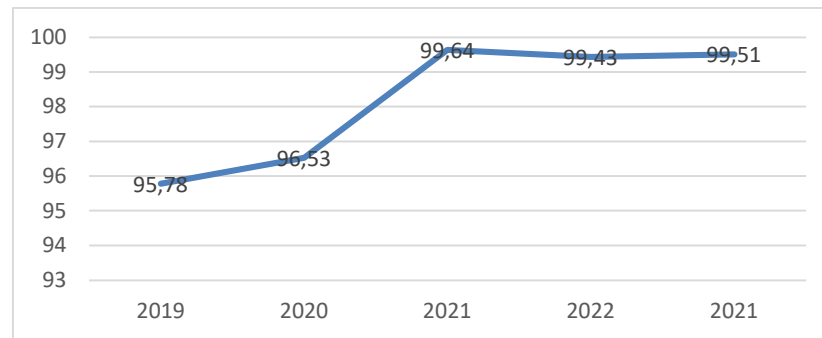
**Penjelasan Capaian IKU Nilai Kinerja Penyaluran Dana Transfer ke Daerah**

|          | Triwulan I | Triwulan II | Triwulan III | Triwulan IV |
|----------|------------|-------------|--------------|-------------|
| NKP TKDD | 99,38      | 99,40       | 99.74        | 99,51       |

Capaian IKU ini telah melebihi target yang ditetapkan pada awal tahun. Sementara Capaian IKU ini pada tahun 2019 sebesar 95.78; tahun 2020 sebesar 96.53; pada tahun 2021 sebesar 99.64; tahun 2022 sebesar 99,43; dan pada tahun 2023 sebesar 99,51.

**Grafik 3.8**

**Capaian IKU Nilai Kinerja Penyaluran Dana Transfer ke Daerah 2019-2023**



Tabel 3.28

**Perbandingan Target dan Realisasi IKU Nilai Kinerja Penyaluran Dana Transfer ke Daerah**

| IKU                                              | 2019   |       | 2020   |       | 2021   |       | 2022   |       | 2023   |       |
|--------------------------------------------------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|
|                                                  | Target | Real. | Target | Real. | Target | Real. | Target | Real. | Target | Real. |
| Nilai Kinerja Penyaluran Dana Transfer ke Daerah | 75     | 95,78 | 80     | 96,53 | 90     | 99,64 | 90     | 99,43 | 90     | 99,51 |

**Tujuan IKU:**

Untuk mengetahui kinerja Pemda, serta KPA penyaluran DAK dan Dana Desa dalam kegiatan pelaksanaan anggaran penyaluran transfer ke daerah secara optimal sebagaimana tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran.

**Isu Utama:**

- Mulai TA 2023 Seluruh Transfer ke Daerah disalurkan melalui KPPN
- KPPN harus melakukan input potongan dan penundaan (perlu ketelitian)
- Adanya mekanisme BOK Pukermas yang sama dengan mekanisme BOSP (langsung ke rek.puskesmas)

**Implikasi:**

- Nilai Ketepatan waktu penyampaian dokumen persyaratan oleh pemda (Syarat) yang tidak maksimal
- Supplier baru, KPPN harus input manual
- No rek Supplier dari Aplikasi K/L berpotensi tidak aktif

- tidak dapat disalurkan DAK Fisik untuk kegiatan yang tidak didaftarkan pada OMSPAN

#### **Tindakan yang telah dilaksanakan**

- Berkoordinasi dengan Dinas Terkait dan Dit PA dan DJPK
- Berkoordinasi dengan pemda terkait penyaluran Dana Fisik
- Pemahaman peraturan terkait mekanisme baru dana BOS

#### **Rekomendasi Rencana Aksi**

- Aktif berkoordinasi dengan Dit. PA, DJPK, dan Pemerintah Daerah
- Koordinasi dengan Pemda untuk penyaluran dokumen DF tepat waktu
- Mendorong pemda berkoordinasi dengan K/L
- Memahami peraturan terkait TKD yang baru

### **9. Indeks Kualitas Implementasi Digipay**

Implementasi Digipay diukur dari progres capaian implementasi Digipay Satu dalam rangka penggunaan Uang Persediaan yang bersumber dari Rupiah Murni dan/atau PNBPN. Pelaksanaan Digipay diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-7/PB/2022 dan aturan/kebijakan teknis yang diterbitkan Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara, antara lain Surat Direktur PKN Nomor ND-1209/PB.3/2021 tanggal 30 Juli 2021, ND-221/PB.3/2022 tanggal 10 Februari 2022 dan ND-315/PB.3/2023 tanggal 27 Februari 2023. Capaian implementasi Digipay diukur dalam 3 parameter yaitu capaian jumlah satker, jumlah vendor, dan jumlah transaksi.

Formula Capaian =

Indeks Implementasi Digipay = (Indeks Capaian Komponen Satker x 30%) + (Indeks Capaian Komponen Vendor x 10%) + (Indeks Capaian Komponen Transaksi x 60%)

Indeks Capaian Komponen (Satker/Vendor/Transaksi):

- a. Indeks 4 (Sangat baik)  
jika capaian komponen (Satker/Vendor/Transaksi)  $\geq 70\%$
- b. Indeks 3 (Baik)

jika capaian komponen (Satker/Vendor/Transaksi)  $50 \geq x < 70$

c. Indeks 2 (Cukup)

jika capaian komponen (Satker/Vendor/Transaksi)  $30 \geq x < 50$

d. Indeks 1 (Kurang)

jika capaian komponen (Satker/Vendor/Transaksi)  $< 30$

$$\text{Capaian komponen satker/vendor/transaksi} = \frac{\text{Realisasi komponen satker/vendor/transaksi}}{\text{Target komponen satker/vendor/transaksi}} \times 100\%$$

Target Komponen:

a. Satker: Q1 = 10% ; Q2 = 20% ; Q3 = 30% ; Q4 = 15%

Total target komponen Satker adalah 75% dari total jumlah satker pengelola UP pada Bank Mitra Digipay lingkup Kanwil DJPb/KPPN yang terdaftar pada Digipay Satu

b. Vendor: Q1 = 5% ; Q2 = 20% ; Q3 = 20% ; Q4 = 5%

Total target komponen Vendor adalah 50% dari target tahunan jumlah satker pengelola UP yang terdaftar dalam Digipay Satu lingkup Kanwil DJPb/KPPN

c. Transaksi: Q1 = 10% ; Q2 = 20% ; Q3 = 30% ; Q4 = 15%

Total target komponen Transaksi adalah 75% dari target tahunan jumlah satker pengelola UP (distribusi satker tidak diperhitungkan)

Keterangan:

1. Capaian komponen Satker dan Vendor di tahun sebelumnya dapat digunakan sepanjang user Satker/Vendor telah terdaftar juga pada Digipay Satu

2. Capaian komponen Transaksi:

a. Dihitung berdasarkan capaian transaksi pada tahun 2023 (tahun sebelumnya tidak dapat digunakan)

b. Capaian transaksi TW I dihitung berdasarkan transaksi pada Digipay existing sampai dengan masa cut off transaksi (s.d. 31 Maret 2023)

c. Capaian transaksi TW II - TW IV dihitung berdasarkan transaksi pada Digipay Satu

3. Bank Mitra Digipay adalah bank mitra satker K/L menyimpan UP yg telah menyelesaikan tahapan interkoneksi dengan Digipay Satu dan dengan payment gateway serta dinyatakan telah siap operasional.

4. Dit. PKN akan menyampaikan informasi daftar Bank Mitra Digipay secara berkala kepada Kanwil/KPPN

IKU ini merupakan IKU Baru dan bersifat progresif sehingga perhitungan capaian akhirnya diambil pada akhir periode penilaian. Berikut Tabel realisasi IKU ini:

Tabel 3.29

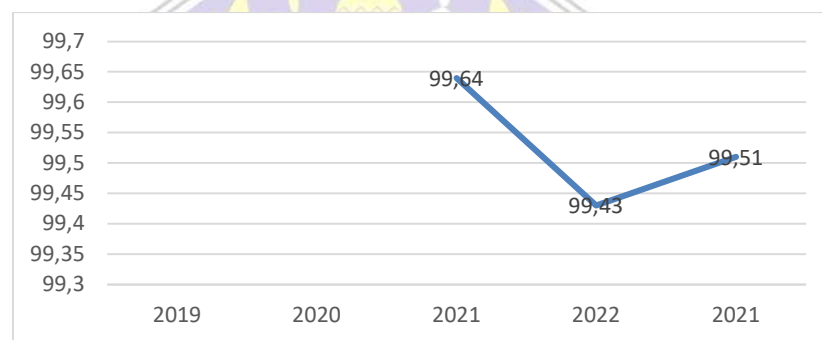
**Penjelasan Capaian IKU Indeks Kualitas Implementasi Digipay**

|                 | Triwulan I | Triwulan II | Triwulan III | Triwulan IV |
|-----------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| Capaian Digipay | 4          | 4           | 4            | 4           |

Capaian IKU ini telah melebihi target yang ditetapkan pada awal tahun. Sementara Capaian IKU ini pada tahun 2019 sebesar 95.78; tahun 2020 sebesar 96.53; pada tahun 2021 sebesar 99.64; tahun 2022 sebesar 99,43; dan pada tahun 2023 sebesar 99,51.

Grafik 3.8

**Capaian IKU Indeks Kualitas Implementasi Digipay 2019-2023**



Tabel 3.29

**Perbandingan Target dan Realisasi IKU Indeks Kualitas Implementasi Digipay**

| IKU                                  | 2019   |       | 2020   |       | 2021   |       | 2022   |       | 2023   |       |
|--------------------------------------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|
|                                      | Target | Real. | Target | Real. | Target | Real. | Target | Real. | Target | Real. |
| Indeks Kualitas Implementasi Digipay | -      | -     | -      | -     | 89%    | 99,64 | 90%    | 99,43 | 90     | 99,51 |

**Tujuan :**

Mengukur tingkat keberhasilan implementasi Digipay Satu di wilayah kerja Kanwil/KPPN sebagai bagian dari langkah strategis modernisasi pengelolaan kas negara dan upaya peningkatan inklusi keuangan serta pemberdayaan UMKM.

**Isu Utama :**

Isu terkait penggunaan DIGIPay saat ini baru dapat dilakukan untuk pengadaan dan pembayaran kepada rekanan yang memiliki rekening di bank penyedia platform aplikasi DIGIPay telah diselesaikan melalui DIGIPay 1. Kurang komitmen dan kesadaran satker dalam belanja secara cashless.

**Implikasi :**

Eksklusivitas platform ini berdampak pada perbedaan teknis DIGIPay yang disediakan oleh bank yang berbeda.

**Tindakan yang telah dilaksanakan :**

- Mengenalkan potensi partisipasi satker melalui sistem DIGIPay untuk mendukung upaya terkini dari pemerintah, khususnya dalam menumbuhkan kegiatan perekonomian pasca pandemi.
- Membantu akses kelompok potensial kepada kemanfaatan sistem DIGIPay
- Mengenalkan satker dengan implementasi DigiPay dengan melibatkan bank himbara melalui sosialisasi yang komprehensif

**Rekomendasi Rencana Aksi :**

- FGD melibatkan pihak bank
- Pendampingan satker yang mengalami permasalahan terkait DIGIPay

**10. Indeks Kualitas Pelaksanaan Rekonsiliasi Tingkat UAKPA**

Kepatuhan satker dalam melakukan rekonsiliasi dan menjaga kualitas data laporan keuangan, diukur melalui aplikasi MonSAKTI, meliputi kelengkapan data dan penyelesaian transaksi serta rekonsiliasi eksternal UAKPA.

Realisasi IKU dihitung berdasarkan :

Kelengkapan Data dan Penyelesaian Transaksi

pada Aplikasi MonSAKTI terdapat fitur todolist yang menampilkan data dan transaksi terkait pelaporan keuangan yang harus diselesaikan satker setiap periode rekonsiliasi, terdiri dari:

1. Persediaan/Aset belum didetilkkan



2. RK Persediaan/Aset belum RM

3. Persediaan/Aset belum validasi approve

Capaian kelengkapan data dan penyelesaian transaksi diperoleh dari jumlah satker yang terbebas dari validasi todolist sebagaimana dimaksud.

Rekonsiliasi Ekternal :

1. Ketepatan waktu rekonsiliasi

Perbandingan jumlah Satker yang melakukan rekonsiliasi laporan keuangan secara tepat waktu dengan jumlah satker yang wajib melakukan rekonsiliasi laporan keuangan

(dihitung berdasar jumlah satker yang mendapatkan SHR tidak kena sanksi pada periode rekonsiliasi berkenaan)

2. Keandalan rekonsiliasi:

Perbandingan jumlah satker yang melakukan rekonsiliasi laporan keuangan secara andal, dengan jumlah satker yang wajib melakukan rekonsiliasi laporan keuangan Keandalan data dihitung berdasarkan jumlah satker yang tidak memiliki TDK (Transaksi Dalam Konfirmasi) belanja bruto dan TDK Kas di Bendahara Pengeluaran (ambang batas suspensi 0%) sesuai dengan SHR (Surat Hasil Rekonsiliasi) yang diterbitkan

Pengisian realisasi IKU disesuaikan dengan siklus dan karakteristik laporan keuangan yang bersifat historical report.

Cakupan data setiap triwulan adalah sebagai berikut:

Tw 1 2022 = Des 2022 - Feb 2023

Tw 2 2022 = Mar - Mei 2023

Tw 3 2022 = Jun - Agt 2023

Tw 4 2022 = Sep - Nov 2023

Capaian IKU ini telah melebihi target yang telah ditetapkan pada awal tahun. IKU ini merupakan formulasi IKU baru di tahun 2023 sehingga belum memiliki data capaian historis

**Tabel 3.30**

**Penjelasan Capaian Persentase Akurasi Perencanaan Kas**

|         | Triwulan I | Triwulan II | Triwulan III | Triwulan IV |
|---------|------------|-------------|--------------|-------------|
| Capaian | 4          | 4           | 4            | 4           |

**Tujuan IKU:**

Untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan seluruh UAKPA lingkup wilayah kerja KPPN.

**Isu Utama:**

Masih terdapat satker yang kurang paham/tidak tahu jadwal periode open dan closed period.

**Implikasi:**

Keterlambatan akan berpengaruh pada capaian IKU

**Tindakan yang telah dilaksanakan**

- Penerbitan sanksi bagi satuan kerja yang terlambat
- Mengingatkan kepada satker melalui surat, telepon, dan telegram mengenai batas waktu / open period bulan berkenaan

**Rekomendasi Rencana Aksi**

- Memberikan pemahaman dan melakukan monitoring dan evaluasi kepada satker
- Memberikan pemahaman kepada satker pentingnya koordinasi internal

**11. Indeks Kualitas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara K/L**

Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara oleh Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN yang menggunakan aplikasi pengelolaan rekening yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan c.q. DJPb.

Berdasar Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-3303/PB/2018, pengelolaan rekening tersebut menggunakan aplikasi SPRINT (Sistem Pengelolaan Rekening Terintegrasi) sejak 2018.

Sebagaimana ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN, penyampaian LPJ bendahara beserta

lampirannya kepada KPPN dilaksanakan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setelah bulan yang bersangkutan berakhir.

LPJ Bendahara dinyatakan andal jika LPJ tersebut telah diverifikasi dan dinyatakan benar oleh Kuasa BUN KPPN sesuai indikator verifikasi LPJ yang telah ditetapkan.

Pengisian realisasi IKU disesuaikan dengan siklus dan karakteristik penyusunan LPJ Bendahara yang bersifat historical report. Artinya, untuk data realisasi IKU triwulan I tahun 2023 merupakan rata-rata data bulan Desember 2022, bulan Januari dan Februari tahun 2023, begitupun seterusnya.

Formula:

|                                                                                                                              |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| $\frac{\sum \text{LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu}}{\sum \text{LPJ Bendahara yang seharusnya disampaikan ke KPPN}}$ | $\times 100 \%$ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|

Indeks 4: Jika memperoleh nilai  $99,5\% < x \leq 100\%$  LPJ Bendahara yang diterima secara andal dan tepat waktu

Indeks 3,5: Jika memperoleh nilai  $99 < x \leq 99,5 \%$  LPJ Bendahara yang diterima secara andal dan tepat waktu

Indeks 3: jika memperoleh nilai  $98,5 \leq x \leq 99 \%$  LPJ Bendahara yang diterima secara andal dan tepat waktu

Indeks 2,5: jika memperoleh nilai  $95 < x < 98,5 \%$  LPJ Bendahara yang diterima secara andal dan tepat waktu

Indeks 2: jika memperoleh nilai  $90 < x \leq 95 \%$  LPJ Bendahara yang diterima secara andal dan tepat waktu

Indeks 1: jika memperoleh nilai  $\leq 90 \%$  LPJ Bendahara yang diterima secara andal dan tepat waktu

Capaian IKU ini telah melebihi target yang telah ditetapkan pada awal tahun. IKU ini merupakan formulasi IKU baru di tahun 2023 sehingga belum memiliki data capaian historis

**Tabel 3.31**

**Penjelasan Capaian Indeks Kualitas Laporan Pertanggungjawaban  
Bendahara K/L**

|                                          | Triwulan I | Triwulan II | Triwulan III | Triwulan IV |
|------------------------------------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu | 222        | 222         | 222          | 222         |

|                                                   |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------|------|------|------|------|
| LPJ Bendahara yang seharusnya disampaikan ke KPPN | 222  | 222  | 222  | 222  |
| Capaian                                           | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Indeks                                            | 4    | 4    | 4    | 4    |

**Tujuan IKU:**

IKU ini bertujuan untuk mengukur kualitas dan tingkat kepatuhan Bendahara Satker dalam menyusun dan menyampaikan LPJ Bendahara.

**Isu Utama:**

Kurangnya pemahaman petugas satker dalam mengerjakan LPJ sehingga masih banyak kesalahan.

**Implikasi:**

Penumpukan LPJ terjadi di hari-hari terakhir

**Tindakan yang telah dilaksanakan**

- Penerbitan sanksi bagi satuan kerja yang terlambat menyampaikan LPJ ke KPPN
- Berkoordinasi dengan satker melalui telepon, WA, dan/atau telegram mengenai penegasan kewajiban satker dalam penyampaian LPJ Bendahara

**Rekomendasi Rencana Aksi**

- Mendorong penunjukan bendahara yang bersertifikasi
- Mendorong Bimtek/ Pelatihan melalui e-learning

**12. Tingkat Implementasi Penajaman Tugas *Treasury* dan *Financial Advisory***

Instansi vertikal DJPb telah mengalami pengembangan tugas dan fungsi, terutama sebagai Treasurer, Regional Chief Economist dan Financial Advisor, sehingga dapat terlibat lebih dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di daerah. Untuk itu, telah diimplementasikan Shadow Organization sebagai bentuk penajaman tugas dan fungsi di Unit Kerja Kantor Vertikal DJPb.

IKU ini diukur berdasarkan efektivitas implementasi Shadow Organization yang di-breakdown atas:

1. Keorganisasian
2. Proses bisnis dan/atau kegiatan
3. Pengembangan kapasitas SDM
4. Output

IKU ini merupakan wujud sinergi dan kolaborasi dalam percepatan penajaman tugas agar organisasi DJPb makin baik dalam menghadapi serta mengantisipasi perkembangan perekonomian regional, nasional, dan global. IKU ini bersifat direct cascading dari Dirjen Perbendaharaan ke Sekretaris DJPb dan indirect cascading dari Dirjen Perbendaharaan ke seluruh Kepala Kanwil DJPb dan seluruh Kepala KPPN. IKU ini juga bersifat direct cascading dari Kepala KPPN ke seluruh Pejabat Pengawas di lingkup KPPN. Direct cascading tersebut sebagai wujud Kemenkeu Satu - DJPb Satu - KPPN Satu dengan tujuan agar terjadi percepatan penajaman tugas DJPb. Direct cascading tersebut merupakan tanggung renteng/kolektif tanpa pengurangan nilai sebagaimana diatur pada KMK-300/2022 tentang Manajemen Kinerja di lingkungan Kemenkeu.

**Formula:**

Capaian IKU per triwulan = (Capaian Komponen I x bobot) + (Capaian Komponen II x bobot) + (Capaian Komponen III x bobot) + (Capaian Komponen IV x bobot)

Capaian IKU ini diukur dari 4 komponen, yaitu Organisasi, Kegiatan, SDM, dan Output, dengan trajectory dan bobot sebagai berikut:

Capaian tiap triwulan merupakan total nilai masing-masing komponen sesuai dengan bobotnya.

| Triwulan I     | Triwulan II  | Triwulan III | Triwulan IV  |
|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Organisasi 25% | 0%           | 0%           | 0%           |
| Kegiatan 25%   | Kegiatan 25% | Kegiatan 25% | Kegiatan 50% |
| SDM 25%        | SDM 50%      | SDM 50%      | 0%           |
| Output 25%     | Output 25%   | Output 25%   | Output 50%   |

Perhitungan Capaian IKU menggunakan Kertas Kerja TREFA

**Komponen I:**

1. SK Tim Implementasi SO (Triwulan I)

**Capaian Komponen I:**

Jika telah diterbitkan SK Tim Implementasi Shadow Organization pada Triwulan I maka komponen I bernilai 100%

**Komponen II (Kegiatan merupakan kegiatan internal dalam meningkatkan pelaksanaan penajaman tugas):**

Treasurer:

1. Asistensi dan Evaluasi Aplikasi SAKTI (Bulanan)
2. Asistensi Digitalisasi Pembayaran (KKP, Digipay, Virtual Account) (Bulanan)
3. Sosialisasi/FGD/Monev Pelaksanaan Anggaran (Bulanan)
4. Sosialisasi/FGD/Monev Akuntansi Pelaporan Keuangan (Bulanan)
5. Pembinaan Pejabat Perbendaharaan (Bulanan)
6. Sosialisasi/FGD/Monev cash management (Triwulanan)
7. Pembinaan Pejabat Pengelola Perbendaharaan/Jafung Perbendaharaan (one one one meeting, FGD, sosialisasi, dll) (Triwulanan)

Regional Economist

1. Press Release APBN di wilayah KPPN (Bulanan)

Financial Advisory

1. Sosialisasi/FGD Penyaluran TKD (Semesteran)
2. Monitoring, bimbingan, dan konsultasi penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa (Triwulanan)
3. Monitoring dan Pemberdayaan UMKM (UMi) (Triwulanan)

|                                 |                                                  |              |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|
| <b>Capaian komponen II</b><br>= | <b>Jumlah kegiatan yang telah dilakukan</b>      | <b>X100%</b> |
|                                 | <b>Jumlah kegiatan yang seharusnya dilakukan</b> |              |

Keterangan:

1. Kegiatan semesteran dapat dipilih untuk dilakukan pada suatu triwulan dalam suatu semester (misal: kegiatan FA.3. dapat dilakukan pada twI atau twII pada semester I, begitu juga dengan semester II dapat dipilih dilakukan pada twIII atau twIV). Pemilihan tersebut menjadi pembagi capaian IKU pada suatu triwulan.
2. Jika seluruh kegiatan telah dilakukan pada suatu triwulan maka komponen II bernilai 100%

**Komponen III (pengembangan kompetensi SDM):****Triwulan I:**

1. Program Sharing Session APBD
2. PJJ Kurasi UMKM

**Triwulan II:**

1. E-Learning Pengantar Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah
2. PJJ Analisis Kredit UMKM

**Triwulan III:**

1. E-Learning Basic of Macroeconomics: Concepts and Policies
2. PJJ Monitoring, Evaluasi dan Sosialisasi Pembiayaan Ultra Mikro (UMi)

|                                  |                                                                        |              |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Capaian komponen III</b><br>= | <b>Jumlah kegiatan pengembangan kompetensi yang telah diikuti</b>      | <b>X100%</b> |
|                                  | <b>Jumlah kegiatan pengembangan kompetensi yang seharusnya diikuti</b> |              |



**Keterangan:**

1. Suatu kegiatan pengembangan kompetensi dinyatakan telah dilakukan jika suatu KPPN (minimal 1 pejabat/pegawai) telah mengikuti kegiatan tersebut
2. Jika seluruh kegiatan pengembangan kompetensi telah diikuti maka bernilai 100%

**Komponen IV (Output):****Treasurer:**

1. Analisis Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja (Triwulanan)
2. Analisis Laporan Keuangan Satuan Kerja (Triwulanan)
3. Analisis Laporan Penggunaan Pembayaran Digital (Triwulanan)
4. Analisis Pelaksanaan Money Bank Presepsi (Triwulanan)

**Regional Economist:**

1. Hasil Analisis Tematik Perekonomian Daerah. (Tahunan)

**Financial Advisory:**

1. Analisis Pelaksanaan Transfer Ke Daerah (Triwulanan)
2. Laporan Keekonomian Debitur UMi (Semesteran)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|
| Capaian komponen IV<br>=                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Jumlah output yang telah ada      | X100% |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jumlah output yang seharusnya ada |       |
| <p>Keterangan:</p> <p>1. Output semesteran/tahunan dapat dipilih untuk suatu triwulan dalam suatu semester/tahun (misal: output RE. 1. dapat dilakukan pada twl/II/III/IV). Pemilihan tersebut menjadi pembagi capaian IKU pada suatu triwulan.</p> <p>2. Jika seluruh output ada maka komponen IV bernilai 100%</p> |                                   |       |
| Capaian tiap triwulan merupakan total nilai masing-masing komponen sesuai dengan bobotnya.                                                                                                                                                                                                                           |                                   |       |

IKU ini ditetapkan dengan target 80% dari skala 100% dan penilaian dilakukan setiap triwulan.

Capaian IKU ini telah melebihi target yang telah ditetapkan pada awal tahun. IKU ini merupakan formulasi IKU baru di tahun 2023 sehingga belum memiliki data capaian historis

**Tabel 3.32**

**Penjelasan Capaian IKU Tingkat Implementasi Penajaman Tugas *Treasury* dan *Financial Advisory***

|            | Triwulan I | Triwulan II | Triwulan III | Triwulan IV |
|------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| Organisasi | 25%        | 0%          | 0%           | 0%          |
| Kegiatan   | 24,72%     | 25%         | 25%          | 50%         |
| SDM        | 25%        | 50%         | 50%          | 0%          |
| Output     | 25%        | 25%         | 25%          | 50%         |
| Capaian    | 99,72%     | 100%        | 100%         | 100%        |

**Tujuan IKU:**

Mendukung penguatan tugas dan fungsi DJPb sebagai *treasurer*, *regional economist*, dan *financial advisor*.

**Isu Utama:**

- Penjelasan manual IKI serta format pelaporan terkait Tingkat implementasi penajaman tugas Treasury dan Financial Advisory baru disampaikan pada akhir triwulan I
- Tidak adanya penjelasan khusus mengenai format pelaporan pada tiap komponen.

**Implikasi:**

Adanya kemungkinan ketidaktercapaiannya IKI Tingkat implementasi penajaman tugas *Treasury* dan *Financial Advisory*.

**Tindakan yang telah dilaksanakan**

- Melaksanakan seluruh rangkaian standardisasi kegiatan manajemen KPPN
- Melengkapi dokumentasi terkait kegiatan yang telah dilaksanakan

**Rekomendasi Rencana Aksi**

- Melakukan koordinasi antar seksi terkait pemenuhan kegiatan implementasi penajaman tugas *treasury* dan *financial advisory*

### 13. Tingkat kualitas pengelolaan kinerja berbasis *Strategy Focused Organization*

Dalam rangka mendorong komitmen pimpinan dan seluruh pegawai terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja di masing-masing unit lingkup DJPb, telah disampaikan matriks langkah-langkah peningkatan kualitas pengelolaan kinerja.

Langkah-langkah peningkatan kualitas pengelolaan kinerja dimaksud merupakan panduan bagi unit kerja lingkup DJPb untuk melaksanakan action plan yang implementatif berdasarkan prinsip-prinsip *Strategy Focused Organization* (SFO). Sebagai bentuk apresiasi terhadap upaya-upaya peningkatan kualitas pengelolaan kinerja di lingkungan DJPb, Kantor Pusat DJPb melaksanakan penilaian terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja di unit masing-masing.

Penilaian dimaksud dilaksanakan berdasarkan parameter sebagai berikut:

- a. Nilai kuantitatif pemenuhan unsur-unsur peningkatan kualitas pengelolaan kinerja periode sampai dengan triwulan III 2023.
- b. Nilai NKO Unit periode tahunan 2022.

Formula IKU ini adalah Hasil penilaian kualitas pengelolaan kinerja oleh Kantor Pusat DJPb.

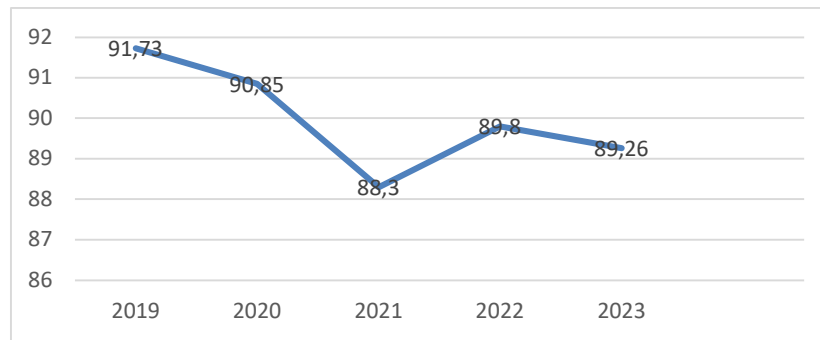
Target IKU ini telah ditetapkan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Indikator Kinerja Utama ini bersifat take last known value dan tahunan.

Capaian IKU ini berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Jenderal Perbendaharaan Nomor ND-187/PB.1/2024 tanggal 15 Januari 2024 hal Penyampaian Hasil Penilaian Pelaksanaan Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2023. KPPN Gorontalo mendapatkan nilai 89,26.

Capaian IKU ini telah melebihi target yang telah ditetapkan pada awal tahun. Sementara capaian IKU ini pada tahun 2019 sebesar 93.87%, pada tahun 2020 sebesar 92.59%, pada tahun 2021 sebesar 93.28%, pada tahun 2022 sebesar 89.8%, dan pada tahun 2023 sebesar 89.26%

### Grafik 3.9

**Capaian IKU Tingkat kualitas pengelolaan kinerja berbasis *Strategy Focused Organization* 2019-2023**



Tabel 3.33

**Perbandingan Target dan Realisasi IKU Tingkat kualitas pengelolaan kinerja berbasis *Strategy Focused Organization***

| IKU                                                                                | 2019  |        | 2020  |        | 2021  |        | 2022  |       | 2023   |       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|
|                                                                                    | Real. | Target | Real. | Target | Real. | Target | Real. | Real. | Target | Real. |
| Tingkat kualitas pengelolaan kinerja berbasis <i>Strategy Focused Organization</i> | 83    | 91,73  | 83    | 90,85  | 84    | 88,3   | 84,5  | 89,8  | 85     | 89,26 |

**Tujuan IKU:**

Meningkatkan pelaksanaan pengelolaan kinerja di KPPN.

**Isu Utama:**

Dalam rangka mendorong komitmen pimpinan dan seluruh pegawai terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja di KPPN Gorontalo dilakukan langkah-langkah peningkatan kualitas kinerja. Sebagai bentuk apresiasi terhadap upaya-upaya peningkatan kualitas kinerja di lingkungan ditjen perbendaharaan, kantor pusat ditjen perbendaharaan melakukan penilaian terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja di unit-unit masing-masing.

**Implikasi:**

Berpengaruh pada nilai IKI Tingkat kualitas pengelolaan kinerja berbasis *Strategy Focused Organization* TA 2023.

**Tindakan yang telah dilaksanakan**

- Melaksanakan kegiatan sesuai matriks *Strategy Focused Organization*
- Memenuhi dokumen sesuai matriks *Strategy Focused Organization*

**Rekomendasi Rencana Aksi**

- Merutinkan pelaksanaan dialog kinerja organisasi
- Mempedomani matriks dalam peningkatan pengelolaan kinerja

**14. Tingkat Implementasi *Learning Organization***

Tingkat Implementasi learning organization merupakan nilai yang merepresentasikan tingkat implementasi unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai learning organization. Learning organization (organisasi pembelajar) adalah organisasi yang secara terus menerus dan terencana memfasilitasi anggotanya agar mampu terus menerus berkembang dan mentransformasi diri baik secara kolektif maupun individual dalam usaha mencapai hasil yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan yang dirasakan bersama antara organisasi dan individu di dalamnya (KEP-140/PP/2017).

Aktivitas implementasi LO diukur melalui 8 (delapan) subkomponen, sebagai berikut:

a. Pendokumentasian dan pengorganisasian:

mengukur partisipasi unit kerja dalam pendokumentasian pengetahuan terkait pengelolaan keuangan negara yang diwujudkan dalam penyusunan aset intelektual dan publikasinya dalam Pusat Pengetahuan pada Kemenkeu Learning Center 2.

b. Analisis kebutuhan pembelajaran:

mengukur partisipasi unit kerja dalam menganalisis kebutuhan pembelajaran pegawai berdasarkan kinerja yang dilaksanakan oleh masing-masing individu melalui Dialog Kinerja Individu (DKI).

c. Desain pembelajaran:

mengukur partisipasi unit kerja dalam menentukan jenis dan model pembelajaran yang dibutuhkan pegawai dalam 1 (satu) tahun melalui penyusunan Individual Development Plan (IDP) Sesuai ketentuan pada KMK 350/KMK/011/2022.

d. Evaluasi pembelajaran:

mengukur partisipasi unit kerja dalam mendorong penyelesaian penugasan pembelajaran oleh pegawai dan partisipasi dalam pelaksanaan evaluasi pascapembelajaran yang diselenggarakan oleh BPPK.

e. Pembelajaran terstruktur:

mengukur akurasi pengiriman peserta pelatihan oleh unit kerja dalam program pembelajaran yang diselenggarakan oleh BPPK.

f. Belajar dari pengalaman kerja:

mengukur tingkat akomodasi unit kerja bagi pegawai untuk melaksanakan pembelajaran melalui praktik langsung dalam pekerjaan.

g. Kinerja organisasi:

mengukur dampak pembelajaran yang dilaksanakan pegawai terhadap perbaikan kinerja organisasi, melalui penciptaan inovasi di unit kerja.

h. Pimpinan sebagai pengajar:

mengukur keterlibatan pimpinan dalam proses pembelajaran di unit kerja melalui perannya sebagai pengajar (sumber belajar) dalam berbagai kegiatan.

Nilai Capaian IKU diperoleh dari hasil verifikasi atas dokumen bukti pendukung atas aktivitas LO yang dijabarkan pada Komponen dan Subkomponen penyusun IKU LO DJPb Tahun 2023 di atas. Dokumen bukti diunggah pada Aplikasi Training Modul Learning Organization. Selanjutnya, dokumen tersebut akan diverifikasi oleh Tim Implementasi LO Pusat pada Bagian SDM Sekretariat DJPb.

Capaian IKU ini berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Jenderal Perbendaharaan Nomor ND-106/PB.1/2024 tanggal 09 Januari 2024 hal Penyampaian Capaian Indikator Kinerja Utama Tingkat Implementasi *Learning Organization* Direktorat Jenderal Perbendaharaan Triwulan IV 2023. KPPN Gorontalo mendapatkan nilai 100.



Capaian IKU ini telah melebihi target yang telah ditetapkan pada awal tahun. IKU ini merupakan formulasi IKU baru di tahun 2023 sehingga belum memiliki data capaian historis

**Tabel 3.34**

**Penjelasan Capaian Tingkat Implementasi *Learning Organization***

|         | Triwulan I | Triwulan II | Triwulan III | Triwulan IV |
|---------|------------|-------------|--------------|-------------|
| Target  | 10         | 40          | 60           | 85          |
| Capaian | 40.84      | 63.63       | 95.75        | 100         |

**Tujuan IKU:**

IKU ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana kualitas Unit Kerja di lingkungan DJPb sebagai organisasi pembelajar dengan dukungan strategi Kemenkeu Corporate University sesuai KMK nomor 283/KMK.011/2021 dan KMK nomor 2/KM.011/2022.

**Isu Utama:**

Pemenuhan dokumen untuk tiap-tiap subkomponen yang harus terus dilakukan secara berkala

**Implikasi:**

Nilai capaian IKI Tingkat Implementasi LO dapat terpenuhi untuk triwulan I, namun secara keseluruhan belum mendapatkan skor tertinggi

**Tindakan yang telah dilaksanakan**

- Telah dilaksanakan kegiatan sesuai dengan sub-komponen implementasi LO
- Telah dipenuhi dokumen terkait implementasi LO.

**Rekomendasi Rencana Aksi**

- Memenuhi kegiatan dan dokumen sesuai dengan output yang diminta pada panduan implementasi LO sesuai dengan penjelasan
- Memberikan reminder kepada para peserta pelatihan untuk mengisi EPASPEM serta melakukan upload sertifikat pelatihan

### 15. Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal

Nilai hasil evaluasi merupakan hasil penilaian terhadap pelaksanaan tugas kepatuhan internal yang diimplementasikan pada unit kerja di lingkungan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Penilaian tersebut dilakukan oleh Kantor Wilayah DJPb c.q. Bidang SKKI.

Penilaian dilaksanakan dengan berpedoman pada Kepdirjen Perbendaharaan No. KEP-239/PB/2020 tentang Pedoman Penilaian Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Unsur-unsur penilaian pelaksanaan tugas kepatuhan internal pada Kanwil DJPb, terdiri atas:

1. Penerapan manajemen risiko (bobot: 35%)
2. Pelaksanaan pemantauan pengendalian intern, kode etik/disiplin pegawai, dan pengendalian gratifikasi (bobot: 55%)
3. Pengelolaan pengaduan dan rekomendasi Laporan Hasil Audit (LHA) Aparat Pengawas Fungsional (bobot: 10%)

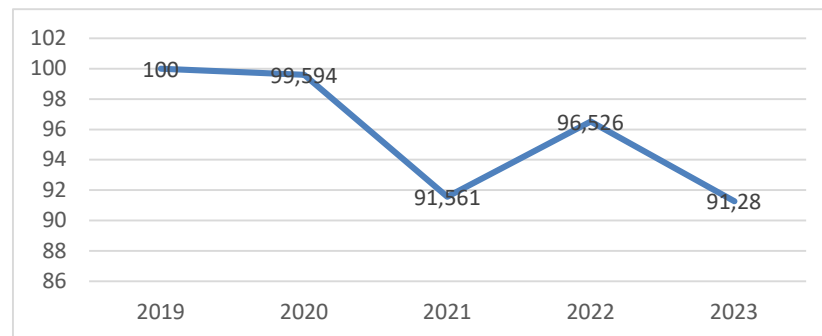
Formula IKU ini adalah Hasil penilaian pelaksanaan tugas KI dari Kantor Wilayah DJPb.

Target IKU ini telah ditetapkan Oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Indikator Kinerja Utama ini bersifat take last known dan tahunan. Capaian IKU ini berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo Nomor KEP-131/WPB.29/2023 tanggal 4 Desember 2023 tentang Penetapan Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo Tahun 2023. KPPN Gorontalo mendapatkan nilai 91,28.

Capaian IKU ini telah melebihi target yang telah ditetapkan pada awal tahun. Sementara Capaian IKU ini pada tahun 2019 sebesar 100, pada tahun 2020 sebesar 99,594, pada tahun 2021 sebesar 91,561, pada tahun 2022 sebesar 96,526, dan pada tahun 2023 sebesar 91,28.

Grafik 3.10

**Capaian IKU Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal 2019-2023**



Tabel 3.35

**Perbandingan Target dan Realisasi IKU Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal**

| IKU                                           | 2019   |       | 2020   |        | 2021   |        | 2022   |        | 2023   |       |
|-----------------------------------------------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
|                                               | Target | Real. | Target | Real.  | Target | Real.  | Target | Real.  | Target | Real. |
| Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal | 90     | 100   | 80     | 99.594 | 83     | 91.561 | 85     | 96.526 | 86     | 91.28 |

**Tujuan:**

Untuk mendukung peningkatan pelaksanaan tugas kepatuhan internal di KPPN

**Isu Utama:**

Pelaporan/evaluasi atas pelaksanaan pemantauan pengendalian intern bersifat dinamis sehingga penyesuaian-penyesuaian terkait dengan format, mekanisme dan periode harus segera dilakukan secara konsisten karena akan berdampak pada hasil penilaian evaluasi. Penilaian hasil evaluasi penerapan PPI dilakukan oleh Kanwil DJPb.

**Implikasi:**

Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal yang kurang maksimal

**Tindakan yang telah dilaksanakan**

- Menyusun laporan dan menyampaikannya secara tepat waktu.
- Menyusun laporan PPI dengan format baru sesuai KMK 940
- Melakukan update ketentuan terkait pemantauan pengendalian intern
- Menyusun laporan PPI dengan format baru sesuai KMK Nomor 940 Tahun 2017 tentang Kerangka Kerja Kerangka Kerja Pemantauan Pengendalian Internal dan Pedoman Pemantauan Pengendalian Internal Di Lingkungan Kementerian Keuangan

**Rekomendasi Rencana Aksi**

Membuat kalender pelaporan KI

**16. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN**

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Perhitungan IKU "Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran" Kementerian Keuangan mengacu pada Surat Edaran Nomor 8/MK.1/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Tata Cara Penghitungan Indikator Kinerja Utama Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kemenkeu.

Ruang lingkup perhitungan IKU "Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran" mencakup aspek kualitas serta aspek tata kelola dan administratif yang ada pada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Aspek kualitas didapat atas capaian pada evaluasi kinerja anggaran pada SMART DJA. Aspek tata kelola dan administratif didapat atas capaian kualitas pelaksanaan anggaran pada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.

Formula perhitungan realisasi IKU=

Capaian IKU PKPA  
Triwulan I = Capaian IKPA Januari s.d. Maret

Capaian IKU PKPA  
Triwulan II = Capaian IKPA Januari s.d. Juni

Capaian IKU PKPA  
Triwulan III = Capaian IKPA Januari s.d. September`

Capaian IKU PKPA  
Triwulan IV = 40% Capaian IKPA Januari s.d. Desember + 60%  
Capaian SMART

Target IKU ini telah ditetapkan Oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Indikator Kinerja Utama ini bersifat average dan triwulanan. Berikut tabel perhitungan realisasi IKU ini.

Tabel 3.36

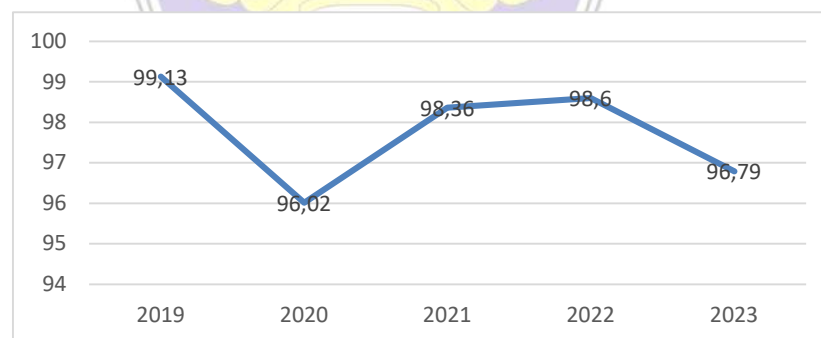
**Penjelasan Capaian IKU Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN**

|         | Triwulan I | Triwulan II | Triwulan III | Triwulan IV |
|---------|------------|-------------|--------------|-------------|
| Capaian | 100%       | 103,87%     | 99,60%       | 96.79%      |

Target IKU ini ditetapkan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Capaian IKU ini telah melebihi target yang telah ditetapkan pada awal tahun. Sementara Capaian IKU ini pada tahun 2016 sebesar 101.25%, 2017 sebesar 100.99%, 2018 sebesar 98,25%, pada tahun 2019 sebesar 99.13%, 2020 sebesar 96.02% dan pada tahun 2021 sebesar 98,36%

Grafik 3.11

**Capaian IKU Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN 2019-2023**



Tabel 3.37

**Perbandingan Target dan Realisasi IKU Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN**

| IKU | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----|------|------|------|------|------|
|-----|------|------|------|------|------|

|                                               | Target | Real. | Target | Real. | Target | Real. | Target | Real. | Target | Real. |
|-----------------------------------------------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|
| Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN | 95     | 99.13 | 95     | 96.02 | 95,5   | 98,36 | 95,5   | 98,6  | 95,5   | 96,79 |

**Tujuan:**

Mengukur kualitas pelaksanaan anggaran sesuai ketentuan IKPA dan SMART.

**Isu Utama**

Capaian IKU ini mencerminkan capaian output terkait kinerja pelaksanaan anggaran KPPN sebagai satker. Unsur yang diukur pada IKU ini dilihat dari penilaian komponen hasil dari SMART dan komponen proses dari IKPA.

**Implikasi**

Capaian output, kinerja anggaran serta realisasi satker sesuai yang direncanakan dan optimal.

**Tindakan yang telah dilaksanakan**

- Menyusun rencana kegiatan tahunan satker selama tahun 2023
- Melaksanakan dan mengontrol realisasi satker sesuai RPD Halaman III DIPA

**Rekomendasi Rencana Aksi**

Melakukan monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran setiap bulan dalam rangka kontrol kesesuaian RPD

**17. Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB**

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Satuan kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) dan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan wajib menyampaikan Laporan Keuangan tingkat UAKPA dan UAKPB kepada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) dan Unit



Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W) Ditjen Perbendaharaan. IKU ini digunakan untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan tingkat UAKPA dan UAKPB lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan dengan dilakukan penilaian laporan Keuangan tingkat UAKPA dan UAKPB yang meliputi kriteria:

- a) Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan
- b) keakuratan data laporan keuangan
- c) kepatuhan pelaksanaan anggaran
- d) Penyajian Laporan Keuangan
- e) Partisipasi dan
- f) Laporan BMN.

Formula dari IKU ini adalah total nilai berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh UAPPA-W dan UAPPB-W terhadap Laporan Keuangan tingkat UAKPA dan UAKPB.

Target IKU ini telah ditetapkan Oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan, pada tahun 2023 KPPN Gorontalo memperoleh nilai 96,00 berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo Nomor KEP-101/WPB.29/2023 tentang Penilaian Laporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran dan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo.

**Tabel 3.38**  
**Penjelasan Capaian IKU LK UAKPA/UAKPB**

| No       | Penilaian                                 | KPPN Gorontalo |
|----------|-------------------------------------------|----------------|
| <b>A</b> | <b>Nilai UAKPA</b>                        |                |
|          | Ketepatan penyampaian LK UAKPA            | 10             |
|          | Keakuratan data LK UAKPA                  | 20             |
|          | Kepatuhan pelaksanaan anggaran UAKPA      | 9              |
|          | Penyajian LK UAKPA                        | 10             |
|          | Beban kerja UAKPA                         | 3              |
|          | Partisipasi UAKPA terkait penyelesaian LK | 15             |
|          | <b>Jumlah</b>                             | <b>67,00</b>   |

|          |                                     |              |
|----------|-------------------------------------|--------------|
| <b>B</b> | <b>Nilai UAKPB</b>                  |              |
|          | Ketepatan waktu penyampaian laporan | 5            |
|          | Kebenaran kodefikikasi BMN          | 5            |
|          | Kejelasan CaLK BMN                  | 14           |
|          | Kebenaran dan kelengkapan lampiran  | 5            |
|          | <b>Jumlah</b>                       | <b>29,00</b> |
| <b>C</b> | <b>Jumlah nilai UAKPA dan UAKPB</b> | <b>96,00</b> |

### Tujuan

IKU ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan tingkat UAKPA/UAKPB

### Isu Utama

- Adanya kesalahan pencatatan perolehan KDP.
- Masih ada persediaan yang belum didetailkan pada aplikasi SAKTI.

### Tindakan yang Telah Dilaksanakan

- Telah diselesaikan to do list pada monsakti secara berkala periode sampai dengan maret 2023
- Rekonsiliasi Internal UAKPA-PB
- Telah dilakukan Jurnal reklas KDP ke Aset tetap

### Rekomendasi Rencana Aksi

Membersihkan to-do-list pada MONSAKTI secara berkala

## 18. Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan

Kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan di tahun 2021 berfokus Rencana Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan, Penertiban administrasi rumah negara dan digitalisasi pengelolaan BMN. IKU ini diukur melalui beberapa komponen yakni persentase kesesuaian pelaksanaan RP4 (Rencana Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan), Indeks ketepatan waktu penyampaian RP4 BMN, Persentase penyelesaian penertiban rumah negara, Indeks Kelengkapan Data Rumah Negara pada Profil Master Aset, Persentase Digitalisasi Pengelolaan BMN, Persentase Rekomendasi

Optimalisasi Aset Terindikasi Idle Kementerian Keuangan yang Ditindaklanjuti, dan Indeks Kepatuhan Pengisian RUP.

#### 1. Kesesuaian pelaksanaan RP4

Kesesuaian pelaksanaan RP4 diukur dari Persentase pelaksanaan Penggunaan atas Rencana Penggunaan, persentase pelaksanaan Pemanfaatan atas Rencana Pemanfaatan, persentase pelaksanaan Pemindahtanganan atas Rencana Pemindahtanganan, dan Persentase pelaksanaan Penghapusan atas Rencana Penghapusan. Realisasi pelaksanaan pemindahtanganan dan penghapusan diukur ketika penyampaian usulan pelaksanaan Pemindahtanganan dan Penghapusan dari satuan kerja kepada Unit Eselon I yang ditembuskan kepada Biro Manajemen BMN dan Pengadaan. Realisasi penggunaan dan pemanfaatan diukur ketika satuan kerja mengajukan usulan pelaksanaan penggunaan dan pemanfaatan kepada Unit Eselon I atau Pengelola Barang yang ditembuskan kepada Biro Manajemen BMN dan Pengadaan. Rencana penggunaan yang diukur selain rencana Penggunaan BMN untuk digunakan sendiri sesuai tugas dan fungsi.

#### 2. Indeks ketepatan waktu penyampaian RP4 BMN

Penyusunan RP4 BMN dilaksanakan untuk mewujudkan Perencanaan BMN di lingkungan Kementerian Keuangan yang terarah. RP4 BMN meliputi Rencana Penggunaan, Rencana Pemanfaatan, Rencana Pemindahtanganan, dan Rencana Penghapusan. Ketepatan waktu dalam penyusunan perencanaan BMN diperlukan agar tersedianya waktu yang cukup dan optimal dalam penelitian dan reviu atas usulan Perencanaan BMN untuk dapat dihasilkannya Perencanaan yang efektif dan efisien. Penyampaian RP4 BMN setiap Unit Eselon I kepada Biro Madan. Target waktu berdasarkan jadwal yang ditetapkan oleh Pengguna Barang sesuai dengan KMK nomor 855/KM.1/2018 tentang Perencanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan BMN di Lingkungan Kementerian Keuangan.

#### 3. Persentase penyelesaian penertiban rumah negara

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan rumah negara yang tertib, terarah, dan akuntabel, serta sejalan dengan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Periode 2020-2024. Penertiban Rumah Negara meliputi tiga aspek yaitu : (1) Aspek Administrasi, (2) Aspek Hukum, dan (3) Aspek Fisik. Implementasi kegiatan tahun 2020 Penertiban Rumah Negara dari Aspek Administrasi ini adalah penyelesaian kelengkapan administrasi yang meliputi Surat Keputusan

Penetapan Status Golongan (PSG) Rumah Negara, Penetapan Huruf Daftar Nomor (HDNo) Rumah Negara.

Realisasi PSG diukur pada saat draft penetapan status golongan rumah negara disampaikan kepada Biro Hukum (apabila aturan terkait pelimpahan wewenang pengelolaan BMN telah ditetapkan, realisasi IKU diukur sampai dengan penetapan oleh Kepala Biro Manajemen BMN dan Pengadaan).

Realisasi HDNo diukur pada saat Unit Eselon I/Biro Umum maupun pejabat yang ditunjuk mendaftarkan rumah negara kepada Direktur Jenderal Cipta Karya dalam hal ini (apabila aturan terkait pelimpahan wewenang pengelolaan BMN telah ditetapkan, realisasi IKU diukur sampai dengan permohonan dari Kuasa Pengguna Barang):

- a) Direktur Bina Penataan Bangunan untuk rumah negara yang terletak di wilayah JABODETABEK;
- b) Direktur Bina Penataan Bangunan melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum/Dinas Teknis Provinsi yang membidangi rumah negara di provinsi untuk rumah negara yang terletak di luar wilayah

#### 4. Persentase Completeness Master Aset

Master Aset di aplikasi SIMAN berisi data-data informasi manajemen terkait BMN. Data-data ini kemudian digunakan oleh berbagai plugin di SIMAN seperti sensus BMN, RKBMN, Wasdal, dsb. Pencatatan BMN yang tertib atas aset tersebut penting peranannya dalam mendukung pengambilan keputusan dan monitoring.

Profil BMN yang yang perlu dilengkapi untuk Rumah Negara yaitu

- a. detail bangunan (alamat, luas bangunan, dan luas dasar bangunan),
- b. foto,
- c. dokumen berupa SK PSP, SK Golongan, dan SIP (bila ada)
- d. batas dan GPS,
- e. fasilitas, dan
- f. konstruksi

#### 5. Persentase jumlah tindak lanjut terhadap BMN Dihentikan Penggunaannya

Biro Manajemen Barang Milik Negara dan pengadaan selaku Pengguna Barang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap Kuasa Pengguna Barang yang berada di wilayah kerjanya atas pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara. Pemindahtanganan Barang Milik Negara merupakan pengalihan kepemilikan

Barang Milik Negara dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal pemerintah. Jika suatu Barang Milik Negara dijual, maka Barang Milik Negara tersebut akan diserahkan kepada pembeli Barang Milik Negara setelah pembeli menyetorkan harga Barang Milik Negara yang bersangkutan tersebut ke Kas Negara. Penghapusan merupakan tindakan administratif dari Barang Milik Negara yaitu mengeluarkan data Barang Milik Negara dari catatan yang dibuat. Sehingga tidak terlihat lagi di dalam neraca. IKU diukur dari data BMN yang dihentikan penggunaannya berdasarkan Laporan Barang Pengguna Tahun 2020 unaudited.

#### 6. Persentase Rekomendasi Optimalisasi Aset Terindikasi Idle Kementerian Keuangan

Pengelolaan BMN yang efektif dan efisien apabila seluruh BMN Kementerian Keuangan telah dimanfaatkan secara optimal dalam pemenuhan kebutuhan satker. Upaya untuk mewujudkan pengelolaan BMN yang optimal dilakukan melalui tertib hukum, tertib fisik, dan tertib administrasi.

Dalam rangka melaksanakan optimalisasi tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan melalui Nota Dinas nomor ND-325/PB.1/2021 tanggal 22 Januari 2021 hal Rekomendasi pelaksanaan Optimalisasi Barang Milik Negara di Lingkungan Satuan Kerja Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai rekomendasi optimalisasi BMN terindikasi idle. Penyelesaian tindak lanjut sampai dengan dikeluarkannya produk pengelolaan bmn berupa usulan/persetujuan yang menjadi kewenangan pengguna barang.

#### 7. Indeks Kepatuhan Pengisian RUP

Rencana Umum Pengadaan (RUP) merupakan daftar rencana Pengadaan Barang/Jasa yang akan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah. Salah satu informasi yang terdapat pada RUP adalah rencana pelaksanaan pengadaan. Informasi rencana pelaksanaan pengadaan akan membantu rencana penganggaran Kementerian. Oleh karena itu, satuan kerja wajib untuk mengumumkan Rencana Umum Pengadaan pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) yang dikembangkan oleh LKPP sebelum dilakukan pelaksanaan pengadaannya. Bagian Perencanaan melakukan pemantauan terhadap pengumuman RUP yang dilakukan satuan kerja. Standar ketentuan pengisian RUP dari LKPP yakni paling lambat sebelum dimulainya tahun anggaran berjalan. Sehingga fokus pemantauan yang dilakukan yaitu kepada satuan kerja di lingkungan Kementerian Keuangan yang memiliki

belanja modal dan belanja barang tahun anggaran 2023. Total Anggaran Belanja Barang dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 yang menjadi target pengisian RUP berdasarkan pada Nota Dinas dari Biro Manajemen BMN dan Pengadaan setelah penetapan pagu alokasi anggaran Tahun 2023.

Formula IKU :

**Pengukuran tingkat kualitas pengelolaan BMN diukur dari beberapa komponen yakni:**

**1. Kesesuaian pelaksanaan Rencana Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan**

- a. Persentase pelaksanaan Pemanfaatan atas Rencana Pemanfaatan (target: 100%)

$$\text{Realisasi a} = \frac{\text{Jumlah pelaksanaan sewa BMN}}{\text{Jumlah BMN dalam rencana pemanfaatan}} \times 100\%$$

- b. Persentase pelaksanaan Penggunaan atas Rencana Penggunaan (target: 100%)

$$\text{Realisasi b} = \frac{\text{Jumlah pelaksanaan penggunaan BMN}}{\text{Jumlah BMN dalam rencana penggunaan}} \times 100\%$$

- c. Persentase Pelaksanaan Pemindahtanganan atas Rencana Pemindahtanganan (target: 100%)

$$\text{Realisasi c} = \frac{\text{Jumlah pelaksanaan pemindahtanganan BMN}}{\text{Jumlah BMN dalam rencana pemindahtanganan}} \times 100\%$$

- d. Persentase Pelaksanaan Penghapusan atas Rencana Penghapusan (target: 70%)

$$\text{Realisasi d} = \frac{\text{Jumlah pelaksanaan penghapusan BMN}}{\text{Jumlah BMN dalam rencana penghapusan}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi 1} = \frac{\text{Realisasi a} + \text{Realisasi b} + \text{Realisasi c} + (\text{Realisasi d} / 70\%)}{4} \times 100\%$$

\*: disesuaikan dengan jumlah subkomponen yang menjadi target. Apabila unit tidak memiliki salah satu subkomponen, penyebut disesuaikan dengan jumlah subkomponen yang ditargetkan pada unit tersebut. Contoh jika unit A tidak memiliki rencana penghapusan maka realisasi 1 diukur dengan formula (realisasi a+realisasi b)/2 x 100%

**2. Persentase ketepatan waktu penyampaian RP4 BMN (target 100%)**

Tabel indeks ketepatan waktu penyampaian RP4 BMN Tahun 2022 s.d 2024



| Waktu Penyampaian                   | Indeks realisasi |
|-------------------------------------|------------------|
| Lebih cepat dua hari dan seterusnya | 120%             |
| Lebih cepat sehari                  | 110%             |
| Tepat waktu                         | 100%             |
| Terlambat satu hari                 | 90%              |
| Terlambat dua hari dan seterusnya   | 80%              |

### 3. Persentase Penyelesaian Penertiban Rumah Negara (target 65%)

$$\text{Realisasi PSG} = \frac{\text{Jumlah Pengajuan PSG}}{\text{Jumlah Rumah Negara}} \times 70\%$$

$$\text{Realisasi HDNo} = \frac{\text{Jumlah Pengajuan HDNo}}{\text{Jumlah Rumah Negara}} \times 30\%$$

$$\text{Realisasi 3} = \frac{\text{Realisasi PSG} + \text{Realisasi HDNo}}{65\%}$$

### 4. Persentase Completeness Master Aset (target : 100% )

$$\text{Persentase profil yang telah diisi lengkap} = \frac{\text{Jumlah Profil Master Aset Rumah Negara yang diisi lengkap}}{\text{Jumlah Profil Master Aset Rumah Negara}} \times 100\%$$

### 5. Persentase tindak lanjut BMN Kemenkeu yang Dihentikan Penggunaannya (target 100%)

$$\text{Persentase tindak lanjut BMN Kemenkeu yang Dihentikan Penggunaannya} = \frac{\text{jumlah nilai perolehan BMN yang dihentikan penggunaannya pada Laporan Barang Pengguna Tahun 2020 unaudited yang ditindaklanjuti dengan usulan pemindahtanganan / penghapusan}}{\text{jumlah nilai perolehan BMN dihentikan penggunaan yang tercantum pada Laporan Barang Pengguna Tahun 2020 unaudited}} \times 100\%$$

### 6. Persentase Rekomendasi Optimalisasi Aset Terindikasi Idle Kementerian Keuangan (target 100%)

$$\text{Persentase Rekomendasi Optimalisasi Aset Terindikasi Idle Kementerian Keuangan} = \frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rekomendasi optimalisasi BMN terindikasi idle}} \times 100\%$$

**7. Persentase Kepatuhan Pengisian RUP (target: 100%)**

$$\text{Persentase kepatuhan Pengisian RUP} = \frac{\text{Total RUP Belanja Barang dan Belanja Modal}}{\text{Total Anggaran Belanja Barang dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 yang Menjadi Target}} \times 100\%$$

**Realisasi IKU :**

$$\begin{aligned} \text{Semester I} &= \frac{\text{Realisasi 1} + \text{Realisasi 3} + \text{Realisasi 4} + \text{Realisasi 5} + \text{Realisasi 6}}{5^{**}} \\ \text{Semester II} &= \frac{\text{Realisasi 1} + \text{Realisasi 2} + \text{Realisasi 3} + \text{Realisasi 4} + \text{Realisasi 5} + \text{Realisasi 6} + \text{Realisasi 7}}{7^{**}} \end{aligned}$$

**\*\*:** disesuaikan dengan jumlah komponen yang menjadi target. Apabila unit tidak memiliki salah satu komponen, penyebut disesuaikan dengan jumlah komponen yang ditargetkan pada unit tersebut. Contoh jika unit A tidak memiliki target PNPB maka realisasi IKU diukur dengan formula (realisasi 1+ realisasi 3 + realisasi 4)/3 x 100%

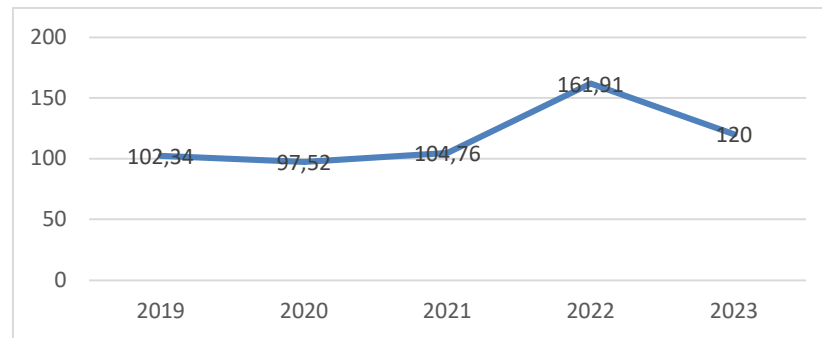
**Catatan : Realisasi maksimal setiap komponen adalah 120%**

Target IKU ini telah ditetapkan Oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Indikator Kinerja Utama ini bersifat take last known dan semesteran.

Capaian IKU ini pada semester II berdasarkan nota Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan nomor ND-118/PB.1/2024 tanggal 10 Januari 2024 tentang Penyampaian Realisasi Triwulan IV IKU Mandatory "Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan" Tahun 2023, KPPN Gorontalo mendapat nilai 120.

Capaian IKU ini telah melebihi target yang telah ditetapkan pada awal tahun. Sementara Capaian IKU ini pada tahun 2019 sebesar 102,34%, pada tahun 2020 sebesar 97.52%, pada tahun 2021 sebesar 104,76%, pada tahun 2022 sebesar 161,91, dan pada tahun 2023 sebesar 120..

**Grafik 3.15****Capaian IKU Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan 2019-2023**



Tabel 3.39

**Perbandingan Target dan Realisasi IKU Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan**

| IKU                                               | 2019   |        | 2020   |       | 2021   |        | 2022   |        | 2023   |       |
|---------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
|                                                   | Target | Real.  | Target | Real. | Target | Real.  | Target | Real.  | Target | Real. |
| Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan | 92     | 102.34 | 92     | 97.52 | 100    | 104.76 | 100    | 161.91 | 100    | 120   |

#### Tujuan:

Meningkatkan kualitas pelaksanaan pengelolaan BMN Kementerian keuangan

#### Isu Utama:

Pengelolaan sarana dan prasarana meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap barang bergerak dan tidak bergerak. Strategi pengelolaan BMN secara optimal berpedoman pada SE-32/PB/2016.

#### Tindakan yang telah dilaksanakan

- Melakukan perbaikan dan penyesuaian terhadap BMN yang ada sehingga menjadi sesuai dengan standar serta memastikan bahwa pengadaan BMN di masa yang akan datang telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- Telah dilakukan penginputan pada aplikasi RP4 untuk penghapusan BMN yang rusak berat. Penghapusan dilakukan secara bertahap, mulai tahun 2021, 2022 dan tahun 2023.

**Rekomendasi Rencana Aksi**

- Pengadaan BMN sesuai standar
- Perbaikan dan penyesuaian atas BMN yang tidak sesuai dengan standar jika dimungkinkan, dan penghapusan untuk BMN yang rusak berat dan tidak dimungkinkan untuk dilakukan upgrade. Sesuai dengan RP4, penghapusan atas barang tersebut akan diusulkan secara bertahap pada tahun 2021,2022 dan 2023.



## Refinement IKU

Tabel 3.40  
Refinement IKU 2023

| NO | Ko de SS dan IKU | NAMA IKU                                                    | Jen is | Pembi na Proses Bisnis | Tusi |     |       |       |     |          | S O | Target |      |         |      |         |                 | Man ual IKU | USULAN TAHUN 2024 |                 |                                   |             |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------|--------|------------------------|------|-----|-------|-------|-----|----------|-----|--------|------|---------|------|---------|-----------------|-------------|-------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------|
|    |                  |                                                             |        |                        | P D  | M S | Ba nk | Ve ra | K I | Um um    |     | Q1     | Q2   | s.d. Q2 | Q3   | s.d. Q3 | Q4              |             | 2023              | OPSI 2024       | USUL AN TAR GET 2024              | PENJELAS AN |
|    | I                | Perbendaharaan Negara yang optimal dan akuntabel            |        |                        |      |     |       |       |     |          |     |        |      |         |      |         |                 |             |                   |                 |                                   |             |
| 1  | 1a-CP            | Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L                      | CF     | PA                     |      | v   |       |       |     | O T, F A | 90  | 90     | 90   | 90      | 90   | 90      | 90              | Fina I      | Disesu aik an     | 91              | Peningkat an tantangan            |             |
| 2  | 1b-N             | Indeks kualitas LK Kuasa BUN KKPN                           | CF     | APK                    |      |     |       | v     |     | O T      | -   | -      | -    | -       | -    | 3       | 3 (Ska la 4)    | Fina I      | Disesu aik an     | 3.1             | Peningkat an tantangan            |             |
|    | II               | Dukungan manajemen yang efektif                             |        |                        |      |     |       |       |     |          |     |        |      |         |      |         |                 |             |                   |                 |                                   |             |
| 3  | 2a-N             | Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN                | D M    | Sekret ariat DJPb      | v    | v   | v     | v     | v   | F A      | -   | 4.66   | 4.66 | -       | 4.66 | 4.66    | 4,66 (Ska la 5) | Fina I      | Tetap             | 4,66 (Skal a 5) | Indeks target sudah sangat tinggi |             |
|    | III              | Komunikasi, edukasi dan standardisasi yang berkesinambungan |        |                        |      |     |       |       |     |          |     |        |      |         |      |         |                 |             |                   |                 |                                   |             |

|   |       |                                                                                 |    |                           |   |   |   |   |  |     |            |            |            |            |            |            |             |        |              |               |                                                                                                |  |
|---|-------|---------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------|---|---|---|---|--|-----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|--------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 4 | 3a-N  | Persentase tingkat implementasi standardisasi kompetensi pejabat perbendaharaan | CF | SP                        | v |   |   |   |  | F A | -          | 93%        | 93%        | -          | 93%        | 93%        | 93%         | Fina I | Disesuai kan | 94%           | Peningkat an tantangan dan memantap kan persiapan mandatory sertifikasi pejabat perbendaharaan |  |
| 5 | 3b-N  | Tingkat efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan                | CF | Sekretariat DJPb, SP      | v |   |   |   |  | F A | -          | 89         | 89         | -          | 89         | 89         | 89          | Fina I | Disesuai kan | 90            | Peningkat an tantangan                                                                         |  |
|   |       | <b>IV Pengelolaan pengeluaran negara yang prudent, efektif dan efisien</b>      |    |                           |   |   |   |   |  |     |            |            |            |            |            |            |             |        |              |               |                                                                                                |  |
| 6 | 4a-CP | Persentase akurasi perencanaan kas                                              | CF | PKN                       | v | v | v |   |  | O T | 80.0<br>0% | 80.0<br>0% | 80.0<br>0% | 80.0<br>0% | 80.0<br>0% | 80.0<br>0% | 80.0<br>0%  | Fina I | Disesuai kan | 81            | Peningkat an tantangan                                                                         |  |
| 7 | 4b-N  | Tingkat kualitas penyelesaian SP2D                                              | CF | Sekretariat DJPb, PA, PKN | v |   | v |   |  | O T | 3          | 3          | 3          | 3          | 3          | 3          | 3 (skala 5) | Fina I | Disesuai kan | 3,1 (skala 5) | Peningkat an tantangan                                                                         |  |
|   |       | <b>V Pelaksanaan anggaran yang optimal</b>                                      |    |                           |   |   |   |   |  |     |            |            |            |            |            |            |             |        |              |               |                                                                                                |  |
| 8 | 5a-CP | Nilai kinerja penyaluran Dana                                                   | CF | PA                        |   |   | v | v |  | O T | 90         | 90         | 90         | 90         | 90         | 90         | 90          | Fina I | Disesuai kan | 91            | Peningkat an tantangan, serta perlu                                                            |  |



|     |       |                                                                                  |        |                  |   |   |   |   |   |        |                    |      |      |      |      |      |                |               |              |                |                           |                                                                                        |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|---|---|---|---|---|--------|--------------------|------|------|------|------|------|----------------|---------------|--------------|----------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|     |       | Transfer ke Daerah                                                               |        |                  |   |   |   |   |   |        |                    |      |      |      |      |      |                |               |              |                | reformulasi manual IKU    |                                                                                        |
| 9   | 5b-N  | Indeks kualitas implementasi <i>Digipay</i>                                      | CF     | PKN              |   | v |   |   |   |        | O<br>T             | 3,1  | 3,1  | 3,1  | 3,1  | 3,1  | 3,1            | 3,1 (skala 4) | <b>Final</b> | Tetap          | 3,1 (skala 4)             | Tantangan sudah berat di tengah permasalahan terkait aplikasi/ infrastruktur penunjang |
| VI  |       | Pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan dan akuntabel                 |        |                  |   |   |   |   |   |        |                    |      |      |      |      |      |                |               |              |                |                           |                                                                                        |
| 10  | 6a-CP | Indeks kualitas pelaksanaan rekonsiliasi tingkat UAKPA                           | CF     | APK              |   |   |   | v |   | O<br>T | 3,25               | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 (skala 4) | <b>Final</b>  | Tetap        | 3,25 (skala 4) | Indeks sudah cukup tinggi |                                                                                        |
| 11  | 6b-N  | Indeks kualitas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara K/L                         | CF     | PKN              |   |   |   | v |   | O<br>T | 3                  | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3 (skala 4)    | <b>Final</b>  | Disesuaikan  | 3,1 (skala 4)  | Peningkatan tantangan     |                                                                                        |
| VII |       | Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif |        |                  |   |   |   |   |   |        |                    |      |      |      |      |      |                |               |              |                |                           |                                                                                        |
| 12  | 7a-CP | Tingkat implementasi penajaman tugas <i>Treasury</i> dan                         | D<br>M | Sekretariat DJPb | v | v | v | v | v | v      | O<br>P,<br>O<br>T, | 80%  | 80%  | 80%  | 80%  | 80%  | 80%            | 80%           | <b>Final</b> | Tetap          | 80%                       | Tugas baru masih perlu                                                                 |

|    |       |                                                                             |     |                  |  |  |  |  |  |   |     |        |        |        |        |        |        |        |       |             |        |                                   |  |
|----|-------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|--|--|--|--|--|---|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------------|--------|-----------------------------------|--|
|    |       | Financial Advisory                                                          |     |                  |  |  |  |  |  |   | F A |        |        |        |        |        |        |        |       | pemantapan  |        |                                   |  |
|    | VII I | Organisasi dan SDM yang unggul dan adaptif                                  |     |                  |  |  |  |  |  |   |     |        |        |        |        |        |        |        |       |             |        |                                   |  |
| 13 | 8a-N  | Tingkat kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization | D M | Sekretariat DJPb |  |  |  |  |  | v | O P | -      | -      | -      | -      | -      | 85     | 85     | Final | Disesuaikan | 86     | Peningkatan tantangan             |  |
| 14 | 8b-N  | Tingkat implementasi Learning Organization                                  | D M | Sekretariat DJPb |  |  |  |  |  | v | O P | 10     | 40     | 40     | 60     | 60     | 85     | 85     | Final | Tetap       | 85     |                                   |  |
| 15 | 8c-N  | Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal                   | D M | Sekretariat DJPb |  |  |  |  |  | v | O P | -      | -      | -      | -      | -      | 86     | 86     | Final | Disesuaikan | 87     | Peningkatan tantangan             |  |
|    | IX    | Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang andal                           |     |                  |  |  |  |  |  |   |     |        |        |        |        |        |        |        |       |             |        |                                   |  |
| 16 | 9a-CP | Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN                               | D M | Sekretariat DJPb |  |  |  |  |  | v | O P | 95.5 % | 95.5 % | 95.5 % | 95.5 % | 95.5 % | 95.5 % | 95.5 % | Final | Tetap       | 95.5 % | Tugas baru masih perlu pemantapan |  |
| 17 | 9b-N  | Nilai kualitas LK tingkat                                                   | D M | Sekretariat DJPb |  |  |  |  |  | v | O P | -      | -      | -      | -      | -      | 84     | 84     | Final | Disesuaikan | 85     | Peningkatan tantangan             |  |

|    |      |                                                   |     |                  |  |  |  |  |  |   |     |   |   |   |   |   |       |       |        |       |       |                |
|----|------|---------------------------------------------------|-----|------------------|--|--|--|--|--|---|-----|---|---|---|---|---|-------|-------|--------|-------|-------|----------------|
|    |      | UAKPA dan UAKPB                                   |     |                  |  |  |  |  |  |   |     |   |   |   |   |   |       |       |        |       |       |                |
| 18 | 9c-N | Persentase kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan | D M | Sekretariat DJPb |  |  |  |  |  | v | O P | - | - | - | - | - | 100 % | 100 % | Fina I | Tetap | 100 % | sudah maksimal |



## 5. Inisiatif Strategis

### a. Pemenuhan Indikator Tingkat Implementasi *Digipay*

- Sasaran Strategis/IKU : Indeks Kualitas Implementasi *Digipay*
- Penjelasan

Implementasi *Digipay* diukur dari progres capaian implementasi Digipay Satu dalam rangka penggunaan Uang Persediaan yang bersumber dari Rupiah Murni dan/atau PNBP. Pelaksanaan *Digipay* diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-7/PB/2022 dan aturan/kebijakan teknis yang diterbitkan Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara, antara lain Surat Direktur PKN Nomor ND-1209/PB.3/2021 tanggal 30 Juli 2021, ND-221/PB.3/2022 tanggal 10 Februari 2022 dan ND-315/PB.3/2023 tanggal 27 Februari 2023. Capaian implementasi Digipay diukur dalam 3 parameter yaitu capaian jumlah satker, jumlah vendor, dan jumlah transaksi.

Penandatanganan MoU dengan Satker mitra kerja/perbankan s.d. 31 Desember 2023 telah dilaksanakan sebanyak 21 kali.

### b. Pemenuhan Indikator Tingkat Implementasi Penajaman Tugas *Treasury* dan *Financial Advisory*

- Sasaran strategis/IKU : Tingkat Implementasi Penajaman Tugas *Treasury* dan *Financial Advisory*
- Penjelasan

Instansi vertikal DJPb telah mengalami pengembangan tugas dan fungsi, terutama sebagai Treasurer, Regional Chief Economist dan Financial Advisor, sehingga dapat terlibat lebih dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di daerah. Untuk itu, telah diimplementasikan Shadow Organization sebagai bentuk penajaman tugas dan fungsi di Unit Kerja Kantor Vertikal DJPb.

Merupakan wujud sinergi dan kolaborasi dalam percepatan penajaman tugas agar organisasi DJPb makin baik dalam menghadapi serta mengantisipasi perkembangan perekonomian regional, nasional, dan global. IKU ini bersifat direct cascading dari Dirjen Perbendaharaan ke Sekretaris DJPb dan indirect cascading dari Dirjen Perbendaharaan ke seluruh Kepala Kanwil DJPb dan seluruh Kepala KPPN. IKU ini juga bersifat direct cascading dari Kepala KPPN ke seluruh Pejabat Pengawas di lingkup KPPN. Direct cascading tersebut sebagai wujud Kemenkeu Satu - DJPb Satu - KPPN Satu dengan tujuan agar terjadi percepatan penajaman tugas DJPb. Direct cascading tersebut merupakan tanggung renteng/kolektif tanpa

pengurangan nilai sebagaimana diatur pada KMK-300/2022 tentang Manajemen Kinerja di lingkungan Kemenkeu.

*Forum Group Discussion* (FGD) dengan instansi pembina s.d. 31 Desember 2023 telah dilaksanakan sebanyak 3 kali

*Forum Group Discussion* (FGD) dengan instansi pemerintah daerah s.d. 31 Desember 2023 telah dilaksanakan sebanyak 2 kali

Dana Desa.

## B. Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran Bruto KPPN Gorontalo dalam DIPA TA 2021 sebesar Rp 2,312,690,000. Pada tahun 2021 dilakukan penghematan sebesar Rp 442.725.000. Sehingga pagu anggaran setelah revisi penghematan menjadi sebesar Rp.1,869,965,000. Pagu program Pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara dan resiko sebesar Rp 35.648.000 dan terealisasi sebesar Rp 34.958.551. Pagu program dukungan manajemen sebesar Rp 1.834.317.000 dan terealisasi sebesar Rp 1.833.251.396

Realisasi Pagu Anggaran KPPN Gorontalo TA 2021 sebesar Rp 1,868,209,947 dengan rincian per jenis belanja sebagaimana tabel dibawah ini.

**Tabel 3.41**  
**Pagu dan Realisasi Belanja KPPN Gorontalo 2019-2023**

|                 | 2019                 |                      | 2020                 |                      | 2021                 |                      | 2022                 |                      | 2023                 |                      |
|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                 | Pagu                 | Realisasi            | Pagu                 | Realisasi            | Pagu                 | Realisasi            | Pagu                 | Realisasi            | Pagu                 | Realisasi            |
| Belanja Pegawai | 341,485,000          | 326,655,000          | 332,380,000          | 331,209,000          | 369,600,000          | 369,597,000          | 311,624,000          | 311,522,000          | 313,496,000          | 312,624,000          |
| Belanja Barang  | 1,980,181,000        | 1,979,664,795        | 1,673,543,000        | 1,652,065,073        | 1,464,365,000        | 1,462,681,947        | 1,450,414,000        | 1,449,814,629        | 1,636,857,000        | 1,636,772,387        |
| Belanja Modal   | 32,124,000           | 31,385,000           | 191,664,000          | 191,557,000          | 36,000,000           | 35,931,000           | 52,650,000           | 52,647,943           | 399,903,000          | 399,771,733          |
| <b>Jumlah</b>   | <b>2,353,790,000</b> | <b>2,337,704,795</b> | <b>2,197,587,000</b> | <b>2,174,831,073</b> | <b>1,869,965,000</b> | <b>1,868,209,947</b> | <b>1,814,688,000</b> | <b>1,813,984,572</b> | <b>2,350,256,000</b> | <b>2,349,168,120</b> |

## C. Kinerja Lainnya

### 1. Inovasi Manajemen/Pelayanan

#### a) Solusi Pasti “Telegram”

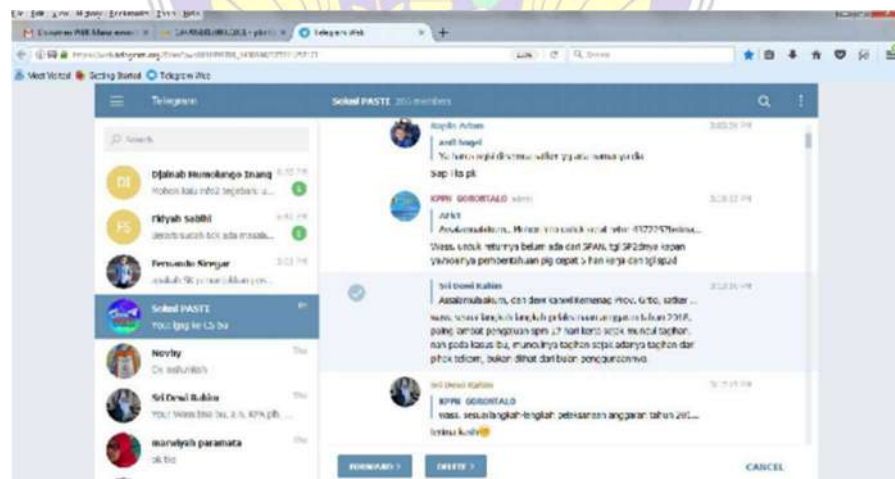
KPPN Gorontalo mempunyai inovasi “Pemanfaatan Aplikasi Telegram sebagai Media Komunikasi dan *Support Group* Satker lingkup KPPN Gorontalo”.

Pemanfaatan Aplikasi Telegram dilakukan untuk membuat grup “Solusi Pasti”. Grup ini beranggotakan seluruh pengelola keuangan satuan kerja mitra KPPN Gorontalo seperti KPA, PPK, Bendahara Pengeluaran, dan Operator Aplikasi. Grup ini bertujuan sebagai sarana komunikasi antara KPPN Gorontalo dengan satuan kerja. Bermotokan “cepat, tepat dan bermanfaat”, grup ini berusaha memberikan respon yang cepat, solusi yang tepat dan informasi yang bermanfaat bagi setiap permasalahan yang dihadapi oleh satuan kerja.

Awalnya grup ini bernama “Rekon Gorontalo” yang khusus melayani konsultasi masalah rekonsiliasi. Namun mengingat respon yang luar biasa dari satker, grup ini dikembangkan bukan sekadar melayani masalah rekonsiliasi namun juga melayani konsultasi lain, seperti layanan strategi penyerapan anggaran, ketepatan waktu penyampaian data kontrak, garansi bank, penyampaian LPJ, dan penyampaian RPD.

Setiap anggota grup bisa berkontribusi dengan memberikan jawaban, solusi dan informasi atas permasalahan yang dikemukakan di grup, juga sebagai sarana untuk *sharing knowledge* dan pengalaman. Dengan adanya grup ini diharapkan tercipta suatu kondisi dimana satuan kerja dapat saling *support* dan saling mengingatkan.

**Gambar 3.2**  
**Aplikasi Telegram**

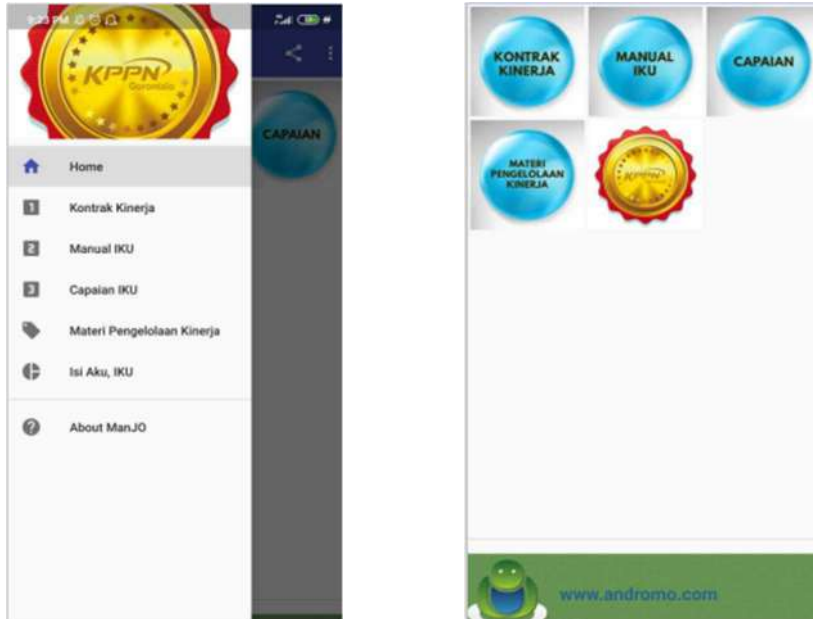


#### b) Aplikasi “Manjo”

Inovasi layanan yang digunakan oleh KPPN Gorontalo untuk membantu peningkatan kualitas pengelolaan kinerja KPPN Gorontalo, yaitu aplikasi “Manjo”.

**Gambar 3.3 dan 3.4**  
**Aplikasi Manjo**

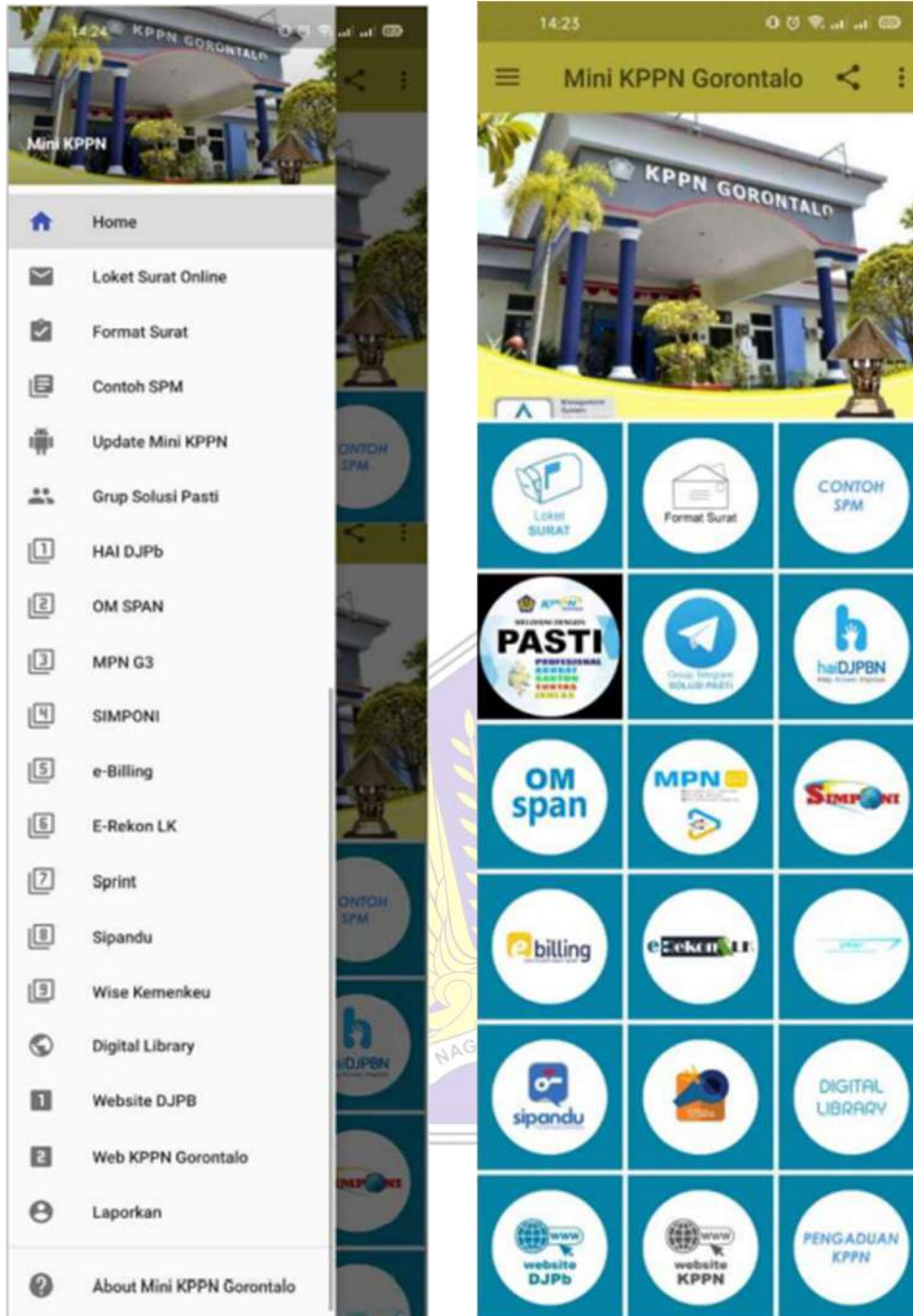




### c) Aplikasi “Mini KPPN”

Inovasi layanan lainnya yang digunakan oleh KPPN Gorontalo untuk membantu pekerjaan dan informasi KPPN Gorontalo, yaitu aplikasi “Mini KPPN”. Mini KPPN merupakan aplikasi berbasis android yang memberikan kemudahan dalam mengakses aplikasi-aplikasi penting dalam format satu halaman tampilan.

**Gambar 3.5 dan 3.6**  
**Aplikasi Mini KPPN**



#### d) Saling Mengenal Antar Pegawai dan Keluarga (SiWeruh)

Salah satu cara meningkatkan pemantauan terhadap integritas pegawai dan kinerja organisasi adalah dengan mengenali para pegawainya (*know your employee*), untuk itu diperlukan ajang untuk saling mengenal antar pegawai sebagai salah satu bentuk pengawasan secara tidak langsung terhadap pegawai apabila ada indikasi ketidakwajaran. Manfaat utama dari inovasi ini adalah meningkatkan kesadaran khususnya di kalangan

pegawai dan *stakeholder* pada umumnya untuk menjaga nilai-nilai integritas dan selalu merasa diawasi oleh orang lain sehingga terhindar dari pelanggaran.

**Gambar 3.7**

**Si Weruh**



**e) Inovasi Jaga Agar Aman (Si Jaga)**

Salah satu cara untuk menjaga dan memelihara aset serta menghindari kemungkinan terhentinya layanan karena gangguan alam adalah dengan pro aktif melakukan mitigasi atas potensi kejadian yang dapat berdampak pada terganggunya pencapaian visi dan misi organisasi. KPPN Gorontalo selalu proaktif dalam usaha memitigasi risiko gangguan alam misalnya kebakaran. Manfaat utama dari inovasi ini adalah meningkatkan kesadaran khususnya di kalangan pegawai akan pentingnya ketangkasan dalam menghadapi bencana, setiap pegawai harus dibekali kemampuan minimum untuk menghadapi kejadian tidak terduga. Misalnya terjadinya kebakaran, dll.

**Gambar 3.8**

**Si Jaga**



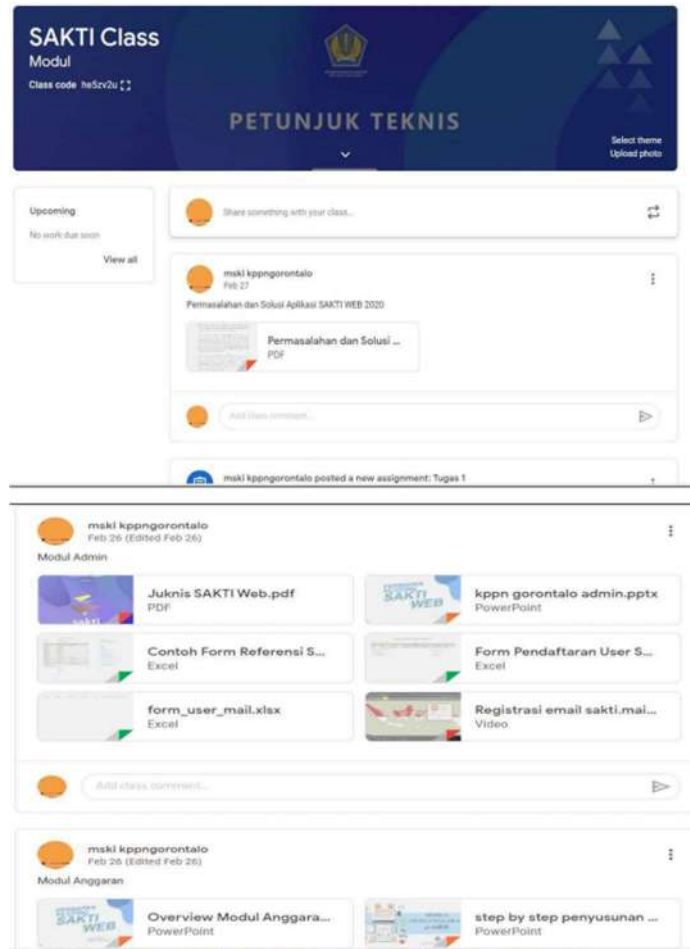


**f) Treasury Classroom KPPN Gorontalo**

Sebagaimana Kemenkeu Learning Center (KLC) menyediakan berbagai materi terkait keuangan negara, Treasury Classroom KPPN Gorontalo Classroom turut hadir menyediakan materi-materi terkait perbendaharaan seperti materi tentang Bendahara, Aplikasi SAS, SAKTI, Pengadaan barang dan jasa, dan lain-lain. Dengan tampilan yang user friendly, Treasury classroom KPPN Gorontalo juga dapat memberikan tugas untuk pengguna yang mengikuti salah satu kelas. Proses pembelajaran yang mudah terjangkau akan membuat stakeholder mudah dan lebih bersemangat dalam mempelajari aspek-aspek teknis Perbendaharaan yang pada gilirannya akan mempermudah tugas KPPN dan meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran satker. Inovasi ini terus berkelanjutan dengan selalu mengupdate materi-materi pengelolaan keuangan dan aplikasi. Inovasi ini mudah direplikasi karena sifat aplikasi nya yang terbuka difasilitasi oleh google. content dalam treasury classroom KPPN Gorontalo juga terkait dengan hal-hal teknis perbendaharaan sehingga bisa berfungsi sebagai media pembelajaran dengan materi yang sangat diperlukan namun sama untuk semua pengelola keuangan di seluruh Indonesia.

**Gambar 3.9**

***Treasury Classrom KPPN Gorontalo***

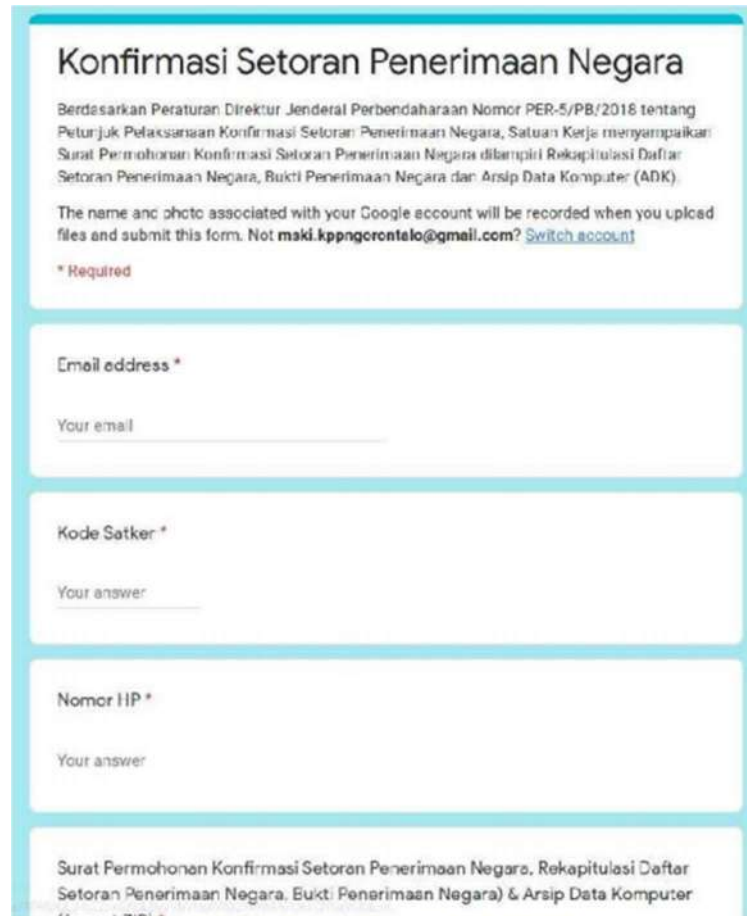


#### g) Konfirmasi Penerimaan Negara Online (KOPEN)

Satuan kerja dapat mengirimkan pengajuan konfirmasi setoran penerimaan negara secara online melalui formulir online yang telah dibuat oleh KPPN Gorontalo. Melalui formulir tersebut, satuan kerja mengisi kontak yang dapat dihubungi, nomor surat, hasil scan surat permohonan beserta lampiran dan arsip data computer (ADK). Petugas di KPPN akan mengecek kelengkapan dokumen dan kesesuaian ADK. Jika sudah selesai, petugas KPPN akan melakukan konfirmasi penerimaan setoran negara melalui aplikasi OMSPAN. Petugas di KPPN akan memberikan informasi kepada satuan kerja melalui kontrak yang telah diisi melalui formulir. Jika masih terdapat kesalahan diharuskan memperbaiki kesalahan dan menyampaikan kembali dokumen dan ADK yang salah.

**Gambar 3.10**

**KOPEN**



**Konfirmasi Setoran Penerimaan Negara**

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Konfirmasi Setoran Penerimaan Negara, Satuan Kerja menyampaikan Surat Permohonan Konfirmasi Setoran Penerimaan Negara dilampiri Rekapitulasi Daftar Setoran Penerimaan Negara, Bukti Penerimaan Negara dan Arsip Data Komputer (ADK).

The name and photo associated with your Google account will be recorded when you upload files and submit this form. Not [maki.kppngorontalo@gmail.com](mailto:maki.kppngorontalo@gmail.com)? [Switch account](#)

\* Required

Email address \*

Your email

Kode Satker \*

Your answer

Nomor IIP \*

Your answer

Surat Permohonan Konfirmasi Setoran Penerimaan Negara, Rekapitulasi Daftar Setoran Penerimaan Negara, Bukti Penerimaan Negara & Arsip Data Komputer

#### h) Laporan Saldo Rekening Online (SAREO)

Satuan kerja dapat mengirimkan laporan saldo rekening secara online melalui formulir yang sudah dibuat oleh KPPN Gorontalo, melalui formulir tersebut, satuan kerja mengisi data rekening dan mengunggah hasil scan laporan saldo rekening dan rekening koran.

**Gambar 3.11**

**SAREO**



### Laporan Saldo Rekening

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 182/KMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga, KPA/Kepala Satuan Kerja/Pimpinan BLU wajib melaporkan saldo seluruh rekening yang dikelolanya setiap bulan kepada KPPN paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

The name and photo associated with your Google account will be recorded when you upload files and submit this form. Not [mski.kppngorontalo@gmail.com](mailto:mski.kppngorontalo@gmail.com)? [Switch account](#)

\* Required

Email address \*

Your email

Kodo Satker \*

Your answer

Nomor Rekening \*

Your answer

Nama Rekening \*

#### i) Saling Bertukar Pikiran Antar Pegawai (Rombukiya)

Sebagai bentuk nyata upaya untuk selalu menjaga institusi dari adanya pelanggaran kode etik/kode perilaku oleh pegawai, maka KPPN Gorontalo menginisiasi pelaksanaan kegiatan bertukar pikiran untuk saling menasihati dan meneguhkan kembali komitmen untuk menjaga nilai-nilai etika sebagai ASN. Kepada setiap pegawai juga dibekali dengan buku saku kode etik pegawai sebagai pengingat untuk selalu menjaga kode etik dan kode perilaku. Selain itu, sebagai bentuk pengingat juga dipasang banner dalam bahasa lokal yang berisi seruan untuk menjaga integritas.

Gambar 3.12 dan 3.13

Rombukiya



j) LOSDOL (Layanan Online Satker KPPN Gorontalo)

Inovasi ini masuk pada saat munculnya Pandemi Covid-19. Seluruh Proses Bisnis yang ada di KPPN Gorontalo harus dilakukan secara online. Padahal, dengan mekanisme online ini, satker pasti mengalami kesulitan yang jauh lebih banyak daripada sebelumnya. Namun, KPPN Gorontalo berinisiatif untuk mengatasi hal tersebut dengan memberikan wadah berupa layanan zoom/google meeting bagi satker yang ingin berkonsultasi secara online

setiap harinya, yang dimulai pukul 09.00 s.d. 17.00 WITA. Pegawai KPPN Gorontalo yang ada di zoom tersebut akan standby melayani satker dengan berbagai kendala yang dialaminya. Inovasi ini pun pada mulanya muncul secara spontan. Hal ini karena pada saat itu sedang trend lagu LOSDOL yang dibawa oleh Denny Caknan. Akhirnya Inovasi ini mengambil nama dari judul lagu tersebut dan harapannya agar seluruh kendala yang dialami satker bisa tertangani.

**Gambar 3.14**

**LosDol**



k) **Call Me KPPN Gorontalo : Contact Person Masing masing Seksi + SSO**

Inovasi ini muncul dari kebingungan satker apabila ada kendala yang dialami, tapi masih belum ada jawaban dari Pihak KPPN Gorontalo. Kemudian, KPPN Gorontalo menyediakan saluran resmi, seluruh seksi KPPN Gorontalo sesuai dengan bagian tugasnya, sehingga tentu saja akan lebih memudahkan satker untuk langsung bertanya ke pihak KPPN yang menangani atas pekerjaan yang mereka kirimkan.

**Gambar 3.15**

**Call Me KPPN Gorontalo**



### I) Motivasi Pagi Gorontalo Pasti

Inovasi ini muncul dari inisiatif Kepala KPPN Gorontalo untuk memberikan semangat bagi seluruh Pegawai KPPN Gorontalo. Rutin setiap Senin dan Rabu dalam setiap minggu, dalam briefing pagi pegawai KPPN Gorontalo, ada jadwal khusus yang diberikan bagi pegawai KPPN Gorontalo secara bergantian, untuk memberikan motivasi pagi, yang bentuk nya bermacam-macam, mulai dari narasi, puisi, pantun dan lain lain. Inovasi ini tentu saja memberi dampak positif bagi seluruh pegawai KPPN Gorontalo dengan tentunya membakar semangat untuk mengawali pekerjaan di pagi hari.

**Gambar 3.16**  
**Motivasi Pagi Gorontalo Pasti**



## 2. Inisiatif Pemberantasan Korupsi

### a) Penandatanganan Pakta Integritas

Mencegah lebih baik daripada mengobati. Demikian juga dalam hal pemberantasan korupsi. KPPN Gorontalo telah melakukan inisiatif pemberantasan korupsi dengan



melaksanakan penandatanganan Pakta Integritas dengan antara kepala KPPN dengan semua pegawai baik PNS maupun PPNP dan seluruh Kuasa Pengguna Anggaran satuan kerja mitra KPPN Gorontalo.

Hal ini diharapkan dapat mendorong semua pihak untuk lebih bekerja secara profesional, bersih, dan beritikad baik dalam melakukan pengelolaan keuangan negara demi nusa dan bangsa.

**Gambar 3.17**  
**Penandatanganan Pakta Integritas**



### 3. Penghargaan

Prestasi yang di raih KPPN Gorontalo Tahun 2021 hingga 2023:

- a. Pada Tahun 2021, KPPN Gorontalo mendapatkan Treasury Award atas kinerja penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa kategori KPPN Besar
- b. Pada Triwulan I Tahun 2022, KPPN Gorontalo mendapatkan Peringkat II untuk Nilai IKPA KPPN Selaku BUN / Pembina Satker untuk kategori KPPN Tipe A1 ibu kota provinsi

- c. Pada Triwulan II Tahun 2022, KPPN Gorontalo mendapatkan Peringkat I untuk Nilai IKPA KPPN Selaku BUN / Pembina Satker untuk kategori KPPN Tipe A1 ibu kota provinsi
- d. Pada Triwulan III Tahun 2022, KPPN Gorontalo mendapatkan Peringkat II untuk Nilai IKPA KPPN Selaku BUN / Pembina Satker untuk kategori KPPN Tipe A1 ibu kota provinsi
- e. Pada Triwulan IV Tahun 2022, KPPN Gorontalo mendapatkan Peringkat III untuk Nilai IKPA KPPN Selaku BUN / Pembina Satker untuk kategori KPPN Tipe A1 ibu kota provinsi
- f. Pada Triwulan I Tahun 2023, KPPN Gorontalo mendapatkan Penghargaan dengan capaian IKPA Berpredikat Sangat Baik Tahun 2023
- g. Salah satu Pegawai KPPN Gorontalo mendapatkan penghargaan Karya Terbaik dalam sayembara Karya Kreatif Media Cetak Humas dan Publikasi Lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2023
- h. Salah satu pegawai KPPN Gorontalo mendapatkan Peringkat Pertama Lomba Cerdas Cermat Online Hari Bakti Perbendaharaan ke-19 Tingkat Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo
- i. KPPN Gorontalo mendapatkan Penghargaan Atas Terciptanya Inovasi Di Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo
- j. KPPN Gorontalo mendapatkan Penghargaan Juara Favorit Juri Kegiatan *Treasury Performing Arts Competition* Tahun 2023





## BAB IV

### PENUTUP

Laporan Kinerja KPPN Gorontalo tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2023 sebagaimana ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 262/PMK.01/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan untuk memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan tugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum maka KPPN Gorontalo harus senantiasa memelihara, mengamankan, dan melaksanakan semua kebijaksanaan pemerintah agar APBN dapat dilaksanakan dengan baik dan benar serta mampu mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Selain itu mewujudkan implementasi SPAN agar peran strategis KPPN Gorontalo menjadi lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, tidak terdapat capaian kinerja KPPN Gorontalo tahun 2023 yang lebih rendah dari target yang direncanakan. Untuk meningkatkan capaian kinerja di tahun-tahun selanjutnya, KPPN Gorontalo akan tetap mengoptimalkan pelaksanaan program yang telah ditetapkan.

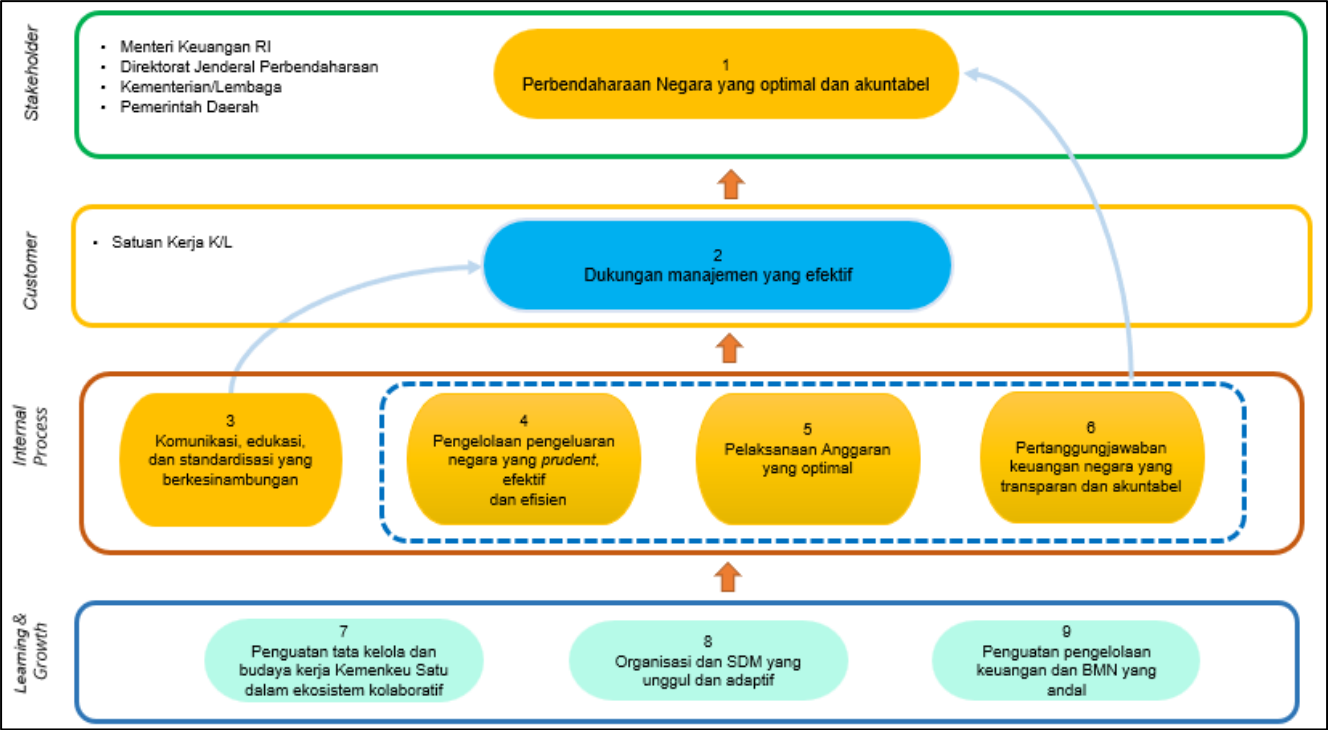
Untuk mengoptimalkan kinerja dan kemitraan dengan satker mitra kerja, KPPN Gorontalo terus melakukan sosialisasi kepada seluruh pejabat dan pegawai tentang visi, misi, tujuan, sasaran, dan target yang akan dicapai serta pedoman/peraturan yang dapat dijadikan landasan/acuan dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari, di samping memanfaatkan sarana teknologi informasi sehingga masyarakat atau siapapun yang berhubungan/ berkepentingan dengan KPPN Gorontalo akan merasa sangat senang dan puas karena telah terlayani dengan cepat, cermat, dan akurat sesuai ketentuan yang berlaku serta memahami visi dan misi Kementerian Keuangan dalam penerapan kebijakan reformasi birokrasi yang dicanangkan oleh Kementerian Keuangan pada tahun 2008.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja 2023 diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan baik kepada pimpinan maupun kepada semua pihak yang terkait sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Gorontalo pada periode berikutnya.



PERJANJIAN KINERJA  
NOMOR: PK-050/WPB.29/2023  
KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA  
TIPE A1 GORONTALO  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
TAHUN 2023

Peta Strategi



**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2023  
KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A1  
GORONTALO  
KEMENTERIAN KEUANGAN**

| No. | Sasaran Program/Kegiatan                                                         | Indikator Kinerja                                                                   | Target |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1   | Perbendaharaan Negara yang optimal dan akuntabel                                 | 1a-CP Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L                                        | 90     |
|     |                                                                                  | 1b-N Indeks kualitas LK Kuasa BUN KKPN                                              | 3      |
| 2   | Dukungan manajemen yang efektif                                                  | 2a-N Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN                                   | 4,66   |
| 3   | Komunikasi, edukasi dan standarisasi yang berkesinambungan                       | 3a-N Persentase tingkat implementasi standarisasi kompetensi pejabat perbendaharaan | 93     |
|     |                                                                                  | 3b-N Tingkat efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan               | 89     |
| 4   | Pengelolaan pengeluaran negara yang prudent, efektif dan efisien                 | 4a-CP Persentase akurasi perencanaan kas                                            | 80     |
|     |                                                                                  | 4b-N Tingkat kualitas penyelesaian SP2D                                             | 3      |
| 5   | Pelaksanaan anggaran yang optimal                                                | 5a-CP Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah                              | 90     |
|     |                                                                                  | 5b-N Indeks kualitas implementasi Digipay                                           | 3,1    |
| 6   | Pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan dan akuntabel                 | 6a-CP Indeks kualitas pelaksanaan rekonsiliasi tingkat UAKPA                        | 3,25   |
|     |                                                                                  | 6b-N Indeks kualitas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara K/L                       | 3      |
| 7   | Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif | 7a-CP Tingkat implementasi penajaman tugas Treasury dan Financial Advisory          | 80     |
| 8   | Organisasi dan SDM yang unggul dan adaptif                                       | 8a-N Tingkat kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization    | 85     |
|     |                                                                                  | 8b-N Tingkat implementasi Learning Organization                                     | 85     |
|     |                                                                                  | 8c-N Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal                      | 86     |
| 9   | Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang andal                                | 9a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN                                 | 95,5   |
|     |                                                                                  | 9b-N Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB                                      | 84     |

| No. | Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja                                      | Target |
|-----|--------------------------|--------------------------------------------------------|--------|
|     |                          | 9c-N Persentase kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan | 100    |

Program/Kegiatan Tahun 2023

Anggaran

|                                                                |    |               |
|----------------------------------------------------------------|----|---------------|
| Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko |    |               |
| 1. Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko           | Rp | 4.894.000     |
| 2. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi                      | Rp | 169.586.000   |
| 3. Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko           | Rp | 12.788.000    |
| 4. Pengelolaan Kas dan Pembiayaan Negara                       | Rp | 6.770.000     |
| 5. Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara     | Rp | 2.000.000     |
| Program Dukungan Manajemen                                     |    |               |
| 6. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum                         | Rp | 1.643.317.000 |
| 7. Pengelolaan komunikasi dan informasi public                 | Rp | 10.500.000    |
| 8. Pengelolaan Organisasi dan SDM                              | Rp | 300.498.000   |

Plt. Kepala Kantor Wilayah Jenderal  
Perbendaharaan Provinsi Gorontalo



Ditandatangani Secara Elektronik  
Ratih Hapsari Kusumawardani

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara  
Tipe A1 Gorontalo



Ditandatangani Secara Elektronik  
Arief Rokhman



## TAHUN 2023

[illegible]

| Kode<br>SS/IKU | SS dan IKU                                                                  | Target |      |        |      |        |      |      |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|------|--------|------|------|
|                |                                                                             | Q1     | Q2   | Smt. 1 | Q3   | s.d.Q3 | Q4   | Y    |
| 7a-CP          | Tingkat implementasi penajaman tugas Treasury dan Financial Advisory        | 80     | 80   | 80     | 80   | 80     | 80   | 80   |
| 8              | Organisasi dan SDM yang unggul dan adaptif                                  |        |      |        |      |        |      |      |
| 8a-N           | Tingkat kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization |        |      |        |      |        | 85   | 85   |
| 8b-N           | Tingkat implementasi Learning Organization                                  | 10     | 40   | 40     | 60   | 60     | 85   | 85   |
| 8c-N           | Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal                   |        |      |        |      |        | 86   | 86   |
| 9              | Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang andal                           |        |      |        |      |        |      |      |
| 9a-CP          | Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN                               | 95,5   | 95,5 | 95,5   | 95,5 | 95,5   | 95,5 | 95,5 |
| 9b-N           | Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB                                   |        |      |        |      |        | 84   | 84   |
| 9c-N           | Persentase kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan                           |        |      |        |      |        | 100  | 100  |

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan  
Negara Tipe A1 Gorontalo,



Ditandatangani Secara Elektronik  
Arief Rokhman





**INISIATIF STRATEGIS**  
**KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A1 GORONTALO**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**TAHUN 2023**

| No. | IKU                                                                  | Inisiatif Strategis                                                                      | Output/Outcome                                                              | Trajectory                                                   |             | Periode Pelaksanaan | Penanggung Jawab                                                         | Biaya (Rp) |
|-----|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|
|     |                                                                      |                                                                                          |                                                                             | Kegiatan                                                     | Output      |                     |                                                                          |            |
| 1   | Indeks kualitas implementasi Digipay                                 | Pemenuhan Indikator tingkat implementasi digipay                                         | Peningkatan jumlah satker, vendor, dan transaksi digipay                    | Q1 : Penandatanganan MoU dengan Satker mitra kerja/perbankan | Q1 : 10%    | 31 Maret 2023       | Kepala Kantor, kepala Seksi MSKI                                         | -          |
|     |                                                                      |                                                                                          |                                                                             | Q2 : Penandatanganan MoU dengan Satker mitra kerja/perbankan | Q2 : 15%    | 30 Juni 2023        |                                                                          |            |
|     |                                                                      |                                                                                          |                                                                             | Q3 : Penandatanganan MoU dengan Satker mitra kerja/perbankan | Q3 : 20%    | 30 September 2023   |                                                                          |            |
|     |                                                                      |                                                                                          |                                                                             | Q4 : Penandatanganan MoU dengan Satker mitra kerja/perbankan | Q4 : 25%    | 31 Desember 2023    |                                                                          |            |
| 2.  | Tingkat implementasi penajaman tugas Treasury dan Financial Advisory | Pemenuhan indikator Tingkat implementasi penajaman tugas Treasury dan Financial Advisory | Peningkatan kompetensi SDM penunjang fungsi Treasury dan Financial Advisory | Semester 1 : FGD dengan instansi pembina                     | Laporan FGD | 30 Juni 2023        | Kepala Kantor, Kepala Subbagian Umum, Head of Financial Advisor Division | -          |
|     |                                                                      |                                                                                          |                                                                             | Semester 2 : FGD dengan pemerintah daerah                    | Laporan FGD | 31 Desember 2023    |                                                                          |            |



Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara  
Tipe A1 Gorontalo



Ditandatangani Secara Elektronik  
Arief Rokhman



SASARAN KINERJA PEGAWAI  
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF  
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2023

| PEGAWAI YANG DINILAI  |                                                                                                                                       |                                              | PEJABAT PENILAI KINERJA |                                                                       |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| NAMA                  | Arief Rokhman, S.E., M.M.                                                                                                             |                                              | NAMA                    | Ratih Hapsari Kusumawardani                                           |
| NIP                   | 197112181992011001                                                                                                                    |                                              | NIP                     | 197101181997032001                                                    |
| PANGKAT/<br>GOL RUANG | Pembina, IV/a                                                                                                                         |                                              | PANGKAT/<br>GOL RUANG   | Pembina Tingkat I, IV/b                                               |
| JABATAN               | Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Gorontalo                                                                       |                                              | JABATAN                 | Plt. Kepala Kantor Wilayah Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo |
| UNIT KERJA            | Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo                                                                  |                                              | UNIT KERJA              | Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo  |
| NO                    | RENCANA HASIL KERJA                                                                                                                   | INDIKATOR KINERJA INDIVIDU                   | TARGET                  | PERSPEKTIF                                                            |
| (1)                   | (2)                                                                                                                                   | (3)                                          | (4)                     | (5)                                                                   |
| A. UTAMA              |                                                                                                                                       |                                              |                         |                                                                       |
| 1.                    | Perbendaharaan negara yang optimal dan akuntabel<br>(Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo) | Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L       | 90                      | Penerima Layanan                                                      |
| 2.                    | Perbendaharaan Negara yang optimal dan akuntabel<br>(Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo) | Indeks kualitas LK Kuasa BUN KKPN            | 3                       | Penerima Layanan                                                      |
| 3.                    | Dukungan manajemen yang efektif<br>(Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah                                                              | Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN | 4,66                    | Penerima Layanan                                                      |



|    |                                                                                                                                                    |                                                                                 |     |               |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|
|    | Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo)                                                                                                        |                                                                                 |     |               |
| 4. | Komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang berkesinambungan (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo)     | Persentase tingkat implementasi standardisasi kompetensi pejabat perbendaharaan | 93  | Proses Bisnis |
| 5. | Komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang berkesinambungan (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo)     | Tingkat efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan                | 89  | Proses Bisnis |
| 6. | Pengelolaan pengeluaran negara yang prudent, efektif dan efisien (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo) | Persentase akurasi perencanaan kas                                              | 80  | Proses Bisnis |
| 7. | Pengelolaan pengeluaran negara yang prudent, efektif dan efisien (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo) | Tingkat kualitas penyelesaian SP2D                                              | 3   | Proses Bisnis |
| 8. | Pelaksanaan anggaran yang optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo)                                | Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah                                | 90  | Proses Bisnis |
| 9. | Pelaksanaan anggaran yang optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah                                                                            | Indeks kualitas implementasi Digipay                                            | 3,1 | Proses Bisnis |



|     |                                                                                                                                                                    |                                                                             |      |                                  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|
|     | Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo)                                                                                                                        |                                                                             |      |                                  |
| 10. | Pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan dan akuntabel (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo)                 | Indeks kualitas pelaksanaan rekonsiliasi tingkat UAKPA                      | 3,25 | Proses Bisnis                    |
| 11. | Pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan dan akuntabel (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo)                 | Indeks kualitas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara K/L                    | 3    | Proses Bisnis                    |
| 12. | Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo) | Tingkat implementasi penajaman tugas Treasury dan Financial Advisory        | 80   | Penguatan Internal atau Anggaran |
| 13. | Organisasi dan SDM yang unggul dan adaptif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo)                                       | Tingkat kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization | 85   | Penguatan Internal atau Anggaran |
| 14. | Organisasi dan SDM yang unggul dan adaptif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo)                                       | Tingkat implementasi Learning Organization                                  | 85   | Penguatan Internal atau Anggaran |



|                    |                                                                                                                                        |                                                           |      |                                  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|----------------------------------|
| 15.                | Organisasi dan SDM yang unggul dan adaptif<br>(Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo)        | Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal | 86   | Penguatan Internal atau Anggaran |
| 16.                | Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang andal<br>(Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo) | Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN             | 95,5 | Penguatan Internal atau Anggaran |
| 17.                | Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang andal<br>(Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo) | Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB                 | 84   | Penguatan Internal atau Anggaran |
| 18.                | Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang andal<br>(Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo) | Persentase kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan         | 100  | Penguatan Internal atau Anggaran |
| <b>B. TAMBAHAN</b> |                                                                                                                                        |                                                           |      |                                  |
| 1.                 | Organisasi dan SDM yang unggul dan adaptif                                                                                             | Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator  | 90   | Penguatan Internal atau Anggaran |





| PERILAKU KERJA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1              | Berorientasi pelayanan                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat</li> <li>- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan</li> <li>- Melakukan perbaikan tiada henti</li> </ul>                                                                                                             | <p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p>     |
| 2              | Akuntabel                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi</li> <li>- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien.</li> <li>- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan</li> </ul> | <p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>                                                 |
| 3              | Kompeten                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah</li> <li>- Membantu orang lain belajar</li> <li>- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik</li> </ul>                                                                                     | <p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p> |
| 4              | Harmonis                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya</li> <li>- Suka menolong orang lain</li> <li>- Membangun lingkungan kerja yang kondusif</li> </ul>                                                                                                                   | <p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif &amp; kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>           |



| PERILAKU KERJA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5              | Loyal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah</li> <li>- Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara</li> <li>- Menjaga rahasia jabatan dan negara</li> </ul> | <p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>                                       |
| 6              | Adaptif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan</li> <li>- Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas</li> <li>- Bertindak proaktif</li> </ul>                                                                                                                                                         | <p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.</p>                                      |
| 7              | Kolaboratif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi</li> <li>- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah</li> <li>- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama</li> </ul>                                                                              | <p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif &amp; kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p> |

30 Januari 2023

Pegawai yang Dinilai,

Pejabat Penilai Kinerja,





Ditandatangani secara elektronik

Arief Rokhman

197112181992011001



Ditandatangani secara elektronik

Ratih Hapsari Kusumawardani

197101181997032001

## LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2023

| DUKUNGAN SUMBER DAYA     |                                                                                             |        |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1.                       | 23 pegawai                                                                                  |        |
| 2.                       | Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain. |        |
| SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN |                                                                                             |        |
| 1.                       | Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan                                                    |        |
|                          | No                                                                                          | IKI    |
|                          |                                                                                             | Target |



|    |                                                                                 | Q1   | Q2   | Smt.1 | Q3   | s.d.Q3 | Q4   | Y    |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|------|--------|------|------|
| 1  | Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L                                          | 90   | 90   | 90    | 90   | 90     | 90   | 90   |
| 2  | Indeks kualitas LK Kuasa BUN KKPN                                               |      |      |       |      |        | 3    | 3    |
| 3  | Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN                                    |      | 4,66 | 4,66  |      |        |      |      |
| 4  | Persentase tingkat implementasi standardisasi kompetensi pejabat perbendaharaan |      | 93   | 93    |      |        | 93   | 93   |
| 5  | Tingkat efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan                |      | 89   | 89    |      |        | 89   | 89   |
| 6  | Persentase akurasi perencanaan kas                                              | 80   | 80   | 80    | 80   | 80     | 80   | 80   |
| 7  | Tingkat kualitas penyelesaian SP2D                                              | 3    | 3    | 3     | 3    | 3      | 3    | 3    |
| 8  | Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah                                | 90   | 90   | 90    | 90   | 90     | 90   | 90   |
| 9  | Indeks kualitas implementasi Digipay                                            | 3,1  | 3,1  | 3,1   | 3,1  | 3,1    | 3,1  | 3,1  |
| 10 | Indeks kualitas pelaksanaan rekonsiliasi tingkat UAKPA                          | 3,25 | 3,25 | 3,25  | 3,25 | 3,25   | 3,25 | 3,25 |
| 11 | Indeks kualitas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara K/L                        | 3    | 3    | 3     | 3    | 3      | 3    | 3    |
| 12 | Tingkat implementasi penajaman tugas Treasury dan Financial Advisory            | 80   | 80   | 80    | 80   | 80     | 80   | 80   |
| 13 | Tingkat kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization     |      |      |       |      |        | 85   | 85   |



|             |                                                                                                                      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 14          | Tingkat implementasi Learning Organization                                                                           | 10   | 40   | 40   | 60   | 60   | 85   | 85   |
| 15          | Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal                                                            |      |      |      |      |      | 86   | 86   |
| 16          | Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN                                                                        | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 |
| 17          | Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB                                                                            |      |      |      |      |      | 84   | 84   |
| 18          | Persentase kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan                                                                    |      |      |      |      |      | 100  | 100  |
| KONSEKUENSI |                                                                                                                      |      |      |      |      |      |      |      |
| 1.          | <i>Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.</i>                     |      |      |      |      |      |      |      |
| 2.          | <i>Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.</i> |      |      |      |      |      |      |      |

30 Januari 2023

Pegawai yang Dinilai,

Pejabat Penilai Kinerja,





Ditandatangani secara elektronik

Arief Rokhman

197112181992011001



Ditandatangani secara elektronik

Ratih Hapsari Kusumawardani

197101181997032001





**EVENTS CALENDER (KALENDER KEGIATAN)**  
**KPPN GORONTALO**  
**PERIODE TAHUN 2023**

| BULAN    | TANGGAL PELAKSANAAN | NAMA KEGIATAN                                                                                               | LOKASI KEGIATAN                     | DESKRIPSI                                                                                                                                                                       | UIC  |
|----------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| JANUARI  | 12 Januari 2023     | FGD Evaluasi Retur 2022                                                                                     | KPPN Gorontalo                      | Dihadiri oleh Satuan Kerja dan perbankan untuk evaluasi retur 2022 sebanyak 190 SP2D, dan rencana Zero Retur tahun 2023                                                         | BANK |
|          | 18 Januari 2023     | Sosialisasi ND Pembukaan Trigger                                                                            | Daring melalui Zoom                 | Dihadiri oleh Pemda untuk penyusunan laporan DAK Fisik 2022 sebagai syarat untuk pengajuan DAK Fisik tahap 1 tahun 2023                                                         |      |
|          | 20 Januari 2023     | Kunjungan ke Pemda                                                                                          | Rumah Dinas Walikota Gorontalo      | Dihadiri oleh Walikota Gorontalo, Setda Kota, Kepala Dinas PUPR, Kesehatan, Pendidikan, dan Kabid PPA II Kanwil DJPB GTO                                                        |      |
|          | Minggu ke-4         | Sosialisasi PMK --210 dan langkah-langkah strategis 2023 dan Apresiasi kepada satker semester II Tahun 2022 | Aula KPPN Gorontalo                 | Kegiatan dilaksanakan bersamaan dengan acara award kppn gorontalo                                                                                                               | MSKI |
| FEBRUARI | Minggu ke-2         | FGD Evaluasi DAK FISIK dan penyampaian Juknis , user OMSPAN, persiapan tahap I                              | Daring melalui Zoom                 | Diikuti oleh BKAD Provinsi, Kota, Kab Gor, Kab. Gorut, Kab. Bone Bolango                                                                                                        | BANK |
|          | Minggu ke-3         | Sosisliasi Digipay BNI                                                                                      | Aula KPPN Gorontalo                 | Kegiatan dilaksanakan dengan dihadiri oleh pegawai BNI, satuan kerja, dan pendamping dari KPPN Gorontalo                                                                        | MSKI |
|          | Minggu ke-4         | MOU KPPN Gorontalo dengan Bank BRI terkait Klinik Digipay002                                                | Aula KPPN Gorontalo                 | Kegiatan dilaksanakan dengan dihadiri oleh pegawai BRI, satuan kerja, dan pendamping dari KPPN Gorontalo                                                                        |      |
| MARET    | Minggu ke-1         | Monev WBBM                                                                                                  | Aula KPPN Gorontalo                 | Kegiatan dilaksanakan oleh seluruh pegawai KPPN Gorontalo dalam rangka KPPN Gorontalo menuju WBBM tahun 2023                                                                    | MSKI |
|          | Minggu ke-1         | Konpers APBN dan Evaluasi PA s.d. bulan Februari                                                            | Aula KPPN Gorontalo                 | Konpers APBN dan Evaluasi PA s.d. bulan Februari                                                                                                                                | BANK |
|          | Minggu ke-1         | Pemasangan Logo InTress di pagar                                                                            | KPPN GORONTALO                      | Sesuai ND Setditjen Nomor 4561 Tanggal 25 Desember 2022 bahwa Implementasi Branding InTress paling lambat September 2023                                                        | UMUM |
|          | Minggu ke-3         | Rombak ruang dokter menjadi ruang laktasi                                                                   | KPPN GORONTALO                      | Implementasi ABW                                                                                                                                                                |      |
|          | Minggu ke-3 atau 4  | Konsolidasi dengan bendahara satuan kerja lingkup KPPN Gorontalo                                            | Aula KPPN Gorontalo                 | Silaturahmi dan konsolidasi dengan seluruh Bendahara Negara lingkup KPPN Gorontalo dalam rangka peningkatan kinerja penyelesaian LPJ Bendahara                                  | VERA |
|          | Minggu ke-4         | Internal Gathering KPPN                                                                                     | KPPN GORONTALO                      | Konsep menyusun                                                                                                                                                                 | UMUM |
| APRIL    | Minggu ke-1         | Monev WBBM                                                                                                  | Aula KPPN Gorontalo                 | Kegiatan dilaksanakan oleh seluruh pegawai KPPN Gorontalo dalam rangka KPPN Gorontalo menuju WBBM tahun 2023                                                                    | MSKI |
|          | Minggu ke-2         | Penambahan Wifi                                                                                             | KPPN GORONTALO                      | Untuk mengcover seluruh ruangan KPPN dalam implementasi ABW                                                                                                                     | UMUM |
|          | Minggu ke-3         | Rombak ruangan middle office                                                                                | KPPN GORONTALO                      | Implementasi ABW                                                                                                                                                                |      |
|          | Minggu ke-4         | Evaluasi Pengelolaan SDM, Jafung dan Kerumahtanggaan (GKM)                                                  | KPPN GORONTALO                      | Dalam rangka memenuhi standardisasi manajemen kegiatan KPPN                                                                                                                     |      |
| MEI      | Minggu ke-1         | Monev WBBM                                                                                                  | Aula KPPN Gorontalo                 | Kegiatan dilaksanakan oleh seluruh pegawai KPPN Gorontalo dalam rangka KPPN Gorontalo menuju WBBM tahun 2023                                                                    | MSKI |
|          | Minggu ke-2         | Refreshment Pejabat Perbendaharaan Smt 1                                                                    | Offline (Kanwil DJPB)/Online (zoom) | Kegiatan dilaksanakan untuk memperoleh sertifikat PPK dan PPSPM untuk satker                                                                                                    |      |
|          | Minggu ke-3         | Capacity Building KPPN                                                                                      | Manado                              | Kegiatan yang diharapkan dapat menambah dan memperbarui motivasi pegawai dalam pelaksanaan tugas.                                                                               | UMUM |
| JUNI     | Minggu ke-1         | Monev WBBM                                                                                                  | Aula KPPN Gorontalo                 | Kegiatan dilaksanakan oleh seluruh pegawai KPPN Gorontalo dalam rangka KPPN Gorontalo menuju WBBM tahun 2023                                                                    | MSKI |
|          | Minggu ke-2         | FGD Evaluasi TKD                                                                                            | Daring melalui Zoom                 | Diikuti oleh BKAD Provinsi, Kota, Kab Gor, Kab. Gorut, Kab. Bone Bolango                                                                                                        | BANK |
|          | Minggu ke-3 atau 4  | Konsolidasi dengan petugas penyusun Laporan Keuangan UAKPA satuan kerja lingkup KPPN Gorontalo              | Aula KPPN Gorontalo                 | Silaturahmi dan konsolidasi dengan seluruh operator atau pejabat penyusun Laporan Keuangan UAKPA lingkup KPPN Gorontalo dalam rangka peningkatan kualitas Lapoaran Keuangan K/L | VERA |
|          | Minggu ke-4         | RTM Semester 1                                                                                              | Aula KPPN Gorontalo                 | Kegiatan diikuti oleh seluruh pegawai KPPN Gorontalo                                                                                                                            | MSKI |
| JULI     | Minggu ke-1         | Monev WBBM                                                                                                  | Aula KPPN Gorontalo                 | Kegiatan dilaksanakan oleh seluruh pegawai KPPN Gorontalo dalam rangka KPPN Gorontalo menuju WBBM tahun 2023                                                                    | MSKI |
|          | Minggu ke-2         | Sosialisasi EPA dan Treasury Award Semester 1                                                               | Aula KPPN Gorontalo                 | Kegiatan dilaksanakan diaula KPPN Gorontalo untuk memberi penghargaan kepada satker dan sosialisasi EPA                                                                         |      |
|          | Minggu ke-3         | Rekonsiliasi Penerimaan Pajak dari Pemda                                                                    | Pemda Wilayah Kerja KPPN            | Pelaksanaan Rekonsiliasi dan penandatanganan Berita Acara Rekonsiliasi Penirimaan Pajak Pusat dari Pemda                                                                        | BANK |
|          | Minggu ke-1         | Monev WBBM                                                                                                  | Aula KPPN Gorontalo                 | Kegiatan dilaksanakan oleh seluruh pegawai KPPN Gorontalo dalam rangka KPPN Gorontalo menuju WBBM tahun 2023                                                                    | MSKI |

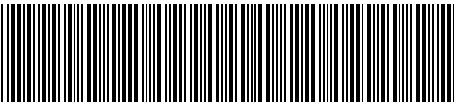
|           |                    |                                                                                                |                                        |                                                                                                                                                                                 |      |
|-----------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| AGUSTUS   | Minggu ke-2        | FGD Evaluasi TKD                                                                               | Daring melalui Zoom                    | Diikuti oleh BKAD Provinsi, Kota, Kab Gor, Kab. Gorut, Kab. Bone Bolango                                                                                                        | BANK |
|           | Minggu ke-2        | Evaluasi Pengelolaan SDM, Jafung dan Kerumahtangaan (GKM)                                      | KPPN GORONTALO                         | Dalam rangka memenuhi standardisasi manajemen kegiatan KPPN                                                                                                                     | UMUM |
| SEPTEMBER | Minggu ke-1        | Monev WBBM                                                                                     | Aula KPPN Gorontalo                    | Kegiatan dilaksanakan oleh seluruh pegawai KPPN Gorontalo dalam rangka KPPN Gorontalo menuju WBBM tahun 2023                                                                    | MSKI |
|           | Minggu ke-2        | Pemasangan Logo InTress di Belakang Resepsionis                                                | KPPN GORONTALO                         | Sesuai ND Setditjen Nomor 4561 Tanggal 25 Desember 2022 bahwa Implementasi Branding InTress paling lambat September 2023                                                        | UMUM |
|           | Minggu ke-3        | Evaluasi Pengelolaan SDM, Jafung dan Kerumahtangaan (GKM)                                      | KPPN GORONTALO                         | Dalam rangka memenuhi standardisasi manajemen kegiatan KPPN                                                                                                                     |      |
| OKTOBER   | Minggu ke-1        | Monev WBBM                                                                                     | Aula KPPN Gorontalo                    | Kegiatan dilaksanakan oleh seluruh pegawai KPPN Gorontalo dalam rangka KPPN Gorontalo menuju WBBM tahun 2023                                                                    | MSKI |
|           | Minggu ke-2        | FGD Evaluasi TKD                                                                               | Daring melalui Zoom                    | Diikuti oleh BKAD Provinsi, Kota, Kab Gor, Kab. Gorut, Kab. Bone Bolango                                                                                                        | BANK |
|           | Minggu ke-3        | Evaluasi Penyerapan Anggaran                                                                   | KPPN GORONTALO                         | Evaluasi Penyerapan Anggaran pada KPPN Gorontalo                                                                                                                                | UMUM |
|           | Minggu ke-4        | Sosialisasi LLAT Tahun 2023                                                                    | Offline (KPPN Gorontalo)/Online (zoom) | Kegiatan ini melibatkan semua satker dengan tujuan untuk memberikan langkah langkah yang diambil dalam rangka pelaksanaan anggaran di akhir tahun                               | MSKI |
| NOVEMBER  | Minggu ke-1        | Monev WBBM                                                                                     | Aula KPPN Gorontalo                    | Kegiatan dilaksanakan oleh seluruh pegawai KPPN Gorontalo dalam rangka KPPN Gorontalo menuju WBBM tahun 2023                                                                    | MSKI |
|           | Minggu ke-2        | Evaluasi Pengelolaan SDM, Jafung dan Kerumahtangaan (GKM)                                      | KPPN GORONTALO                         | Dalam rangka memenuhi standardisasi manajemen kegiatan KPPN                                                                                                                     | UMUM |
|           | Minggu ke-3        | Refreshment Manajemen Kas Daerah                                                               | -                                      | Kolaborasi dengan Kanwil (Bid PA II)                                                                                                                                            | BANK |
|           | Minggu ke-3 atau 4 | Konsolidasi dengan petugas penyusun Laporan Keuangan UAKPA satuan kerja lingkup KPPN Gorontalo | Aula KPPN Gorontalo                    | Silaturahmi dan konsolidasi dengan seluruh operator atau pejabat penyusun Laporan Keuangan UAKPA lingkup KPPN Gorontalo dalam rangka peningkatan kualitas Lapoaran Keuangan K/L | VERA |
|           | Minggu ke-4        | RTM Semester 2                                                                                 | Aula KPPN Gorontalo                    | Kegiatan diikuti oleh seluruh pegawai KPPN Gorontalo                                                                                                                            | MSKI |
| DESEMBER  | Minggu ke-1        | Monev WBBM                                                                                     | Aula KPPN Gorontalo                    | Kegiatan dilaksanakan oleh seluruh pegawai KPPN Gorontalo dalam rangka KPPN Gorontalo menuju WBBM tahun 2023                                                                    | MSKI |
|           | Minggu ke-2        | FGD Evaluasi TKD                                                                               | Daring melalui Zoom                    | Diikuti oleh BKAD Provinsi, Kota, Kab Gor, Kab. Gorut, Kab. Bone Bolango                                                                                                        | BANK |
|           | Minggu ke-2        | Evaluasi Pengelolaan SDM, Jafung dan Kerumahtangaan (GKM)                                      | KPPN GORONTALO                         | Dalam rangka memenuhi standardisasi manajemen kegiatan KPPN                                                                                                                     | UMUM |

Gorontalo, 9 Januari 2023

**KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN  
NEGARA TIPE A1 GORONTALO**

Ditandatangani secara elektronik

Arief Rokhman  
197112181992011001



SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : SP DIPA- 015.08.2.528281/2024

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- 1. Kementerian Negara/Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
- 2. Unit Organisasi : (08) Ditjen Perbendaharaan
- 3. Provinsi : (31) GORONTALO
- 4. Kode>Nama Satker : (528281) KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA GORONTALO
- Sebesar : Rp. 1.947.824.000 ( SATU MILIAR SEMBILAN RATUS EMPAT PULUH TUJUH JUTA DELAPAN RATUS DUA PULUH EMPAT RIBU RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 01 PELAYANAN UMUM
- 01.01 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

|                               |     |               |                                |     |   |
|-------------------------------|-----|---------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni               | Rp. | 1.947.824.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNB                        |     |               | - Pinjaman Dalam Negeri        | Rp. | 0 |
| PNBP TA Berjalan              | Rp. | 0             | - Hibah Dalam Negeri           | Rp. | 0 |
|                               |     |               | 5. Hibah Langsung              | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0             | - Hibah Luar Negeri Langsung   | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri        | Rp. | 0             | - Hibah Dalam Negeri Langsung  | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri           | Rp. | 0             | 6. SBSN PBS                    | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- 1. KPPN GORONTALO (050) Rp. 1.947.824.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Jakarta, 24 November 2023  
A.N. MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.  
ISA RACHMATARWATA  
NIP. 196612301991021001

LAMPIRAN

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2024

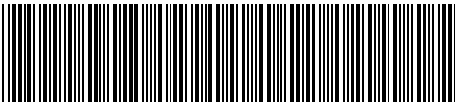
NOMOR : DIPA- 015.08.2.528281/2024



Satker : (528281) KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA GORONTALO

|         |                                                                |     |               |
|---------|----------------------------------------------------------------|-----|---------------|
| CD      | Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko | Rp. | 202.080.000   |
| CD.4803 | Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko              | Rp. | 5.044.000     |
| CD.6212 | Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi                         | Rp. | 172.988.000   |
| CD.6213 | Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko              | Rp. | 14.948.000    |
| CD.6214 | Pengelolaan Kas dan Pembiayaan Negara                          | Rp. | 6.800.000     |
| CD.6215 | Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara        | Rp. | 2.300.000     |
| WA      | Program Dukungan Manajemen                                     | Rp. | 1.745.744.000 |
| WA.4715 | Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum                            | Rp. | 1.418.212.000 |
| WA.4718 | Pengelolaan komunikasi dan informasi publik                    | Rp. | 10.400.000    |
| WA.4719 | Pengelolaan Organisasi dan SDM                                 | Rp. | 317.132.000   |

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 015.08.2.528281/2024  
I A. INFORMASI KINERJA

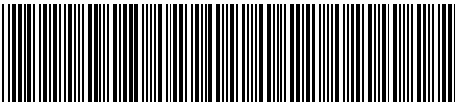


DS:8804-3286-5603-2550

Kementerian Negara/Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN  
Unit Organisasi : (08) Ditjen Perbendaharaan  
Provinsi : (31) GORONTALO  
Kode>Nama Satker : (528281) KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA GORONTALO

|                            |   |           |                                                                                             |        |                               |             |
|----------------------------|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------|-------------|
| Program                    | : | 015.08.CD | Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko                              |        |                               | 202.080.000 |
| Kegiatan                   | : | 4803      | Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko                                           |        |                               | 5.044.000   |
| Indikator Kinerja Kegiatan | : | 1. 01     | Rata-rata indeks kualitas Evaluasi Pelaksanaan Anggaran K/L                                 |        |                               |             |
| Klasifikasi Rincian Output | 1 | :         | 4803.FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan                                            | 2,00   | Laporan, Rekomendasi          | 5.044.000   |
| Rincian Output             | : | 01        | FAE.001 Rekomendasi atas Kinerja Investasi Pemerintah                                       | 2.00   | Rekomendasi                   | 5.044.000   |
| Kegiatan                   | : | 6212      | Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi                                                      |        |                               | 172.988.000 |
|                            | : | 1. 01     | Tingkat efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan                            |        |                               |             |
|                            | : | 2. 02     | Persentase Implementasi Jabatan Fungsional di Bidang Perbendaharaan                         |        |                               |             |
| Klasifikasi Rincian Output | 2 | :         | 6212.FAC Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara                                              | 225,00 | Orang, KL, Daerah, Unit Kerja | 37.040.000  |
| Rincian Output             | : | 01        | FAC.001 Komunikasi dan Edukasi Implementasi Aplikasi                                        | 225.00 | Unit Kerja                    | 37.040.000  |
| Klasifikasi Rincian Output | 3 | :         | 6212.FAH Pengelolaan Keuangan Negara                                                        | 4,00   | Laporan                       | 58.240.000  |
| Rincian Output             | : | 01        | FAH.001 Edukasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN                  | 4.00   | Laporan                       | 58.240.000  |
| Klasifikasi Rincian Output | 4 | :         | 6212.FAL Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran dan Pembiayaan                                    | 10,00  | Dokumen, Kegiatan             | 77.708.000  |
| Rincian Output             | : | 01        | FAL.004 Konsultasi Pencairan Dana                                                           | 10.00  | Kegiatan                      | 77.708.000  |
| Kegiatan                   | : | 6213      | Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko                                           |        |                               | 14.948.000  |
|                            | : | 1. 01     | Rata-rata indeks kualitas Evaluasi Pelaksanaan Anggaran K/L                                 |        |                               |             |
|                            | : | 2. 02     | Persentase BLU yang kinerja dan tata kelolanya baik sesuai hasil maturity rating assessment |        |                               |             |
|                            | : | 3. 03     | Persentase Pencapaian Target Pendapatan BLU                                                 |        |                               |             |

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 015.08.2.528281/2024  
I A. INFORMASI KINERJA



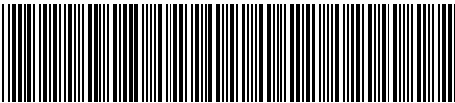
DS:8804-3286-5603-2550

Kementerian Negara/Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN  
Unit Organisasi : (08) Ditjen Perbendaharaan  
Provinsi : (31) GORONTALO  
Kode>Nama Satker : (528281) KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA GORONTALO

|                            |   |   |            |                                                                                       |          |                               |               |
|----------------------------|---|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|---------------|
| Klasifikasi Rincian Output | 5 | : | 6213.FAC   | Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara                                                 | 10,00    | Orang, KL, Daerah, Unit Kerja | 2.760.000     |
| Rincian Output             |   | : | 01 FAC.001 | Monev Pengembangan Kompetensi KPA, PPK, PPSPM, Bendahara dan Pengelola Perbendaharaan | 10.00    | Orang                         | 2.760.000     |
| Klasifikasi Rincian Output | 6 | : | 6213.FAL   | Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran dan Pembiayaan                                       | 2,00     | Dokumen, Kegiatan             | 12.188.000    |
| Rincian Output             |   | : | 01 FAL.001 | Monev Penerimaan dan Pengeluaran Kas                                                  | 1.00     | Kegiatan                      | 6.094.000     |
|                            |   | : | 02 FAL.003 | Reviu Belanja Pemerintah                                                              | 1.00     | Dokumen                       | 6.094.000     |
| Kegiatan                   |   | : | 6214       | Pengelolaan Kas dan Pembiayaan Negara                                                 |          |                               | 6.800.000     |
| Indikator Kinerja Kegiatan |   | : | 1. 00      | Indeks optimalisasi kas negara                                                        |          |                               |               |
|                            |   | : | 2. 03      | Indeks Efektivitas Pengelolaan Kas, Pinjaman dan Hibah                                |          |                               |               |
| Klasifikasi Rincian Output | 7 | : | 6214.FAL   | Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran dan Pembiayaan                                       | 5.281,00 | Dokumen, Kegiatan             | 6.800.000     |
| Rincian Output             |   | : | 01 FAL.001 | Koordinasi dan Rekonsiliasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas                            | 1.00     | Dokumen                       | 2.800.000     |
|                            |   | : | 02 FAL.002 | Surat Perintah Pencairan/Penarikan/Repayment/Pengesahan Dana                          | 5280.00  | Dokumen                       | 4.000.000     |
| Kegiatan                   |   | : | 6215       | Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara                               |          |                               | 2.300.000     |
|                            |   | : | 1. 01      | Persentase instansi Pemerintah Pusat (K/L) yang mendapatkan opini WTP                 |          |                               |               |
|                            |   | : | 2. 02      | Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti            |          |                               |               |
| Klasifikasi Rincian Output | 8 | : | 6215.FAH   | Pengelolaan Keuangan Negara                                                           | 4,00     | Laporan                       | 2.300.000     |
| Rincian Output             |   | : | 01 FAH.003 | Laporan Keuangan BUN                                                                  | 4.00     | Laporan                       | 2.300.000     |
| Program                    |   | : | 015.08.WA  | Program Dukungan Manajemen                                                            |          |                               | 1.745.744.000 |



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 015.08.2.528281/2024  
I A. INFORMASI KINERJA

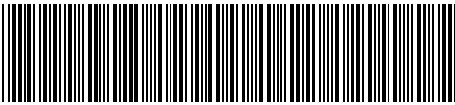


DS:8804-3286-5603-2550

Kementerian Negara/Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN  
Unit Organisasi : (08) Ditjen Perbendaharaan  
Provinsi : (31) GORONTALO  
Kode>Nama Satker : (528281) KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA GORONTALO

|                              |   |          |                                                                   |      |                                              |               |
|------------------------------|---|----------|-------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|---------------|
| Kegiatan                     | : | 4715     | Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum                               |      |                                              | 1.418.212.000 |
| Indikator Kinerja Kegiatan   | : | 1. 01    | Persentase kualitas pelaksanaan anggaran                          |      |                                              |               |
|                              |   | 2. 02    | Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan                 |      |                                              |               |
| Klasifikasi Rincian Output 1 | : | 4715.EBA | Layanan Dukungan Manajemen Internal                               | 3,00 | Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit | 1.412.462.000 |
| Rincian Output               | : | 01       | EBA.001 Kerumahtanggaan                                           | 1.00 | Layanan                                      | 71.600.000    |
|                              |   | 02       | EBA.002 Dukungan Pimpinan dan Keprotokoleran                      | 1.00 | Layanan                                      | 21.588.000    |
|                              |   | 03       | EBA.994 Layanan Perkantoran                                       | 1.00 | Layanan                                      | 1.319.274.000 |
| Klasifikasi Rincian Output 2 | : | 4715.EBD | Layanan Manajemen Kinerja Internal                                | 3,00 | Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi       | 5.750.000     |
| Rincian Output               | : | 01       | EBD.001 Rencana Kerja dan Anggaran Unit                           | 1.00 | Dokumen                                      | 2.700.000     |
|                              |   | 02       | EBD.003 Dokumen Pengelolaan Kinerja Organisasi                    | 2.00 | Dokumen                                      | 3.050.000     |
| Kegiatan                     | : | 4718     | Pengelolaan komunikasi dan informasi publik                       |      |                                              | 10.400.000    |
|                              | : | 1. 01    | Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan                            |      |                                              |               |
| Klasifikasi Rincian Output 3 | : | 4718.BMB | Komunikasi Publik                                                 | 3,00 | layanan, kegiatan, Media, Orang, Volume      | 10.400.000    |
| Rincian Output               | : | 01       | BMB.001 Pembinaan/Edukasi Publik                                  | 2.00 | kegiatan                                     | 5.400.000     |
|                              |   | 02       | BMB.002 Kehumasan                                                 | 1.00 | kegiatan                                     | 5.000.000     |
| Kegiatan                     | : | 4719     | Pengelolaan Organisasi dan SDM                                    |      |                                              | 317.132.000   |
|                              | : | 1. 01    | Nilai Kualitas Pengelolaan Kinerja berbasis SFO                   |      |                                              |               |
|                              |   | 2. 02    | Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan |      |                                              |               |

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 015.08.2.528281/2024  
I A. INFORMASI KINERJA



DS:8804-3286-5603-2550

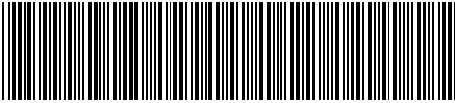
Kementerian Negara/Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN  
Unit Organisasi : (08) Ditjen Perbendaharaan  
Provinsi : (31) GORONTALO  
Kode>Nama Satker : (528281) KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA GORONTALO

|                            |   |   |          |                                     |                                                    |                                              |             |             |
|----------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|-------------|
| Klasifikasi Rincian Output | 4 | : | 4719.EBA | Layanan Dukungan Manajemen Internal | 3,00                                               | Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit | 306.992.000 |             |
| Rincian Output             |   | : | 01       | EBA.004                             | Hasil Survey/Rekomendasi Kepuasan Pengguna Layanan | 2.00                                         | Laporan     | 2.000.000   |
|                            |   | : | 02       | EBA.994                             | Layanan Perkantoran                                | 1.00                                         | Layanan     | 304.992.000 |
| Klasifikasi Rincian Output | 5 | : | 4719.EBC | Layanan Manajemen SDM Internal      | 22,00                                              | Orang, Layanan, Rekomendasi                  | 10.140.000  |             |
| Rincian Output             |   | : | 01       | EBC.001                             | Pengembangan SDM                                   | 22.00                                        | Orang       | 10.140.000  |

Jakarta, 24 November 2023  
Direktur Jenderal Perbendaharaan

ttd.  
ASTERA PRIMANTO BHAKTI  
NIP. 196801201992011003

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 015.08.2.528281/2024  
I B. SUMBER DANA



DS:8804-3286-5603-2550

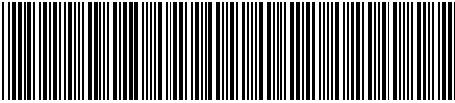
Kementerian Negara/Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN  
Unit Organisasi : (08) Ditjen Perbendaharaan  
Provinsi : (31) GORONTALO  
Kode>Nama Satker : (528281) KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA GORONTALO

|                                |     |               | Pagu  |                                          | Ekuivalen Rupiah |       |
|--------------------------------|-----|---------------|-------|------------------------------------------|------------------|-------|
| 1. Anggaran Tahun 2024         | Rp. | 1.947.824.000 | Ket : | a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing | US\$             | 0 Rp. |
| 1. Rupiah Murni                | Rp. | 1.947.824.000 |       | (2) RPLN                                 | US\$             | 0 Rp. |
| 2. PNPB                        | Rp. | 0             |       | b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing    | US\$             | 0 Rp. |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri  | Rp. | 0             |       | (2) RHLN                                 | US\$             | 0 Rp. |
| 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0             |       | c. Pinjaman Dalam Negeri                 | IDR              | 0     |
| 5. Hibah Langsung              | Rp. | 0             |       | d. Hibah Dalam Negeri                    | IDR              | 0     |
| 6. SBSN PBS                    | Rp. | 0             |       | e. Hibah Luar Negeri Langsung            | IDR              | 0     |
| 2. Rincian Pinjaman / Hibah :  |     |               |       | f. Hibah Dalam Negeri Langsung           | IDR              | 0     |

(dalam ribuan rupiah)

| No. | SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH<br>No. NPP/H per Tahun<br>No. Register |        | PAGU TAHUN INI |      | RINCIAN DANA BERDASARKAN<br>CARA PENARIKAN |      | DANA PENDAMPING |       |             |
|-----|------------------------------------------------------------------|--------|----------------|------|--------------------------------------------|------|-----------------|-------|-------------|
|     | Kode                                                             | Uraian | Kode           | Dana | Kode                                       | Dana | Rp. Pdp         | Rp.LN | Rp.Loc.Cost |
| 1   | 2                                                                | 3      | 4              | 5    | 6                                          | 7    | 8               | 9     | 10          |
|     |                                                                  |        |                |      |                                            |      |                 |       |             |

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 015.08.2.528281/2024  
II. RINCIAN PENGELUARAN



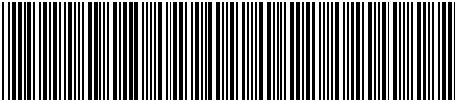
DS:8804-3286-5603-2550

Kementerian Negara/Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN  
Unit Organisasi : (08) Ditjen Perbendaharaan  
Provinsi : (31) GORONTALO  
Kode>Nama Satker : (528281) KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA GORONTALO  
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1  
(dalam ribuan rupiah)

| KODE      | URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA                                | BELANJA         |                |               |                           |                   |                        | LOKASI/<br>KPPN | CARA<br>PENARIKAN/<br>REGISTER |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------------------|-------------------|------------------------|-----------------|--------------------------------|
|           |                                                                               | PEGAWAI<br>[51] | BARANG<br>[52] | MODAL<br>[53] | BANTUAN<br>SOSIAL<br>[57] | LAIN-LAIN<br>[58] | JUMLAH<br>SELURUH<br>8 |                 |                                |
| 1         | 2                                                                             | 3               | 4              | 5             | 6                         | 7                 | 8                      | 9               | 10                             |
| 528281    | KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA GORONTALO                              | 304.992         | 1.642.832      | -             | -                         | -                 | 1.947.824              | 31 . 51         |                                |
| 015.08.CD | Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko                | -               | 202.080        | -             | -                         | -                 | 202.080                |                 |                                |
| 4803      | Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko                             | -               | 5.044          | -             | -                         | -                 | 5.044                  |                 |                                |
| 4803.FAE  | Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan<br>(31.51 GORONTALO / KOTA GORONTALO) | -               | 5.044          | -             | -                         | -                 | 5.044                  |                 |                                |
| 01        | RM                                                                            | -               | 5.044          | -             | -                         | -                 | 5.044                  |                 |                                |
| 6212      | Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi                                        | -               | 172.988        | -             | -                         | -                 | 172.988                |                 |                                |
| 6212.FAC  | Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara<br>(31.51 GORONTALO / KOTA GORONTALO)   | -               | 37.040         | -             | -                         | -                 | 37.040                 |                 |                                |
| 01        | RM                                                                            | -               | 37.040         | -             | -                         | -                 | 37.040                 |                 |                                |
| 6212.FAH  | Pengelolaan Keuangan Negara<br>(31.51 GORONTALO / KOTA GORONTALO)             | -               | 58.240         | -             | -                         | -                 | 58.240                 |                 |                                |
| 01        | RM                                                                            | -               | 58.240         | -             | -                         | -                 | 58.240                 |                 |                                |

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 015.08.2.528281/2024  
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:8804-3286-5603-2550

Kementerian Negara/Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN  
Unit Organisasi : (08) Ditjen Perbendaharaan  
Provinsi : (31) GORONTALO  
Kode>Nama Satker : (528281) KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA GORONTALO  
Kewenangan : (KD)

| KODE     | URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA                                        | BELANJA         |                |               |                           |                   |                        | LOKASI/<br>KPPN | CARA<br>PENARIKAN/<br>REGISTER |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------------------|-------------------|------------------------|-----------------|--------------------------------|
|          |                                                                                       | PEGAWAI<br>[51] | BARANG<br>[52] | MODAL<br>[53] | BANTUAN<br>SOSIAL<br>[57] | LAIN-LAIN<br>[58] | JUMLAH<br>SELURUH<br>8 |                 |                                |
| 1        | 2                                                                                     | 3               | 4              | 5             | 6                         | 7                 | 8                      | 9               | 10                             |
| 6212.FAL | Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran dan Pembiayaan<br>(31.51 GORONTALO / KOTA GORONTALO) | -               | 77.708         | -             | -                         | -                 | 77.708                 | 31 . 51         |                                |
| 01 RM    |                                                                                       | -               | 77.708         | -             | -                         | -                 | 77.708                 | 050             |                                |
| 6213     | Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko                                     | -               | 14.948         | -             | -                         | -                 | 14.948                 |                 |                                |
| 6213.FAC | Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara<br>(31.51 GORONTALO / KOTA GORONTALO)           | -               | 2.760          | -             | -                         | -                 | 2.760                  | 31 . 51         |                                |
| 01 RM    |                                                                                       | -               | 2.760          | -             | -                         | -                 | 2.760                  | 050             |                                |
| 6213.FAL | Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran dan Pembiayaan<br>(31.51 GORONTALO / KOTA GORONTALO) | -               | 12.188         | -             | -                         | -                 | 12.188                 | 31 . 51         |                                |
| 01 RM    |                                                                                       | -               | 12.188         | -             | -                         | -                 | 12.188                 | 050             |                                |
| 6214     | Pengelolaan Kas dan Pembiayaan Negara                                                 | -               | 6.800          | -             | -                         | -                 | 6.800                  |                 |                                |
| 6214.FAL | Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran dan Pembiayaan<br>(31.51 GORONTALO / KOTA GORONTALO) | -               | 6.800          | -             | -                         | -                 | 6.800                  | 31 . 51         |                                |
| 01 RM    |                                                                                       | -               | 6.800          | -             | -                         | -                 | 6.800                  | 050             |                                |

DS:8804-3286-5603-2550

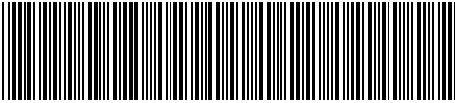
Kementerian Negara/Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN  
Unit Organisasi : (08) Ditjen Perbendaharaan  
Provinsi : (31) GORONTALO  
Kode>Nama Satker : (528281) KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA GORONTALO  
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 3  
(dalam ribuan rupiah)

[illegible]



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 015.08.2.528281/2024  
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:8804-3286-5603-2550

Kementerian Negara/Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN  
Unit Organisasi : (08) Ditjen Perbendaharaan  
Provinsi : (31) GORONTALO  
Kode>Nama Satker : (528281) KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA GORONTALO  
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 4  
(dalam ribuan rupiah)

| KODE     | URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA | BELANJA         |                |               |                           |                   |                        | LOKASI/<br>KPPN | CARA<br>PENARIKAN/<br>REGISTER |
|----------|------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------------------|-------------------|------------------------|-----------------|--------------------------------|
|          |                                                | PEGAWAI<br>[51] | BARANG<br>[52] | MODAL<br>[53] | BANTUAN<br>SOSIAL<br>[57] | LAIN-LAIN<br>[58] | JUMLAH<br>SELURUH<br>8 |                 |                                |
| 1        | 2                                              | 3               | 4              | 5             | 6                         | 7                 | 8                      | 9               | 10                             |
| 4718.BMB | Komunikasi Publik                              | -               | 10.400         | -             | -                         | -                 | 10.400                 | 31 . 51         |                                |
|          | (31.51 GORONTALO / KOTA GORONTALO)             |                 |                |               |                           |                   |                        |                 |                                |
| 01       | RM                                             | -               | 10.400         | -             | -                         | -                 | 10.400                 | 050             |                                |
| 4719     | Pengelolaan Organisasi dan SDM                 | 304.992         | 12.140         | -             | -                         | -                 | 317.132                |                 |                                |
| 4719.EBA | Layanan Dukungan Manajemen Internal            | 304.992         | 2.000          | -             | -                         | -                 | 306.992                | 31 . 51         |                                |
|          | (31.51 GORONTALO / KOTA GORONTALO)             |                 |                |               |                           |                   |                        |                 |                                |
| 01       | RM                                             | 304.992         | 2.000          | -             | -                         | -                 | 306.992                | 050             |                                |
| 4719.EBC | Layanan Manajemen SDM Internal                 | -               | 10.140         | -             | -                         | -                 | 10.140                 |                 |                                |
|          | (31.51 GORONTALO / KOTA GORONTALO)             |                 |                |               |                           |                   |                        |                 |                                |
| 01       | RM                                             | -               | 10.140         | -             | -                         | -                 | 10.140                 | 050             |                                |
| JUMLAH   |                                                | 304.992         | 1.642.832      | -             | -                         | -                 | 1.947.824              |                 |                                |

Jakarta, 24 November 2023  
Direktur Jenderal Perbendaharaan

ttd.  
ASTERA PRIMANTO BHAKTI  
NIP. 196801201992011003



DS:8804-3286-5603-2550

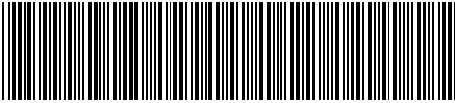
DS:8804-3286-5603-2550

Kode>Nama Satker : (528281) KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA GORONTALO

Halaman : III. 1  
(dalam ribuan rupiah)

[illegible]

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 015.08.2.528281/2024  
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:8804-3286-5603-2550

Kementerian Negara/Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN  
Unit Organisasi : (08) Ditjen Perbendaharaan  
Provinsi : (31) GORONTALO  
Kode>Nama Satker : (528281) KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA GORONTALO

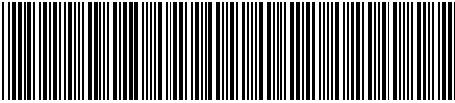
Halaman : III. 2  
(dalam ribuan rupiah)

| NO             | KODE | URAIAN SATKER                               | RENCANA PENARIKAN |          |         |         |         |         |         |         |           |         |          |          | JUMLAH<br>SELURUH |
|----------------|------|---------------------------------------------|-------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|----------|----------|-------------------|
|                |      |                                             | JANUARI           | FEBRUARI | MARET   | APRIL   | MEI     | JUNI    | JULI    | AGUSTUS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER |                   |
| 1              | 2    | 3                                           | 4                 | 5        | 6       | 7       | 8       | 9       | 10      | 11      | 12        | 13      | 14       | 15       | 16                |
| 015.08.WA.4718 |      | 52 BELANJA BARANG DAN BARANG                | 118.173           | 118.173  | 118.173 | 118.173 | 118.173 | 118.173 | 118.173 | 118.173 | 118.173   | 118.173 | 118.173  | 118.309  | 1.418.212         |
|                |      | Pengelolaan komunikasi dan informasi publik | 865               | 865      | 865     | 865     | 865     | 865     | 865     | 865     | 865       | 865     | 865      | 885      | 10.400            |
| 015.08.WA.4719 |      | 52 BELANJA BARANG DAN BARANG                | 865               | 865      | 865     | 865     | 865     | 865     | 865     | 865     | 865       | 865     | 865      | 885      | 10.400            |
|                |      | Pengelolaan Organisasi dan SDM              | 26.426            | 26.426   | 26.426  | 26.426  | 26.426  | 26.426  | 26.426  | 26.426  | 26.426    | 26.426  | 26.426   | 26.446   | 317.132           |
|                |      | 51 BELANJA PEGAWAI                          | 25.416            | 25.416   | 25.416  | 25.416  | 25.416  | 25.416  | 25.416  | 25.416  | 25.416    | 25.416  | 25.416   | 25.416   | 304.992           |
|                |      | 52 BELANJA BARANG DAN BARANG                | 1.010             | 1.010    | 1.010   | 1.010   | 1.010   | 1.010   | 1.010   | 1.010   | 1.010     | 1.010   | 1.010    | 1.030    | 12.140            |

Jakarta, 24 November 2023  
Direktur Jenderal Perbendaharaan

ttd.  
ASTERA PRIMANTO BHAKTI  
NIP. 196801201992011003

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 015.08.2.528281/2024  
IV A. B L O K I R



DS:8804-3286-5603-2550

Kementerian Negara/Lembaga : [015] KEMENTERIAN KEUANGAN  
Unit Organisasi : [08] Ditjen Perbendaharaan  
Provinsi : [31] GORONTALO  
Kode dan Nama Satker : [528281] KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA GORONTALO

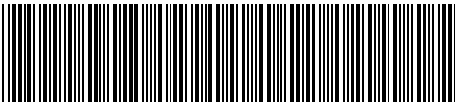
Halaman : IV.A. 1  
(dalam ribuan rupiah)

| KODE | URAIAN | KODE | URAIAN |
|------|--------|------|--------|
|      |        |      |        |

Jakarta, 24 November 2023  
Direktur Jenderal Perbendaharaan

ttd.  
ASTERA PRIMANTO BHAKTI  
NIP. 196801201992011003

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 015.08.2.528281/2024  
IV B. C A T A T A N



DS:8804-3286-5603-2550

Kementerian Negara/Lembaga : [015] KEMENTERIAN KEUANGAN  
Unit Organisasi : [08] Ditjen Perbendaharaan  
Provinsi : [31] GORONTALO  
Kode dan Nama Satker : [528281] KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA GORONTALO

Halaman : IV.B. 1  
(dalam ribuan rupiah)

| KODE | URAIAN | KODE | URAIAN |
|------|--------|------|--------|
|      |        |      |        |

Jakarta, 24 November 2023  
Direktur Jenderal Perbendaharaan

ttd.  
ASTERA PRIMANTO BHAKTI  
NIP. 196801201992011003

**MATRIKS CASCADING**  
Unit Pemilik Kinerja : KPPN GORONTALO

| Kemenkeu <i>Three</i>                                                            |                                                                                    |                   |                          | Kemenkeu <i>Four</i>                            |                                                                                  |                                                                                    |                   |                            |                           | Kemenkeu <i>Five</i>  |                   |          |        |                            |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|----------|--------|----------------------------|---------------------------|
| Sasaran Strategis                                                                | Nama IKU                                                                           | Target            | Jenis Konsolidasi Lokasi | <i>Unit in charge</i>                           | Sasaran Strategis                                                                | Nama IKU                                                                           | Target            | Jenis <i>Cascading</i> IKU | Validitas dan Kendali IKU | <i>Unit in charge</i> | Sasaran Strategis | Nama IKU | Target | Jenis <i>Cascading</i> IKU | Validitas dan Kendali IKU |
| Perbendaharaan Negara yang optimal dan akuntabel                                 | Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L                                             | 90                | -                        | Seksi MSKI                                      | Perbendaharaan Negara yang optimal dan akuntabel                                 | Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L                                             | 90                | CP                         |                           |                       |                   |          |        |                            |                           |
|                                                                                  | Indeks Kualitas LK Kuasa BUN KKPn                                                  | 3<br>(Skala 4)    | -                        | Seksi Vera                                      |                                                                                  | Indeks Kualitas LK Kuasa BUN KKPn                                                  | 3<br>(Skala 4)    | CP                         |                           |                       |                   |          |        |                            |                           |
| Dukungan manajemen yang efektif                                                  | Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN                                       | 4,66<br>(Skala 5) | Average                  | Seksi PD, Seksi Bank, Seksi MSKI dan Seksi Vera | Dukungan manajemen yang efektif                                                  | Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN                                       | 4,66<br>(Skala 5) | CP                         |                           |                       |                   |          |        |                            |                           |
| Komunikasi, edukasi dan standarisasi yang berkesinambungan                       | Persentase tingkat implementasi standarisasi kompetensi pejabat perbendaharaan     | 93%               | -                        | Seksi MSKI                                      | Komunikasi, edukasi dan standarisasi yang berkesinambungan                       | Persentase tingkat implementasi standarisasi kompetensi pejabat perbendaharaan     | 93%               | CP                         |                           |                       |                   |          |        |                            |                           |
|                                                                                  | Tingkat efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan                   | 89                | -                        | Seksi MSKI dan PTPN                             |                                                                                  | Tingkat efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan                   | 89                | CP                         |                           |                       |                   |          |        |                            |                           |
| Pengelolaan pengeluaran negara yang <i>prudent</i> , efektif dan efisien         | Persentase akurasi perencanaan kas                                                 | 80%               | -                        | Seksi PD, Seksi Bank dan Seksi MSKI             | Pengelolaan pengeluaran negara yang <i>prudent</i> , efektif dan efisien         | Persentase akurasi perencanaan kas                                                 | 80%               | CP                         |                           |                       |                   |          |        |                            |                           |
|                                                                                  | Tingkat kualitas penyelesaian SP2D                                                 | 3(skala 5)        | -                        | Seksi PD dan Seksi Bank                         |                                                                                  | Tingkat kualitas penyelesaian SP2D                                                 | 3(skala 5)        | CP                         |                           |                       |                   |          |        |                            |                           |
| Pelaksanaan anggaran yang optimal                                                | Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah                                   | 90.00             | Raw Data                 | Seksi Bank dan Seksi Vera                       | Pelaksanaan anggaran yang optimal                                                | Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah                                   | 90.00             | CP                         |                           |                       |                   |          |        |                            |                           |
|                                                                                  | Indeks kualitas implementasi <i>Digipay</i>                                        | 3,1<br>(skala 4)  | -                        | Seksi MSKI                                      |                                                                                  | Indeks kualitas implementasi <i>Digipay</i>                                        | 3,1<br>(skala 4)  | CP                         |                           |                       |                   |          |        |                            |                           |
| Pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan dan akuntabel                 | Indeks Kualitas Pelaksanaan Rekonsiliasi Tingkat UAKPA                             | 3,25<br>(skala 4) | -                        | Seksi Vera                                      | Pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan dan akuntabel                 | Indeks Kualitas Pelaksanaan Rekonsiliasi Tingkat UAKPA                             | 3,25<br>(skala 4) | CP                         |                           |                       |                   |          |        |                            |                           |
|                                                                                  | Indeks kualitas Laporan Pertanggungjawab an Bendahara K/L                          | 3<br>(skala 4)    | -                        | Seksi Vera                                      |                                                                                  | Indeks kualitas Laporan Pertanggungjawab an Bendahara K/L                          | 3<br>(skala 4)    | CP                         |                           |                       |                   |          |        |                            |                           |
| Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif | Tingkat implementasi penajaman tugas <i>Treasury</i> dan <i>Financial Advisory</i> | 80%               | -                        | Seluruh Unit                                    | Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif | Tingkat implementasi penajaman tugas <i>Treasury</i> dan <i>Financial Advisory</i> | 80%               | CP                         |                           |                       |                   |          |        |                            |                           |



|                                                   |                                                                                    |       |   |                |                                                   |                                                                                    |       |    |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|----------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|--|--|--|--|--|--|--|
| Organisasi dan SDM yang unggul dan adaptif        | Tingkat kualitas pengelolaan kinerja berbasis <i>Strategy Focused Organization</i> | 85    | - | Subbagian Umum | Organisasi dan SDM yang unggul dan adaptif        | Tingkat kualitas pengelolaan kinerja berbasis <i>Strategy Focused Organization</i> | 85    | CP |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                   | Tingkat implementasi <i>Learning Organization</i>                                  | 85    | - | Subbagian Umum |                                                   | Tingkat implementasi <i>Learning Organization</i>                                  | 85    | CP |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                   | Nilai hasil kualitas pelaksanaan tugas kepatuhan internal                          | 86    | - | Seksi MSKI     |                                                   | Nilai hasil kualitas pelaksanaan tugas kepatuhan internal                          | 86    | CP |  |  |  |  |  |  |  |
| Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang andal | Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN                                      | 95.5% | - | Subbagian Umum | Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang andal | Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN                                      | 95.5% | CP |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                   | Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB                                          | 84    | - | Subbagian Umum |                                                   | Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB                                          | 84    | CP |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                   | Persentase kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan                                  | 100%  | - | Subbagian Umum |                                                   | Persentase kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan                                  | 100%  | CP |  |  |  |  |  |  |  |

## FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

Unit Organisasi Eselon III Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Gorontalo  
Tahun Anggaran 2023

| No. | Sasaran Strategis                                                                | Indikator Kinerja Utama |                                                                                 | Target | Realisasi | %       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|
| (1) | (2)                                                                              | (3)                     | (4)                                                                             | (5)    | (6)       | (7)     |
| 1   | Perbendaharaan Negara yang optimal dan akuntabel                                 | 1a-CP                   | Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L                                          | 90     | 95        | 105,56% |
|     |                                                                                  | 1b-N                    | Indeks Kualitas LK Kuasa BUN KPPN                                               | 3      | 4         | 133,33% |
| 2   | Dukungan manajemen yang efektif                                                  | 2a-N                    | Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN                                    | 4,66   | 4,84      | 103,86% |
| 3   | Komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang berkesinambungan                     | 3a-N                    | Persentase tingkat implementasi standardisasi kompetensi pejabat perbendaharaan | 93%    | 95%       | 102,15% |
|     |                                                                                  | 3b-N                    | Tingkat efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan                | 89     | 96,55     | 108,48% |
| 4   | Pengelolaan pengeluaran negara yang prudent, efektif, dan efisien                | 4a-CP                   | Persentase akurasi perencanaan kas                                              | 80%    | 97,97%    | 122,46% |
|     |                                                                                  | 4b-N                    | Tingkat kualitas penyelesaian SP2D                                              | 3      | 5         | 166,67% |
| 5   | Pelaksanaan anggaran yang optimal                                                | 5a-CP                   | Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa                  | 90%    | 99,51%    | 110,57% |
|     |                                                                                  | 5b-N                    | Indeks kualitas Implementasi Digipay                                            | 3,1    | 4         | 129,03% |
| 6   | Pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan dan akuntabel                 | 6a-CP                   | Indeks Kualitas Pelaksanaan Rekonsiliasi tingkat UAKPA                          | 3,25   | 4         | 123,08% |
|     |                                                                                  | 6b-N                    | Indeks kualitas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara K/L                        | 3      | 4         | 133,33% |
| 7   | Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif | 7a-CP                   | Tingkat implementasi penajaman tugas Treasury dan Financial Advisory            | 80     | 99,62%    | 1,25%   |
| 8   | Organisasi dan SDM yang unggul dan adaptif                                       | 8a-N                    | Tingkat kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization     | 85     | 89,26     | 105,01% |
|     |                                                                                  | 8b-N                    | Tingkat Implementasi Learning Organization                                      | 85     | 100       | 117,65% |
|     |                                                                                  | 8c-N                    | Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal                       | 86     | 91,28     | 106,14% |
| 9   | Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang andal                                | 9a-CP                   | Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN                                   | 95,50% | 99,98%    | 104,69% |
|     |                                                                                  | 9b-N                    | Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB                                       | 84     | 96        | 114,29% |
|     |                                                                                  | 9c-N                    | Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan                               | 100%   | 120%      | 120,00% |

Jumlah Anggaran Program Tahun 2023

: Rp 2.350.256.000

Jumlah Realisasi Anggaran Program Tahun 2023

: Rp 2.349.168.120

### LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

NAMA UNIT : KPPN Gorontalo  
 PERIODE PELAPORAN : s.d. Triwulan I Tahun 2023

| No. | IKU/IKI                                                                          | Q1     |           | Q2     |           | Sm.1   |           | Q3     |           | s.d.Q3 |           | Q4     |           | Y      |           |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
|     |                                                                                  | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi |
| 1.  | 1a-CP Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L                                     | 90     | 91,57     | 90     | -         | 90     | -         | 90     | -         | 90     | -         | 90     | -         | 90     | -         |
| 2.  | 1b-N Indeks kualitas LK Kuasa BUN KPPN                                           | -      | -         | -      | -         | -      | -         | -      | -         | -      | -         | 3      | -         | 3      | -         |
| 3.  | 2a-N Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN                                | -      | -         | 4,66   | -         | 4,66   | -         | -      | -         | 4,66   | -         | 4,66   | -         | 4,66   | -         |
| 4.  | 3a-N Persentase tingkat implementasi kompetensi pejabat perbendaharaan           | -      | -         | 93%    | -         | 93%    | -         | -      | -         | 93%    | -         | 93%    | -         | 93%    | -         |
| 5.  | 3b-N Tingkat efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan            | -      | -         | 89     | -         | 89     | -         | -      | -         | 89     | -         | 89     | -         | 89     | -         |
| 6.  | 4a-CP Persentase akurasi perencanaan kas                                         | 80%    | 100%      | 80%    | -         | 80%    | -         | 80%    | -         | 80%    | -         | 80%    | -         | 80%    | -         |
| 7.  | 4b-N Tingkat kualitas penyelesaian SP2D                                          | 3      | 5         | 3      | -         | 3      | -         | 3      | -         | 3      | -         | 3      | -         | 3      | -         |
| 8.  | 5a-CP Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah                           | 90     | 99,38     | 90     | -         | 90     | -         | 90     | -         | 90     | -         | 90     | -         | 90     | -         |
| 9.  | 5b-N Indeks kualitas implementasi Digipay                                        | 3,1    | 4         | 3,1    | -         | 3,1    | -         | 3,1    | -         | 3,1    | -         | 3,1    | -         | 3,1    | -         |
| 10. | 6a-CP Indeks kualitas pelaksanaan rekonsiliasi tingkat UAKPA                     | 3,25   | 4         | 3,25   | -         | 3,25   | -         | 3,25   | -         | 3,25   | -         | 3,25   | -         | 3,25   | -         |
| 11. | 6b-N Indeks kualitas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara K/L                    | 3      | 4         | 3      | -         | 3      | -         | 3      | -         | 3      | -         | 3      | -         | 3      | -         |
| 12. | 7a-CP Tingkat implementasi penajaman tugas Treasury dan Financial Advisory       | 80%    | 99,17%    | 80%    | -         | 80%    | -         | 80%    | -         | 80%    | -         | 80%    | -         | 80%    | -         |
| 13. | 8a-N Tingkat kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization | -      | -         | -      | -         | -      | -         | -      | -         | -      | -         | 85     | -         | 85     | -         |
| 14. | 8b-N Tingkat implementasi Learning Organization                                  | 10     | 40,84     | 40     | -         | 40     | -         | 60     | -         | 60     | -         | 85     | -         | 85     | -         |

|     |                                                                |       |      |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |
|-----|----------------------------------------------------------------|-------|------|-------|---|-------|---|-------|---|-------|---|-------|---|-------|---|
| 15. | 8c-N Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal | -     | -    | -     | - | -     | - | -     | - | -     | - | 86    | - | 86    | - |
| 16. | 9a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN            | 95,5% | 100% | 95,5% | - | 95,5% | - | 95,5% | - | 95,5% | - | 95,5% | - | 95,5% | - |
| 17. | 9b-N Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB                 | -     | -    | -     | - | -     | - | -     | - | -     | - | 84    | - | 84    | - |
| 18. | 9c-N Persentase kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan         | -     | -    | -     | - | -     | - | -     | - | -     | - | 100%  | - | 100%  | - |

Gorontalo, 4 April 2023  
Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik  
Arief Rokhman  
197112181992011001



### LAPORAN CAPAIAN IKU KEMENKEU-THREE VERSI IIAA

| KPPN<br>GORONTALO | Perbendaharaan Negara yang optimal dan akuntabel<br>1a-CP Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L |       |       |       |         |       |       |               |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|---------------|
| T/R               | Q1                                                                                               | Q2    | Sm. I | Q3    | s.d. Q3 | Q4    | Y-23  | Pol/ K P      |
| Target            | 90                                                                                               | 90    | 90    | 90    | 90      | 90    | 90    | Maximize/TLKV |
| Realisasi         | 91.57                                                                                            |       |       |       |         |       |       |               |
| Capaian           | 101.74%                                                                                          | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00%   | 0.00% | 0.00% |               |

| Isu Utama dan Implikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tindakan yang telah dilaksanakan                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Isu Utama</b><br>Kualitas kinerja satker yang dinilai dari aspek perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran dengan variabel retur SP2D, aspek efisiensi dan kepatuhan terhadap regulasi perlu dijaga konsistensinya. IKPA K/L merupakan salah satu komponen dalam kinerja KPPN yang dapat mempengaruhi persepsi stakeholders dalam melakukan penilaian atau kinerja KPPN secara keseluruhan | -Melakukan reuiu pelaksanaan anggaran setiap bulan.<br>-Mengadakan sharing session terkait IKPA di awal tahun.<br>-Menekan nilai UP mendekati dengan besaran GUP yang sering diajukan pada tahun sebelumnya.<br>-Meningatkan satker pada saat batas-batas akhir pengajuan SPM. |
| <b>Implikasi</b><br>Persepsi penilaian stakeholders, terutama Kantor Pusat DJPb kurang baik                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Akar Masalah                                                                                                                                                                                                                           | Rekomendasi Rencana Aksi                                                                                                                                                                                                     | Penanggung jawab | Periode     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 1. Masih terdapat bendahara/operator baru di satker yang baru yang belum menguasai IKPA.<br>2. Pemahaman pengelolaan anggaran pejabat terkait di satuan kerja masih belum maksimal.<br>3. Satker mangajukan UP dengan nilai yang besar | 1. Mengoptimalkan penggunaan Sosial Media KPPN Gorontalo untuk membagikan informasi terbaru terkait IKPA<br>2. Secara berkala melakukan sharing session dan monev IKPA<br>2. Membuat Rapot Satker dan memberikan penghargaan | Seksi MSKI       | Akhir Maret |

### LAPORAN CAPAIAN IKU KEMENKEU-THREE VERSI IIAA

| KPPN<br>GORONTALO | Perbendaharaan Negara yang optimal dan akuntabel<br>1b-N Indeks kualitas LK Kuasa BUN KPPN |    |       |    |         |       |       |               |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----|---------|-------|-------|---------------|
| T/R               | Q1                                                                                         | Q2 | Sm. I | Q3 | s.d. Q3 | Q4    | Y-23  | Pol/ K P      |
| Target            | -                                                                                          | -  | -     | -  | -       | 3     | 3     | Maximize/TLKV |
| Realisasi         | -                                                                                          | -  | -     | -  | -       |       |       |               |
| Capaian           | -                                                                                          | -  | -     | -  | -       | 0.00% | 0.00% |               |

| Isu Utama dan Implikasi                                                                                                                                           | Tindakan yang telah dilaksanakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Isu Utama</b><br>Nilai LK Kuasa BUN KPPN dipengaruhi oleh validitas data transaksi baik pengeluaran maupun penerimaan. Target IKU ini terdapat di TRIWULAN IV. | 1. Pelaksanaan rekonsiliasi internal harian.<br>2. Monitoring data suspend atas penerimaan negara pada Aplikasi OM SPAN<br>3. Pelaksanaan analisis Neraca Percobaan dan Neraca lajur detil segmen satker. Memastikan tidak terdapat penggunaan akun/CoA yang salah pada transaksi di satker dan membuat Nota Dinas ke Seksi terkait, jika di temukan kesalahan penggunaan akun/CoA. |
| <b>Implikasi</b><br>Tidak maksimalnya nilai Laporan Keuangan khususnya pada indikator partisipasi                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Akar Masalah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rekomendasi Rencana Aksi                                                                                                                                       | Penanggung jawab | Periode         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| 1. Tingkat pemahaman satker terhadap penggunaan akun/CoA masih rendah.<br>2. Tingkat ketelitian satker terhadap pembebanan akun rendah sehingga menimbulkan selisih pada Transaksi<br>Dalam Konfirmasi (TDK), hal ini dapat mengurangi nilai LK BUN KPPN maupun Kanwil.<br>3. Masih terjadi kesalahan penginputan segmen-segmen CoA pada Aplikasi Simponi untuk penyetoran PNPB sehingga menimbulkan data Suspend | 1. Memberikan pendampingan.<br>2. Monitoring data dan menginformasikan melalui WAG..<br>3. Monitoring data suspend dan menginformasikan kepada satker terkait. | Seksi Vera       | Akhir Juni 2023 |

### LAPORAN CAPAIAN IKU KEMENKEU-THREE VERSI IIAA

| KPPN<br>GORONTALO | Dukungan manajemen yang efektif                   |       |       |    |         |       |       |                      |
|-------------------|---------------------------------------------------|-------|-------|----|---------|-------|-------|----------------------|
|                   | 2a-N Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN |       |       |    |         |       |       |                      |
| T/R               | Q1                                                | Q2    | Sm. I | Q3 | s.d. Q3 | Q4    | Y-23  | Pol/ K P             |
| Target            | -                                                 | 4.66  | 4.66  | -  | 4.66    | 4.66  | 4.66  | Maximize/<br>Average |
| Realisasi         | -                                                 |       |       | -  |         |       |       |                      |
| Capaian           | -                                                 | 0.00% | 0.00% | -  | 0.00%   | 0.00% | 0.00% |                      |

| Isu Utama dan Implikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tindakan yang telah dilaksanakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Isu Utama</b><br>Tingkat kepuasan satker terhadap layanan KPPN tidak hanya ditentukan oleh kualitas layanan KPPN namun juga terkait berbagai aspek misalnya kehandalan sistem aplikasi dan kebijakan lain yang berada diluar wewenang KPPN, akibatnya tingkat kepuasan atas layanan KPPN juga dipengaruhi oleh kepuasan stakeholder atas kebijakan-kebijakan yang berada diluar kewenangan KPPN (misalnya kehandalan sistem SPAN, dll) | 1. Melakukan analisa atas hasil survey untuk memetakan kelemahan pelayanan dan menyusun rekomendasi untuk perbaikan pada masing-masing unit.<br>2. Telah dilakukan <i>reminder</i> secara rutin mengenai deadline/informasi terkini pada Group Telegram SOLUSI PASTI.<br>3. Melakukan evaluasi terhadap hasil survei periode sebelumnya.<br>4. Melaksanakan/melengkapi sarana dan informasi sebagai tindakan perbaikan atas hasil survei periode sebelumnya yang masih kurang.<br>5. Melakukan tindakan perbaikan atas hasil survei periode sebelumnya yang masih kurang.<br>6. Semaksimal mungkin membantu satker dalam menghadapi permasalahan aplikasi. |
| <b>Implikasi</b><br>Potensi tidak maksimalnya nilai Keterbukaan dan kemudahan akses informasi serta nilai sarana media publikasi rendah pada saat periode penilaian indeks kepuasan satuan kerja terhadap layanan KPPN                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Akar Masalah                                                                                                                                                                                                   | Rekomendasi Rencana Aksi                                                                                                                                         | Penanggung jawab                     | Periode |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------|
| Adakalanya sistem aplikasi yang digunakan oleh satker mengalami gangguan, hal ini berada diluar kemampuan KPPN untuk menyelesaikannya tetapi satker akan menilai bahwa hal tersebut murni merupakan tugas KPPN | 1. Melakukan Sosialisasi inovasi-inovasi pelayanan yang diberikan KPPN<br>2. Melakukan publikasi yang lebih intensif terkait kebijakan dan capaian kinerja KPPN. | Para Kepala Seksi dan Subbagian Umum | Tahunan |



**LAPORAN CAPAIAN IKU KEMENKEU-THREE VERSI IIAA**

| KPPN<br>GORONTALO | Komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang berkesinambungan<br>3a-N Persentase tingkat implementasi standardisasi kompetensi pejabat perbendaharaan |       |       |    |         |       |       |               |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----|---------|-------|-------|---------------|
| T/R               | Q1                                                                                                                                                   | Q2    | Sm. I | Q3 | s.d. Q3 | Q4    | Y-23  | Pol/ K P      |
| Target            | -                                                                                                                                                    | 93%   | 93%   | -  | 93%     | 93%   | 93%   | Maximize/TLKV |
| Realisasi         | -                                                                                                                                                    |       |       |    |         |       |       |               |
| Capaian           | -                                                                                                                                                    | 0.00% | 0.00% | -  | 0.00%   | 0.00% | 0.00% |               |

| Isu Utama dan Implikasi                                                                                        | Tindakan yang telah dilaksanakan                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Isu Utama</b><br>Media pelatihan (khususnya PPSPM) yang menjadi syarat sertifikat masih sangat terbatas.    | 1.Menyampaikan pengumuman setiap ada pembukaan pelatihan Pejabat perbendaharaan<br>2.Pendampingan satker dan melayani konsultasi satker |
| <b>Implikasi</b><br>Banyak pejabat perbendaharaan yang belum bisa memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikat |                                                                                                                                         |

| Akar Masalah                                                                                                                                             | Rekomendasi Rencana Aksi                                                                                                                                                                                                              | Penanggung jawab | Periode    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|
| Pelatihan Bendahara, PPSPM, dan PPK jumlahnya masih sangat terbatas sehingga pejabat perbendaharaan di satker kesulitan untuk memenuhi syarat sertifikat | 1. Proaktif mendampingi pejabat perbendaharaan saat pelatihan PPK dan PPSPM dibuka oleh BPPK/Kantor Pusat DJPb<br>2. Membuka layanan konsultasi online via Google meet terkait prosedur sertifikasi kompetensi pejabat perbendaharaan | Seksi MSKI       | Triwulanan |

### LAPORAN CAPAIAN IKU KEMENKEU-THREE VERSI IIAA

| KPPN<br>GORONTALO | Komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang berkesinambungan<br>3b-N Tingkat efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan |       |       |    |         |       |       |                      |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----|---------|-------|-------|----------------------|
| T/R               | Q1                                                                                                                                    | Q2    | Sm. I | Q3 | s.d. Q3 | Q4    | Y-23  | Pol/ K P             |
| Target            | -                                                                                                                                     | 89    | 89    | -  | 89      | 89    | 89    | Maximize/<br>Average |
| Realisasi         | -                                                                                                                                     |       |       |    |         |       |       |                      |
| Capaian           | -                                                                                                                                     | 0.00% | 0.00% | -  | 0.00%   | 0.00% | 0.00% |                      |

| Isu Utama dan Implikasi                                                                                                                                                                                                                                                      | Tindakan yang telah dilaksanakan                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Isu Utama</b><br>Efektivitas edukasi dan komunikasi diukur melalui pengisian kuesioner atau pelaksanaan pretest dan post test pada saat dilaksanakan kegiatan sosialisasi ataupun bimtek. Selain itu juga berkurangnya pertanyaan dan permasalahan yang diajukan ke KPPN. | 1. Mengadakan sosialisasi dan bimtek terutama apabila terdapat peraturan baru atau update aplikasi<br>2. Pendampingan apabila terdapat masalah |
| <b>Implikasi</b><br>Berpengaruh pada tingkat efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |

| Akar Masalah                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Rekomendasi Rencana Aksi                                                                                                                                                          | Penanggung jawab | Periode    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|
| 1. Pelatihan di masa pandemic mayoritas menggunakan media online sehingga kesempatan berinteraksi agak berkurang dan menurun efektifitasnya.<br>2. Peserta sosialisasi, bimtek, atau pelatihan online biasanya dilakukan sambil melaksanakan tugas yang lain, sehingga mereka kurang focus pada materi yang disampaikan. | 1. Pelatihan/GKM kepada semua pegawai agar pengetahuan terupdate dan dapat membimbing satker apabila ada yang konsultasi.<br>2. Sosialisasi kepada satker atas peraturan terbaru. | Seksi MSKI       | Semesteran |

**LAPORAN CAPAIAN IKU KEMENKEU-THREE VERSI IIAA**

| KPPN<br>GORONTALO | Pengelolaan pengeluaran negara yang prudent, efektif dan efisien |       |       |       |         |       |       |                      |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|----------------------|
| T/R               | Q1                                                               | Q2    | Sm. I | Q3    | s.d. Q3 | Q4    | Y-23  | Pol/ K P             |
| Target            | 80%                                                              | 80%   | 80%   | 80%   | 80%     | 80%   | 80%   | Maximize/<br>Average |
| Realisasi         | 100%                                                             |       |       |       |         |       |       |                      |
| Capaian           | 125.00%                                                          | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00%   | 0.00% | 0.00% |                      |

| Isu Utama dan Implikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tindakan yang telah dilaksanakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Isu Utama</b><br>Ketepatan penyampaian RPD oleh satker wujud garansi kualitas perencanaan satuan kerja. Sesuai ketentuan baru tentang RPD (PMK 197/PMK.05/2017) penyampaian/pelaksanaan RPD telah banyak diberikan kemudahan-kemudahan bagi satker, antara lain penyampaian SPM tanpa RPD namun dilengkapi adanya Surat Pernyataan KPA ttg penundaan pencairan diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam pengelolaan RPD, baik di satker maupun KPPN.<br>Update Renkas Melalui SPRINT | 1.Sosialisasi tentang ketentuan baru RPD (PMK 197/PMK.05/2017).<br>2.Sosialisasi langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran tahun 2023, salah satu materinya terkait perencanaan kas.<br>3.Sosialisasi dan bimtek secara intensif.<br>4.Perlu dilakukan kegiatan pendampingan khususnya terhadap satker dengan pagu besar.<br>5.Menyampaikan teguran kepada satker yang tidak memenuhi RPD sesuai yang telah disampaikan. 6.Mengundang satker ke KPPN untuk didampingi input renkas di SPRINT. |
| <b>Implikasi</b><br>Berpengaruh pada tingkat akurasi RPD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Akar Masalah                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rekomendasi Rencana Aksi                                                                                                                                         | Penanggung jawab                 | Periode           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| 1.Pemahaman teknis pelaksanaan anggaran di satker perlu ditingkatkan, masih banyak kesalahan SPM yang menyebabkan deviasi pada RPD<br>2.Perencanaan kegiatan yang disusun oleh satker masih belum akurat<br>3.Banyaknya perubahan/revisi DIPA<br>4.Tidak semua Satker mengetahui renkas melalui SPRINT | 1.Memberikan bimtek kepada satker.<br>2.Berkoordinasi dengan Kanwil DJPb.<br>3.Secara aktif melakukan updating data perencanaan kas yang disampaikan oleh satker | Seksi PD, Seksi MSKI, Seksi Bank | April - Juni 2023 |

### LAPORAN CAPAIAN IKU KEMENKEU-THREE VERSI IIAA

| KPPN<br>GORONTALO | Pengelolaan pengeluaran negara yang prudent, efektif dan efisien<br>4b-N Tingkat kualitas penyelesaian SP2D |       |       |       |         |       |       |                      |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|----------------------|
| T/R               | Q1                                                                                                          | Q2    | Sm. I | Q3    | s.d. Q3 | Q4    | Y-23  | Pol/ K P             |
| Target            | 3                                                                                                           | 3     | 3     | 3     | 3       | 3     | 3     | Maximize/<br>Average |
| Realisasi         | 5                                                                                                           |       |       |       |         |       |       |                      |
| Capaian           | 120.00%                                                                                                     | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00%   | 0.00% | 0.00% |                      |

| Isu Utama dan Implikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tindakan yang telah dilaksanakan                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Isu Utama</b><br>Capaian IKU Tingkat kualitas penyelesaian SP2D yang sekarang mempertimbangkan 3 komponen (dulu 1), yaitu Penyelesaian SP2D secara tepat waktu, Efektivitas Penyaluran dana SP2D yang akurat, serta Efektivitas kecepatan penyelesaian retur SP2D.<br>Adanya pengajuan SPM banyak penerima dengan data rekening pada supplier yang sudah tidak aktif | -Membangun komunikasi antar petugas terkait Pengumuman PPR di grup whatsapp kantor<br>-Mengatur tahapan proses validasi SPM untuk memberikan waktu dalam proses penyelesaian SPM<br>-Mempelajari alur penerimaan SPM melalui SAKTI BUN |
| <b>Implikasi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                        |
| Potensi terjadinya retur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                        |

| Akar Masalah                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rekomendasi Rencana Aksi                                                                                                                | Penanggung jawab      | Periode         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| - Rekening yang sudah lama tidak digunakan (pasif) namun digunakan lagi ketika ada transaksi pembayaran<br>-Adanya perubahan prosedur pengajuan SPM secara online selama masa pandemi<br>-Perlunya koordinasi dan manajemen waktu dalam penyelesaian SPM<br>-Gangguan jaringan internet dan listrik | -Melakukan evaluasi atas pelaksanaan proses penyelesaian sp2d 1 jam untuk per baikan ke depan.<br>-Mempelajari sakti BUN secara bersama | Seksi PD - Seksi Bank | April-Juni 2023 |

**LAPORAN CAPAIAN IKU KEMENKEU-THREE VERSI IIAA**

| KPPN<br>GORONTALO | Pelaksanaan anggaran yang optimal<br>5a-CP Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah |       |       |       |         |       |       |                      |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|----------------------|
| T/R               | Q1                                                                                          | Q2    | Sm. I | Q3    | s.d. Q3 | Q4    | Y-23  | Pol/ K P             |
| Target            | 90                                                                                          | 90    | 90    | 90    | 90      | 90    | 90    | Maximize/<br>Average |
| Realisasi         | 99.38                                                                                       |       |       |       |         |       |       |                      |
| Capaian           | 110.42%                                                                                     | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00%   | 0.00% | 0.00% |                      |

| Isu Utama dan Implikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tindakan yang telah dilaksanakan                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Isu Utama</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Mulai TA 2023 Seluruh Transfer ke Daerah disalurkan melalui KPPN</li> <li>- KPPN harus melakukan input potongan dan penundaan (perlu ketelitian)</li> <li>- Adanya mekanisme BOK Pukermas yang sama dengan mekanisme BOSP (langsung ke rek.puskesmas)</li> </ul>                                                             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berkoordinasi dengan Dinas Terkait dan Dit PA dan DJPK</li> <li>2. Berkoordinasi dengan pemda terkait penyaluran Dana Fisik</li> <li>3. Pemahaman peraturan terkait mekanisme baru dana BOS</li> </ol> |
| <b>Implikasi</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Nilai Ketepatan waktu penyampaian dokumen persyaratan oleh pemda (Syarat) yang tidak maksimal</li> <li>- Supplier baru, KPPN harus input manual</li> <li>- No rek Supplier dari Aplikasi K/L berpotensi tidak aktif</li> <li>- tidak dapat disalurkan DAK Fisik untuk kegiatan yang tidak didaftarkan pada OMSPAN</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Akar Masalah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rekomendasi Rencana Aksi                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Penanggung jawab           | Periode           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Proses perbaikan data supplier dilakukan oleh kantor pusat kemendikbud dan kemenkes, sehingga saat ada retur harus menunggu terlebih dahulu</li> <li>- Saat ini tw.l, pemda sedang melakukan input kontrak-kontrak dan sisa DAK Fisik TAYL</li> <li>- Masih banyak pemda yang belum memahami juknis dan peraturan-peraturan yang ada, berpotensi kesalahan input di kedepan hari</li> </ul> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aktif berkoordinasi dengan Dit. PA, DJPK, dan Pemerintah Daerah</li> <li>2. Koordinasi dengan Pemda untuk penyaluran dokumen DF tepat waktu</li> <li>3. Mendorong pemda berkoordinasi dengan K/L.</li> <li>4. Memahami peraturan terkait TKD yang baru</li> </ol> | Seksi Bank -<br>Seksi Vera | April - Juni 2023 |

**LAPORAN CAPAIAN IKU KEMENKEU-THREE VERSI IIAA**

| KPPN<br>GORONTALO | Pelaksanaan anggaran yang optimal<br>5b-N Indeks kualitas implementasi Digipay |       |       |       |         |       |       |                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|----------------------|
| T/R               | Q1                                                                             | Q2    | Sm. I | Q3    | s.d. Q3 | Q4    | Y-23  | Pol/ K P             |
| Target            | 3.1                                                                            | 3.1   | 3.1   | 3.1   | 3.1     | 3.1   | 3.1   | Maximize/<br>Average |
| Realisasi         | 4                                                                              |       |       |       |         |       |       |                      |
| Capaian           | 120.00%                                                                        | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00%   | 0.00% | 0.00% |                      |

| Isu Utama dan Implikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tindakan yang telah dilaksanakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Isu Utama</b><br>Isu terkait penggunaan DIGIPay saat ini baru dapat dilakukan untuk pengadaan dan pembayaran kepada rekanan yang memiliki rekening di bank penyedia platform aplikasi DIGIPay telah diselesaikan melalui DIGIPay 1.<br>Kurang komitmen dan kesadaran satker dalam belanja secara cashless | 1.Mengenalkan potensi partisipasi satker melalui sistem DIGIPay untuk mendukung upaya terkini dari pemerintah, khususnya dalam menumbuhkan kegiatan perekonomian pasca pandemi.<br>2.Membantu akses kelompok potensial kepada kemanfaatan sistem DIGIPay<br>3.Mengenalkan satker dengan implementasi DigiPay dengan melibatkan bank himbara melalui sosialisasi yang komprehensif |
| <b>Implikasi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Eksklusivitas platform ini berdampak pada perbedaan teknis DIGIPay yang disediakan oleh bank yang                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Akar Masalah                                                                                                                                                                                                                                                               | Rekomendasi Rencana Aksi                                                                         | Penanggung jawab | Periode           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| Ketiadaan mesin Electronic Data Capture (EDC) dan potensi biaya-biaya lain yang ditagihkan oleh rekanan/ penyedia karena kurangnya pemahaman rekanan/ penyedia. Migrasi dari DIGIPay ke DIGIPay 1 masih terdapat permasalahan yaitu tidak semua termigrasi dengan sempurna | 1.FGD melibatkan pihak bank<br>2.Pendampingan satker yang mengalami permasalahan terkait DIGIPay | Seksi MSKI       | April - Juni 2023 |

**LAPORAN CAPAIAN IKU KEMENKEU-THREE VERSI IIAA**

| KPPN<br>GORONTALO | Pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan dan akuntabel<br>6a-CP Indeks kualitas pelaksanaan rekonsiliasi tingkat UAKPA |       |       |       |         |       |       |                      |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|----------------------|
| T/R               | Q1                                                                                                                               | Q2    | Sm. I | Q3    | s.d. Q3 | Q4    | Y-23  | Pol/ K P             |
| Target            | 3.25                                                                                                                             | 3.25  | 3.25  | 3.25  | 3.25    | 3.25  | 3.25  | Maximize/<br>Average |
| Realisasi         | 4                                                                                                                                |       |       |       |         |       |       |                      |
| Capaian           | 120.00%                                                                                                                          | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00%   | 0.00% | 0.00% |                      |

| Isu Utama dan Implikasi                                                                                      | Tindakan yang telah dilaksanakan                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Isu Utama</b><br>Masih terdapat satker yang kurang paham/tidak tahu jadwal periode open dan closed period | 1. Penerbitan sanksi bagi satuan kerja yang terlambat<br>2. Mengingatkan kepada satker melalui surat, telepon, dan telegram mengenai batas waktu / open period bulan berkenaan |
| <b>Implikasi</b><br>Keterlambatan akan berpengaruh pada capaian IKU                                          |                                                                                                                                                                                |

| Akar Masalah                                                                                                                                                                 | Rekomendasi Rencana Aksi                                                                                                                             | Penanggung jawab | Periode         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| 1. Operator satker bersifat pasif sehingga mengakibatkan lebih sering menunggu untuk diingatkan<br>2. Kurang koordinasi antara operator sehingga masih saling menunggu data. | 1. Memberikan pemahaman dan melakukan monitoring dan evaluasi kepada satker<br>2. Memberikan pemahaman kepada satker pentingnya koordinasi internal. | Seksi Vera       | Akhir Juni 2023 |



**LAPORAN CAPAIAN IKU KEMENKEU-THREE VERSI IIAA**

| KPPN<br>GORONTALO | Pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan dan akuntabel |       |       |       |         |       |       |                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|------------------|
|                   | 6b-N Indeks kualitas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara K/L    |       |       |       |         |       |       |                  |
| T/R               | Q1                                                               | Q2    | Sm. I | Q3    | s.d. Q3 | Q4    | Y-23  | Pol/ K P         |
| Target            | 3                                                                | 3     | 3     | 3     | 3       | 3     | 3     | Maximize/Average |
| Realisasi         | 4                                                                |       |       |       |         |       |       |                  |
| Capaian           | 120.00%                                                          | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00%   | 0.00% | 0.00% |                  |

| Isu Utama dan Implikasi                                                                                                                            | Tindakan yang telah dilaksanakan                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Isu Utama</b><br>Terkendalanya Akses Jaringan Aplikasi SAKTI                                                                                    | - Melakukan Pendampingan terkait Penyampaian LPJ di luar Jam Kerja<br>- Melaksanakan monitoring Penyampaian LPJ melalui Whatsapp Group bersama Satuan Kerja |
| <b>Implikasi</b><br>Karena Aplikasi SAKTI tidak bisa diakses menyebabkan satker terkendala saat memproses LPJ serta lambat dalam menyampaikan LPJ. |                                                                                                                                                             |

| Akar Masalah                                                                                      | Rekomendasi Rencana Aksi                                                                                             | Penanggung jawab | Periode           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| Direktorat SITP melakukan maintenance Aplikasi SAKTI pada periode pengajuan LPJ selama jam kerja. | -Melakukan pendampingan terkait penyampaian LPJ di luar jam kerja.<br>- Melaksanakan bimbingan teknis secara virtual | Seksi Vera-KI    | April - Juni 2023 |

**LAPORAN CAPAIAN IKU KEMENKEU-THREE VERSI IIAA**

| KPPN<br>GORONTALO | Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif<br>7a-CP Tingkat implementasi penajaman tugas Treasury dan Financial Advisory |       |       |       |         |       |       |                      |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|----------------------|
| T/R               | Q1                                                                                                                                                             | Q2    | Sm. I | Q3    | s.d. Q3 | Q4    | Y-23  | Pol/ K P             |
| Target            | 80%                                                                                                                                                            | 80%   | 80%   | 80%   | 80%     | 80%   | 80%   | Maximize/<br>Average |
| Realisasi         | 99.17%                                                                                                                                                         |       |       |       |         |       |       |                      |
| Capaian           | 123.96%                                                                                                                                                        | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00%   | 0.00% | 0.00% |                      |

| Isu Utama dan Implikasi                                                                                                                                                                                                                                                   | Tindakan yang telah dilaksanakan                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Isu Utama</b><br>1. Penjelasan manual IKI serta format pelaporan terkait Tingkat implementasi penajaman tugas Treasury dan Financial Advisory baru disampaikan pada akhir triwulan I<br>2. Tidak adanya penjelasan khusus mengenai format pelaporan pada tiap komponen | 1. Melaksanakan seluruh rangkaian standardisasi kegiatan manajemen KPPN<br>2. Melengkapi dokumentasi terkait kegiatan yang telah dilaksanakan |
| <b>Implikasi</b><br>Adanya kemungkinan ketidaktercapaiannya IKI Tingkat implementasi penajaman tugas Treasury dan Financial Advisory                                                                                                                                      |                                                                                                                                               |

| Akar Masalah                                                                                                                       | Rekomendasi Rencana Aksi                                                                                                 | Penanggung jawab                     | Periode           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| Diperlukan extra effort dalam penyusunan Laporan Implementasi Penajaman Tugas Treasury, Regional Economist, dan Financial Advisory | Melakukan koordinasi antar seksi terkait pemenuhan kegiatan implementasi penajaman tugas treasury dan financial advisory | Para Kepala Seksi dan Subbagian Umum | April - Juni 2023 |

**LAPORAN CAPAIAN IKU KEMENKEU-THREE VERSI IIAA**

| KPPN<br>GORONTALO | Organisasi dan SDM yang unggul dan adaptif                                       |    |       |    |         |       |       |               |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----|---------|-------|-------|---------------|
|                   | 8a-N Tingkat kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization |    |       |    |         |       |       |               |
| T/R               | Q1                                                                               | Q2 | Sm. I | Q3 | s.d. Q3 | Q4    | Y-23  | Pol/ K P      |
| Target            | -                                                                                | -  | -     | -  | -       | 85    | 85    | Maximize/TLKV |
| Realisasi         | -                                                                                | -  | -     | -  | -       |       |       |               |
| Capaian           | -                                                                                | -  | -     | -  | -       | 0.00% | 0.00% |               |

| Isu Utama dan Implikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tindakan yang telah dilaksanakan                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Isu Utama</b><br>Dalam rangka mendorong komitmen pimpinan dan seluruh pegawai terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja di KPPN Gorontalo dilakukan langkah-langkah peningkatan kualitas kinerja. Sebagai bentuk apresiasi terhadap upaya-upaya peningkatan kualitas kinerja di lingkungan ditjen perbendaharaan, kantor pusat ditjen perbendaharaan melakukan penilaian terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja di unit-unit masing-masing. | Telah dilaksanakan kegiatan dan dipenuhi dokumen sesuai matriks SFO pada triwulan I |
| <b>Implikasi</b><br>Berpengaruh pada nilai IKI Tingkat kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization TA 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |

| Akar Masalah                                                                                                             | Rekomendasi Rencana Aksi                                                                                           | Penanggung jawab | Periode |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|
| Masih ada beberapa pegawai yang kurang peduli terhadap peningkatan kualitas pengelolaan kinerja organisasi dan individu. | - Merutinkan pelaksanaan dialog kinerja organisasi.<br>- Mempedomani matriks dalam peningkatan pengelolaan kinerja | Subbagian Umum   | Tahunan |

**LAPORAN CAPAIAN IKU KEMENKEU-THREE VERSI IIAA**

| KPPN<br>GORONTALO | Organisasi dan SDM yang unggul dan adaptif<br>8b-N Tingkat implementasi learning organization |       |       |       |         |       |       |               |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|---------------|
| T/R               | Q1                                                                                            | Q2    | Sm. I | Q3    | s.d. Q3 | Q4    | Y-23  | Pol/ K P      |
| Target            | 10                                                                                            | 40    | 40    | 60    | 60      | 85    | 85    | Maximize/TLKV |
| Realisasi         | 40.84                                                                                         |       |       |       |         |       |       |               |
| Capaian           | 408.40%                                                                                       | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00%   | 0.00% | 0.00% |               |

| Isu Utama dan Implikasi                                                                                                                                   | Tindakan yang telah dilaksanakan                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Isu Utama</b><br>Pemenuhan dokumen untuk tiap-tiap subkomponen yang harus terus dilakukan secara berkala                                               | 1. Telah dilaksanakan kegiatan sesuai dengan sub-komponen implementasi LO<br>2. Telah dipenuhi dokumen terkait implementasi LO |
| <b>Implikasi</b><br>Nilai capaian IKI Tingkat Implementasi LO dapat terpenuhi untuk triwulan I, namun secara keseluruhan belum mendapatkan skor tertinggi |                                                                                                                                |

| Akar Masalah                                                                                                                 | Rekomendasi Rencana Aksi                                                                                                                                                                                                                           | Penanggung jawab | Periode           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| Pada komponen 2, terdapat dua subkomponen yang tidak bisa didapatkan nilainya dikarenakan periode pelaporan DKI belum dibuka | 1. Memenuhi kegiatan dan dokumen sesuai dengan output yang diminta pada panduan implementasi LO sesuai dengan penjelasan<br>2. Memberikan reminder kepada para peserta pelatihan untuk mengisi EPASPEM serta melakukan upload sertifikat pelatihan | Subbagian Umum   | April - Juni 2023 |

### LAPORAN CAPAIAN IKU KEMENKEU-THREE VERSI IIAA

| KPPN<br>GORONTALO | Organisasi dan SDM yang unggul dan adaptif                     |    |       |    |         |       |       |               |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|----|-------|----|---------|-------|-------|---------------|
|                   | 8c-N Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal |    |       |    |         |       |       |               |
| T/R               | Q1                                                             | Q2 | Sm. I | Q3 | s.d. Q3 | Q4    | Y-23  | Pol/ K P      |
| Target            | -                                                              | -  | -     | -  | -       | 86    | 86    | Maximize/TLKV |
| Realisasi         | -                                                              | -  | -     | -  | -       |       |       |               |
| Capaian           | -                                                              | -  | -     | -  | -       | 0.00% | 0.00% |               |

| Isu Utama dan Implikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tindakan yang telah dilaksanakan                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Isu Utama</b><br>Pelaporan/evaluasi atas pelaksanaan pemantauan pengendalian intern bersifat dinamis sehingga penyesuaian-penyesuaian terkait dengan format, mekanisme dan periode harus segera dilakukan secara konsisten karena akan berdampak pada hasil penilaian evaluasi.<br>Penilaian hasil evaluasi penerapan PPI dilakukan oleh kanwil DJPb. | Menyusun laporan PPI dengan format baru sesuai KMK Nomor 940 Tahun 2017 tentang Kerangka Kerja Kerangka Kerja Pemantauan Pengendalian Internal dan Pedoman Pemantauan Pengendalian Internal Di Lingkungan Kementerian Keuangan |
| <b>Implikasi</b><br>Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal yang kurang maksimal                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                |

| Akar Masalah                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rekomendasi Rencana Aksi    | Penanggung jawab | Periode |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------|
| Penyusunan laporan PPI dengan format sesuai KMK Nomor 940 Tahun 2017 tentang Kerangka Kerja Kerangka Kerja Pemantauan Pengendalian Internal dan Pedoman Pemantauan Pengendalian Internal Di Lingkungan Kementerian Keuangan baru sehingga laporan yang disusun belum dapat dipastikan ketepatan penyusunannya. | Membuat kalender laporan KI | Seksi MSKI       | Tahunan |

### LAPORAN CAPAIAN IKU KEMENKEU-THREE VERSI IIAA

| KPPN<br>GORONTALO | Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang andal<br>9a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN |        |        |        |         |        |        |               |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|---------------|
| T/R               | Q1                                                                                                       | Q2     | Sm. I  | Q3     | s.d. Q3 | Q4     | Y-23   | Pol/ K P      |
| Target            | 95.50%                                                                                                   | 95.50% | 95.50% | 95.50% | 95.50%  | 95.50% | 95.50% | Maximize/TLKV |
| Realisasi         | 100%                                                                                                     |        |        |        |         |        |        |               |
| Capaian           | 104.71%                                                                                                  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%   | 0.00%  | 0.00%  |               |

| Isu Utama dan Implikasi                                                                                               | Tindakan yang telah dilaksanakan                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Isu Utama</b><br>Mempertahankan nilai capaian IKI Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran KPPN periode triwulan I | 1. Telah melakukan input data capaian output sebelum batas waktu<br>2. Menjaga persentase realisasi pelaksanaan anggaran<br>3. Menjaga nilai deviasi agar tidak melebihi 5% |
| <b>Implikasi</b>                                                                                                      |                                                                                                                                                                             |
| Nilai IKPA masih terus mengalami perubahan sampai dengan periode pengisian dan pelaporan capaian output berakhir      |                                                                                                                                                                             |

| Akar Masalah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rekomendasi Rencana Aksi                                                                                   | Penanggung jawab | Periode           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| 1. Berdasarkan nota dinas Dit. PA, periode pengisian dan pelaporan capaian output pada aplikasi OMSPAN masih dalam tahapan Open Period sampai dengan 30 April 2023<br>2. Adanya perubahan ketentuan pemutakhiran RPD hal III DIPA sesuai dengan Nota Dinas Dit. PA nomor ND-467/PB.2/2023 Tanggal 3 April 2023 Hal Perubahan Ketentuan Pemutakhiran RPD Hal III DIPA Triwulan II 2023 dan Pengaturan Indikator Kinerja Pengelolaan UP & TUP Sehubungan Dengan Libur dan Cuti Bersama HBK Idul Fitri | 1. Melakukan revisi hal III DIPA sebelum batas waktu<br>2. Melaksanakan belanja sesuai dengan hal III DIPA | Subbagian Umum   | April - Juni 2023 |

### LAPORAN CAPAIAN IKU KEMENKEU-THREE VERSI IIAA

| KPPN<br>GORONTALO | Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang andal<br>9b-N Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB |    |       |    |         |       |       |               |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----|---------|-------|-------|---------------|
| T/R               | Q1                                                                                                  | Q2 | Sm. I | Q3 | s.d. Q3 | Q4    | Y-23  | Pol/ K P      |
| Target            | -                                                                                                   | -  | -     | -  | -       | 84    | 84    | Maximize/TLKV |
| Realisasi         | -                                                                                                   | -  | -     | -  | -       |       |       |               |
| Capaian           | -                                                                                                   | -  | -     | -  | -       | 0.00% | 0.00% |               |

| Isu Utama dan Implikasi                                                                                                                                                                           | Tindakan yang telah dilaksanakan                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Isu Utama</b><br>- Adanya kesalahan pencatatan perolehan KDP<br>- masih ada persediaan yang belum didetailkan pada aplikasi SAKTI                                                              | - Telah diselesaikan to do list pada monsakti secara berkala periode sampai dengan maret 2023<br>- Rekonsiliasi Internal UAKPA-PB<br>- Telah dilakukan Jurnal reklas KDP ke Aset tetap |
| <b>Implikasi</b><br>- Nilai pada variable keakuratan Laporan BMN tidak maksimal<br>- Muncul daftar to-do-list pada aplikasi SAKTI dan MONSAKTI yang berpengaruh pada nilai partisipasi LK UAKPA/B |                                                                                                                                                                                        |

| Akar Masalah                                                                                                                                                      | Rekomendasi Rencana Aksi                             | Penanggung jawab | Periode           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| 1. Aset dan persediaan belum bisa didetailkan jika modul GLP pada bulan sebelumnya belum ditutup<br>2. Penutupan pada modul GLP menunggu arahan dari kantor pusat | membersihkan to-do-list pada MONSAKTI secara berkala | Subbagian Umum   | April - Juni 2023 |



**LAPORAN CAPAIAN IKU KEMENKEU-THREE VERSI IIAA**

| KPPN<br>GORONTALO | Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang andal<br>9c-N Persentase kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan |    |       |    |         |       |       |               |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----|---------|-------|-------|---------------|
| T/R               | Q1                                                                                                          | Q2 | Sm. I | Q3 | s.d. Q3 | Q4    | Y-23  | Pol/ K P      |
| Target            | -                                                                                                           | -  | -     | -  | -       | 100%  | 100%  | Maximize/TLKV |
| Realisasi         | -                                                                                                           | -  | -     | -  | -       |       |       |               |
| Capaian           | -                                                                                                           | -  | -     | -  | -       | 0.00% | 0.00% |               |

| Isu Utama dan Implikasi                                                                                                                                                                                                   | Tindakan yang telah dilaksanakan                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Isu Utama</b><br>Pengelolaan sarana dan prasarana meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap barang bergerak dan tidak bergerak. Strategi pengelolaan BMN secara optimal berpedoman pada SE-32/PB/2016. | - Telah melakukan pengadaan kursi dan pelaksanaan sebagian pagu belanja modal |
| <b>Implikasi</b><br>Nilai Persentase kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan mencapai target                                                                                                                               |                                                                               |

| Akar Masalah                                      | Rekomendasi Rencana Aksi                                                             | Penanggung jawab | Periode               |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| Kekurangan jumlah komposisi SDM di Subbagian Umum | - penghapusan BMN<br>- Renovasi Middle Office<br>- Penghapusan Arsip<br>- Sensus BMN | Subbagian Umum   | s.d. 31 Desember 2023 |

**RAW DATA IKU KEMENKEU-THREE KPPN**  
**KPPN Gorontalo**

| No. | Kode IKU | Uraian IKU                                                                     | Data yang diperlukan                                                                                                                                        | Data                                                                     |        | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | 1a-CP    | Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L                                         | Hasil penilaian IKPA tingkat Nasional sebagai BUN pada Aplikasi OMSPAN                                                                                      | 91,57                                                                    |        | $IKPA = \sum [ 10\% (REV) + 10\% (HAL3) + 20\% (REAL) + 10\% (KTR) + 10\% (TAG) + 10\% (PUP) + 5\% (DSPM) + 25\% (CO)] \times 100$                                                                                                                                |
| 2.  | 1b-N     | Indeks kualitas LK Kuasa BUN KPPN                                              | Monitoring monsakti dan Surat Keputusan Hasil Penilaian LK Kuasa BUN tingkat KPPN                                                                           | -                                                                        |        | Capaian IKU = INDEKS ( a + b ) / 2<br>a. Persentase jumlah satker yang tidak terdapat selisih TKTM Aset dan Persediaan pada periode pelaporan semesteran<br>b. Hasil penilaian kualitas LKBUN KPPN yang dilakukan oleh Kanwil DJPb                                |
| 3.  | 2a-N     | Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN                                   | Indeks Hasil Survei Kepuasan Satker                                                                                                                         | -                                                                        |        | Kategori kualitas nilai LK Kuasa BUN tingkat KPPN adalah sebagai berikut :<br>5 = Sangat Puas<br>4 = Puas<br>3 = Cukup Puas<br>2 = Kurang Puas<br>1 = Tidak Puas                                                                                                  |
| 4.  | 3a-N     | Persentase tingkat implementasi standarisasi kompetensi pejabat perbendaharaan | Laporan Monitoring pada Aplikasi SIMASPATEN                                                                                                                 | -                                                                        |        | (persentase akselerasi verifikasi usulan x bobot) +<br>(persentase akselerasi refreshment x bobot ) +<br>(persentase pemenuhan BNT x bobot)                                                                                                                       |
| 5.  | 3b-N     | Tingkat efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan               | Hasil Post Test dan hasil perhitungan kuesioner sosialisasi                                                                                                 | -                                                                        |        | Rata-rata Indeks Tingkat Efektifitas Edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan<br>$0 < x \leq 20$ = tidak efektif<br>$20 < x \leq 40$ = kurang efektif<br>$40 < x \leq 60$ = cukup efektif<br>$60 < x \leq 80$ = efektif<br>$80 < x \leq 100$ = sangat efektif |
| 6.  | 4a-CP    | Persentase akurasi perencanaan kas                                             | Laporan Terkait Hasil Perhitungan Deviasi RPD dari Aplikasi MONSAKTI                                                                                        | 100%                                                                     |        | $((100\% - ((Rata - Rata Deviasi Unit RPD \text{ harian KPPN per periode} \times 0,3) + ((Rata - Rata Deviasi Nilai RPD \text{ harian KPPN per periode} \times 0,7)))) - (Rasio Dispensasi RPD \text{ harian KPPN per periode} \times 0,01))$                     |
| 7.  | 4b-N     | Tingkat kualitas penyelesaian SP2D                                             | Data penerbitan SP2D pada aplikasi OM SPAN                                                                                                                  | $\sum$ SP2D sesuai kriteria                                              | 2.558  | (Capaian Komponen A + Capaian Komponen B + Capaian Komponen C)/3                                                                                                                                                                                                  |
|     |          |                                                                                |                                                                                                                                                             | $\sum$ SP2D yang seharusnya sesuai kriteria                              | 2.558  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     |          |                                                                                |                                                                                                                                                             | Capaian A                                                                | 5      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     |          |                                                                                |                                                                                                                                                             | $\sum$ Penerima pada SP2D yg terbit –<br>$\sum$ Penerima yang diretur BO | 10.010 |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     |          |                                                                                |                                                                                                                                                             | $\sum$ Penerima pada SP2D                                                | 10.010 |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     |          |                                                                                |                                                                                                                                                             | Capaian B                                                                | 5      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     |          |                                                                                |                                                                                                                                                             | $\sum$ SP2D Pengganti kategori indeks 5                                  | 235    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     |          |                                                                                |                                                                                                                                                             | $\sum$ SP2D Pengganti kategori indeks 1-4                                | 0      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     |          |                                                                                |                                                                                                                                                             | $\sum$ total SP2D Pengganti                                              | 235    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     |          |                                                                                |                                                                                                                                                             | Capaian C                                                                | 5      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     |          |                                                                                |                                                                                                                                                             | Capaian IKU                                                              | 5      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8.  | 5a-CP    | Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah                               | Hasil penilaian kinerja penyaluran DAK dan Dana Desa yang diterbitkan oleh Direktorat PA melalui surat resmi atau sistem yang telah dikembangkan (bila ada) | 99,38                                                                    |        | $NKP \text{ TKDD} = [0,10 (SYARAT) + 0,15 (PROYEKSI) + 0,25 (TAGIHAN) + 0,10 (MONEV) + 0,20 (LK-UAKPA) + 0,20 (REAL)] \times 100$                                                                                                                                 |
| 9.  | 5b-N     | Indeks kualitas                                                                | Data capaian satker, vendor, dan transaksi pada                                                                                                             | 4                                                                        |        | (Indeks Capaian Satker*30%)+(Indeks Capaian                                                                                                                                                                                                                       |

|     |       |                                                                             |                                                                                                                   |                                                          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |       | implementasi Digipay                                                        | Dashboard Aplikasi Digipay                                                                                        |                                                          |        | Vendor*10%)+(Indeks Capaian Transaksi*60%)                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 10. | 6a-CP | Indeks kualitas pelaksanaan rekonsiliasi tingkat UAKPA                      | Monitoring Rekonsiliasi pada Aplikasi MonSAKTI                                                                    | 4                                                        |        | (Indeks Kelengkapan Data dan Penyelesaian Transaksi*50%) + (Indeks Pelaksanaan Rekonsiliasi Eksternal*50%)                                                                                                                                                                                         |
| 11. | 6b-N  | Indeks kualitas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara K/L                    | Daftar LPJ Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran dari Aplikasi SPRINT                                              | $\sum$ LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu          | 222    | Realisasi: $\sum$ LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu / $\sum$ LPJ Bendahara yang seharusnya disampaikan ke KPPN*100%<br>Indeks 4: Jika memperoleh nilai $99,5\% < x \leq 100\%$                                                                                                              |
|     |       |                                                                             |                                                                                                                   | $\sum$ LPJ Bendahara yang seharusnya disampaikan ke KPPN | 222    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     |       |                                                                             |                                                                                                                   | Realisasi                                                | 100%   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     |       |                                                                             |                                                                                                                   | Capaian                                                  | 4      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 12. | 7a-CP | Tingkat implementasi penajaman tugas Treasury dan Financial Advisory        | Laporan implementasi Shadow Organization                                                                          | Organisasi                                               | 25%    | (Capaian Komponen I x bobot) + (Capaian Komponen II x bobot) + (Capaian Komponen III x bobot) + (Capaian Komponen IV x bobot)                                                                                                                                                                      |
|     |       |                                                                             |                                                                                                                   | Kegiatan                                                 | 24,17% |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     |       |                                                                             |                                                                                                                   | SDM                                                      | 25%    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     |       |                                                                             |                                                                                                                   | Output                                                   | 25%    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     |       |                                                                             |                                                                                                                   | Capaian                                                  | 99,17% |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 13. | 8a-N  | Tingkat kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization | Surat Keputusan Dirjen Perbendaharaan terkait hasil penilaian kualitas pengelolaan kinerja oleh Kantor Pusat DJPb | -                                                        |        | Hasil penilaian kualitas pengelolaan kinerja oleh Kantor Pusat DJPb                                                                                                                                                                                                                                |
| 14. | 8b-N  | Tingkat implementasi Learning Organization                                  | Hasil penilaian LO pada Aplikasi Training Modul Learning Organization                                             | 40,84                                                    |        | Nilai Tingkat Implementasi <i>Learning Organization</i>                                                                                                                                                                                                                                            |
| 15. | 8c-N  | Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal                   | Hasil penilaian pelaksanaan tugas kepatuhan internal oleh Kanwil DJPb                                             | -                                                        |        | Hasil penilaian pelaksanaan tugas KI dari Kantor Wilayah DJPb                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16. | 9a-CP | Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN                               | Laporan realisasi anggaran KPPN, TOR, RKA-K/L, LTPK, IKPA KPPN, OMSPAN, dan SMART DJA                             | 100%                                                     |        | Capaian IKU PKPA Triwulan I = Capaian IKPA Januari s.d. Maret<br>Capaian IKU PKPA Triwulan II = Capaian IKPA Januari s.d. Juni<br>Capaian IKU PKPA Triwulan III = Capaian IKPA Januari s.d. September<br>Capaian IKU PKPA Triwulan IV = 40% Capaian IKPA Januari s.d. Desember + 60% Capaian SMART |
| 17. | 9b-N  | Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB                                   | Laporan hasil penilaian yang dilakukan oleh UAPPA-W dan UAPPB-W                                                   | -                                                        |        | Total nilai berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh UAPPA-W dan UAPPB-W terhadap Laporan Keuangan tingkat UAKPA dan UAKPB                                                                                                                                                                        |
| 18. | 9c-N  | Persentase kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan                           | Daftar nominatif sertipikat Tanah dari DJKN, RP4, Aplikasi Pengadaan                                              | -                                                        |        | Realisasi IKU = (Realisasi 1 + Realisasi 2 + Realisasi 3)/3                                                                                                                                                                                                                                        |

Mengetahui,  
Kepala KPPN



Ditandatangani secara elektronik  
Arief Rokhman  
197112181992011001



## LAPORAN PELAKSANAAN INISIATIF STRATEGIS

### VERSI IIAA

|            |                                                                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------|
| SS/IKU     | Indeks Kualitas Implementasi <i>Digipay</i>                     |
| IS         | Pemenuhan Indikator Tingkat Implementasi <i>Digipay</i>         |
| Periode IS | s.d. 31 Desember 2023                                           |
| Output     | Peningkatan jumlah satker, vendor, dan transaksi <i>digipay</i> |

| Progres s.d. Triwulan I                                                                                                             |  | On-Track |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|--|
| <b>Penjelasan</b><br>Penandatanganan MoU dengan Satker mitra kerja/perbankan s.d. 31 Maret 2023 telah dilaksanakan sebanyak 13 kali |  |          |  |
| <b>Kendala/Akar Masalah</b><br>Komunikasi intensif antara Kepala KPPN dan KPA satker menjadi penentu utama                          |  |          |  |
| <b>Output</b><br>Peningkatan jumlah satker, vendor, dan transaksi <i>digipay</i>                                                    |  |          |  |

| Anggaran |           |
|----------|-----------|
| Pagu     | Realisasi |
| -        | -         |

| Rencana Aksi                                            | Penanggung-jawab                 | Periode               |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Penandatanganan MoU dengan Satker mitra kerja/perbankan | Kepala Kantor, Kepala Seksi MSKI | s.d. 31 Desember 2023 |

\*) Status penyelesaian IS:

- Selesai, jika pada saat periode pelaporan, IS atau langkah pelaksanaan IS dimaksud telah diselesaikan;
- On-Track, jika pada saat periode pelaporan, IS atau langkah pelaksanaan IS belum jatuh tempo;
- Off-Track, jika pada saat periode pelaporan, IS atau langkah pelaksanaan IS masih dalam proses pelaksanaan tapi telah jatuh tempo.

\*\*) Warna status

- Selesai : Hijau
- On-Track: Kuning
- Off-Track: Merah

## LAPORAN PELAKSANAAN INISIATIF STRATEGIS

### VERSI IIAA

|            |                                                                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SS/IKU     | Tingkat Implementasi Penajaman Tugas <i>Treasury</i> dan <i>Financial Advisory</i>                     |
| IS         | Pemenuhan Indikator Tingkat Implementasi Penajaman Tugas <i>Treasury</i> dan <i>Financial Advisory</i> |
| Periode IS | s.d. 31 Desember 2023                                                                                  |
| Output     | Peningkatan kompetensi SDM penunjang fungsi <i>Treasury</i> dan <i>Financial Advisory</i>              |

| Progres s.d. Triwulan I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | On-Track                                                                           |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <p><b>Penjelasan</b><br/> <i>Forum Group Discussion</i> (FGD) dengan instansi pembina s.d. 31 Maret 2023 telah dilaksanakan sebanyak 1 kali</p> <p><b>Kendala/Akar Masalah</b><br/> Diperlukan <i>extra effort</i> dalam melakukan koordinasi antar seksi terkait pemenuhan kegiatan implementasi penajaman tugas <i>treasury</i> dan <i>financial advisory</i></p> <p><b>Output</b><br/> Peningkatan kompetensi SDM penunjang fungsi <i>Treasury</i> dan <i>Financial Advisory</i></p> |                                                                                    |                       |
| Anggaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    |                       |
| Pagu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Realisasi                                                                          |                       |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                  |                       |
| Rencana Aksi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Penanggung-jawab                                                                   | Periode               |
| FGD dengan instansi pembina<br>FGD dengan pemerintah daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kepala Kantor,<br>Kepala Subbagian Umum, <i>Head of Financial Advisor Division</i> | s.d. 31 Desember 2023 |

\*) Status penyelesaian IS:

- Selesai, jika pada saat periode pelaporan, IS atau langkah pelaksanaan IS dimaksud telah diselesaikan;
- On-Track, jika pada saat periode pelaporan, IS atau langkah pelaksanaan IS belum jatuh tempo;
- Off-Track, jika pada saat periode pelaporan, IS atau langkah pelaksanaan IS masih dalam proses pelaksanaan tapi telah jatuh tempo.

\*\*) Warna status

- Selesai : Hijau
- On-Track: Kuning
- Off-Track: Merah

## Summary Kinerja dan Risiko KPPN Gorontalo



KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA



Kemenkeu-Three KPPN Gorontalo tahun 2023, memiliki **9 Sasaran Strategis (SS)** dan **18 Indikator Kinerja Utama (IKU)** dengan rincian:

- 6 (enam) IKU *Cascading Peta* (diturunkan dari *Kemenkeu-Wide*, *Kemenkeu-One*, dan *Kemenkeu-Two*).
- 12 (dua belas) IKU *Non Cascading*



- Pada **triwulan 1** terdapat **10 (sepuluh) IKU** dengan *trajectory* target pada triwulan I dan **seluruhnya mencapai target**.
- Sampai dengan triwulan I, terdapat **10 (sepuluh) IKU** yang telah memiliki **capaian** dan **seluruhnya melampaui target**, sehingga NKO s.d. triwulan I sebesar 111,06.



Terdapat **3 (tiga) IKU Kemenkeu-Wide-One** yang akan menjadi **tanggung jawab KPPN Gorontalo**, yaitu:

- Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L
- Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran KPPN
- Nilai Kinerja Penyaluran Dana Transfer ke Daerah



Pada tahun 2023, terdapat **28 (dua puluh delapan) risk events** yang telah ditetapkan pada Piagam Risiko UPR KPPN Gorontalo tahun 2023, dengan rincian **6 Risiko perlu dimitigasi** dan **22 Risiko tidak perlu dimitigasi**.

Sampai dengan triwulan 1 2023, terdapat **2 risiko** yang masih pada level sangat tinggi, yaitu:

- Bertambahnya jumlah retur SP2D
- Penyelesaian SP2D Lebih Dari 1 (Satu) Jam

### NKO

**111,06**

|                         |       |  |
|-------------------------|-------|--|
| Stakeholder (30%)       | 38,15 |  |
| Customer (20%)          | N/A   |  |
| Internal Process (25%)  | 37,00 |  |
| Learning & Growth (25%) | 35,91 |  |

*\*) NKO menggunakan data capaian cut-off per 04 April 2023*

### Tren Nilai Kinerja Organisasi



NKO Tahun 2023 mencapai **111,06**, lebih tinggi dibandingkan NKO tahun 2022 sebesar 107,75.

### LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

NAMA UNIT : KPPN Gorontalo  
 PERIODE PELAPORAN : s.d. Triwulan II Tahun 2023

| No. | IKU/IKI                                                                             | Q1     |           | Q2     |           | Sm.1   |           | Q3     |           | s.d.Q3 |           | Q4     |           | Y      |           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
|     |                                                                                     | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi |
| 1.  | 1a-CP Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L                                        | 90     | 95,69     | 90     | 93,75     | 90     | 94,72     | 90     | -         | 90     | -         | 90     | -         | 90     | -         |
| 2.  | 1b-N Indeks kualitas LK Kuasa BUN KPPN                                              | -      | -         | -      | -         | -      | -         | -      | -         | -      | -         | 3      | -         | 3      | -         |
| 3.  | 2a-N Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN                                   | -      | -         | 4,66   | 4,82      | 4,66   | 4,82      | -      | -         | 4,66   | -         | 4,66   | -         | 4,66   | -         |
| 4.  | 3a-N Persentase tingkat implementasi standarisasi kompetensi pejabat perbendaharaan | -      | -         | 93%    | 98%       | 93%    | 98%       | -      | -         | 93%    | -         | 93%    | -         | 93%    | -         |
| 5.  | 3b-N Tingkat efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan               | -      | -         | 89     | 92,28     | 89     | 92,28     | -      | -         | 89     | -         | 89     | -         | 89     | -         |
| 6.  | 4a-CP Persentase akurasi perencanaan kas                                            | 80%    | N/A       | 80%    | 97,65%    | 80%    | 97,65%    | 80%    | -         | 80%    | -         | 80%    | -         | 80%    | -         |
| 7.  | 4b-N Tingkat kualitas penyelesaian SP2D                                             | 3      | 5         | 3      | 5         | 3      | 5         | 3      | -         | 3      | -         | 3      | -         | 3      | -         |
| 8.  | 5a-CP Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah                              | 90     | 99,38     | 90     | * _       | 90     | * _       | 90     | -         | 90     | -         | 90     | -         | 90     | -         |
| 9.  | 5b-N Indeks kualitas implementasi Digipay                                           | 3,1    | 4         | 3,1    | 4         | 3,1    | 4         | 3,1    | -         | 3,1    | -         | 3,1    | -         | 3,1    | -         |
| 10. | 6a-CP Indeks kualitas pelaksanaan rekonsiliasi tingkat UAKPA                        | 3,25   | 4         | 3,25   | 4         | 3,25   | 4         | 3,25   | -         | 3,25   | -         | 3,25   | -         | 3,25   | -         |
| 11. | 6b-N Indeks kualitas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara K/L                       | 3      | 4         | 3      | 4         | 3      | 4         | 3      | -         | 3      | -         | 3      | -         | 3      | -         |
| 12. | 7a-CP Tingkat implementasi penajaman tugas Treasury dan Financial Advisory          | 80%    | 98,86%    | 80%    | 100%      | 80%    | 99,43%    | 80%    | -         | 80%    | -         | 80%    | -         | 80%    | -         |
| 13. | 8a-N Tingkat kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization    | -      | -         | -      | -         | -      | -         | -      | -         | -      | -         | 85     | -         | 85     | -         |
| 14. | 8b-N Tingkat implementasi Learning Organization                                     | 10     | 40,84     | 40     | 63,63     | 40     | 63,63     | 60     | -         | 60     | -         | 85     | -         | 85     | -         |



|     |                                                                |       |      |       |        |       |       |       |   |       |   |       |   |       |   |
|-----|----------------------------------------------------------------|-------|------|-------|--------|-------|-------|-------|---|-------|---|-------|---|-------|---|
| 15. | 8c-N Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal | -     | -    | -     | -      | -     | -     | -     | - | -     | - | 86    | - | 86    | - |
| 16. | 9a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN            | 95,5% | 100% | 95,5% | 99,20% | 95,5% | 99,6% | 95,5% | - | 95,5% | - | 95,5% | - | 95,5% | - |
| 17. | 9b-N Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB                 | -     | -    | -     | -      | -     | -     | -     | - | -     | - | 84    | - | 84    | - |
| 18. | 9c-N Persentase kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan         | -     | -    | -     | -      | -     | -     | -     | - | -     | - | 100%  | - | 100%  | - |

Keterangan: \*\_ belum ada capaian IKU/IKI per tanggal 3 Juli 2023 karena masing menunggu ND dari pusat.

Gorontalo, 3 Juli 2023  
Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik  
Arief Rokhman  
197112181992011001



**RAW DATA IKU KEMENKEU-THREE KPPN**  
**KPPN Gorontalo**

| No. | Kode IKU | Uraian IKU                                                                      | Data yang diperlukan                                                                                                                                        | Data                                                                  |        | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | 1a-CP    | Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L                                          | Hasil penilaian IKPA tingkat Nasional sebagai BUN pada Aplikasi OMSPAN                                                                                      | 93,75                                                                 |        | $IKPA = \sum [ 10\% (REV) + 10\% (HAL3) + 20\% (REAL) + 10\% (KTR) + 10\% (TAG) + 10\% (PUP) + 5\% (DSPM) + 25\% (CO)] \times 100$                                                                                                                                |
| 2.  | 1b-N     | Indeks kualitas LK Kuasa BUN KPPN                                               | Monitoring monsakti dan Surat Keputusan Hasil Penilaian LK Kuasa BUN tingkat KPPN                                                                           | -                                                                     |        | Capaian IKU = $INDEKS (a + b) / 2$<br>a. Persentase jumlah satker yang tidak terdapat selisih TKTM Aset dan Persediaan pada periode pelaporan semesteran<br>b. Hasil penilaian kualitas LKBUN KPPN yang dilakukan oleh Kanwil DJPb                                |
| 3.  | 2a-N     | Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN                                    | Indeks Hasil Survei Kepuasan Satker                                                                                                                         | 4,82                                                                  |        | Kategori kualitas nilai LK Kuasa BUN tingkat KPPN adalah sebagai berikut :<br>5 = Sangat Puas<br>4 = Puas<br>3 = Cukup Puas<br>2 = Kurang Puas<br>1 = Tidak Puas                                                                                                  |
| 4.  | 3a-N     | Persentase tingkat implementasi standardisasi kompetensi pejabat perbendaharaan | Laporan Monitoring pada Aplikasi SIMASPATEN                                                                                                                 | 98%                                                                   |        | (persentase akselerasi verifikasi usulan x bobot) +<br>(persentase akselerasi refreshment x bobot) +<br>(persentase pemenuhan BNT x bobot)                                                                                                                        |
| 5.  | 3b-N     | Tingkat efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan                | Hasil Post Test dan hasil perhitungan kuesioner sosialisasi                                                                                                 | 92,28%                                                                |        | Rata-rata Indeks Tingkat Efektifitas Edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan<br>$0 < x \leq 20$ = tidak efektif<br>$20 < x \leq 40$ = kurang efektif<br>$40 < x \leq 60$ = cukup efektif<br>$60 < x \leq 80$ = efektif<br>$80 < x \leq 100$ = sangat efektif |
| 6.  | 4a-CP    | Persentase akurasi perencanaan kas                                              | Laporan Terkait Hasil Perhitungan Deviasi RPD dari Aplikasi MONSAKTI                                                                                        | 97,65%                                                                |        | $((100\% - ((Rata - Rata Deviasi Unit RPD \text{ harian KPPN per periode} \times 0,3) + ((Rata - Rata Deviasi Nilai RPD \text{ harian KPPN per periode} \times 0,7)))) - (Rasio Dispensasi RPD \text{ harian KPPN per periode} \times 0,01))$                     |
| 7.  | 4b-N     | Tingkat kualitas penyelesaian SP2D                                              | Data penerbitan SP2D pada aplikasi OM SPAN                                                                                                                  | $\sum$ SP2D sesuai kriteria                                           | 2.558  | (Capaian Komponen A + Capaian Komponen B + Capaian Komponen C)/3                                                                                                                                                                                                  |
|     |          |                                                                                 |                                                                                                                                                             | $\sum$ SP2D yang seharusnya sesuai kriteria                           | 2.558  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     |          |                                                                                 |                                                                                                                                                             | Capaian A                                                             | 5      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     |          |                                                                                 |                                                                                                                                                             | $\sum$ Penerima pada SP2D yg terbit – $\sum$ Penerima yang diretur BO | 10.010 |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     |          |                                                                                 |                                                                                                                                                             | $\sum$ Penerima pada SP2D                                             | 10.010 |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     |          |                                                                                 |                                                                                                                                                             | Capaian B                                                             | 5      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     |          |                                                                                 |                                                                                                                                                             | $\sum$ SP2D Pengganti kategori indeks 5                               | 235    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     |          |                                                                                 |                                                                                                                                                             | $\sum$ SP2D Pengganti kategori indeks 1-4                             | 0      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     |          |                                                                                 |                                                                                                                                                             | $\sum$ total SP2D Pengganti                                           | 235    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     |          |                                                                                 |                                                                                                                                                             | Capaian C                                                             | 5      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     |          |                                                                                 |                                                                                                                                                             | Capaian IKU                                                           | 5      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8.  | 5a-CP    | Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah                                | Hasil penilaian kinerja penyaluran DAK dan Dana Desa yang diterbitkan oleh Direktorat PA melalui surat resmi atau sistem yang telah dikembangkan (bila ada) | *<br>—                                                                |        | $NKP \text{ TKDD} = [0,10 (SYARAT) + (0,15 (PROYEKSI) + 0,25 (TAGIHAN) + 0,10 (MONEV) + 0,20 (LK-UAKPA) + 0,20 (REAL)] \times 100$                                                                                                                                |
| 9.  | 5b-N     | Indeks kualitas implementasi Digipay                                            | Data capaian satker, vendor, dan transaksi pada Dashboard Aplikasi Digipay                                                                                  | 4                                                                     |        | (Indeks Capaian Satker*30%)+(Indeks Capaian Vendor*10%)+(Indeks Capaian Transaksi*60%)                                                                                                                                                                            |

|     |       |                                                                             |                                                                                                                   |                                                          |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10. | 6a-CP | Indeks kualitas pelaksanaan rekonsiliasi tingkat UAKPA                      | Monitoring Rekonsiliasi pada Aplikasi MonSAKTI                                                                    | 4                                                        |             | (Indeks Kelengkapan Data dan Penyelesaian Transaksi*50%) + (Indeks Pelaksanaan Rekonsiliasi Eksternal*50%)                                                                                                                                                                                         |
| 11. | 6b-N  | Indeks kualitas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara K/L                    | Daftar LPJ Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran dari Aplikasi SPRINT                                              | $\sum$ LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu          | 222         | Realisasi: $\sum$ LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu / $\sum$ LPJ Bendahara yang seharusnya disampaikan ke KPPN*100%<br>Indeks 4: Jika memperoleh nilai $99,5\% < x \leq 100\%$                                                                                                              |
|     |       |                                                                             |                                                                                                                   | $\sum$ LPJ Bendahara yang seharusnya disampaikan ke KPPN | 222         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     |       |                                                                             |                                                                                                                   | Realisasi                                                | 100%        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     |       |                                                                             |                                                                                                                   | <b>Capaian</b>                                           | <b>4</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 12. | 7a-CP | Tingkat implementasi penajaman tugas Treasury dan Financial Advisory        | Laporan implementasi Shadow Organization                                                                          | Organisasi                                               | 25%         | (Capaian Komponen I x bobot) + (Capaian Komponen II x bobot) + (Capaian Komponen III x bobot) + (Capaian Komponen IV x bobot)                                                                                                                                                                      |
|     |       |                                                                             |                                                                                                                   | Kegiatan                                                 | 25%         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     |       |                                                                             |                                                                                                                   | SDM                                                      | 25%         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     |       |                                                                             |                                                                                                                   | Output                                                   | 25%         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     |       |                                                                             |                                                                                                                   | <b>Capaian</b>                                           | <b>100%</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 13. | 8a-N  | Tingkat kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization | Surat Keputusan Dirjen Perbendaharaan terkait hasil penilaian kualitas pengelolaan kinerja oleh Kantor Pusat DJPb | -                                                        |             | Hasil penilaian kualitas pengelolaan kinerja oleh Kantor Pusat DJPb                                                                                                                                                                                                                                |
| 14. | 8b-N  | Tingkat implementasi Learning Organization                                  | Hasil penilaian LO pada Aplikasi Training Modul Learning Organization                                             | 63,63                                                    |             | Nilai Tingkat Implementasi <i>Learning Organization</i>                                                                                                                                                                                                                                            |
| 15. | 8c-N  | Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal                   | Hasil penilaian pelaksanaan tugas kepatuhan internal oleh Kanwil DJPb                                             | -                                                        |             | Hasil penilaian pelaksanaan tugas KI dari Kantor Wilayah DJPb                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16. | 9a-CP | Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN                               | Laporan realisasi anggaran KPPN, TOR, RKA-K/L, LTPK, IKPA KPPN, OMSPAN, dan SMART DJA                             | 99,20%                                                   |             | Capaian IKU PKPA Triwulan I = Capaian IKPA Januari s.d. Maret<br>Capaian IKU PKPA Triwulan II = Capaian IKPA Januari s.d. Juni<br>Capaian IKU PKPA Triwulan III = Capaian IKPA Januari s.d. September<br>Capaian IKU PKPA Triwulan IV = 40% Capaian IKPA Januari s.d. Desember + 60% Capaian SMART |
| 17. | 9b-N  | Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB                                   | Laporan hasil penilaian yang dilakukan oleh UAPPA-W dan UAPPB-W                                                   | -                                                        |             | Total nilai berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh UAPPA-W dan UAPPB-W terhadap Laporan Keuangan tingkat UAKPA dan UAKPB                                                                                                                                                                        |
| 18. | 9c-N  | Persentase kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan                           | Daftar nominatif sertipikat Tanah dari DJKN, RP4, Aplikasi Pengadaan                                              | -                                                        |             | Realisasi IKU = (Realisasi 1 + Realisasi 2 + Realisasi 3)/3                                                                                                                                                                                                                                        |

Keterangan: \*\_ belum ada capaian IKU/IKI per tanggal 3 Juli 2023 karena masing menunggu ND dari pusat.

Mengetahui,  
Kepala KPPN



Ditandatangani secara elektronik  
Arief Rokhman  
197112181992011001



### LAPORAN CAPAIAN IKU KEMENKEU-THREE VERSI IIAA

| KPPN<br>GORONTALO | Perbendaharaan Negara yang optimal dan akuntabel |         |         |       |         |       |       |               |
|-------------------|--------------------------------------------------|---------|---------|-------|---------|-------|-------|---------------|
|                   | 1a-CP Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L     |         |         |       |         |       |       |               |
| T/R               | Q1                                               | Q2      | Sm. I   | Q3    | s.d. Q3 | Q4    | Y-23  | Pol/ K P      |
| Target            | 90                                               | 90      | 90      | 90    | 90      | 90    | 90    | Maximize/TLKV |
| Realisasi         | 95.68                                            | 93.75   | 94.72   |       |         |       |       |               |
| Capaian           | 106.31%                                          | 104.16% | 105.24% | 0.00% | 0.00%   | 0.00% | 0.00% |               |

| Isu Utama dan Implikasi                                                                                                                                                                                                                                                    | Tindakan yang telah dilaksanakan                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Isu Utama</b><br><p>Indikator Deviasi pada halaman III DIPA nilainya cukup rendah.</p> <p>KPA K/L merupakan salah satu komponen dalam kinerja KPPN yang dapat mempengaruhi persepsi stakeholders dalam melakukan penilaian atas kinerja KPPN secara keseluruhan</p>     | <p>-Melakukan reviu pelaksanaan anggaran setiap bulan.</p> <p>-Mengadakan sharing session terkait IKPA di awal tahun.</p> <p>-Menekan nilai UP mendekati dengan besaran GUP yang sering diajukan pada tahun sebelumnya.</p> <p>-Meningatkan satker pada saat batas-batas akhir pengajuan SPM.</p> |
| <b>Implikasi</b><br><p>1. Masih terdapat bendahara/operator baru di satker yang baru yang belum menguasai IKPA.</p> <p>2. Pemahaman pengelolaan anggaran pejabat terkait di satuan kerja masih belum maksimal.</p> <p>3. Satker mengajukan UP dengan nilai yang besar.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Akar Masalah | Rekomendasi Rencana Aksi | Penanggung jawab | Periode |
|--------------|--------------------------|------------------|---------|
|--------------|--------------------------|------------------|---------|



|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                              |            |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| 1. Masih terdapat bendahara/operator baru di satker yang baru yang belum menguasai IKPA.<br>2. Pemahaman pengelolaan anggaran pejabat terkait di satuan kerja masih belum maksimal.<br>3. Satker belum memahami penyusunan RPD Halaman III DIPA yang baik. | 1. Mengoptimalkan penggunaan Sosial Media KPPN Gorontalo untuk membagikan informasi terbaru terkait IKPA<br>2. One on one meeting RPD Halaman III DIPA<br>3. Membuat Rapot Satker dan memberikan penghargaan | Seksi MSKI | Akhir Juli 2023 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|

**LAPORAN CAPAIAN IKU KEMENKEU-THREE VERSI IIAA**

| KPPN<br>GORONTALO | Perbendaharaan Negara yang optimal dan akuntabel |    |       |    |         |       |       |               |
|-------------------|--------------------------------------------------|----|-------|----|---------|-------|-------|---------------|
|                   | 1b-N Indeks kualitas LK Kuasa BUN KPPN           |    |       |    |         |       |       |               |
| T/R               | Q1                                               | Q2 | Sm. I | Q3 | s.d. Q3 | Q4    | Y-23  | Pol/ K P      |
| Target            | -                                                | -  | -     | -  | -       | 3     | 3     | Maximize/TLKV |
| Realisasi         | -                                                | -  | -     | -  | -       |       |       |               |
| Capaian           | -                                                | -  | -     | -  | -       | 0.00% | 0.00% |               |

| Isu Utama dan Implikasi                                                                                                                                           | Tindakan yang telah dilaksanakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Isu Utama</b><br>Nilai LK Kuasa BUN KPPN dipengaruhi oleh validitas data transaksi baik pengeluaran maupun penerimaan. Target IKU ini terdapat di TRIWULAN IV. | 1. Pelaksanaan rekonsiliasi internal harian.<br>2. Monitoring data suspend atas penerimaan negara pada Aplikasi OM SPAN<br>3. Pelaksanaan analisis Neraca Percobaan dan Neraca lajur detil segmen satker. Memastikan tidak terdapat penggunaan akun/CoA yang salah pada transaksi di satker dan membuat Nota Dinas ke Seksi terkait, jika di temukan kesalahan penggunaan akun/CoA. |
| <b>Implikasi</b><br>Tidak maksimalnya nilai Laporan Keuangan khususnya pada indikator partisipasi                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Akar Masalah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rekomendasi Rencana Aksi                                                                                                                                       | Penanggung jawab | Periode              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|
| 1. Tingkat pemahaman satker terhadap penggunaan akun/CoA masih rendah.<br>2. Tingkat ketelitian satker terhadap pembebanan akun rendah sehingga menimbulkan selisih pada Transaksi<br>Dalam Konfirmasi (TDK), hal ini dapat mengurangi nilai LK BUN KPPN maupun Kanwil.<br>3. Masih terjadi kesalahan penginputan segmen-segmen CoA pada Aplikasi Simponi untuk penyetoran PNPB sehingga menimbulkan data Suspend | 1. Memberikan pendampingan.<br>2. Monitoring data dan menginformasikan melalui WAG..<br>3. Monitoring data suspend dan menginformasikan kepada satker terkait. | Seksi Vera       | Akhir September 2023 |

**LAPORAN CAPAIAN IKU KEMENKEU-THREE VERSI IIAA**

| KPPN<br>GORONTALO | Dukungan manajemen yang efektif                   |         |         |    |         |       |       |                      |
|-------------------|---------------------------------------------------|---------|---------|----|---------|-------|-------|----------------------|
|                   | 2a-N Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN |         |         |    |         |       |       |                      |
| T/R               | Q1                                                | Q2      | Sm. I   | Q3 | s.d. Q3 | Q4    | Y-23  | Pol/ K P             |
| Target            | -                                                 | 4.66    | 4.66    | -  | 4.66    | 4.66  | 4.66  | Maximize/<br>Average |
| Realisasi         | -                                                 | 4.82    | 4.82    | -  |         |       |       |                      |
| Capaian           | -                                                 | 103.43% | 103.43% | -  | 0.00%   | 0.00% | 0.00% |                      |

| Isu Utama dan Implikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tindakan yang telah dilaksanakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Isu Utama</b><br><p>Tingkat kepuasan satker terhadap layanan KPPN tidak hanya ditentukan oleh kualitas layanan KPPN namun juga terkait berbagai aspek misalnya kehandalan sistem aplikasi dan kebijakan lain yang berada diluar wewenang KPPN, akibatnya tingkat kepuasan atas layanan KPPN juga dipengaruhi oleh kepuasan stakeholder atas kebijakan-kebijakan yang berada diluar kewenangan KPPN (misalnya kehandalan sistem SPAN, dll). Selain itu, segmen informasi layanan masih perlu ditingkatkan.</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan analisa atas hasil survey untuk memetakan kelemahan pelayanan dan menyusun rekomendasi untuk perbaikan pada masing-masing unit.</li> <li>2. Melakukan evaluasi terhadap hasil survei periode sebelumnya.</li> <li>3. Melaksanakan/melengkapi sarana dan informasi sebagai tindakan perbaikan atas hasil survei periode sebelumnya yang masih kurang.</li> <li>4. Melakukan tindakan perbaikan atas hasil survei periode sebelumnya yang masih kurang.</li> <li>5. Semaksimal mungkin membantu satker dalam menghadapi permasalahan aplikasi.</li> </ol> |
| <b>Implikasi</b><br><p>Potensi tidak maksimalnya nilai Keterbukaan dan kemudahan akses informasi serta nilai sarana media publikasi rendah pada saat periode penilaian indeks kepuasan satuan kerja terhadap layanan KPPN</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Akar Masalah                                                                                                                                | Rekomendasi Rencana Aksi                                                                                                                                                                                            | Penanggung jawab                     | Periode            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| Seringkali terdapat gangguan pada sistem aplikasi yang digunakan oleh satker sehingga memengaruhi penilaian satker terhadap pelayanan KPPN. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan Sosialisasi inovasi-inovasi pelayanan yang diberikan KPPN</li> <li>2. Memanfaatkan media sosial</li> </ol> <p>KPPN untuk melakukan publikasi yang intensif.</p> | Para Kepala Seksi dan Subbagian Umum | Akhir Agustus 2023 |



**LAPORAN CAPAIAN IKU KEMENKEU-THREE VERSI IIAA**

| KPPN<br>GORONTALO | Komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang berkesinambungan<br>3a-N Persentase tingkat implementasi standardisasi kompetensi pejabat perbendaharaan |         |         |    |         |       |       |               |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----|---------|-------|-------|---------------|
| T/R               | Q1                                                                                                                                                   | Q2      | Sm. I   | Q3 | s.d. Q3 | Q4    | Y-23  | Pol/ K P      |
| Target            | -                                                                                                                                                    | 93%     | 93%     | -  | 93%     | 93%   | 93%   | Maximize/TLKV |
| Realisasi         | -                                                                                                                                                    | 98%     | 98%     |    |         |       |       |               |
| Capaian           | -                                                                                                                                                    | 105.38% | 105.38% | -  | 0.00%   | 0.00% | 0.00% |               |

| Isu Utama dan Implikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tindakan yang telah dilaksanakan                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Isu Utama</b><br>Standardisasi kompetensi pejabat perbendaharaan yaitu pelaksanaan penilaian kompetensi bagi PPK dan PPSPM pada satker pengelola APBN sesuai dengan PMK Nomor 211/PMK.05/2019 tentang Tata Cara Penilaian Kompetensi Bagi Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.<br><br>Sertifikat bendahara banyak yang berakhir periode Maret 2023. | 1. Menyampaikan pengumuman setiap ada pembukaan pelatihan Pejabat perbendaharaan<br>2. Pendampingan satker dan melayani konsultasi satker |
| <b>Implikasi</b><br>Banyak pejabat perbendaharaan yang belum bisa memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                           |

| Akar Masalah                                                                                                                                             | Rekomendasi Rencana Aksi                                                                                         | Penanggung jawab | Periode            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| Pelatihan Bendahara, PPSPM, dan PPK jumlahnya masih sangat terbatas sehingga pejabat perbendaharaan di satker kesulitan untuk memenuhi syarat sertifikat | Proaktif memberikan informasi dan mendorong pejabat perbendaharaan untuk mendaftarkan refreshment atau pelatihan | Seksi MSKI       | Akhir Agustus 2023 |

**LAPORAN CAPAIAN IKU KEMENKEU-THREE VERSI IIAA**

| KPPN<br>GORONTALO | Komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang berkesinambungan<br>3b-N Tingkat efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan |         |         |    |         |       |       |                      |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----|---------|-------|-------|----------------------|
| T/R               | Q1                                                                                                                                    | Q2      | Sm. I   | Q3 | s.d. Q3 | Q4    | Y-23  | Pol/ K P             |
| Target            | -                                                                                                                                     | 89      | 89      | -  | 89      | 89    | 89    | Maximize/<br>Average |
| Realisasi         | -                                                                                                                                     | 92.28   | 92.28   |    |         |       |       |                      |
| Capaian           | -                                                                                                                                     | 103.69% | 103.69% | -  | 0.00%   | 0.00% | 0.00% |                      |

| Isu Utama dan Implikasi                                                                                                                                                                                                                                                      | Tindakan yang telah dilaksanakan                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Isu Utama</b><br>Efektivitas edukasi dan komunikasi diukur melalui pengisian kuesioner atau pelaksanaan pretest dan post test pada saat dilaksanakan kegiatan sosialisasi ataupun bimtek. Selain itu juga berkurangnya pertanyaan dan permasalahan yang diajukan ke KPPN. | 1. Mengadakan sosialisasi dan bimtek terutama apabila terdapat peraturan baru atau update aplikasi<br>2. Pendampingan apabila terdapat masalah |
| <b>Implikasi</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |
| Berpengaruh pada tingkat efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |

| Akar Masalah                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Rekomendasi Rencana Aksi                                                                                                                                                                                                      | Penanggung jawab | Periode    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|
| 1. Pelatihan di masa pandemic mayoritas menggunakan media online sehingga kesempatan berinteraksi agak berkurang dan menurun efektivitasnya.<br>2. Peserta sosialisasi, bimtek, atau pelatihan online biasanya dilakukan sambil melaksanakan tugas yang lain, sehingga mereka kurang focus pada materi yang disampaikan. | 1. Pelatihan/GKM kepada semua pegawai agar pengetahuan terupdate dan dapat membimbing satker apabila ada yang konsultasi.<br>2. Sosialisasi kepada satker atas peraturan terbaru.<br>3. Pendampingan satker yang ada masalah. | Seksi MSKI       | Semesteran |

**LAPORAN CAPAIAN IKU KEMENKEU-THREE VERSI IIAA**

| KPPN<br>GORONTALO | Pengelolaan pengeluaran negara yang prudent, efektif dan efisien |         |         |       |         |       |       |                      |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------|---------|-------|-------|----------------------|
|                   | 4a-CP Persentase akurasi perencanaan kas                         |         |         |       |         |       |       |                      |
| T/R               | Q1                                                               | Q2      | Sm. I   | Q3    | s.d. Q3 | Q4    | Y-23  | Pol/ K P             |
| Target            | 80%                                                              | 80%     | 80%     | 80%   | 80%     | 80%   | 80%   | Maximize/<br>Average |
| Realisasi         | N/A                                                              | 97.65%  | 97.65%  |       |         |       |       |                      |
| Capaian           | N/A                                                              | 122.06% | 122.06% | 0.00% | 0.00%   | 0.00% | 0.00% |                      |

| Isu Utama dan Implikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tindakan yang telah dilaksanakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Isu Utama</b><br>Ketepatan penyampaian RPD oleh satker wujud garansi kualitas perencanaan satuan kerja. Sesuai ketentuan baru tentang RPD (PMK 197/PMK.05/2017)<br>penyampaian/pelaksanaan RPD telah banyak diberikan kemudahan-kemudahan bagi satker, antara lain penyampaian SPM tanpa RPD namun dilengkapi adanya Surat Pernyataan KPA ttg penundaan pencairan diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam pengelolaan RPD, baik di satker maupun KPPN.<br>Update Renkas Melalui SPRINT | 1.Sosialisasi tentang ketentuan baru RPD (PMK 197/PMK.05/2017).<br>2.Sosialisasi langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran tahun 2023, salah satu materinya terkait perencanaan kas.<br>3.Sosialisasi dan bimtek secara intensif.<br>4.Perlu dilakukan kegiatan pendampingan khususnya terhadap satker dengan pagu besar.<br>5. Menyampaikan teguran kepada satker yang tidak memenuhi RPD sesuai yang telah disampaikan. 6.Mengundang satker ke KPPN untuk didampingi input renkas di SPRINT. |
| <b>Implikasi</b><br>RPD dapat lebih akurat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Akar Masalah | Rekomendasi Rencana Aksi | Penanggung jawab | Periode |
|--------------|--------------------------|------------------|---------|
|--------------|--------------------------|------------------|---------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                     |                                  |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 1. Pemahaman teknis pelaksanaan anggaran di satker perlu ditingkatkan, masih banyak kesalahan SPM yang menyebabkan deviasi pada RPD<br>2. Perencanaan kegiatan yang disusun oleh satker masih belum akurat<br>3. Banyaknya perubahan/revisi DIPA<br>4. Tidak semua Satker mengetahui renkas melalui SPRINT | 1. Memberikan bimtek kepada satker.<br>2. Berkoordinasi dengan Kanwil DJPb.<br>3. Secara aktif melakukan updating data perencanaan kas yang disampaikan oleh satker | Seksi PD, Seksi MSKI, Seksi Bank | Akhir September 2023 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|

**LAPORAN CAPAIAN IKU KEMENKEU-THREE VERSI IIAA**

| KPPN<br>GORONTALO | Pengelolaan pengeluaran negara yang prudent, efektif dan efisien<br>4b-N Tingkat kualitas penyelesaian SP2D |         |         |       |         |       |       |                      |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------|---------|-------|-------|----------------------|
| T/R               | Q1                                                                                                          | Q2      | Sm. I   | Q3    | s.d. Q3 | Q4    | Y-23  | Pol/ K P             |
| Target            | 3                                                                                                           | 3       | 3       | 3     | 3       | 3     | 3     | Maximize/<br>Average |
| Realisasi         | 5                                                                                                           | 5       | 5       |       |         |       |       |                      |
| Capaian           | 120.00%                                                                                                     | 166.67% | 166.67% | 0.00% | 0.00%   | 0.00% | 0.00% |                      |

| Isu Utama dan Implikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tindakan yang telah dilaksanakan                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Isu Utama</b><br>Capaian IKU Tingkat kualitas penyelesaian SP2D yang sekarang mempertimbangkan 3 komponen (dulu 1), yaitu Penyelesaian SP2D secara tepat waktu, Efektivitas Penyaluran dana SP2D yang akurat, serta Efektivitas kecepatan penyelesaian retur SP2D. Selain itu, walaupun capaian IKU telah melampaui target yang ditentukan, masih perlu dicermati ketika jumlah SPM yang disampaikan overload.<br>Adanya pengajuan SPM banyak penerima dengan data rekening pada supplier yang | -Membangun komunikasi antar petugas terkait Pengumuman PPR di grup whatsapp kantor<br>-Mengatur tahapan proses validasi SPM untuk memberikan waktu dalam proses penyelesaian SPM<br>-Melaporkan melalui HAI DJPb |
| <b>Implikasi</b><br>1. Potensi terjadinya retur<br>2. Apabila SPM yang masuk dalam jumlah banyak, target IKU belum tentu akan tercapai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |

| Akar Masalah                                                                                                                                                                | Rekomendasi Rencana Aksi                                                  | Penanggung jawab      | Periode         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| - Rekening yang sudah lama tidak digunakan (pasif) namun digunakan lagi ketika ada transaksi pembayaran<br>-Penumpukan SPM di akhir tahun<br>-Gangguan jaringan pada sistem | -Koordinasi internal Seksi PD dan Seksi Bank.<br>-Melaporkan ke Dit. SITP | Seksi PD - Seksi Bank | Akhir Juli 2023 |

**LAPORAN CAPAIAN IKU KEMENKEU-THREE VERSI IIAA**

| KPPN<br>GORONTALO | Pelaksanaan anggaran yang optimal                      |       |       |       |         |       |       |                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|----------------------|
|                   | 5a-CP Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah |       |       |       |         |       |       |                      |
| T/R               | Q1                                                     | Q2    | Sm. I | Q3    | s.d. Q3 | Q4    | Y-23  | Pol/ K P             |
| Target            | 90                                                     | 90    | 90    | 90    | 90      | 90    | 90    | Maximize/<br>Average |
| Realisasi         | 99.38                                                  | N/A   |       |       |         |       |       |                      |
| Capaian           | 110.42%                                                | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00%   | 0.00% | 0.00% |                      |

| Isu Utama dan Implikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tindakan yang telah dilaksanakan                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Isu Utama</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Mulai TA 2023 Seluruh Transfer ke Daerah disalurkan melalui KPPN</li> <li>- KPPN harus melakukan input potongan dan penundaan (perlu ketelitian)</li> <li>- Adanya mekanisme BOK Pukermas yang sama dengan mekanisme BOSP (langsung ke rek.puskesmas)</li> </ul> <p>belum ada capaian IKU/IKI per tanggal 3 Juli 2023 karena masing menunggu ND dari pusat.</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berkoordinasi dengan Dinas Terkait dan Dit PA dan DJPK</li> <li>2. Berkoordinasi dengan pemda terkait penyaluran Dana Fisik</li> <li>3. Pemahaman peraturan terkait mekanisme baru dana BOS</li> </ol> |
| <b>Implikasi</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Nilai Ketepatan waktu penyampaian dokumen persyaratan oleh pemda (Syarat) yang tidak maksimal</li> <li>- Supplier baru, KPPN harus input manual</li> <li>- No rek Supplier dari Aplikasi K/L berpotensi tidak aktif</li> <li>- tidak dapat disalurkan DAK Fisik untuk kegiatan yang tidak didaftarkan pada OMSPAN</li> </ul>                                    |                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Akar Masalah | Rekomendasi Rencana Aksi | Penanggung jawab | Periode |
|--------------|--------------------------|------------------|---------|
|--------------|--------------------------|------------------|---------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Proses perbaikan data supplier dilakukan oleh kantor pusat kemendikbud dan kemenkes, sehingga saat ada retur harus menunggu terlebih dahulu</li> <li>- Saat ini tw.I, pemda sedang melakukan input kontrak-kontrak dan sisa DAK Fisik TAYL</li> <li>- Masih banyak pemda yang belum memahami juknis dan peraturan-peraturan yang ada, berpotensi kesalahan input di kedepan hari</li> </ul> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aktif berkoordinasi dengan Dit. PA, DJPK, dan Pemerintah Daerah</li> <li>2. Koordinasi dengan Pemda untuk penyaluran dokumen DF tepat waktu</li> <li>3. Mendorong pemda berkoordinasi dengan K/L.</li> <li>4. Memahami peraturan terkait TKD yang baru</li> </ol> | <p>Seksi Bank -<br/>Seksi Vera</p> | <p>Minggu II Juli<br/>2023</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|



**LAPORAN CAPAIAN IKU KEMENKEU-THREE VERSI IIAA**

| KPPN<br>GORONTALO | Pelaksanaan anggaran yang optimal         |         |         |       |         |       |       |                      |
|-------------------|-------------------------------------------|---------|---------|-------|---------|-------|-------|----------------------|
|                   | 5b-N Indeks kualitas implementasi Digipay |         |         |       |         |       |       |                      |
| T/R               | Q1                                        | Q2      | Sm. I   | Q3    | s.d. Q3 | Q4    | Y-23  | Pol/ K P             |
| Target            | 3.1                                       | 3.1     | 3.1     | 3.1   | 3.1     | 3.1   | 3.1   | Maximize/<br>Average |
| Realisasi         | 4                                         | 4       | 4       |       |         |       |       |                      |
| Capaian           | 120.00%                                   | 129.03% | 129.03% | 0.00% | 0.00%   | 0.00% | 0.00% |                      |

| Isu Utama dan Implikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tindakan yang telah dilaksanakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Isu Utama</b><br>Isu terkait penggunaan DIGIPay saat ini baru dapat dilakukan untuk pengadaan dan pembayaran kepada rekanan yang memiliki rekening di bank penyedia platform aplikasi DIGIPay telah diselesaikan melalui DIGIPay 1.<br>Kurang komitmen dan kesadaran satker dalam belanja secara cashless | 1. Mengenalkan potensi partisipasi satker melalui sistem DIGIPay untuk mendukung upaya terkini dari pemerintah, khususnya dalam menumbuhkan kegiatan perekonomian pasca pandemi.<br>2. Membantu akses kelompok potensial kepada kemanfaatan sistem DIGIPay<br>3. Mengenalkan satker dengan implementasi DigiPay dengan melibatkan bank himbara melalui sosialisasi yang komprehensif |
| <b>Implikasi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Eksklusivitas platform ini berdampak pada perbedaan teknis DIGIPay yang disediakan oleh bank yang                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Akar Masalah                                                                                                                                                                                                                                                               | Rekomendasi Rencana Aksi                                                                         | Penanggung jawab | Periode         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| Ketiadaan mesin Electronic Data Capture (EDC) dan potensi biaya-biaya lain yang ditagihkan oleh rekanan/ penyedia karena kurangnya pemahaman rekanan/ penyedia. Migrasi dari DIGIPay ke DIGIPay 1 masih terdapat permasalahan yaitu tidak semua termigrasi dengan sempurna | 1.FGD melibatkan pihak bank<br>2.Pendampingan satker yang mengalami permasalahan terkait DIGIPay | Seksi MSKI       | Akhir Juli 2023 |

**LAPORAN CAPAIAN IKU KEMENKEU-THREE VERSI IIAA**

| KPPN<br>GORONTALO | Pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan dan akuntabel |         |         |       |         |       |       |                      |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------|---------|-------|-------|----------------------|
|                   | 6a-CP Indeks kualitas pelaksanaan rekonsiliasi tingkat UAKPA     |         |         |       |         |       |       |                      |
| T/R               | Q1                                                               | Q2      | Sm. I   | Q3    | s.d. Q3 | Q4    | Y-23  | Pol/ K P             |
| Target            | 3.25                                                             | 3.25    | 3.25    | 3.25  | 3.25    | 3.25  | 3.25  | Maximize/<br>Average |
| Realisasi         | 4                                                                | 4       | 4       |       |         |       |       |                      |
| Capaian           | 120.00%                                                          | 123.08% | 123.08% | 0.00% | 0.00%   | 0.00% | 0.00% |                      |

| Isu Utama dan Implikasi                                                                                      | Tindakan yang telah dilaksanakan                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Isu Utama</b><br>Masih terdapat satker yang kurang paham/tidak tahu jadwal periode open dan closed period | 1. Penerbitan sanksi bagi satuan kerja yang terlambat<br>2. Mengingatkan kepada satker melalui surat, telepon, dan telegram mengenai batas waktu / open period bulan berkenaan |
| <b>Implikasi</b>                                                                                             |                                                                                                                                                                                |
| Keterlambatan akan berpengaruh pada capaian IKU                                                              |                                                                                                                                                                                |

| Akar Masalah                                                                                                                                                                 | Rekomendasi Rencana Aksi                                                                                                                             | Penanggung jawab | Periode              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|
| 1. Operator satker bersifat pasif sehingga mengakibatkan lebih sering menunggu untuk diingatkan<br>2. Kurang koordinasi antara operator sehingga masih saling menunggu data. | 1. Memberikan pemahaman dan melakukan monitoring dan evaluasi kepada satker<br>2. Memberikan pemahaman kepada satker pentingnya koordinasi internal. | Seksi Vera       | Akhir September 2023 |

**LAPORAN CAPAIAN IKU KEMENKEU-THREE VERSI IIAA**

| KPPN<br>GORONTALO | Pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan dan akuntabel |         |         |       |         |       |       |                 |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------|---------|-------|-------|-----------------|
|                   | 6b-N Indeks kualitas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara K/L    |         |         |       |         |       |       |                 |
| T/R               | Q1                                                               | Q2      | Sm. I   | Q3    | s.d. Q3 | Q4    | Y-23  | Pol/ K P        |
| Target            | 3                                                                | 3       | 3       | 3     | 3       | 3     | 3     | aximize/Average |
| Realisasi         | 4                                                                | 4       | 4       |       |         |       |       |                 |
| Capaian           | 120.00%                                                          | 133.33% | 133.33% | 0.00% | 0.00%   | 0.00% | 0.00% |                 |

| Isu Utama dan Implikasi                                                                                       | Tindakan yang telah dilaksanakan                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Isu Utama</b><br>Kurangnya pemahaman petugas satker dalam mengerjakan LPJ sehingga masih banyak kesalahan. | - Penerbitan sanksi bagi satuan kerja yang terlambat menyampaikan LPJ ke KPPN<br>- Berkoordinasi dengan satker melalui telepon, WA, dan/atau telegram mengenai penegasan kewajiban satker dalam penyampaian LPJ Bendahara |
| <b>Implikasi</b>                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                           |
| Penumpukan LPJ terjadi di hari-hari terakhir                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |

| Akar Masalah                                                                                                         | Rekomendasi Rencana Aksi                                                                                 | Penanggung jawab | Periode              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|
| 1. Adanya pergantian bendahara satker.<br>2. Kualitas SDM satker/operator pelaporan LPJ bendahara yang belum merata. | - Mendorong penunjukan bendahara yang bersertifikasi<br>- Mendorong Bimtek/ Pelatihan melalui e-learning | Seksi Vera       | Akhir September 2023 |

**LAPORAN CAPAIAN IKU KEMENKEU-THREE VERSI IIAA**

| KPPN<br>GORONTALO | Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif |         |         |       |         |       |       |                      |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------|---------|-------|-------|----------------------|
|                   | 7a-CP Tingkat implementasi penajaman tugas Treasury dan Financial Advisory       |         |         |       |         |       |       |                      |
| T/R               | Q1                                                                               | Q2      | Sm. I   | Q3    | s.d. Q3 | Q4    | Y-23  | Pol/ K P             |
| Target            | 80%                                                                              | 80%     | 80%     | 80%   | 80%     | 80%   | 80%   | Maximize/<br>Average |
| Realisasi         | 98.86%                                                                           | 100%    | 100%    |       |         |       |       |                      |
| Capaian           | 123.58%                                                                          | 125.00% | 125.00% | 0.00% | 0.00%   | 0.00% | 0.00% |                      |

| Isu Utama dan Implikasi                                                                                                                                                                                                                                                   | Tindakan yang telah dilaksanakan                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Isu Utama</b><br>1. Penjelasan manual IKI serta format pelaporan terkait Tingkat implementasi penajaman tugas Treasury dan Financial Advisory baru disampaikan pada akhir triwulan I<br>2. Tidak adanya penjelasan khusus mengenai format pelaporan pada tiap komponen | 1. Melaksanakan seluruh rangkaian standardisasi kegiatan manajemen KPPN<br>2. Melengkapi dokumentasi terkait kegiatan yang telah dilaksanakan |
| <b>Implikasi</b><br>Adanya kemungkinan ketidaktercapaiannya IKI Tingkat implementasi penajaman tugas Treasury dan Financial Advisory                                                                                                                                      |                                                                                                                                               |

| Akar Masalah                                                                                                                       | Rekomendasi Rencana Aksi                                                                                                 | Penanggung jawab                            | Periode              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| Diperlukan extra effort dalam penyusunan Laporan Implementasi Penajaman Tugas Treasury, Regional Economist, dan Financial Advisory | Melakukan koordinasi antar seksi terkait pemenuhan kegiatan implementasi penajaman tugas treasury dan financial advisory | Para Kepala Seksi dan Subbagian<br><br>Umum | Akhir September 2023 |

**LAPORAN CAPAIAN IKU KEMENKEU-THREE VERSI IIAA**

| KPPN<br>GORONTALO | Organisasi dan SDM yang unggul dan adaptif<br>8a-N Tingkat kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization |    |       |    |         |       |       |               |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----|---------|-------|-------|---------------|
| T/R               | Q1                                                                                                                             | Q2 | Sm. I | Q3 | s.d. Q3 | Q4    | Y-23  | Pol/ K P      |
| Target            | -                                                                                                                              | -  | -     | -  | -       | 85    | 85    | Maximize/TLKV |
| Realisasi         | -                                                                                                                              | -  | -     | -  | -       |       |       |               |
| Capaian           | -                                                                                                                              | -  | -     | -  | -       | 0.00% | 0.00% |               |

| Isu Utama dan Implikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tindakan yang telah dilaksanakan                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Isu Utama</b><br>Dalam rangka mendorong komitmen pimpinan dan seluruh pegawai terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja di KPPN Gorontalo dilakukan langkah-langkah peningkatan kualitas kinerja. Sebagai bentuk apresiasi terhadap upaya-upaya peningkatan kualitas kinerja di lingkungan ditjen perbendaharaan, kantor pusat ditjen perbendaharaan melakukan penilaian terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja di unit-unit masing-masing. | Telah dilaksanakan kegiatan dan dipenuhi dokumen sesuai matriks SFO pada triwulan I |
| <b>Implikasi</b><br>Berpengaruh pada nilai IKI Tingkat kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization TA 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |

| Akar Masalah                                                                                                             | Rekomendasi Rencana Aksi                                                                                           | Penanggung jawab | Periode              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|
| Masih ada beberapa pegawai yang kurang peduli terhadap peningkatan kualitas pengelolaan kinerja organisasi dan individu. | - Merutinkan pelaksanaan dialog kinerja organisasi.<br>- Mempedomani matriks dalam peningkatan pengelolaan kinerja | Subbagian Umum   | Akhir September 2023 |

**LAPORAN CAPAIAN IKU KEMENKEU-THREE VERSI IIAA**

| KPPN<br>GORONTALO | Organisasi dan SDM yang unggul dan adaptif<br>8b-N Tingkat implementasi learning organization |         |         |       |         |       |       |               |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------|---------|-------|-------|---------------|
| T/R               | Q1                                                                                            | Q2      | Sm. I   | Q3    | s.d. Q3 | Q4    | Y-23  | Pol/ K P      |
| Target            | 10                                                                                            | 40      | 40      | 60    | 60      | 85    | 85    | Maximize/TLKV |
| Realisasi         | 40.84                                                                                         | 63.63   | 63.63   |       |         |       |       |               |
| Capaian           | 408.40%                                                                                       | 159.08% | 159.08% | 0.00% | 0.00%   | 0.00% | 0.00% |               |

| Isu Utama dan Implikasi                                                                                                                                   | Tindakan yang telah dilaksanakan                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Isu Utama</b><br>Pemenuhan dokumen untuk tiap-tiap subkomponen yang harus terus dilakukan secara berkala                                               | 1. Telah dilaksanakan kegiatan sesuai dengan sub-komponen implementasi LO<br>2. Telah dipenuhi dokumen terkait implementasi LO |
| <b>Implikasi</b><br>Nilai capaian IKI Tingkat Implementasi LO dapat terpenuhi untuk triwulan I, namun secara keseluruhan belum mendapatkan skor tertinggi |                                                                                                                                |

| Akar Masalah                                                                                                                 | Rekomendasi Rencana Aksi                                                                                                                                                                                                                           | Penanggung jawab | Periode              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|
| Pada komponen 2, terdapat dua subkomponen yang tidak bisa didapatkan nilainya dikarenakan periode pelaporan DKI belum dibuka | 1. Memenuhi kegiatan dan dokumen sesuai dengan output yang diminta pada panduan implementasi LO sesuai dengan penjelasan<br>2. Memberikan reminder kepada para peserta pelatihan untuk mengisi EPASPEM serta melakukan upload sertifikat pelatihan | Subbagian Umum   | Akhir September 2023 |

**LAPORAN CAPAIAN IKU KEMENKEU-THREE VERSI IIAA**

| KPPN<br>GORONTALO | Organisasi dan SDM yang unggul dan adaptif                     |    |       |    |         |       |       |               |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|----|-------|----|---------|-------|-------|---------------|
|                   | 8c-N Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal |    |       |    |         |       |       |               |
| T/R               | Q1                                                             | Q2 | Sm. I | Q3 | s.d. Q3 | Q4    | Y-23  | Pol/ K P      |
| Target            | -                                                              | -  | -     | -  | -       | 86    | 86    | Maximize/TLKV |
| Realisasi         | -                                                              | -  | -     | -  | -       |       |       |               |
| Capaian           | -                                                              | -  | -     | -  | -       | 0.00% | 0.00% |               |

| Isu Utama dan Implikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tindakan yang telah dilaksanakan                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Isu Utama</b><br>Pelaporan/evaluasi atas pelaksanaan pemantauan pengendalian intern bersifat dinamis sehingga penyesuaian-penyesuaian terkait dengan format, mekanisme dan periode harus segera dilakukan secara konsisten karena akan berdampak pada hasil penilaian evaluasi.<br>Penilaian hasil evaluasi penerapan PPI dilakukan oleh kanwil DJPb. | Menyusun laporan PPI dengan format baru sesuai KMK Nomor 940 Tahun 2017 tentang Kerangka Kerja Kerangka Kerja Pemantauan Pengendalian Internal dan Pedoman Pemantauan Pengendalian Internal Di Lingkungan Kementerian Keuangan |
| <b>Implikasi</b><br>Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal yang kurang maksimal                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                |

| Akar Masalah                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rekomendasi Rencana Aksi    | Penanggung jawab | Periode              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------|
| Penyusunan laporan PPI dengan format sesuai KMK Nomor 940 Tahun 2017 tentang Kerangka Kerja Kerangka Kerja Pemantauan Pengendalian Internal dan Pedoman Pemantauan Pengendalian Internal Di Lingkungan Kementerian Keuangan baru sehingga laporan yang disusun belum dapat dipastikan ketepatan penyusunannya. | Membuat kalender laporan KI | Seksi MSKI       | Akhir September 2023 |

**LAPORAN CAPAIAN IKU KEMENKEU-THREE VERSI IIAA**

| KPPN<br>GORONTALO | Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang andal<br>9a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN |         |         |        |         |        |        |               |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|---------|--------|--------|---------------|
| T/R               | Q1                                                                                                       | Q2      | Sm. I   | Q3     | s.d. Q3 | Q4     | Y-23   | Pol/ K P      |
| Target            | 95.50%                                                                                                   | 95.50%  | 95.50%  | 95.50% | 95.50%  | 95.50% | 95.50% | Maximize/TLKV |
| Realisasi         | 100%                                                                                                     | 99.20%  | 99.20%  |        |         |        |        |               |
| Capaian           | 104.71%                                                                                                  | 103.87% | 103.87% | 0.00%  | 0.00%   | 0.00%  | 0.00%  |               |

| Isu Utama dan Implikasi                                                                                                              | Tindakan yang telah dilaksanakan                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Isu Utama</b><br>Mempertahankan nilai capaian IKI Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran KPPN periode triwulan I                | 1. Telah melakukan input data capaian output sebelum batas waktu<br>2. Menjaga persentase realisasi pelaksanaan anggaran<br>3. Menjaga nilai deviasi agar tidak melebihi 5% |
| <b>Implikasi</b><br>Nilai IKPA masih terus mengalami perubahan sampai dengan periode pengisian dan pelaporan capaian output berakhir |                                                                                                                                                                             |

| Akar Masalah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rekomendasi Rencana Aksi                                                                                   | Penanggung jawab | Periode             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| 1. Berdasarkan nota dinas Dit. PA, periode pengisian dan pelaporan capaian output pada aplikasi OMSPAN masih dalam tahapan Open Period sampai dengan 30 April 2023<br>2. Adanya perubahan ketentuan pemutakhiran RPD hal III DIPA sesuai dengan Nota Dinas Dit. PA nomor ND-467/PB.2/2023 Tanggal 3 April 2023 Hal Perubahan Ketentuan Pemutakhiran RPD Hal III DIPA Triwulan II 2023 dan Pengaturan Indikator Kinerja Pengelolaan UP & TUP Sehubungan Dengan Libur dan Cuti Bersama HBK Idul Fitri | 1. Melakukan revisi hal III DIPA sebelum batas waktu<br>2. Melaksanakan belanja sesuai dengan hal III DIPA | Subbagian Umum   | Minggu II Juli 2023 |



**LAPORAN CAPAIAN IKU KEMENKEU-THREE VERSI IIAA**

| KPPN<br>GORONTALO | Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang andal |    |       |    |         |       |       |               |
|-------------------|---------------------------------------------------|----|-------|----|---------|-------|-------|---------------|
|                   | 9b-N Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB    |    |       |    |         |       |       |               |
| T/R               | Q1                                                | Q2 | Sm. I | Q3 | s.d. Q3 | Q4    | Y-23  | Pol/ K P      |
| Target            | -                                                 | -  | -     | -  | -       | 84    | 84    | Maximize/TLKV |
| Realisasi         | -                                                 | -  | -     | -  | -       |       |       |               |
| Capaian           | -                                                 | -  | -     | -  | -       | 0.00% | 0.00% |               |

| Isu Utama dan Implikasi                                                                                                                                                                           | Tindakan yang telah dilaksanakan                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Isu Utama</b><br>- Adanya kesalahan pencatatan perolehan KDP<br>- masih ada persediaan yang belum didetailkan pada aplikasi SAKTI                                                              | - Telah diselesaikan to do list pada monsahti secara berkala periode sampai dengan maret 2023<br>- Rekonsiliasi Internal UAKPA-PB<br>- Telah dilakukan Jurnal reklas KDP ke Aset tetap |
| <b>Implikasi</b><br>- Nilai pada variable keakuratan Laporan BMN tidak maksimal<br>- Muncul daftar to-do-list pada aplikasi SAKTI dan MONSAKTI yang berpengaruh pada nilai partisipasi LK UAKPA/B |                                                                                                                                                                                        |

| Akar Masalah                                                                                                                                                      | Rekomendasi Rencana Aksi                             | Penanggung jawab | Periode              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|----------------------|
| 1. Aset dan persediaan belum bisa didetailkan jika modul GLP pada bulan sebelumnya belum ditutup<br>2. Penutupan pada modul GLP menunggu arahan dari kantor pusat | membersihkan to-do-list pada MONSAKTI secara berkala | Subbagian Umum   | Akhir September 2023 |

**LAPORAN CAPAIAN IKU KEMENKEU-THREE VERSI IIAA**

| KPPN<br>GORONTALO | Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang andal      |    |       |    |         |       |       |               |
|-------------------|--------------------------------------------------------|----|-------|----|---------|-------|-------|---------------|
|                   | 9c-N Persentase kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan |    |       |    |         |       |       |               |
| T/R               | Q1                                                     | Q2 | Sm. I | Q3 | s.d. Q3 | Q4    | Y-23  | Pol/ K P      |
| Target            | -                                                      | -  | -     | -  | -       | 100%  | 100%  | Maximize/TLKV |
| Realisasi         | -                                                      | -  | -     | -  | -       |       |       |               |
| Capaian           | -                                                      | -  | -     | -  | -       | 0.00% | 0.00% |               |

| Isu Utama dan Implikasi                                                                                                                                                                                                   | Tindakan yang telah dilaksanakan                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Isu Utama</b><br>Pengelolaan sarana dan prasarana meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap barang bergerak dan tidak bergerak. Strategi pengelolaan BMN secara optimal berpedoman pada SE-32/PB/2016. | - Telah melakukan pengadaan kursi dan pelaksanaan sebagian pagu belanja modal |
| <b>Implikasi</b>                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |
| Nilai Persentase kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan mencapai target                                                                                                                                                   |                                                                               |

| Akar Masalah                                      | Rekomendasi Rencana Aksi                                                             | Penanggung jawab | Periode              |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|
| Kekurangan jumlah komposisi SDM di Subbagian Umum | - penghapusan BMN<br>- Renovasi Middle Office<br>- Penghapusan Arsip<br>- Sensus BMN | Subbagian Umum   | Akhir September 2023 |

# LAPORAN PELAKSANAAN INISIATIF STRATEGIS

## VERSI IIAA

|            |                                                                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------|
| SS/IKU     | Indeks Kualitas Implementasi <i>Digipay</i>                     |
| IS         | Pemenuhan Indikator Tingkat Implementasi <i>Digipay</i>         |
| Periode IS | s.d. 31 Desember 2023                                           |
| Output     | Peningkatan jumlah satker, vendor, dan transaksi <i>digipay</i> |

| Progres s.d. Triwulan I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | On-Track |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <p><b>Penjelasan</b><br/>Penandatanganan MoU dengan Satker mitra kerja/perbankan s.d. 30 Juni 2023 telah dilaksanakan sebanyak 21 kali</p> <p><b>Kendala/Akar Masalah</b><br/>Komunikasi intensif antara Kepala KPPN dan KPA satker menjadi penentu utama</p> <p><b>Output</b><br/>Peningkatan jumlah satker, vendor, dan transaksi <i>digipay</i></p> |          |

| Anggaran |           |
|----------|-----------|
| Pagu     | Realisasi |
| -        | -         |

| Rencana Aksi                                            | Penanggung-jawab                 | Periode               |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Penandatanganan MoU dengan Satker mitra kerja/perbankan | Kepala Kantor, Kepala Seksi MSKI | s.d. 31 Desember 2023 |

\*) Status penyelesaian IS:

- Selesai, jika pada saat periode pelaporan, IS atau langkah pelaksanaan IS dimaksud telah diselesaikan;
- On-Track, jika pada saat periode pelaporan, IS atau langkah pelaksanaan IS belum jatuh tempo;
- Off-Track, jika pada saat periode pelaporan, IS atau langkah pelaksanaan IS masih dalam proses pelaksanaan tapi telah jatuh tempo.

\*\*) Warna status

- Selesai : Hijau
- On-Track: Kuning
- Off-Track: Merah



## LAPORAN PELAKSANAAN INISIATIF STRATEGIS

### VERSI IIAA

|            |                                                                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SS/IKU     | Tingkat Implementasi Penajaman Tugas <i>Treasury</i> dan <i>Financial Advisory</i>                     |
| IS         | Pemenuhan Indikator Tingkat Implementasi Penajaman Tugas <i>Treasury</i> dan <i>Financial Advisory</i> |
| Periode IS | s.d. 31 Desember 2023                                                                                  |
| Output     | Peningkatan kompetensi SDM penunjang fungsi <i>Treasury</i> dan <i>Financial Advisory</i>              |

| Progres s.d. Triwulan I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | On-Track                                                                           |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <p><b>Penjelasan</b><br/> <i>Forum Group Discussion</i> (FGD) dengan instansi pembina s.d. 30 Juni 2023 telah dilaksanakan sebanyak 2 kali</p> <p><b>Kendala/Akar Masalah</b><br/> Diperlukan <i>extra effort</i> dalam melakukan koordinasi antar seksi terkait pemenuhan kegiatan implementasi penajaman tugas <i>treasury</i> dan <i>financial advisory</i></p> <p><b>Output</b><br/> Peningkatan kompetensi SDM penunjang fungsi <i>Treasury</i> dan <i>Financial Advisory</i></p> |                                                                                    |                       |
| Anggaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                       |
| Pagu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Realisasi                                                                          |                       |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                                  |                       |
| Rencana Aksi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Penanggung-jawab                                                                   | Periode               |
| FGD dengan instansi pembina<br>FGD dengan pemerintah daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kepala Kantor,<br>Kepala Subbagian Umum, <i>Head of Financial Advisor Division</i> | s.d. 31 Desember 2023 |

\*) Status penyelesaian IS:

- Selesai, jika pada saat periode pelaporan, IS atau langkah pelaksanaan IS dimaksud telah diselesaikan;
- On-Track, jika pada saat periode pelaporan, IS atau langkah pelaksanaan IS belum jatuh tempo;
- Off-Track, jika pada saat periode pelaporan, IS atau langkah pelaksanaan IS masih dalam proses pelaksanaan tapi telah jatuh tempo.

\*\*) Warna status

- Selesai : Hijau
- On-Track: Kuning
- Off-Track: Merah

### LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

NAMA UNIT : KPPN Gorontalo  
 PERIODE PELAPORAN : s.d. Triwulan III Tahun 2023

| No. | IKU/IKI                                                                          | Q1     |           | Q2     |           | Sm.1   |           | Q3     |           | s.d.Q3 |           | Q4     |           | Y      |           |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
|     |                                                                                  | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi |
| 1.  | 1a-CP Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L                                     | 90     | 95,68     | 90     | 94,75     | 90     | 94,75     | 90     | 95,87     | 90     | 95,87     | 90     | -         | 90     | -         |
| 2.  | 1b-N Indeks kualitas LK Kuasa BUN KPPN                                           | -      | -         | -      | -         | -      | -         | -      | -         | -      | -         | 3      | -         | 3      | -         |
| 3.  | 2a-N Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN                                | -      | -         | 4,66   | 4,82      | 4,66   | 4,82      | -      | -         | 4,66   | 4,82      | 4,66   | -         | 4,66   | -         |
| 4.  | 3a-N Persentase tingkat implementasi kompetensi pejabat perbendaharaan           | -      | -         | 93%    | 98%       | 93%    | 98%       | -      | -         | 93%    | 98%       | 93%    | -         | 93%    | -         |
| 5.  | 3b-N Tingkat efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan            | -      | -         | 89     | 95,59     | 89     | 95,59     | -      | -         | 89     | 95,59     | 89     | -         | 89     | -         |
| 6.  | 4a-CP Persentase akurasi perencanaan kas                                         | 80%    | N/A       | 80%    | 97,65%    | 80%    | 97,65%    | 80%    | 95,92%    | 80%    | 96,79%    | 80%    | -         | 80%    | -         |
| 7.  | 4b-N Tingkat kualitas penyelesaian SP2D                                          | 3      | 5         | 3      | 5         | 3      | 5         | 3      | 5         | 3      | 5         | 3      | -         | 3      | -         |
| 8.  | 5a-CP Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah                           | 90     | 99,38     | 90     | 99,40     | 90     | 99,39     | 90     | * _       | 90     | * _       | 90     | -         | 90     | -         |
| 9.  | 5b-N Indeks kualitas implementasi Digipay                                        | 3,1    | 4         | 3,1    | 4         | 3,1    | 4         | 3,1    | 4         | 3,1    | 4         | 3,1    | -         | 3,1    | -         |
| 10. | 6a-CP Indeks kualitas pelaksanaan rekonsiliasi tingkat UAKPA                     | 3,25   | 4         | 3,25   | 4         | 3,25   | 4         | 3,25   | 4         | 3,25   | 4         | 3,25   | -         | 3,25   | -         |
| 11. | 6b-N Indeks kualitas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara K/L                    | 3      | 4         | 3      | 4         | 3      | 4         | 3      | 4         | 3      | 4         | 3      | -         | 3      | -         |
| 12. | 7a-CP Tingkat implementasi penajaman tugas Treasury dan Financial Advisory       | 80%    | 98,86%    | 80%    | 100%      | 80%    | 99,43%    | 80%    | 100%      | 80%    | 99,62%    | 80%    | -         | 80%    | -         |
| 13. | 8a-N Tingkat kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization | -      | -         | -      | -         | -      | -         | -      | -         | -      | -         | 85     | -         | 85     | -         |
| 14. | 8b-N Tingkat implementasi Learning Organization                                  | 10     | 40,84     | 40     | 63,63     | 40     | 63,63     | 60     | 95,75     | 60     | 95,75     | 85     | -         | 85     | -         |

|     |                                                                |       |      |       |        |       |       |       |        |       |        |       |   |       |   |
|-----|----------------------------------------------------------------|-------|------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|---|-------|---|
| 15. | 8c-N Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal | -     | -    | -     | -      | -     | -     | -     | -      | -     | -      | 86    | - | 86    | - |
| 16. | 9a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN            | 95,5% | 100% | 95,5% | 99,20% | 95,5% | 99,6% | 95,5% | 99,98% | 95,5% | 99,98% | 95,5% | - | 95,5% | - |
| 17. | 9b-N Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB                 | -     | -    | -     | -      | -     | -     | -     | -      | -     | -      | 84    | - | 84    | - |
| 18. | 9c-N Persentase kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan         | -     | -    | -     | -      | -     | -     | -     | -      | -     | -      | 100%  | - | 100%  | - |

Keterangan: \*\_ belum ada capaian IKU/IKI per tanggal 4 Oktober 2023 karena masing menunggu ND dari pusat.

Gorontalo, 4 Oktober 2023  
Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik  
Arief Rokhman  
197112181992011001



**RAW DATA IKU KEMENKEU-THREE KPPN**  
**KPPN Gorontalo**

| No. | Kode IKU | Uraian IKU                                                                     | Data yang diperlukan                                                                                                                                        | Data                                        |        | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | 1a-CP    | Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L                                         | Hasil penilaian IKPA tingkat Nasional sebagai BUN pada Aplikasi OMSPAN                                                                                      | 93,36                                       |        | $IKPA = \sum [ 10\% (REV) + 10\% (HAL3) + 20\% (REAL) + 10\% (KTR) + 10\% (TAG) + 10\% (PUP) + 5\% (DSPM) + 25\% (CO)] \times 100$                                                                                                                                |
| 2.  | 1b-N     | Indeks kualitas LK Kuasa BUN KPPN                                              | Monitoring monsakti dan Surat Keputusan Hasil Penilaian LK Kuasa BUN tingkat KPPN                                                                           | -                                           |        | Capaian IKU = $INDEKS (a + b) / 2$<br>a. Persentase jumlah satker yang tidak terdapat selisih TKTM Aset dan Persediaan pada periode pelaporan semesteran<br>b. Hasil penilaian kualitas LKBUN KPPN yang dilakukan oleh Kanwil DJPb                                |
| 3.  | 2a-N     | Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN                                   | Indeks Hasil Survei Kepuasan Satker                                                                                                                         | 4,82                                        |        | Kategori kualitas nilai LK Kuasa BUN tingkat KPPN adalah sebagai berikut :<br>5 = Sangat Puas<br>4 = Puas<br>3 = Cukup Puas<br>2 = Kurang Puas<br>1 = Tidak Puas                                                                                                  |
| 4.  | 3a-N     | Persentase tingkat implementasi standarisasi kompetensi pejabat perbendaharaan | Laporan Monitoring pada Aplikasi SIMASPATEN                                                                                                                 | 98%                                         |        | (persentase akselerasi verifikasi usulan x bobot) +<br>(persentase akselerasi refreshment x bobot) +<br>(persentase pemenuhan BNT x bobot)                                                                                                                        |
| 5.  | 3b-N     | Tingkat efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan               | Hasil Post Test dan hasil perhitungan kuesioner sosialisasi                                                                                                 | 95,59%                                      |        | Rata-rata Indeks Tingkat Efektifitas Edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan<br>$0 < x \leq 20$ = tidak efektif<br>$20 < x \leq 40$ = kurang efektif<br>$40 < x \leq 60$ = cukup efektif<br>$60 < x \leq 80$ = efektif<br>$80 < x \leq 100$ = sangat efektif |
| 6.  | 4a-CP    | Persentase akurasi perencanaan kas                                             | Laporan Terkait Hasil Perhitungan Deviasi RPD dari Aplikasi MONSAKTI                                                                                        | 95,92%                                      |        | $((100\% - ((Rata - Rata Deviasi Unit RPD \text{ harian KPPN per periode} \times 0,3) + ((Rata - Rata Deviasi Nilai RPD \text{ harian KPPN per periode} \times 0,7)))) - (Rasio Dispensasi RPD \text{ harian KPPN per periode} \times 0,01))$                     |
| 7.  | 4b-N     | Tingkat kualitas penyelesaian SP2D                                             | Data penerbitan SP2D pada aplikasi OM SPAN                                                                                                                  | $\sum$ SP2D sesuai kriteria                 | 2.558  | (Capaian Komponen A + Capaian Komponen B + Capaian Komponen C)/3                                                                                                                                                                                                  |
|     |          |                                                                                |                                                                                                                                                             | $\sum$ SP2D yang seharusnya sesuai kriteria | 2.558  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     |          |                                                                                |                                                                                                                                                             | Capaian A                                   | 5      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     |          |                                                                                |                                                                                                                                                             | $\sum$ Penerima pada SP2D yg terbit –       | 10.010 |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     |          |                                                                                |                                                                                                                                                             | $\sum$ Penerima yang diretur BO             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     |          |                                                                                |                                                                                                                                                             | $\sum$ Penerima pada SP2D                   | 10.010 |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     |          |                                                                                |                                                                                                                                                             | Capaian B                                   | 5      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     |          |                                                                                |                                                                                                                                                             | $\sum$ SP2D Pengganti kategori indeks 5     | 235    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     |          |                                                                                |                                                                                                                                                             | $\sum$ SP2D Pengganti kategori indeks 1-4   | 0      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     |          |                                                                                |                                                                                                                                                             | $\sum$ total SP2D Pengganti                 | 235    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     |          |                                                                                |                                                                                                                                                             | Capaian C                                   | 5      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     |          |                                                                                |                                                                                                                                                             | Capaian IKU                                 | 5      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8.  | 5a-CP    | Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah                               | Hasil penilaian kinerja penyaluran DAK dan Dana Desa yang diterbitkan oleh Direktorat PA melalui surat resmi atau sistem yang telah dikembangkan (bila ada) | *<br>-                                      |        | $NKP \text{ TKDD} = [0,10 (SYARAT) + 0,15 (PROYEKSI) + 0,25 (TAGIHAN) + 0,10 (MONEV) + 0,20 (LK-UAKPA) + 0,20 (REAL)] \times 100$                                                                                                                                 |
| 9.  | 5b-N     | Indeks kualitas implementasi Digipay                                           | Data capaian satker, vendor, dan transaksi pada Dashboard Aplikasi Digipay                                                                                  | 4                                           |        | $(Indeks \text{ Capaian Satker} \times 30\%) + (Indeks \text{ Capaian Vendor} \times 10\%) + (Indeks \text{ Capaian Transaksi} \times 60\%)$                                                                                                                      |

|     |       |                                                                             |                                                                                                                   |                                                          |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10. | 6a-CP | Indeks kualitas pelaksanaan rekonsiliasi tingkat UAKPA                      | Monitoring Rekonsiliasi pada Aplikasi MonSAKTI                                                                    | 4                                                        |             | (Indeks Kelengkapan Data dan Penyelesaian Transaksi*50%) + (Indeks Pelaksanaan Rekonsiliasi Eksternal*50%)                                                                                                                                                                                         |
| 11. | 6b-N  | Indeks kualitas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara K/L                    | Daftar LPJ Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran dari Aplikasi SPRINT                                              | $\sum$ LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu          | 222         | Realisasi: $\frac{\sum \text{LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu}}{\sum \text{LPJ Bendahara yang seharusnya disampaikan ke KPPN}} \times 100\%$<br>Indeks 4: Jika memperoleh nilai $99,5\% < x \leq 100\%$                                                                                    |
|     |       |                                                                             |                                                                                                                   | $\sum$ LPJ Bendahara yang seharusnya disampaikan ke KPPN | 222         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     |       |                                                                             |                                                                                                                   | Realisasi                                                | 100%        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     |       |                                                                             |                                                                                                                   | <b>Capaian</b>                                           | <b>4</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 12. | 7a-CP | Tingkat implementasi penajaman tugas Treasury dan Financial Advisory        | Laporan implementasi Shadow Organization                                                                          | Organisasi                                               | 0%          | (Capaian Komponen I x bobot) + (Capaian Komponen II x bobot) + (Capaian Komponen III x bobot) + (Capaian Komponen IV x bobot)                                                                                                                                                                      |
|     |       |                                                                             |                                                                                                                   | Kegiatan                                                 | 25%         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     |       |                                                                             |                                                                                                                   | SDM                                                      | 50%         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     |       |                                                                             |                                                                                                                   | Output                                                   | 25%         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     |       |                                                                             |                                                                                                                   | <b>Capaian</b>                                           | <b>100%</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 13. | 8a-N  | Tingkat kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization | Surat Keputusan Dirjen Perbendaharaan terkait hasil penilaian kualitas pengelolaan kinerja oleh Kantor Pusat DJPb |                                                          |             | Hasil penilaian kualitas pengelolaan kinerja oleh Kantor Pusat DJPb                                                                                                                                                                                                                                |
| 14. | 8b-N  | Tingkat implementasi Learning Organization                                  | Hasil penilaian LO pada Aplikasi Training Modul Learning Organization                                             | 95,75                                                    |             | Nilai Tingkat Implementasi <i>Learning Organization</i>                                                                                                                                                                                                                                            |
| 15. | 8c-N  | Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal                   | Hasil penilaian pelaksanaan tugas kepatuhan internal oleh Kanwil DJPb                                             |                                                          |             | Hasil penilaian pelaksanaan tugas KI dari Kantor Wilayah DJPb                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16. | 9a-CP | Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN                               | Laporan realisasi anggaran KPPN, TOR, RKA-K/L, LTPK, IKPA KPPN, OMSPAN, dan SMART DJA                             | 99,98%                                                   |             | Capaian IKU PKPA Triwulan I = Capaian IKPA Januari s.d. Maret<br>Capaian IKU PKPA Triwulan II = Capaian IKPA Januari s.d. Juni<br>Capaian IKU PKPA Triwulan III = Capaian IKPA Januari s.d. September<br>Capaian IKU PKPA Triwulan IV = 40% Capaian IKPA Januari s.d. Desember + 60% Capaian SMART |
| 17. | 9b-N  | Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB                                   | Laporan hasil penilaian yang dilakukan oleh UAPPA-W dan UAPPB-W                                                   |                                                          |             | Total nilai berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh UAPPA-W dan UAPPB-W terhadap Laporan Keuangan tingkat UAKPA dan UAKPB                                                                                                                                                                        |
| 18. | 9c-N  | Persentase kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan                           | Daftar nominatif sertipikat Tanah dari DJKN, RP4, Aplikasi Pengadaan                                              |                                                          |             | Realisasi IKU = (Realisasi 1 + Realisasi 2 + Realisasi 3)/3                                                                                                                                                                                                                                        |

Keterangan: \*\_ belum ada capaian IKU/IKI per tanggal 4 Oktober 2023 karena masing menunggu ND dari pusat.

Mengetahui,  
Kepala KPPN



Ditandatangani secara elektronik  
Arief Rokhman  
197112181992011001





### LAPORAN CAPAIAN IKU KEMENKEU-THREE VERSI IIAA

| KPPN<br>GORONTALO | Perbendaharaan Negara yang optimal dan akuntabel |         |         |         |         |       |       |               |
|-------------------|--------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|-------|-------|---------------|
|                   | 1a-CP Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L     |         |         |         |         |       |       |               |
| T/R               | Q1                                               | Q2      | Sm. I   | Q3      | s.d. Q3 | Q4    | Y-23  | Pol/ K P      |
| Target            | 90                                               | 90      | 90      | 90      | 90      | 90    | 90    | Maximize/TLKV |
| Realisasi         | 95,68                                            | 94,75   | 94,75   | 95,87   | 95,87   |       |       |               |
| Capaian           | 106,31%                                          | 105,28% | 105,28% | 106,52% | 106,52% | 0,00% | 0,00% |               |

| Isu Utama dan Implikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tindakan yang telah dilaksanakan                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Isu Utama</b><br><p>Indikator Deviasi pada halaman III DIPA nilainya cukup rendah.</p> <p>KPA K/L merupakan salah satu komponen dalam kinerja KPPN yang dapat mempengaruhi persepsi stakeholders dalam melakukan penilaian atas kinerja KPPN secara keseluruhan</p>                                                                                                              | <p>-Melakukan reuiu pelaksanaan anggaran setiap bulan.</p> <p>-Mengadakan sharing session terkait IKPA di awal tahun.</p> <p>-Menekan nilai UP mendekati dengan besaran GUP yang sering diajukan pada tahun sebelumnya.</p> <p>-Mengingatkan satker pada saat batas-batas akhir pengajuan SPM.</p> |
| <b>Implikasi</b><br><p>1. Masih terdapat bendahara/operator baru di satker yang baru yang belum menguasai IKPA.</p> <p>2. Pemahaman pengelolaan anggaran pejabat terkait di satuan kerja masih belum maksimal.</p> <p>3. Satker mengajukan UP dengan nilai yang besar.</p> <p>4. Penambahan hari libur pada akhir Triwulan II memengaruhi realisasi pelaksanaan anggaran satker</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Akar Masalah | Rekomendasi Rencana Aksi | Penanggung jawab | Periode |
|--------------|--------------------------|------------------|---------|
|--------------|--------------------------|------------------|---------|



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                              |            |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| 1. Masih terdapat bendahara/operator baru di satker yang baru yang belum menguasai IKPA.<br>2. Pemahaman pengelolaan anggaran pejabat terkait di satuan kerja masih belum maksimal.<br>3. Satker mengajukan UP dengan nilai yang besar<br>4. Penambahan hari libur pada akhir Triwulan II memengaruhi realisasi pelaksanaan anggaran satker | 1. Mengoptimalkan penggunaan Sosial Media KPPN Gorontalo untuk membagikan informasi terbaru terkait IKPA<br>2. Secara berkala melakukan sharing session dan monev IKPA<br>3. Membuat Rapot Satker dan memberikan penghargaan | Seksi MSKI | Akhir Desember 2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|

**LAPORAN CAPAIAN IKU KEMENKEU-THREE VERSI IIAA**

| KPPN<br>GORONTALO | Perbendaharaan Negara yang optimal dan akuntabel |    |       |    |         |       |       |               |
|-------------------|--------------------------------------------------|----|-------|----|---------|-------|-------|---------------|
|                   | 1b-N Indeks kualitas LK Kuasa BUN KPPN           |    |       |    |         |       |       |               |
| T/R               | Q1                                               | Q2 | Sm. I | Q3 | s.d. Q3 | Q4    | Y-23  | Pol/ K P      |
| Target            | -                                                | -  | -     | -  | -       | 3     | 3     | Maximize/TLKV |
| Realisasi         | -                                                | -  | -     | -  | -       |       |       |               |
| Capaian           | -                                                | -  | -     | -  | -       | 0,00% | 0,00% |               |

| Isu Utama dan Implikasi                                                                                                                                           | Tindakan yang telah dilaksanakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Isu Utama</b><br>Nilai LK Kuasa BUN KPPN dipengaruhi oleh validitas data transaksi baik pengeluaran maupun penerimaan. Target IKU ini terdapat di TRIWULAN IV. | 1. Pelaksanaan rekonsiliasi internal harian.<br>2. Monitoring data suspend atas penerimaan negara pada Aplikasi OM SPAN<br>3. Pelaksanaan analisis Neraca Percobaan dan Neraca lajur detil segmen satker. Memastikan tidak terdapat penggunaan akun/CoA yang salah pada transaksi di satker dan membuat Nota Dinas ke Seksi terkait, jika di temukan kesalahan penggunaan akun/CoA. |
| <b>Implikasi</b><br>Tidak maksimalnya nilai Laporan Keuangan khususnya pada indikator partisipasi                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Akar Masalah | Rekomendasi Rencana Aksi | Penanggung jawab | Periode |
|--------------|--------------------------|------------------|---------|
|--------------|--------------------------|------------------|---------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                               |                   |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| <p>1. Tingkat pemahaman satker terhadap penggunaan akun/CoA masih rendah.</p> <p>2. Tingkat ketelitian satker terhadap pembebanan akun rendah sehingga menimbulkan selisih pada Transaksi</p> <p>Dalam Konfirmasi (TDK), hal ini dapat mengurangi nilai LK BUN KPPN maupun Kanwil.</p> <p>3. Masih terjadi kesalahan penginputan segmen-segmen CoA pada Aplikasi Simponi untuk penyetoran PNBPN sehingga menimbulkan data Suspend</p> | <p>1. Memberikan pendampingan.</p> <p>2. Monitoring data dan menginformasikan melalui WAG..</p> <p>3. Monitoring data suspend dan menginformasikan kepada satker terkait.</p> | <p>Seksi Vera</p> | <p>Akhir<br/>Desember 2023</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|

### LAPORAN CAPAIAN IKU KEMENKEU-THREE VERSI IIAA

| KPPN<br>GORONTALO | Dukungan manajemen yang efektif<br>2a-N Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN |         |         |    |         |       |       |                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----|---------|-------|-------|----------------------|
| T/R               | Q1                                                                                   | Q2      | Sm. I   | Q3 | s.d. Q3 | Q4    | Y-23  | Pol/ K P             |
| Target            | -                                                                                    | 4,66    | 4,66    | -  | 4,66    | 4,66  | 4,66  | Maximize/<br>Average |
| Realisasi         | -                                                                                    | 4,82    | 4,82    | -  | 4,82    |       |       |                      |
| Capaian           | -                                                                                    | 103,43% | 103,43% | -  | 103,43% | 0,00% | 0,00% |                      |

| Isu Utama dan Implikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tindakan yang telah dilaksanakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Isu Utama</b></p> <p>Tingkat kepuasan satker terhadap layanan KPPN tidak hanya ditentukan oleh kualitas layanan KPPN namun juga terkait berbagai aspek misalnya kehandalan sistem aplikasi dan kebijakan lain yang berada diluar wewenang KPPN, akibatnya tingkat kepuasan atas layanan KPPN juga dipengaruhi oleh kepuasan stakeholder atas kebijakan-kebijakan yang berada diluar kewenangan KPPN (misalnya kehandalan sistem SPAN, dll). Selain itu, segmen informasi layanan masih perlu ditingkatkan.</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan analisa atas hasil survey untuk memetakan kelemahan pelayanan dan menyusun rekomendasi untuk perbaikan pada masing-masing unit.</li> <li>2. Melakukan evaluasi terhadap hasil survei periode sebelumnya.</li> <li>3. Melaksanakan/melengkapai sarana dan informasi sebagai tindakan perbaikan atas hasil survei periode sebelumnya yang masih kurang.</li> <li>4. Melakukan tindakan perbaikan atas hasil survei periode sebelumnya yang masih kurang.</li> <li>5. Semaksimal mungkin membantu satker dalam menghadapi permasalahan aplikasi.</li> </ol> |
| <p><b>Implikasi</b></p> <p>Potensi tidak maksimalnya nilai Keterbukaan dan kemudahan akses informasi serta nilai sarana media publikasi rendah pada saat periode penilaian indeks kepuasan satuan kerja terhadap layanan KPPN</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Akar Masalah                                                                                                                                | Rekomendasi Rencana Aksi                                                                                                                                                                                            | Penanggung jawab                     | Periode             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| Seringkali terdapat gangguan pada sistem aplikasi yang digunakan oleh satker sehingga memengaruhi penilaian satker terhadap pelayanan KPPN. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan Sosialisasi inovasi-inovasi pelayanan yang diberikan KPPN</li> <li>2. Memanfaatkan media sosial</li> </ol> <p>KPPN untuk melakukan publikasi yang intensif.</p> | Para Kepala Seksi dan Subbagian Umum | Akhir Desember 2023 |

**LAPORAN CAPAIAN IKU KEMENKEU-THREE VERSI IIAA**

| KPPN<br>GORONTALO | Komunikasi, edukasi, dan standarisasi yang berkesinambungan                         |         |         |    |         |       |       |               |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----|---------|-------|-------|---------------|
|                   | 3a-N Persentase tingkat implementasi standarisasi kompetensi pejabat perbendaharaan |         |         |    |         |       |       |               |
| T/R               | Q1                                                                                  | Q2      | Sm. I   | Q3 | s.d. Q3 | Q4    | Y-23  | Pol/ K P      |
| Target            | -                                                                                   | 93%     | 93%     | -  | 93%     | 93%   | 93%   | Maximize/TLKV |
| Realisasi         | -                                                                                   | 98%     | 98%     | -  | 98%     |       |       |               |
| Capaian           | -                                                                                   | 105,38% | 105,38% | -  | 105,38% | 0,00% | 0,00% |               |

| Isu Utama dan Implikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tindakan yang telah dilaksanakan                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Isu Utama</b><br>Standardisasi kompetensi pejabat perbendaharaan yaitu pelaksanaan penilaian kompetensi bagi PPK dan PPSPM pada satker pengelola APBN sesuai dengan PMK Nomor 211/PMK.05/2019 tentang Tata Cara Penilaian Kompetensi Bagi Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.<br><br>Sertifikat bendahara banyak yang berakhir periode Maret 2023. | 1. Menyampaikan pengumuman setiap ada pembukaan pelatihan Pejabat perbendaharaan<br>2. Pendampingan satker dan melayani konsultasi satker |
| <b>Implikasi</b><br>Banyak pejabat perbendaharaan yang belum bisa memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                           |

| Akar Masalah                                                                                                                                             | Rekomendasi Rencana Aksi                                                                                         | Penanggung jawab | Periode             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| Pelatihan Bendahara, PPSPM, dan PPK jumlahnya masih sangat terbatas sehingga pejabat perbendaharaan di satker kesulitan untuk memenuhi syarat sertifikat | Proaktif memberikan informasi dan mendorong pejabat perbendaharaan untuk mendaftarkan refreshment atau pelatihan | Seksi MSKI       | Akhir Desember 2023 |

### LAPORAN CAPAIAN IKU KEMENKEU-THREE VERSI IIAA

| KPPN<br>GORONTALO | Komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang berkesinambungan<br>3b-N Tingkat efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan |         |         |    |         |       |       |                      |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----|---------|-------|-------|----------------------|
| T/R               | Q1                                                                                                                                    | Q2      | Sm. I   | Q3 | s.d. Q3 | Q4    | Y-23  | Pol/ K P             |
| Target            | -                                                                                                                                     | 89      | 89      | -  | 89      | 89    | 89    | Maximize/<br>Average |
| Realisasi         | -                                                                                                                                     | 95,59   | 95,59   | -  | 95,59   |       |       |                      |
| Capaian           | -                                                                                                                                     | 107,40% | 107,40% | -  | 107,40% | 0,00% | 0,00% |                      |

| Isu Utama dan Implikasi                                                                                                                                                                                                                                                      | Tindakan yang telah dilaksanakan                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Isu Utama</b><br>Efektivitas edukasi dan komunikasi diukur melalui pengisian kuesioner atau pelaksanaan pretest dan post test pada saat dilaksanakan kegiatan sosialisasi ataupun bimtek. Selain itu juga berkurangnya pertanyaan dan permasalahan yang diajukan ke KPPN. | 1. Mengadakan sosialisasi dan bimtek terutama apabila terdapat peraturan baru atau update aplikasi<br>2. Pendampingan apabila terdapat masalah |
| <b>Implikasi</b><br>Berpengaruh pada tingkat efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |

| Akar Masalah                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Rekomendasi Rencana Aksi                                                                                                                                                                                                      | Penanggung jawab | Periode             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| 1. Pelatihan di masa pandemic mayoritas menggunakan media online sehingga kesempatan berinteraksi agak berkurang dan menurun efektifitasnya.<br>2. Peserta sosialisasi, bimtek, atau pelatihan online biasanya dilakukan sambil melaksanakan tugas yang lain, sehingga mereka kurang focus pada materi yang disampaikan. | 1. Pelatihan/GKM kepada semua pegawai agar pengetahuan terupdate dan dapat membimbing satker apabila ada yang konsultasi.<br>2. Sosialisasi kepada satker atas peraturan terbaru.<br>3. Pendampingan satker yang ada masalah. | Seksi MSKI       | Akhir Desember 2023 |

### LAPORAN CAPAIAN IKU KEMENKEU-THREE VERSI IIAA

| KPPN<br>GORONTALO | Pengelolaan pengeluaran negara yang prudent, efektif dan efisien |         |         |         |         |       |       |                      |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|-------|-------|----------------------|
|                   | 4a-CP Persentase akurasi perencanaan kas                         |         |         |         |         |       |       |                      |
| T/R               | Q1                                                               | Q2      | Sm. I   | Q3      | s.d. Q3 | Q4    | Y-23  | Pol/ K P             |
| Target            | 80%                                                              | 80%     | 80%     | 80%     | 80%     | 80%   | 80%   | Maximize/<br>Average |
| Realisasi         | N/A                                                              | 97,65%  | 97,65%  | 95,92%  | 96,79%  |       |       |                      |
| Capaian           | N/A                                                              | 122,06% | 122,06% | 119,90% | 120,98% | 0,00% | 0,00% |                      |

| Isu Utama dan Implikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tindakan yang telah dilaksanakan                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Isu Utama</b></p> <p>Perencanaan Kas (Renkas) KPPN yang diperoleh dari RPD harian tingkat Satker serta pemutakhirannya yang disampaikan kepada kepala KPPN oleh KPA secara otomatis melalui aplikasi SAKTI menggunakan fitur Scheduled Payment Date.</p> <p>Perencanaan Kas KPPN dinyatakan akurat apabila deviasi tagihan atas RPD Harian satker berada dalam batas kewajaran sebagaimana ditentukan dalam target IKU. Yang menjadi isu utama adalah tools yang ada di KPPN pada aplikasi SAKTI kurang memadai untuk mencegah terjadinya deviasi RPD Harian. Tidak adanya implikasi bagi satker apabila terjadi deviasi RPD Harian juga turut menjadi penyebab adanya deviasi RPD.</p> <p>Pemberian dispensasi RPD, baik nilai maupun waktu, tetap diperhitungkan dalam formasi akurasi RPD Harian dengan menggunakan rasio pemberian dispensasi terhadap total RPD Harian pada suatu periode.</p> | <p>1.Sosialisasi langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran tahun 2023, salah satu materinya terkait perencanaan kas.</p> <p>3.Sosialisasi dan bimtek dengan menyisipkan materi terkait pentingnya Rencana Penarikan Dana melalui fitur Scheduled Payment Date.</p> |
| <p><b>Implikasi</b></p> <p>RPD dapat lebih akurat</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |



| Akar Masalah                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rekomendasi Rencana Aksi                                                                                                                                                                                                                     | Penanggung jawab                        | Periode             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| <p>1. Satker belum memahami adanya konsekuensi maksimal tanggal jatuh tempo yang tidak boleh dilampaui, apabila SPP yang sudah disetujui belum sampai dilakukan SPM ke KPPN.</p> <p>2. Adanya perbaikan SPM yang berulang juga menjadi penambah daftar list deviasi RPD Harian</p> | <p>1. Apabila telah tersedia tools yang memadai pada aplikasi SAKTI sebagai bentuk warning untuk mencegah terjadinya deviasi RPD Harian.</p> <p>2. Berkoordinasi dengan satker terkait apabila ada perlu pemberian dispensasi RPD Harian</p> | <p>Seksi PD, Seksi MSKI, Seksi Bank</p> | <p>Oktober 2023</p> |

### LAPORAN CAPAIAN IKU KEMENKEU-THREE VERSI IIAA

| KPPN<br>GORONTALO | Pengelolaan pengeluaran negara yang prudent, efektif dan efisien |         |         |         |         |       |       |                      |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|-------|-------|----------------------|
|                   | 4b-N Tingkat kualitas penyelesaian SP2D                          |         |         |         |         |       |       |                      |
| T/R               | Q1                                                               | Q2      | Sm. I   | Q3      | s.d. Q3 | Q4    | Y-23  | Pol/ K P             |
| Target            | 3                                                                | 3       | 3       | 3       | 3       | 3     | 3     | Maximize/<br>Average |
| Realisasi         | 5                                                                | 5       | 5       | 5       | 5       |       |       |                      |
| Capaian           | 120,00%                                                          | 166,67% | 166,67% | 166,67% | 166,67% | 0,00% | 0,00% |                      |

| Isu Utama dan Implikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tindakan yang telah dilaksanakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Isu Utama</b><br><p>Capaian IKU Tingkat kualitas penyelesaian SP2D yang sekarang mempertimbangkan 3 komponen (dulu 1), yaitu Penyelesaian SP2D secara tepat waktu, Efektivitas Penyaluran dana SP2D yang akurat, serta Efektivitas kecepatan penyelesaian retur SP2D. Terkait retur, ada beberapa satker yang menjadi langganan terkena retur tiap bulannya. Selain itu, walaupun capaian IKU telah melampaui target yang ditentukan, masih perlu dicermati ketika jumlah SPM yang disampaikan overload.</p> | <p>-Membangun komunikasi antar petugas terkait Pengumuman PPR di grup whatsapp kantor</p> <p>-Mengatur tahapan proses validasi SPM untuk memberikan waktu dalam proses penyelesaian SPM</p> <p>-Mempelajari alur penerimaan SPM melalui SAKTI BUN</p> <p>-Sudah ditemukan strategi untuk SP2D di bawah 1 jam dan 100% diproses</p> <p>-Menghitung jumlah SPM yang masuk dan menunggu di user validator agar tidak terselip</p> <p>-Melaporkan melalui HAI DJPb</p> |
| <b>Implikasi</b><br><p>1. Apabila SPM yang masuk dalam jumlah banyak, target IKU belum tentu akan tercapai</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Akar Masalah | Rekomendasi Rencana Aksi | Penanggung jawab | Periode |
|--------------|--------------------------|------------------|---------|
|--------------|--------------------------|------------------|---------|

-Penumpukan SPM di akhir tahun  
-Gangguan jaringan pada sistem  
-Adanya perubahan prosedur pengajuan SPM secara online selama masa pandemi  
-Perlunya koordinasi dan manajemen waktu dalam penyelesaian SPM  
Papperless bagus namun membuat kurangnya monitoring jumlah yang masuk antara user reviewer dengan validator

|                                                                                                                                                                                                                         |                       |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
| -Koordinasi internal Seksi PD dan Seksi Bank.<br>-Melaporkan ke Dit. SITP<br>-Melakukan evaluasi atas pelaksanaan proses penyelesaian SP2D 1 jam untuk per transaksi ke depan<br>- Mempelajari SAKTI BUN secara bersama | Seksi PD - Seksi Bank | Oktober 2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|

### LAPORAN CAPAIAN IKU KEMENKEU-THREE VERSI IIAA

| KPPN<br>GORONTALO | Pelaksanaan anggaran yang optimal                      |         |         |       |         |       |       |                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------|---------|---------|-------|---------|-------|-------|----------------------|
|                   | 5a-CP Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah |         |         |       |         |       |       |                      |
| T/R               | Q1                                                     | Q2      | Sm. I   | Q3    | s.d. Q3 | Q4    | Y-23  | Pol/ K P             |
| Target            | 90                                                     | 90      | 90      | 90    | 90      | 90    | 90    | Maximize/<br>Average |
| Realisasi         | 99,38                                                  | 99,40   | 99,39   |       |         |       |       |                      |
| Capaian           | 110,42%                                                | 110,44% | 110,43% | 0,00% | 0,00%   | 0,00% | 0,00% |                      |

| Isu Utama dan Implikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tindakan yang telah dilaksanakan                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Isu Utama</b><br>- Mulai TA 2023 Seluruh Transfer ke Daerah disalurkan melalui KPPN<br>- KPPN harus melakukan input potongan dan penundaan (perlu ketelitian)<br>- Adanya mekanisme BOK Pukermas yang sama dengan mekanisme BOSP (langsung ke rek.puskesmas)<br><br>belum ada capaian IKU/IKI per tanggal 4 Oktober 2023 karena masing menunggu ND dari pusat. | 1. Berkoordinasi dengan Dinas Terkait dan Dit PA dan DJPK<br>2. Berkoordinasi dengan pemda terkait penyaluran Dana Fisik<br>3. Pemahaman peraturan terkait mekanisme baru dana BOS |
| <b>Implikasi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                    |
| - Nilai Ketepatan waktu penyampaian dokumen persyaratan oleh pemda (Syarat) yang tidak maksimal<br>- Supplier baru, KPPN harus input manual<br>- No rek Supplier dari Aplikasi K/L berpotensi tidak aktif<br>- tidak dapat disalurkan DAK Fisik untuk kegiatan yang tidak didaftarkan pada OMSPAN                                                                 |                                                                                                                                                                                    |

| Akar Masalah | Rekomendasi Rencana Aksi | Penanggung jawab | Periode |
|--------------|--------------------------|------------------|---------|
|--------------|--------------------------|------------------|---------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Proses perbaikan data supplier dilakukan oleh kantor pusat kemendikbud dan kemenkes, sehingga saat ada retur harus menunggu terlebih dahulu</li> <li>- Saat ini tw.I, pemda sedang melakukan input kontrak-kontrak dan sisa DAK Fisik TAYL</li> <li>- Masih banyak pemda yang belum memahami juknis dan peraturan-peraturan yang ada, berpotensi kesalahan input di kedepan hari</li> </ul> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aktif berkoordinasi dengan Dit. PA, DJPK, dan Pemerintah Daerah</li> <li>2. Koordinasi dengan Pemda untuk penyaluran dokumen DF tepat waktu</li> <li>3. Mendorong pemda berkoordinasi dengan K/L.</li> <li>4. Memahami peraturan terkait TKD yang baru</li> </ol> | <p>Seksi Bank -<br/>Seksi Vera</p> | <p>Akhir<br/>Desember<br/>2023</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|

**LAPORAN CAPAIAN IKU KEMENKEU-THREE VERSI IIAA**

| KPPN<br>GORONTALO | Pelaksanaan anggaran yang optimal         |         |         |         |         |       |       |                      |
|-------------------|-------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|-------|-------|----------------------|
|                   | 5b-N Indeks kualitas implementasi Digipay |         |         |         |         |       |       |                      |
| T/R               | Q1                                        | Q2      | Sm. I   | Q3      | s.d. Q3 | Q4    | Y-23  | Pol/ K P             |
| Target            | 3,1                                       | 3,1     | 3,1     | 3,1     | 3,1     | 3,1   | 3,1   | Maximize/<br>Average |
| Realisasi         | 4                                         | 4       | 4       | 4       | 4       |       |       |                      |
| Capaian           | 120,00%                                   | 129,03% | 129,03% | 129,03% | 129,03% | 0,00% | 0,00% |                      |

| Isu Utama dan Implikasi                                                                                                                                                                                                                                                          | Tindakan yang telah dilaksanakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Isu Utama</b><br>1. Belum terbangun budaya cashless dalam setiap transaksi keuangan di lingkup KL/Satker.<br>2. Kurangnya komitmen para pemimpin untuk menyukseskan sistem pengadaan belanja melalui marketplace/e-commerce sekalipun telah membuat Nota Kesepakatan bersama. | 1. Melaksanakan sosialisasi, workshop, pendampingan untuk para satker dan vendor potensial baik secara formal maupun non formal, offline maupun online, serta dilakukan secara periodik;<br>2. Memperkenalkan produk-produk baru yang bergabung pada digipay melalui group media sosial yang telah dibentuk, guna menumbuhkan semangat satker dalam bertransaksi;<br>3. Melibatkan pihak perbankan untuk terlibat aktif dalam setiap kegiatan. |
| <b>Implikasi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Akar Masalah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rekomendasi Rencana Aksi                                                                                                                                                    | Penanggung jawab | Periode             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| 1. Memulai transaksi awal pada digipay membutuhkan usaha maksimal yang harus terkoordinasi antar pengguna, pihak vendor, produk yang ditawarkan, dan proses negosiasi, serta kesediaan pihak perbankan untuk mendampingi dalam memulai transaksi CMS. Ketika salah satu tidak terkoordinasi atau slow respon maka proses awal transaksi akan selalu menemui kegagalan.<br>2. Satker masih harus dipaksa untuk melakukan transaksi pada digipay, karena belum terdapat sanksi | 1. On the Spot kepada vendor potensial untuk bergabung dengan digipay (perlu dukungan dana).<br>2. Terus melakukan pendampingan satker yang akan memulai transaksi Digipay. | Seksi MSKI       | Akhir Desember 2023 |

**LAPORAN CAPAIAN IKU KEMENKEU-THREE VERSI IIAA**

| KPPN<br>GORONTALO | Pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan dan akuntabel |         |         |         |         |       |       |                      |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|-------|-------|----------------------|
|                   | 6a-CP Indeks kualitas pelaksanaan rekonsiliasi tingkat UAKPA     |         |         |         |         |       |       |                      |
| T/R               | Q1                                                               | Q2      | Sm. I   | Q3      | s.d. Q3 | Q4    | Y-23  | Pol/ K P             |
| Target            | 3,25                                                             | 3,25    | 3,25    | 3,25    | 3,25    | 3,25  | 3,25  | Maximize/<br>Average |
| Realisasi         | 4                                                                | 4       | 4       | 4       | 4       |       |       |                      |
| Capaian           | 120,00%                                                          | 123,08% | 123,08% | 123,08% | 123,08% | 0,00% | 0,00% |                      |

| Isu Utama dan Implikasi                                                                                      | Tindakan yang telah dilaksanakan                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Isu Utama</b><br>Masih terdapat satker yang kurang paham/tidak tahu jadwal periode open dan closed period | 1. Penerbitan sanksi bagi satuan kerja yang terlambat<br>2. Mengingatkan kepada satker melalui surat, telepon, dan telegram mengenai batas waktu / open period bulan berkenaan |
| <b>Implikasi</b>                                                                                             |                                                                                                                                                                                |
| Keterlambatan akan berpengaruh pada capaian IKU                                                              |                                                                                                                                                                                |

| Akar Masalah                                                                                                                                                                 | Rekomendasi Rencana Aksi                                                                                                                             | Penanggung jawab | Periode             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| 1. Operator satker bersifat pasif sehingga mengakibatkan lebih sering menunggu untuk diingatkan<br>2. Kurang koordinasi antara operator sehingga masih saling menunggu data. | 1. Memberikan pemahaman dan melakukan monitoring dan evaluasi kepada satker<br>2. Memberikan pemahaman kepada satker pentingnya koordinasi internal. | Seksi Vera       | Akhir Desember 2023 |

**LAPORAN CAPAIAN IKU KEMENKEU-THREE VERSI IIAA**

| KPPN<br>GORONTALO | Pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan dan akuntabel<br>6b-N Indeks kualitas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara K/L |         |         |         |         |       |       |                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|-------|-------|-----------------|
| T/R               | Q1                                                                                                                                | Q2      | Sm. I   | Q3      | s.d. Q3 | Q4    | Y-23  | Pol/ K P        |
| Target            | 3                                                                                                                                 | 3       | 3       | 3       | 3       | 3     | 3     | aximize/Average |
| Realisasi         | 4                                                                                                                                 | 4       | 4       | 4       | 4,00    |       |       |                 |
| Capaian           | 120,00%                                                                                                                           | 133,33% | 133,33% | 133,33% | 133,33% | 0,00% | 0,00% |                 |

| Isu Utama dan Implikasi                                                                                       | Tindakan yang telah dilaksanakan                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Isu Utama</b><br>Kurangnya pemahaman petugas satker dalam mengerjakan LPJ sehingga masih banyak kesalahan. | - Penerbitan sanksi bagi satuan kerja yang terlambat menyampaikan LPJ ke KPPN<br>- Berkoordinasi dengan satker melalui telepon, WA, dan/atau telegram mengenai penegasan kewajiban satker dalam penyampaian LPJ Bendahara |
| <b>Implikasi</b><br>Penumpukan LPJ terjadi di hari-hari terakhir                                              |                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                           |

| Akar Masalah                                                                                                         | Rekomendasi Rencana Aksi                                                                                 | Penanggung jawab | Periode             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| 1. Adanya pergantian bendahara satker.<br>2. Kualitas SDM satker/operator pelaporan LPJ bendahara yang belum merata. | - Mendorong penunjukan bendahara yang bersertifikasi<br>- Mendorong Bimtek/ Pelatihan melalui e-learning | Seksi Vera       | Akhir Desember 2023 |



**LAPORAN CAPAIAN IKU KEMENKEU-THREE VERSI IIAA**

| KPPN<br>GORONTALO | Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif<br>7a-CP Tingkat implementasi penajaman tugas Treasury dan Financial Advisory |         |         |         |         |       |       |                      |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|-------|-------|----------------------|
| T/R               | Q1                                                                                                                                                             | Q2      | Sm. I   | Q3      | s.d. Q3 | Q4    | Y-23  | Pol/ K P             |
| Target            | 80%                                                                                                                                                            | 80%     | 80%     | 80%     | 80%     | 80%   | 80%   | Maximize/<br>Average |
| Realisasi         | 98,86%                                                                                                                                                         | 100%    | 99,43%  | 100%    | 99,62%  |       |       |                      |
| Capaian           | 123,58%                                                                                                                                                        | 125,00% | 124,29% | 125,00% | 124,53% | 0,00% | 0,00% |                      |

| Isu Utama dan Implikasi                                                                                                                                                                                                                                                   | Tindakan yang telah dilaksanakan                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Isu Utama</b><br>1. Penjelasan manual IKI serta format pelaporan terkait Tingkat implementasi penajaman tugas Treasury dan Financial Advisory baru disampaikan pada akhir triwulan I<br>2. Tidak adanya penjelasan khusus mengenai format pelaporan pada tiap komponen | 1. Melaksanakan seluruh rangkaian standardisasi kegiatan manajemen KPPN<br>2. Melengkapi dokumentasi terkait kegiatan yang telah dilaksanakan |
| <b>Implikasi</b><br>Adanya kemungkinan ketidaktercapaiannya IKI Tingkat implementasi penajaman tugas Treasury dan Financial Advisory                                                                                                                                      |                                                                                                                                               |

| Akar Masalah                                                                                                                       | Rekomendasi Rencana Aksi                                                                                                 | Penanggung jawab                     | Periode             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| Diperlukan extra effort dalam penyusunan Laporan Implementasi Penajaman Tugas Treasury, Regional Economist, dan Financial Advisory | Melakukan koordinasi antar seksi terkait pemenuhan kegiatan implementasi penajaman tugas treasury dan financial advisory | Para Kepala Seksi dan Subbagian Umum | Akhir Desember 2023 |

### LAPORAN CAPAIAN IKU KEMENKEU-THREE VERSI IIAA

| KPPN<br>GORONTALO | Organisasi dan SDM yang unggul dan adaptif<br>8a-N Tingkat kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization |    |       |    |         |       |       |               |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----|---------|-------|-------|---------------|
| T/R               | Q1                                                                                                                             | Q2 | Sm. I | Q3 | s.d. Q3 | Q4    | Y-23  | Pol/ K P      |
| Target            | -                                                                                                                              | -  | -     | -  | -       | 85    | 85    | Maximize/TLKV |
| Realisasi         | -                                                                                                                              | -  | -     | -  | -       |       |       |               |
| Capaian           | -                                                                                                                              | -  | -     | -  | -       | 0,00% | 0,00% |               |

| Isu Utama dan Implikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tindakan yang telah dilaksanakan                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Isu Utama</b><br>Dalam rangka mendorong komitmen pimpinan dan seluruh pegawai terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja di KPPN Gorontalo dilakukan langkah-langkah peningkatan kualitas kinerja. Sebagai bentuk apresiasi terhadap upaya-upaya peningkatan kualitas kinerja di lingkungan ditjen perbendaharaan, kantor pusat ditjen perbendaharaan melakukan penilaian terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja di unit-unit masing-masing. | Telah dilaksanakan kegiatan dan dipenuhi dokumen sesuai matriks SFO pada triwulan I |
| <b>Implikasi</b><br>Berpengaruh pada nilai IKI Tingkat kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization TA 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |

| Akar Masalah                                                                                                             | Rekomendasi Rencana Aksi                                                                                           | Penanggung jawab | Periode       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| Masih ada beberapa pegawai yang kurang peduli terhadap peningkatan kualitas pengelolaan kinerja organisasi dan individu. | - Merutinkan pelaksanaan dialog kinerja organisasi.<br>- Mempedomani matriks dalam peningkatan pengelolaan kinerja | Subbagian Umum   | Desember 2023 |

**LAPORAN CAPAIAN IKU KEMENKEU-THREE VERSI IIAA**

| KPPN<br>GORONTALO | Organisasi dan SDM yang unggul dan adaptif<br>8b-N Tingkat implementasi learning organization |         |         |         |         |       |       |               |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|-------|-------|---------------|
| T/R               | Q1                                                                                            | Q2      | Sm. I   | Q3      | s.d. Q3 | Q4    | Y-23  | Pol/ K P      |
| Target            | 10                                                                                            | 40      | 40      | 60      | 60      | 85    | 85    | Maximize/TLKV |
| Realisasi         | 40,84                                                                                         | 63,63   | 63,63   | 95,75   | 95,75   |       |       |               |
| Capaian           | 408,40%                                                                                       | 159,08% | 159,08% | 159,58% | 159,58% | 0,00% | 0,00% |               |

| Isu Utama dan Implikasi                                                                                     | Tindakan yang telah dilaksanakan                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Isu Utama</b><br>Pemenuhan dokumen untuk tiap-tiap subkomponen yang harus terus dilakukan secara berkala | 1. Telah dilaksanakan kegiatan sesuai dengan sub-komponen implementasi LO<br>2. Telah dipenuhi dokumen terkait implementasi LO |
| <b>Implikasi</b><br>Nilai capaian IKI Tingkat Implementasi LO dapat terpenuhi untuk triwulan III            |                                                                                                                                |
|                                                                                                             |                                                                                                                                |

| Akar Masalah | Rekomendasi Rencana Aksi | Penanggung jawab | Periode |
|--------------|--------------------------|------------------|---------|
|--------------|--------------------------|------------------|---------|

|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| Pada komponen 1, masih ada dokumen AI yang belum diupload untuk triwulan IV | 1. Memenuhi kegiatan dan dokumen sesuai dengan output yang diminta pada panduan implementasi LO sesuai dengan penjelasan<br>2. Memberikan reminder kepada para peserta pelatihan untuk mengisi EPASPEM serta melakukan upload sertifikat pelatihan | Subbagian Umum | Akhir Desember 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|

**LAPORAN CAPAIAN IKU KEMENKEU-THREE VERSI IIAA**

| KPPN<br>GORONTALO | Organisasi dan SDM yang unggul dan adaptif<br>8c-N Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal |    |       |    |         |       |       |               |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----|---------|-------|-------|---------------|
| T/R               | Q1                                                                                                           | Q2 | Sm. I | Q3 | s.d. Q3 | Q4    | Y-23  | Pol/ K P      |
| Target            | -                                                                                                            | -  | -     | -  | -       | 86    | 86    | Maximize/TLKV |
| Realisasi         | -                                                                                                            | -  | -     | -  | -       |       |       |               |
| Capaian           | -                                                                                                            | -  | -     | -  | -       | 0,00% | 0,00% |               |

| Isu Utama dan Implikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tindakan yang telah dilaksanakan                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Isu Utama</b><br>Pelaporan/evaluasi atas pelaksanaan pemantauan pengendalian intern bersifat dinamis sehingga penyesuaian-penyesuaian terkait dengan format, mekanisme dan periode harus segera dilakukan secara konsisten karena akan berdampak pada hasil penilaian evaluasi.<br>Penilaian hasil evaluasi penerapan PPI dilakukan oleh kanwil DJPb. | Menyusun laporan PPI dengan format baru sesuai KMK Nomor 940 Tahun 2017 tentang Kerangka Kerja Kerangka Kerja Pemantauan Pengendalian Internal dan Pedoman Pemantauan Pengendalian Internal Di Lingkungan Kementerian Keuangan |
| <b>Implikasi</b><br>Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal yang kurang maksimal                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                |

| Akar Masalah                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rekomendasi Rencana Aksi    | Penanggung jawab | Periode       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|
| Penyusunan laporan PPI dengan format sesuai KMK Nomor 940 Tahun 2017 tentang Kerangka Kerja Kerangka Kerja Pemantauan Pengendalian Internal dan Pedoman Pemantauan Pengendalian Internal Di Lingkungan Kementerian Keuangan baru sehingga laporan yang disusun belum dapat dipastikan ketepatan penyusunannya. | Membuat kalender laporan KI | Seksi MSKI       | Desember 2023 |

**LAPORAN CAPAIAN IKU KEMENKEU-THREE VERSI IIAA**

| KPPN<br>GORONTALO | Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang andal   |         |         |         |         |        |        |               |
|-------------------|-----------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|---------------|
|                   | 9a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN |         |         |         |         |        |        |               |
| T/R               | Q1                                                  | Q2      | Sm. I   | Q3      | s.d. Q3 | Q4     | Y-23   | Pol/ K P      |
| Target            | 95,50%                                              | 95,50%  | 95,50%  | 95,50%  | 95,50%  | 95,50% | 95,50% | Maximize/TLKV |
| Realisasi         | 100%                                                | 99,20%  | 99,20%  | 99,98%  | 99,98%  |        |        |               |
| Capaian           | 104,71%                                             | 103,87% | 103,87% | 104,69% | 104,69% | 0,00%  | 0,00%  |               |

| Isu Utama dan Implikasi                                                                                                 | Tindakan yang telah dilaksanakan                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Isu Utama</b><br>Mempertahankan nilai capaian IKI Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran KPPN periode triwulan III | 1. Telah melakukan input data capaian output sebelum batas waktu<br>2. Menjaga persentase realisasi pelaksanaan anggaran<br>3. Menjaga nilai deviasi agar tidak melebihi 5% |
| <b>Implikasi</b>                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |
| Nilai IKPA masih terus mengalami perubahan sampai dengan periode pengisian dan pelaporan capaian output berakhir        |                                                                                                                                                                             |

| Akar Masalah                                                                                                              | Rekomendasi Rencana Aksi                        | Penanggung jawab | Periode       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|---------------|
| Komponen Indikator pengelolaan UP tidak 100% karena pengajuan GU KKP melebihi yang telah ditargetkan pada bulan September | Melaksanakan belanja sesuai dengan hal III DIPA | Subbagian Umum   | Desember 2023 |

**LAPORAN CAPAIAN IKU KEMENKEU-THREE VERSI IIAA**

| KPPN<br>GORONTALO | Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang andal<br>9b-N Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB |    |       |    |         |       |       |               |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----|---------|-------|-------|---------------|
| T/R               | Q1                                                                                                  | Q2 | Sm. I | Q3 | s.d. Q3 | Q4    | Y-23  | Pol/ K P      |
| Target            | -                                                                                                   | -  | -     | -  | -       | 84    | 84    | Maximize/TLKV |
| Realisasi         | -                                                                                                   | -  | -     | -  | -       |       |       |               |
| Capaian           | -                                                                                                   | -  | -     | -  | -       | 0,00% | 0,00% |               |

| Isu Utama dan Implikasi                                                                                                                                                       | Tindakan yang telah dilaksanakan                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Isu Utama</b><br>- Adanya kesalahan pencatatan perolehan KDP<br>- masih ada persediaan yang belum didetailkan pada aplikasi SAKTI                                          | - Telah diselesaikan to do list pada monsakti secara berkala periode sampai dengan maret 2023<br>- Rekonsiliasi Internal UAKPA-PB<br>- Telah dilakukan Jurnal reklas KDP ke Aset tetap |
| <b>Implikasi</b>                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                        |
| - Nilai pada variable keakuratan Laporan BMN tidak maksimal<br>- Muncul daftar to-do-list pada aplikasi SAKTI dan MONSAKTI yang berpengaruh pada nilai partisipasi LK UAKPA/B |                                                                                                                                                                                        |

| Akar Masalah                                                                                                                                                      | Rekomendasi Rencana Aksi                             | Penanggung jawab | Periode       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| 1. Aset dan persediaan belum bisa didetailkan jika modul GLP pada bulan sebelumnya belum ditutup<br>2. Penutupan pada modul GLP menunggu arahan dari kantor pusat | membersihkan to-do-list pada MONSAKTI secara berkala | Subbagian Umum   | Desember 2023 |

**LAPORAN CAPAIAN IKU KEMENKEU-THREE VERSI IIAA**

| KPPN<br>GORONTALO | Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang andal      |    |       |    |         |       |       |               |
|-------------------|--------------------------------------------------------|----|-------|----|---------|-------|-------|---------------|
|                   | 9c-N Persentase kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan |    |       |    |         |       |       |               |
| T/R               | Q1                                                     | Q2 | Sm. I | Q3 | s.d. Q3 | Q4    | Y-23  | Pol/ K P      |
| Target            | -                                                      | -  | -     | -  | -       | 100%  | 100%  | Maximize/TLKV |
| Realisasi         | -                                                      | -  | -     | -  | -       |       |       |               |
| Capaian           | -                                                      | -  | -     | -  | -       | 0,00% | 0,00% |               |

| Isu Utama dan Implikasi                                                                                                                                                                                                   | Tindakan yang telah dilaksanakan                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Isu Utama</b><br>Pengelolaan sarana dan prasarana meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap barang bergerak dan tidak bergerak. Strategi pengelolaan BMN secara optimal berpedoman pada SE-32/PB/2016. | - Telah melakukan pengadaan kursi dan pelaksanaan sebagian pagu belanja modal |
| <b>Implikasi</b>                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |
| Nilai Persentase kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan mencapai target                                                                                                                                                   |                                                                               |

| Akar Masalah                                      | Rekomendasi Rencana Aksi                                                             | Penanggung jawab | Periode               |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| Kekurangan jumlah komposisi SDM di Subbagian Umum | - penghapusan BMN<br>- Renovasi Middle Office<br>- Penghapusan Arsip<br>- Sensus BMN | Subbagian Umum   | s.d. 31 Desember 2023 |



## Summary Kinerja dan Risiko KPPN Gorontalo



KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA



Kemenkeu-Three KPPN Gorontalo tahun 2023, memiliki **9 Sasaran Strategis (SS)** dan **18 Indikator Kinerja Utama (IKU)** dengan rincian:

- 6 (enam) IKU *Cascading Peta* (diturunkan dari *Kemenkeu-Wide*, *Kemenkeu-One*, dan *Kemenkeu-Two*).
- 12 (dua belas) IKU *Non Cascading*



- Pada **triwulan III** terdapat **10 (sepuluh) IKU** dengan *trajectory* target pada triwulan III dan *seluruhnya* mencapai target.
- Sampai dengan triwulan III, terdapat **10 (sepuluh) IKU** yang telah memiliki *capaian* dan *seluruhnya melampaui target*, sehingga NKO s.d. triwulan III sebesar 110,23.



Terdapat **3 (tiga) IKU Kemenkeu-Wide-One** yang akan menjadi **tanggung jawab KPPN Gorontalo**, yaitu:

- Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L
- Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran KPPN
- Nilai Kinerja Penyaluran Dana Transfer ke Daerah



Pada tahun 2023, terdapat **30 (tiga puluh) risk events** yang telah ditetapkan pada Piagam Risiko UPR KPPN Gorontalo tahun 2023, dengan rincian **8 Risiko perlu dimitigasi** dan **22 Risiko tidak perlu dimitigasi**.

Sampai dengan triwulan III 2023, sudah tidak terdapat risiko pada level tinggi.

### NKO

**110,23**

|                         |       |  |
|-------------------------|-------|--|
| Stakeholder (30%)       | 31,84 |  |
| Customer (20%)          | 20,69 |  |
| Internal Process (25%)  | 28,85 |  |
| Learning & Growth (25%) | 28,73 |  |

\*) NKO menggunakan data capaian cut-off per 04 Oktober 2023

### Tren Nilai Kinerja Organisasi



NKO Tahun 2023 mencapai **110,23**. Lebih tinggi dibandingkan NKO tahun 2022 sebesar 107,75.



## LAPORAN PELAKSANAAN INISIATIF STRATEGIS

### VERSI IIAA

|            |                                                                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------|
| SS/IKU     | Indeks Kualitas Implementasi <i>Digipay</i>                     |
| IS         | Pemenuhan Indikator Tingkat Implementasi <i>Digipay</i>         |
| Periode IS | s.d. 31 Desember 2023                                           |
| Output     | Peningkatan jumlah satker, vendor, dan transaksi <i>digipay</i> |

| Progres s.d. Triwulan I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | On-Track |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|
| <p><b>Penjelasan</b><br/>Penandatanganan MoU dengan Satker mitra kerja/perbankan s.d. 30 September 2023 telah dilaksanakan sebanyak 21 kali</p> <p><b>Kendala/Akar Masalah</b><br/>Komunikasi intensif antara Kepala KPPN dan KPA satker menjadi penentu utama</p> <p><b>Output</b><br/>Peningkatan jumlah satker, vendor, dan transaksi <i>digipay</i></p> |          |  |

| Anggaran |           |
|----------|-----------|
| Pagu     | Realisasi |
| -        | -         |

| Rencana Aksi                                            | Penanggung-jawab                       | Periode                     |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| Penandatanganan MoU dengan Satker mitra kerja/perbankan | Kepala Kantor,<br>Kepala Seksi<br>MSKI | s.d. 31<br>Desember<br>2023 |

\*) Status penyelesaian IS:

- Selesai, jika pada saat periode pelaporan, IS atau langkah pelaksanaan IS dimaksud telah diselesaikan;
- On-Track, jika pada saat periode pelaporan, IS atau langkah pelaksanaan IS belum jatuh tempo;
- Off-Track, jika pada saat periode pelaporan, IS atau langkah pelaksanaan IS masih dalam proses pelaksanaan tapi telah jatuh tempo.

\*\*) Warna status

- Selesai : Hijau
- On-Track: Kuning
- Off-Track: Merah



## LAPORAN PELAKSANAAN INISIATIF STRATEGIS

### VERSI IIAA

|            |                                                                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SS/IKU     | Tingkat Implementasi Penajaman Tugas <i>Treasury</i> dan <i>Financial Advisory</i>                     |
| IS         | Pemenuhan Indikator Tingkat Implementasi Penajaman Tugas <i>Treasury</i> dan <i>Financial Advisory</i> |
| Periode IS | s.d. 31 Desember 2023                                                                                  |
| Output     | Peningkatan kompetensi SDM penunjang fungsi <i>Treasury</i> dan <i>Financial Advisory</i>              |

| Progres s.d. Triwulan I                                                                                                                                                                                                                                                       | On-Track |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|
| <b>Penjelasan</b><br><i>Forum Group Discussion</i> (FGD) dengan instansi pembina s.d. 30 September 2023 telah dilaksanakan sebanyak 2 kali<br><i>Forum Group Discussion</i> (FGD) dengan instansi pemerintah daerah s.d. 30 September 2023 telah dilaksanakan sebanyak 2 kali |          |  |
| <b>Kendala/Akar Masalah</b><br>Diperlukan <i>extra effort</i> dalam melakukan koordinasi antar seksi terkait pemenuhan kegiatan implementasi penajaman tugas <i>treasury</i> dan <i>financial advisory</i>                                                                    |          |  |
| <b>Output</b><br>Peningkatan kompetensi SDM penunjang fungsi <i>Treasury</i> dan <i>Financial Advisory</i>                                                                                                                                                                    |          |  |

| Anggaran |           |
|----------|-----------|
| Pagu     | Realisasi |
| -        | -         |

| Rencana Aksi                                                | Penanggung-jawab                                                                   | Periode               |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| FGD dengan instansi pembina<br>FGD dengan pemerintah daerah | Kepala Kantor,<br>Kepala Subbagian Umum, <i>Head of Financial Advisor Division</i> | s.d. 31 Desember 2023 |

\*) Status penyelesaian IS:

- Selesai, jika pada saat periode pelaporan, IS atau langkah pelaksanaan IS dimaksud telah diselesaikan;
- On-Track, jika pada saat periode pelaporan, IS atau langkah pelaksanaan IS belum jatuh tempo;
- Off-Track, jika pada saat periode pelaporan, IS atau langkah pelaksanaan IS masih dalam proses pelaksanaan tapi telah jatuh tempo.

\*\*) Warna status

- Selesai : Hijau
- On-Track: Kuning
- Off-Track: Merah

### LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

NAMA UNIT : KPPN Gorontalo  
 PERIODE PELAPORAN : s.d. Triwulan IV Tahun 2023

| No. | IKU/IKI                                                                             | Q1     |           | Q2     |           | Sm.1   |           | Q3     |           | s.d.Q3 |           | Q4     |           | Y      |           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
|     |                                                                                     | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi |
| 1.  | 1a-CP Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L                                        | 90     | 95,68     | 90     | 94,75     | 90     | 94,75     | 90     | 95,87     | 90     | 95,87     | 90     | 95        | 90     | 95        |
| 2.  | 1b-N Indeks kualitas LK Kuasa BUN KPPN                                              | -      | -         | -      | -         | -      | -         | -      | -         | -      | -         | 3      | 4         | 3      | 4         |
| 3.  | 2a-N Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN                                   | -      | -         | 4,66   | 4,82      | 4,66   | 4,82      | -      | -         | 4,66   | 4,82      | 4,66   | 4,85      | 4,66   | 4,84      |
| 4.  | 3a-N Persentase tingkat implementasi standarisasi kompetensi pejabat perbendaharaan | -      | -         | 93%    | 98%       | 93%    | 98%       | -      | -         | 93%    | 98%       | 93%    | 95%       | 93%    | 95%       |
| 5.  | 3b-N Tingkat efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan               | -      | -         | 89     | 95,59     | 89     | 95,59     | -      | -         | 89     | 95,59     | 89     | 97,5      | 89     | 96,55     |
| 6.  | 4a-CP Persentase akurasi perencanaan kas                                            | 80%    | N/A       | 80%    | 97,65%    | 80%    | 97,65%    | 80%    | 95,92%    | 80%    | 96,79%    | 80%    | 98,32%    | 80%    | 97,97%    |
| 7.  | 4b-N Tingkat kualitas penyelesaian SP2D                                             | 3      | 5         | 3      | 5         | 3      | 5         | 3      | 5         | 3      | 5         | 3      | 5         | 3      | 5         |
| 8.  | 5a-CP Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah                              | 90     | 99,38     | 90     | 99,40     | 90     | 99,39     | 90     | 99,74     | 90     | 99,51     | 90     | 99,51     | 90     | 99,51     |
| 9.  | 5b-N Indeks kualitas implementasi Digipay                                           | 3,1    | 4         | 3,1    | 4         | 3,1    | 4         | 3,1    | 4         | 3,1    | 4         | 3,1    | 4         | 3,1    | 4         |
| 10. | 6a-CP Indeks kualitas pelaksanaan rekonsiliasi tingkat UAKPA                        | 3,25   | 4         | 3,25   | 4         | 3,25   | 4         | 3,25   | 4         | 3,25   | 4         | 3,25   | 4         | 3,25   | 4         |
| 11. | 6b-N Indeks kualitas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara K/L                       | 3      | 4         | 3      | 4         | 3      | 4         | 3      | 4         | 3      | 4         | 3      | 4         | 3      | 4         |
| 12. | 7a-CP Tingkat implementasi penajaman tugas Treasury dan Financial Advisory          | 80%    | 98,86%    | 80%    | 100%      | 80%    | 99,43%    | 80%    | 100%      | 80%    | 99,62%    | 80%    | 100%      | 80%    | 99,62%    |
| 13. | 8a-N Tingkat kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization    | -      | -         | -      | -         | -      | -         | -      | -         | -      | -         | 85     | *<br>—    | 85     | *<br>—    |
| 14. | 8b-N Tingkat implementasi Learning Organization                                     | 10     | 40,84     | 40     | 63,63     | 40     | 63,63     | 60     | 95,75     | 60     | 95,75     | 85     | 100       | 85     | 100       |

|     |                                                                |       |      |       |        |       |       |       |        |       |        |       |        |       |        |
|-----|----------------------------------------------------------------|-------|------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| 15. | 8c-N Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal | -     | -    | -     | -      | -     | -     | -     | -      | -     | -      | 86    | 91,28  | 86    | 91,28  |
| 16. | 9a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN            | 95,5% | 100% | 95,5% | 99,20% | 95,5% | 99,6% | 95,5% | 99,98% | 95,5% | 99,98% | 95,5% | 99,98% | 95,5% | 99,98% |
| 17. | 9b-N Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB                 | -     | -    | -     | -      | -     | -     | -     | -      | -     | -      | 84    | 96     | 84    | 96     |
| 18. | 9c-N Persentase kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan         | -     | -    | -     | -      | -     | -     | -     | -      | -     | -      | 100%  | *<br>_ | 100%  | *<br>_ |

Keterangan: \* \_ belum ada capaian IKU/IKI per tanggal 4 Januari 2024 karena masing menunggu ND dari pusat.

Gorontalo, 4 Januari 2024  
Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik

Arief Rokhman  
197112181992011001



# RAW DATA IKU KEMENKEU-THREE KPPN

## KPPN Gorontalo

| No.         | Kode IKU | Uraian IKU                                                                      | Data yang diperlukan                                                                                                                                        | Data                                                        |         | Keterangan                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.          | 1a-CP    | Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L                                          | Hasil penilaian IKPA tingkat Nasional sebagai BUN pada Aplikasi OMSPAN                                                                                      | 95                                                          |         | IKPA =Σ [ 10% (REV) + 10% (HAL3) + 20% (REAL) + 10% (KTR) + 10% (TAG) + 10% (PUP) + 5% (DSPM) + 25% (CO)] x 100                                                                                                                          |
| 2.          | 1b-N     | Indeks kualitas LK Kuasa BUN KPPN                                               | Monitoring monsakti dan Surat Keputusan Hasil Penilaian LK Kuasa BUN tingkat KPPN                                                                           | 4                                                           |         | Capaian IKU = INDEKS ( a + b ) / 2<br>a. Persentase jumlah satker yang tidak terdapat selisih TKTm Aset dan Persediaan pada periode pelaporan semesteran<br>b. Hasil penilaian kualitas LKBUN KPPN yang dilakukan oleh Kanwil DJPb       |
| 3.          | 2a-N     | Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN                                    | Indeks Hasil Survei Kepuasan Satker                                                                                                                         | 4,85                                                        |         | Kategori kualitas nilai LK Kuasa BUN tingkat KPPN adalah sebagai berikut :<br>5 = Sangat Puas<br>4 = Puas<br>3 = Cukup Puas<br>2 = Kurang Puas<br>1 = Tidak Puas                                                                         |
| 4.          | 3a-N     | Persentase tingkat implementasi standardisasi kompetensi pejabat perbendaharaan | Laporan Monitoring pada Aplikasi SIMASPATEN                                                                                                                 | 95%                                                         |         | (persentase akselerasi verifikasi usulan x bobot) + (persentase akselerasi refreshment x bobot ) + (persentase pemenuhan BNT x bobot)                                                                                                    |
| 5.          | 3b-N     | Tingkat efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan                | Hasil Post Test dan hasil perhitungan kuesioner sosialisasi                                                                                                 | 97,5                                                        |         | Rata-rata Indeks Tingkat Efektifitas Edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan<br>0 < x ≤ 20 = tidak efektif<br>20 < x ≤ 40 = kurang efektif<br>40 < x ≤ 60 = cukup efektif<br>60 < x ≤ 80 = efektif<br>80 < x ≤ 100 = sangat efektif |
| 6.          | 4a-CP    | Persentase akurasi perencanaan kas                                              | Laporan Terkait Hasil Perhitungan Deviasi RPD dari Aplikasi MONSAKTI                                                                                        | 97,86%                                                      |         | (((100% - ((Rata - Rata Deviasi Unit RPD harian KPPN per periode*0,3) + ((Rata - Rata Deviasi Nilai RPD harian KPPN per periode*0,7)))) - (Rasio Dispensasi RPD harian KPPN per periode*0,01))                                           |
| 7.          | 4b-N     | Tingkat kualitas penyelesaian SP2D                                              | Data penerbitan SP2D pada aplikasi OM SPAN                                                                                                                  | Σ SP2D sesuai kriteria                                      | 18,909  | (Capaian Komponen A + Capaian Komponen B + Capaian Komponen C)/3                                                                                                                                                                         |
|             |          |                                                                                 |                                                                                                                                                             | Σ SP2D yang seharusnya sesuai kriteria                      | 18,909  |                                                                                                                                                                                                                                          |
|             |          |                                                                                 |                                                                                                                                                             | Capaian A                                                   | 5       |                                                                                                                                                                                                                                          |
|             |          |                                                                                 |                                                                                                                                                             | Σ Penerima pada SP2D yg terbit – Σ Penerima yang diretur BO | 136,831 |                                                                                                                                                                                                                                          |
|             |          |                                                                                 |                                                                                                                                                             | Σ Penerima pada SP2D                                        | 136,831 |                                                                                                                                                                                                                                          |
|             |          |                                                                                 |                                                                                                                                                             | Capaian B                                                   | 5       |                                                                                                                                                                                                                                          |
|             |          |                                                                                 |                                                                                                                                                             | Σ SP2D Pengganti kategori indeks 5                          | 29      |                                                                                                                                                                                                                                          |
|             |          |                                                                                 |                                                                                                                                                             | Σ SP2D Pengganti kategori indeks 1-4                        | 0       |                                                                                                                                                                                                                                          |
|             |          |                                                                                 |                                                                                                                                                             | Σ total SP2D Pengganti                                      | 29      |                                                                                                                                                                                                                                          |
|             |          |                                                                                 |                                                                                                                                                             | Capaian C                                                   | 5       |                                                                                                                                                                                                                                          |
| Capaian IKU | 5        |                                                                                 |                                                                                                                                                             |                                                             |         |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8.          | 5a-CP    | Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah                                | Hasil penilaian kinerja penyaluran DAK dan Dana Desa yang diterbitkan oleh Direktorat PA melalui surat resmi atau sistem yang telah dikembangkan (bila ada) | 99,51                                                       |         | NKP TKDD = [0,10 (SYARAT) + (0,15 (PROYEKSI) + 0,25 (TAGIHAN) + 0,10 (MONEV) + 0,20 (LK-UAKPA) + 0,20 (REAL)] x 100                                                                                                                      |
| 9.          | 5b-N     | Indeks kualitas                                                                 | Data capaian satker, vendor, dan transaksi pada                                                                                                             | 4                                                           |         | (Indeks Capaian Satker*30%)+(Indeks Capaian                                                                                                                                                                                              |

|     |       |                                                                             |                                                                                                                   |                                                          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |       | implementasi Digipay                                                        | Dashboard Aplikasi Digipay                                                                                        |                                                          |      | Vendor*10%)+(Indeks Capaian Transaksi*60%)                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 10. | 6a-CP | Indeks kualitas pelaksanaan rekonsiliasi tingkat UAKPA                      | Monitoring Rekonsiliasi pada Aplikasi MonSAKTI                                                                    | 4                                                        |      | (Indeks Kelengkapan Data dan Penyelesaian Transaksi*50%) + (Indeks Pelaksanaan Rekonsiliasi Eksternal*50%)                                                                                                                                                                                         |
| 11. | 6b-N  | Indeks kualitas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara K/L                    | Daftar LPJ Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran dari Aplikasi SPRINT                                              | $\sum$ LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu          | 222  | Realisasi: $\sum$ LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu / $\sum$ LPJ Bendahara yang seharusnya disampaikan ke KPPN*100%<br>Indeks 4: Jika memperoleh nilai $99,5\% < x \leq 100\%$                                                                                                              |
|     |       |                                                                             |                                                                                                                   | $\sum$ LPJ Bendahara yang seharusnya disampaikan ke KPPN | 222  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     |       |                                                                             |                                                                                                                   | Realisasi                                                | 100% |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     |       |                                                                             |                                                                                                                   | Capaian                                                  | 4    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 12. | 7a-CP | Tingkat implementasi penajaman tugas Treasury dan Financial Advisory        | Laporan implementasi Shadow Organization                                                                          | Organisasi                                               | 25%  | (Capaian Komponen I x bobot) + (Capaian Komponen II x bobot) + (Capaian Komponen III x bobot) + (Capaian Komponen IV x bobot)                                                                                                                                                                      |
|     |       |                                                                             |                                                                                                                   | Kegiatan                                                 | 25%  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     |       |                                                                             |                                                                                                                   | SDM                                                      | 25%  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     |       |                                                                             |                                                                                                                   | Output                                                   | 25%  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     |       |                                                                             |                                                                                                                   | Capaian                                                  | 100% |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 13. | 8a-N  | Tingkat kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization | Surat Keputusan Dirjen Perbendaharaan terkait hasil penilaian kualitas pengelolaan kinerja oleh Kantor Pusat DJPb | *<br>—                                                   |      | Hasil penilaian kualitas pengelolaan kinerja oleh Kantor Pusat DJPb                                                                                                                                                                                                                                |
| 14. | 8b-N  | Tingkat implementasi Learning Organization                                  | Hasil penilaian LO pada Aplikasi Training Modul Learning Organization                                             | 100                                                      |      | Nilai Tingkat Implementasi <i>Learning Organization</i>                                                                                                                                                                                                                                            |
| 15. | 8c-N  | Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal                   | Hasil penilaian pelaksanaan tugas kepatuhan internal oleh Kanwil DJPb                                             | 91,28                                                    |      | Hasil penilaian pelaksanaan tugas KI dari Kantor Wilayah DJPb                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16. | 9a-CP | Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN                               | Laporan realisasi anggaran KPPN, TOR, RKA-K/L, LTPK, IKPA KPPN, OMSPAN, dan SMART DJA                             | 99,98%                                                   |      | Capaian IKU PKPA Triwulan I = Capaian IKPA Januari s.d. Maret<br>Capaian IKU PKPA Triwulan II = Capaian IKPA Januari s.d. Juni<br>Capaian IKU PKPA Triwulan III = Capaian IKPA Januari s.d. September<br>Capaian IKU PKPA Triwulan IV = 40% Capaian IKPA Januari s.d. Desember + 60% Capaian SMART |
| 17. | 9b-N  | Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB                                   | Laporan hasil penilaian yang dilakukan oleh UAPPA-W dan UAPPB-W                                                   | 96                                                       |      | Total nilai berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh UAPPA-W dan UAPPB-W terhadap Laporan Keuangan tingkat UAKPA dan UAKPB                                                                                                                                                                        |
| 18. | 9c-N  | Persentase kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan                           | Daftar nominatif sertipikat Tanah dari DJKN, RP4, Aplikasi Pengadaan                                              | *<br>—                                                   |      | Realisasi IKU = (Realisasi 1 + Realisasi 2 + Realisasi 3)/3                                                                                                                                                                                                                                        |

Mengetahui,  
Kepala KPPN



Ditandatangani secara elektronik  
Arief Rokhman  
197112181992011001



### LAPORAN CAPAIAN IKU KEMENKEU-THREE VERSI IIAA

| KPPN<br>GORONTALO | Perbendaharaan Negara yang optimal dan akuntabel<br>1a-CP Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L |         |         |         |         |         |         |               |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------|
| T/R               | Q1                                                                                               | Q2      | Sm. I   | Q3      | s.d. Q3 | Q4      | Y-23    | Pol/ K P      |
| Target            | 90                                                                                               | 90      | 90      | 90      | 90      | 90      | 90      | Maximize/TLKV |
| Realisasi         | 95,68                                                                                            | 94,5    | 95,09   | 95,87   | 95,87   | 95      | 95      |               |
| Capaian           | 106,31%                                                                                          | 105,00% | 105,66% | 106,52% | 106,52% | 105,56% | 105,56% |               |

| Isu Utama dan Implikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tindakan yang telah dilaksanakan                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Isu Utama</b><br>Indikator Deviasi pada halaman III DIPA nilainya cukup rendah.<br><br>KPA K/L merupakan salah satu komponen dalam kinerja KPPN yang dapat mempengaruhi persepsi stakeholders dalam melakukan penilaian atas kinerja KPPN secara keseluruhan                                                                                                  | - Melakukan reuiu pelaksanaan anggaran setiap bulan.<br>- Mengadakan sharing session terkait IKPA di awal tahun.<br>- Menekan nilai UP mendekati dengan besaran GUP yang sering diajukan pada tahun sebelumnya.<br>- Mengingatkan satker pada saat batas-batas akhir pengajuan SPM. |
| <b>Implikasi</b><br>1. Masih terdapat bendahara/operator baru di satker yang baru yang belum menguasai IKPA.<br>2. Pemahaman pengelolaan anggaran pejabat terkait di satuan kerja masih belum maksimal.<br>3. Satker mengajukan UP dengan nilai yang besar.<br>4. Penambahan hari libur pada akhir Triwulan II memengaruhi realisasi pelaksanaan anggaran satker |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Akar Masalah | Rekomendasi Rencana Aksi | Penanggung jawab | Periode |
|--------------|--------------------------|------------------|---------|
|--------------|--------------------------|------------------|---------|





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                              |            |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| 1. Masih terdapat bendahara/operator baru di satker yang baru yang belum menguasai IKPA.<br>2. Pemahaman pengelolaan anggaran pejabat terkait di satuan kerja masih belum maksimal.<br>3. Satker mengajukan UP dengan nilai yang besar<br>4. Penambahan hari libur pada akhir Triwulan II memengaruhi realisasi pelaksanaan anggaran satker | 1. Mengoptimalkan penggunaan Sosial Media KPPN Gorontalo untuk membagikan informasi terbaru terkait IKPA<br>2. Secara berkala melakukan sharing session dan monev IKPA<br>3. Membuat Rapot Satker dan memberikan penghargaan | Seksi MSKI | Akhir Desember 2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|

### LAPORAN CAPAIAN IKU KEMENKEU-THREE VERSI IIAA

| KPPN<br>GORONTALO | Perbendaharaan Negara yang optimal dan akuntabel |    |       |    |         |         |         |               |
|-------------------|--------------------------------------------------|----|-------|----|---------|---------|---------|---------------|
|                   | 1b-N Indeks kualitas LK Kuasa BUN KPPN           |    |       |    |         |         |         |               |
| T/R               | Q1                                               | Q2 | Sm. I | Q3 | s.d. Q3 | Q4      | Y-23    | Pol/ K P      |
| Target            | -                                                | -  | -     | -  | -       | 3       | 3       | Maximize/TLKV |
| Realisasi         | -                                                | -  | -     | -  | -       | 4       | 4       |               |
| Capaian           | -                                                | -  | -     | -  | -       | 133,33% | 133,33% |               |

| Isu Utama dan Implikasi                                                                                                                                           | Tindakan yang telah dilaksanakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Isu Utama</b><br>Nilai LK Kuasa BUN KPPN dipengaruhi oleh validitas data transaksi baik pengeluaran maupun penerimaan. Target IKU ini terdapat di TRIWULAN IV. | 1. Pelaksanaan rekonsiliasi internal harian.<br>2. Monitoring data suspend atas penerimaan negara pada Aplikasi OM SPAN<br>3. Pelaksanaan analisis Neraca Percobaan dan Neraca lajur detil segmen satker. Memastikan tidak terdapat penggunaan akun/CoA yang salah pada transaksi di satker dan membuat Nota Dinas ke Seksi terkait, jika di temukan kesalahan penggunaan akun/CoA. |
| <b>Implikasi</b><br>Tidak maksimalnya nilai Laporan Keuangan khususnya pada indikator partisipasi                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Akar Masalah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rekomendasi Rencana Aksi                                                                                                                                       | Penanggung jawab | Periode             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| 1. Tingkat pemahaman satker terhadap penggunaan akun/CoA masih rendah.<br>2. Tingkat ketelitian satker terhadap pembebanan akun rendah sehingga menimbulkan selisih pada Transaksi<br>Dalam Konfirmasi (TDK), hal ini dapat mengurangi nilai LK BUN KPPN maupun Kanwil.<br>3. Masih terjadi kesalahan penginputan segmen-segmen CoA pada Aplikasi Simponi untuk penyetoran PNPB sehingga menimbulkan data Suspend | 1. Memberikan pendampingan.<br>2. Monitoring data dan menginformasikan melalui WAG..<br>3. Monitoring data suspend dan menginformasikan kepada satker terkait. | Seksi Vera       | Akhir Desember 2023 |

### LAPORAN CAPAIAN IKU KEMENKEU-THREE VERSI IIAA

| KPPN<br>GORONTALO | Dukungan manajemen yang efektif                   |         |         |    |         |         |         |                      |
|-------------------|---------------------------------------------------|---------|---------|----|---------|---------|---------|----------------------|
|                   | 2a-N Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN |         |         |    |         |         |         |                      |
| T/R               | Q1                                                | Q2      | Sm. I   | Q3 | s.d. Q3 | Q4      | Y-23    | Pol/ K P             |
| Target            | -                                                 | 4,66    | 4,66    | -  | 4,66    | 4,66    | 4,66    | Maximize/<br>Average |
| Realisasi         | -                                                 | 4,82    | 4,82    | -  | 4,82    | 4,85    | 4,84    |                      |
| Capaian           | -                                                 | 103,43% | 103,43% | -  | 103,43% | 104,08% | 103,86% |                      |

| Isu Utama dan Implikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tindakan yang telah dilaksanakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Isu Utama</b><br>Tingkat kepuasan satker terhadap layanan KPPN tidak hanya ditentukan oleh kualitas layanan KPPN namun juga terkait berbagai aspek misalnya kehandalan sistem aplikasi dan kebijakan lain yang berada diluar wewenang KPPN, akibatnya tingkat kepuasan atas layanan KPPN juga dipengaruhi oleh kepuasan stakeholder atas kebijakan-kebijakan yang berada diluar kewenangan KPPN (misalnya kehandalan sistem SPAN, dll). Selain itu, segmen informasi layanan masih perlu ditingkatkan. | 1. Melakukan analisa atas hasil survey untuk memetakan kelemahan pelayanan dan menyusun rekomendasi untuk perbaikan pada masing-masing unit.<br>2. Melakukan evaluasi terhadap hasil survei periode sebelumnya.<br>3. Melaksanakan/melengkapai sarana dan informasi sebagai tindakan perbaikan atas hasil survei periode sebelumnya yang masih kurang.<br>4. Melakukan tindakan perbaikan atas hasil survei periode sebelumnya yang masih kurang.<br>5. Semaksimal mungkin membantu satker dalam menghadapi permasalahan aplikasi. |
| <b>Implikasi</b><br>Potensi tidak maksimalnya nilai Keterbukaan dan kemudahan akses informasi serta nilai sarana media publikasi rendah pada saat periode penilaian indeks kepuasan satuan kerja terhadap layanan KPPN                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Akar Masalah                                                                                                                                | Rekomendasi Rencana Aksi                                                                                                                             | Penanggung jawab                     | Periode |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------|
| Seringkali terdapat gangguan pada sistem aplikasi yang digunakan oleh satker sehingga memengaruhi penilaian satker terhadap pelayanan KPPN. | 1. Melakukan Sosialisasi inovasi-inovasi pelayanan yang diberikan KPPN<br>2. Memanfaatkan media sosial KPPN untuk melakukan publikasi yang intensif. | Para Kepala Seksi dan Subbagian Umum | Tahunan |

### LAPORAN CAPAIAN IKU KEMENKEU-THREE VERSI IIAA

| KPPN<br>GORONTALO | Komunikasi, edukasi, dan standarisasi yang berkesinambungan                         |         |         |    |         |         |         |               |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----|---------|---------|---------|---------------|
|                   | 3a-N Persentase tingkat implementasi standarisasi kompetensi pejabat perbendaharaan |         |         |    |         |         |         |               |
| T/R               | Q1                                                                                  | Q2      | Sm. I   | Q3 | s.d. Q3 | Q4      | Y-23    | Pol/ K P      |
| Target            | -                                                                                   | 93%     | 93%     | -  | 93%     | 93%     | 93%     | Maximize/TLKV |
| Realisasi         | -                                                                                   | 98%     | 98%     |    | 98%     | 95%     | 95%     |               |
| Capaian           | -                                                                                   | 105,38% | 105,38% | -  | 105,38% | 102,15% | 102,15% |               |

| Isu Utama dan Implikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tindakan yang telah dilaksanakan                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Isu Utama</b><br>Standardisasi kompetensi pejabat perbendaharaan yaitu pelaksanaan penilaian kompetensi bagi PPK dan PPSPM pada satker pengelola APBN sesuai dengan PMK Nomor 211/PMK.05/2019 tentang Tata Cara Penilaian Kompetensi Bagi Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.<br><br>Sertifikat bendahara banyak yang berakhir periode Maret 2023. | 1.Menyampaikan pengumuman setiap ada pembukaan pelatihan Pejabat perbendaharaan<br>2.Pendampingan satker dan melayani konsultasi satker |
| <b>Implikasi</b><br>Banyak pejabat perbendaharaan yang belum bisa memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |

| Akar Masalah                                                                                                                                             | Rekomendasi Rencana Aksi                                                                                         | Penanggung jawab | Periode             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| Pelatihan Bendahara, PPSPM, dan PPK jumlahnya masih sangat terbatas sehingga pejabat perbendaharaan di satker kesulitan untuk memenuhi syarat sertifikat | Proaktif memberikan informasi dan mendorong pejabat perbendaharaan untuk mendaftarkan refreshment atau pelatihan | Seksi MSKI       | Akhir Desember 2023 |

### LAPORAN CAPAIAN IKU KEMENKEU-THREE VERSI IIAA

| KPPN<br>GORONTALO | Komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang berkesinambungan<br>3b-N Tingkat efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan |         |         |    |         |         |         |                      |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----|---------|---------|---------|----------------------|
| T/R               | Q1                                                                                                                                    | Q2      | Sm. I   | Q3 | s.d. Q3 | Q4      | Y-23    | Pol/ K P             |
| Target            | -                                                                                                                                     | 89      | 89      | -  | 89      | 89      | 89      | Maximize/<br>Average |
| Realisasi         | -                                                                                                                                     | 95,59   | 95,59   | -  | 95,59   | 97,50   | 96,55   |                      |
| Capaian           | -                                                                                                                                     | 107,40% | 107,40% | -  | 107,40% | 109,55% | 108,48% |                      |

| Isu Utama dan Implikasi                                                                                                                                                                                                                                                      | Tindakan yang telah dilaksanakan                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Isu Utama</b><br>Efektivitas edukasi dan komunikasi diukur melalui pengisian kuesioner atau pelaksanaan pretest dan post test pada saat dilaksanakan kegiatan sosialisasi ataupun bimtek. Selain itu juga berkurangnya pertanyaan dan permasalahan yang diajukan ke KPPN. | 1. Mengadakan sosialisasi dan bimtek terutama apabila terdapat peraturan baru atau update aplikasi<br>2. Pendampingan apabila terdapat masalah |
| <b>Implikasi</b><br>Berpengaruh pada tingkat efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |

| Akar Masalah                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Rekomendasi Rencana Aksi                                                                                                                                                                                                      | Penanggung jawab | Periode    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|
| 1. Pelatihan di masa pandemic mayoritas menggunakan media online sehingga kesempatan berinteraksi agak berkurang dan menurun efektifitasnya.<br>2. Peserta sosialisasi, bimtek, atau pelatihan online biasanya dilakukan sambil melaksanakan tugas yang lain, sehingga mereka kurang focus pada materi yang disampaikan. | 1. Pelatihan/GKM kepada semua pegawai agar pengetahuan terupdate dan dapat membimbing satker apabila ada yang konsultasi.<br>2. Sosialisasi kepada satker atas peraturan terbaru.<br>3. Pendampingan satker yang ada masalah. | Seksi MSKI       | Semesteran |

### LAPORAN CAPAIAN IKU KEMENKEU-THREE VERSI IIAA

| KPPN<br>GORONTALO | Pengelolaan pengeluaran negara yang prudent, efektif dan efisien<br>4a-CP Persentase akurasi perencanaan kas |         |         |         |         |         |         |                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------------|
| T/R               | Q1                                                                                                           | Q2      | Sm. I   | Q3      | s.d. Q3 | Q4      | Y-23    | Pol/ K P             |
| Target            | 80%                                                                                                          | 80%     | 80%     | 80%     | 80%     | 80%     | 80%     | Maximize/<br>Average |
| Realisasi         | N/A                                                                                                          | 97,65%  | 97,65%  | 96%     | 97%     | 98%     | 98%     |                      |
| Capaian           | N/A                                                                                                          | 122,06% | 122,06% | 119,90% | 120,99% | 122,90% | 122,46% |                      |

| Isu Utama dan Implikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tindakan yang telah dilaksanakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Isu Utama</b><br>Ketepatan penyampaian RPD oleh satker wujud garansi kualitas perencanaan satuan kerja. Sesuai ketentuan baru tentang RPD (PMK 197/PMK.05/2017)<br>penyampaian/pelaksanaan RPD telah banyak diberikan kemudahan-kemudahan bagi satker, antara lain penyampaian SPM tanpa RPD namun dilengkapi adanya Surat Pernyataan KPA ttg penundaan pencairan diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam pengelolaan RPD, baik di satker maupun KPPN.<br>Update Renkas Melalui SPRINT | 1.Sosialisasi tentang ketentuan baru RPD (PMK 197/PMK.05/2017).<br>2.Sosialisasi langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran tahun 2023, salah satu materinya terkait perencanaan kas.<br>3.Sosialisasi dan bimtek secara intensif.<br>4.Perlu dilakukan kegiatan pendampingan khususnya terhadap satker dengan pagu besar.<br>5.Menyampaikan teguran kepada satker yang tidak memenuhi RPD sesuai yang telah disampaikan. 6.Mengundang satker ke KPPN untuk didampingi input renkas di SPRINT. |
| <b>Implikasi</b><br>RPD dapat lebih akurat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Akar Masalah | Rekomendasi Rencana Aksi | Penanggung jawab | Periode |
|--------------|--------------------------|------------------|---------|
|--------------|--------------------------|------------------|---------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                  |                                  |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|
| 1.Pemahaman teknis pelaksanaan anggaran di satker perlu ditingkatkan, masih banyak kesalahan SPM yang menyebabkan deviasi pada RPD<br>2.Perencanaan kegiatan yang disusun oleh satker masih belum akurat<br>3.Banyaknya perubahan/revisi DIPA<br>4.Tidak semua Satker mengetahui renkas melalui SPRINT | 1.Memberikan bimtek kepada satker.<br>2.Berkoordinasi dengan Kanwil DJPb.<br>3.Secara aktif melakukan updating data perencanaan kas yang disampaikan oleh satker | Seksi PD, Seksi MSKI, Seksi Bank | Desember 2023 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|

### LAPORAN CAPAIAN IKU KEMENKEU-THREE VERSI IIAA

| KPPN<br>GORONTALO | Pengelolaan pengeluaran negara yang prudent, efektif dan efisien |         |         |         |         |         |         |                      |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------------|
|                   | 4b-N Tingkat kualitas penyelesaian SP2D                          |         |         |         |         |         |         |                      |
| T/R               | Q1                                                               | Q2      | Sm. I   | Q3      | s.d. Q3 | Q4      | Y-23    | Pol/ K P             |
| Target            | 3                                                                | 3       | 3       | 3       | 3       | 3       | 3       | Maximize/<br>Average |
| Realisasi         | 5                                                                | 5       | 5       | 5       | 5       | 5       | 5       |                      |
| Capaian           | 120,00%                                                          | 166,67% | 166,67% | 166,67% | 166,67% | 166,67% | 166,67% |                      |

| Isu Utama dan Implikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tindakan yang telah dilaksanakan                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Isu Utama</b><br>Capaian IKU Tingkat kualitas penyelesaian SP2D yang sekarang mempertimbangkan 3 komponen (dulu 1), yaitu Penyelesaian SP2D secara tepat waktu, Efektivitas Penyaluran dana SP2D yang akurat, serta Efektivitas kecepatan penyelesaian retur SP2D. Selain itu, walaupun capaian IKU telah melampaui target yang ditentukan, masih perlu dicermati ketika jumlah SPM yang disampaikan overload. Adanya pengajuan SPM banyak penerima dengan data rekening pada supplier yang | -Membangun komunikasi antar petugas terkait Pengumuman PPR di grup whatsapp kantor<br>-Mengatur tahapan proses validasi SPM untuk memberikan waktu dalam proses penyelesaian SPM<br>-Melaporkan melalui HAI DJPb |
| <b>Implikasi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |
| 1. Potensi terjadinya retur<br>2. Apabila SPM yang masuk dalam jumlah banyak, target IKU belum tentu akan tercapai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                  |

| Akar Masalah                                                                                                                                                                | Rekomendasi Rencana Aksi                                                  | Penanggung jawab      | Periode       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|
| - Rekening yang sudah lama tidak digunakan (pasif) namun digunakan lagi ketika ada transaksi pembayaran<br>-Penumpukan SPM di akhir tahun<br>-Gangguan jaringan pada sistem | -Koordinasi internal Seksi PD dan Seksi Bank.<br>-Melaporkan ke Dit. SITP | Seksi PD - Seksi Bank | Desember 2023 |



### LAPORAN CAPAIAN IKU KEMENKEU-THREE VERSI IIAA

| KPPN<br>GORONTALO | Pelaksanaan anggaran yang optimal<br>5a-CP Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah |         |         |         |         |         |         |                      |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------------|
| T/R               | Q1                                                                                          | Q2      | Sm. I   | Q3      | s.d. Q3 | Q4      | Y-23    | Pol/ K P             |
| Target            | 90                                                                                          | 90      | 90      | 90      | 90      | 90      | 90      | Maximize/<br>Average |
| Realisasi         | 99,38                                                                                       | 99,40   | 99,39   | 99,74   | 99,51   | 99,51   | 99,51   |                      |
| Capaian           | 110,42%                                                                                     | 110,44% | 110,43% | 110,82% | 110,57% | 110,57% | 110,57% |                      |

| Isu Utama dan Implikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tindakan yang telah dilaksanakan                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Isu Utama</b><br>- Mulai TA 2023 Seluruh Transfer ke Daerah disalurkan melalui KPPN<br>- KPPN harus melakukan input potongan dan penundaan (perlu ketelitian)<br>- Adanya mekanisme BOK Pukermas yang sama dengan mekanisme BOSP (langsung ke rek.puskesmas)<br><br>belum ada capaian IKU/IKI per tanggal 3 Juli 2023 karena masing menunggu ND dari pusat. | 1. Berkoordinasi dengan Dinas Terkait dan Dit PA dan DJPK<br>2. Berkoordinasi dengan pemda terkait penyaluran Dana Fisik<br>3. Pemahaman peraturan terkait mekanisme baru dana BOS |
| <b>Implikasi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                    |
| - Nilai Ketepatan waktu penyampaian dokumen persyaratan oleh pemda (Syarat) yang tidak maksimal<br>- Supplier baru, KPPN harus input manual<br>- No rek Supplier dari Aplikasi K/L berpotensi tidak aktif<br>- tidak dapat disalurkan DAK Fisik untuk kegiatan yang tidak didaftarkan pada OMSPAN                                                              |                                                                                                                                                                                    |

| Akar Masalah | Rekomendasi Rencana Aksi | Penanggung jawab | Periode |
|--------------|--------------------------|------------------|---------|
|--------------|--------------------------|------------------|---------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Proses perbaikan data supplier dilakukan oleh kantor pusat kemendikbud dan kemenkes, sehingga saat ada retur harus menunggu terlebih dahulu</li> <li>- Saat ini tw.l, pemda sedang melakukan input kontrak-kontrak dan sisa DAK Fisik TAYL</li> <li>- Masih banyak pemda yang belum memahami juknis dan peraturan-peraturan yang ada, berpotensi kesalahan input di kedepan hari</li> </ul> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aktif berkoordinasi dengan Dit. PA, DJPK, dan Pemerintah Daerah</li> <li>2. Koordinasi dengan Pemda untuk penyaluran dokumen DF tepat waktu</li> <li>3. Mendorong pemda berkoordinasi dengan K/L.</li> <li>4. Memahami peraturan terkait TKD yang baru</li> </ol> | <p>Seksi Bank -<br/>Seksi Vera</p> | <p>Desember 2023</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|

### LAPORAN CAPAIAN IKU KEMENKEU-THREE VERSI IIAA

| KPPN<br>GORONTALO | Pelaksanaan anggaran yang optimal<br>5b-N Indeks kualitas implementasi Digipay |         |         |         |         |         |         |                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------------|
| T/R               | Q1                                                                             | Q2      | Sm. I   | Q3      | s.d. Q3 | Q4      | Y-23    | Pol/ K P             |
| Target            | 3,1                                                                            | 3,1     | 3,1     | 3,1     | 3,1     | 3,1     | 3,1     | Maximize/<br>Average |
| Realisasi         | 4                                                                              | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       |                      |
| Capaian           | 120,00%                                                                        | 129,03% | 129,03% | 129,03% | 129,03% | 129,03% | 129,03% |                      |

| Isu Utama dan Implikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tindakan yang telah dilaksanakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Isu Utama</b><br>Isu terkait penggunaan DIGIPay saat ini baru dapat dilakukan untuk pengadaan dan pembayaran kepada rekanan yang memiliki rekening di bank penyedia platform aplikasi DIGIPay telah diselesaikan melalui DIGIPay 1.<br>Kurang komitmen dan kesadaran satker dalam belanja secara cashless | 1.Mengenalkan potensi partisipasi satker melalui sistem DIGIPay untuk mendukung upaya terkini dari pemerintah, khususnya dalam menumbuhkan kegiatan perekonomian pasca pandemi.<br>2.Membantu akses kelompok potensial kepada kemanfaatan sistem DIGIPay<br>3.Mengenalkan satker dengan implementasi DigiPay dengan melibatkan bank himbara melalui sosialisasi yang komprehensif |
| <b>Implikasi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ekklusivitas platform ini berdampak pada perbedaan teknis DIGIPay yang disediakan oleh bank yang                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Akar Masalah                                                                                                                                                                                                                                                               | Rekomendasi Rencana Aksi                                                                         | Penanggung jawab | Periode             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| Ketiadaan mesin Electronic Data Capture (EDC) dan potensi biaya-biaya lain yang ditagihkan oleh rekanan/ penyedia karena kurangnya pemahaman rekanan/ penyedia. Migrasi dari DIGIPay ke DIGIPay 1 masih terdapat permasalahan yaitu tidak semua termigrasi dengan sempurna | 1.FGD melibatkan pihak bank<br>2.Pendampingan satker yang mengalami permasalahan terkait DIGIPay | Seksi MSKI       | Akhir Desember 2023 |

**LAPORAN CAPAIAN IKU KEMENKEU-THREE VERSI IIAA**

| KPPN<br>GORONTALO | Pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan dan akuntabel<br>6a-CP Indeks kualitas pelaksanaan rekonsiliasi tingkat UAKPA |         |         |         |         |         |         |                      |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------------|
| T/R               | Q1                                                                                                                               | Q2      | Sm. I   | Q3      | s.d. Q3 | Q4      | Y-23    | Pol/ K P             |
| Target            | 3,25                                                                                                                             | 3,25    | 3,25    | 3,25    | 3,25    | 3,25    | 3,25    | Maximize/<br>Average |
| Realisasi         | 4                                                                                                                                | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       |                      |
| Capaian           | 120,00%                                                                                                                          | 123,08% | 123,08% | 123,08% | 123,08% | 123,08% | 123,08% |                      |

| Isu Utama dan Implikasi                                                                                      | Tindakan yang telah dilaksanakan                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Isu Utama</b><br>Masih terdapat satker yang kurang paham/tidak tahu jadwal periode open dan closed period | 1. Penerbitan sanksi bagi satuan kerja yang terlambat<br>2. Mengingatkan kepada satker melalui surat, telepon, dan telegram mengenai batas waktu / open period bulan berkenaan |
| <b>Implikasi</b>                                                                                             |                                                                                                                                                                                |
| Keterlambatan akan berpengaruh pada capaian IKU                                                              |                                                                                                                                                                                |

| Akar Masalah                                                                                                                                                                 | Rekomendasi Rencana Aksi                                                                                                                             | Penanggung jawab | Periode             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| 1. Operator satker bersifat pasif sehingga mengakibatkan lebih sering menunggu untuk diingatkan<br>2. Kurang koordinasi antara operator sehingga masih saling menunggu data. | 1. Memberikan pemahaman dan melakukan monitoring dan evaluasi kepada satker<br>2. Memberikan pemahaman kepada satker pentingnya koordinasi internal. | Seksi Vera       | Akhir Desember 2023 |

**LAPORAN CAPAIAN IKU KEMENKEU-THREE VERSI IIAA**

| KPPN<br>GORONTALO | Pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan dan akuntabel<br>6b-N Indeks kualitas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara K/L |         |         |         |         |         |         |                  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|
| T/R               | Q1                                                                                                                                | Q2      | Sm. I   | Q3      | s.d. Q3 | Q4      | Y-23    | Pol/ K P         |
| Target            | 3                                                                                                                                 | 3       | 3       | 3       | 3       | 3       | 3       | Maximize/Average |
| Realisasi         | 4                                                                                                                                 | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       |                  |
| Capaian           | 120,00%                                                                                                                           | 133,33% | 133,33% | 133,33% | 133,33% | 133,33% | 133,33% |                  |

| Isu Utama dan Implikasi                                                                                       | Tindakan yang telah dilaksanakan                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Isu Utama</b><br>Kurangnya pemahaman petugas satker dalam mengerjakan LPJ sehingga masih banyak kesalahan. | - Penerbitan sanksi bagi satuan kerja yang terlambat menyampaikan LPJ ke KPPN<br>- Berkoordinasi dengan satker melalui telepon, WA, dan/atau telegram mengenai penegasan kewajiban satker dalam penyampaian LPJ Bendahara |
| <b>Implikasi</b><br>Penumpukan LPJ terjadi di hari-hari terakhir                                              |                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                           |

| Akar Masalah                                                                                                         | Rekomendasi Rencana Aksi                                                                                 | Penanggung jawab | Periode             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| 1. Adanya pergantian bendahara satker.<br>2. Kualitas SDM satker/operator pelaporan LPJ bendahara yang belum merata. | - Mendorong penunjukan bendahara yang bersertifikasi<br>- Mendorong Bimtek/ Pelatihan melalui e-learning | Seksi Vera       | Akhir Desember 2023 |

**LAPORAN CAPAIAN IKU KEMENKEU-THREE VERSI IIAA**

| KPPN<br>GORONTALO | Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif |         |         |         |         |         |         |                      |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------------|
|                   | 7a-CP Tingkat implementasi penajaman tugas Treasury dan Financial Advisory       |         |         |         |         |         |         |                      |
| T/R               | Q1                                                                               | Q2      | Sm. I   | Q3      | s.d. Q3 | Q4      | Y-23    | Pol/ K P             |
| Target            | 80%                                                                              | 80%     | 80%     | 80%     | 80%     | 80%     | 80%     | Maximize/<br>Average |
| Realisasi         | 98,86%                                                                           | 100%    | 99,43%  | 100%    | 99,62%  | 100%    | 99,62%  |                      |
| Capaian           | 123,58%                                                                          | 125,00% | 124,29% | 125,00% | 124,53% | 125,00% | 124,53% |                      |

| Isu Utama dan Implikasi                                                                                                                                                                                                                                                   | Tindakan yang telah dilaksanakan                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Isu Utama</b><br>1. Penjelasan manual IKI serta format pelaporan terkait Tingkat implementasi penajaman tugas Treasury dan Financial Advisory baru disampaikan pada akhir triwulan I<br>2. Tidak adanya penjelasan khusus mengenai format pelaporan pada tiap komponen | 1. Melaksanakan seluruh rangkaian standardisasi kegiatan manajemen KPPN<br>2. Melengkapi dokumentasi terkait kegiatan yang telah dilaksanakan |
| <b>Implikasi</b><br>Adanya kemungkinan ketidaktercapaiannya IKI Tingkat implementasi penajaman tugas Treasury dan Financial Advisory                                                                                                                                      |                                                                                                                                               |

| Akar Masalah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rekomendasi Rencana Aksi                                                                                                 | Penanggung jawab                     | Periode       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| Volume kegiatan mandatory dalam rangka pemenuhan TREFA yang tinggi dan adanya Standardisasi Kegiatan Manajemen Kegiatan KPPN menyebabkan kerepotan dalam pemenuhan seluruh kegiatan tersebut, sehingga menyebabkan kualitas kegiatan menjadi tidak maksimal (hanya sekedar memenuhi kewajiban tanpa outcome yang sesuai harapan) | Melakukan koordinasi antar seksi terkait pemenuhan kegiatan implementasi penajaman tugas treasury dan financial advisory | Para Kepala Seksi dan Subbagian Umum | Desember 2023 |

**LAPORAN CAPAIAN IKU KEMENKEU-THREE VERSI IIAA**

| KPPN<br>GORONTALO | Organisasi dan SDM yang unggul dan adaptif<br>8a-N Tingkat kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization |    |       |    |         |       |       |               |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----|---------|-------|-------|---------------|
| T/R               | Q1                                                                                                                             | Q2 | Sm. I | Q3 | s.d. Q3 | Q4    | Y-23  | Pol/ K P      |
| Target            | -                                                                                                                              | -  | -     | -  | -       | 85    | 85    | Maximize/TLKV |
| Realisasi         | -                                                                                                                              | -  | -     | -  | -       |       |       |               |
| Capaian           | -                                                                                                                              | -  | -     | -  | -       | 0,00% | 0,00% |               |

| Isu Utama dan Implikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tindakan yang telah dilaksanakan                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Isu Utama</b><br>Dalam rangka mendorong komitmen pimpinan dan seluruh pegawai terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja di KPPN Gorontalo dilakukan langkah-langkah peningkatan kualitas kinerja. Sebagai bentuk apresiasi terhadap upaya-upaya peningkatan kualitas kinerja di lingkungan ditjen perbendaharaan, kantor pusat ditjen perbendaharaan melakukan penilaian terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja di unit-unit masing-masing. | Telah dilaksanakan kegiatan dan dipenuhi dokumen sesuai matriks SFO pada triwulan I |
| <b>Implikasi</b><br>Berpengaruh pada nilai IKI Tingkat kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization TA 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |

| Akar Masalah                                                                                                             | Rekomendasi Rencana Aksi                                                                                           | Penanggung jawab | Periode |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|
| Masih ada beberapa pegawai yang kurang peduli terhadap peningkatan kualitas pengelolaan kinerja organisasi dan individu. | - Merutinkan pelaksanaan dialog kinerja organisasi.<br>- Membedomani matriks dalam peningkatan pengelolaan kinerja | Subbagian Umum   | Tahunan |

### LAPORAN CAPAIAN IKU KEMENKEU-THREE VERSI IIAA

| KPPN<br>GORONTALO | Organisasi dan SDM yang unggul dan adaptif<br>8b-N Tingkat implementasi learning organization |         |         |         |         |         |         |               |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------|
| T/R               | Q1                                                                                            | Q2      | Sm. I   | Q3      | s.d. Q3 | Q4      | Y-23    | Pol/ K P      |
| Target            | 10                                                                                            | 40      | 40      | 60      | 60      | 85      | 85      | Maximize/TLKV |
| Realisasi         | 40,84                                                                                         | 63,63   | 63,63   | 95,75   | 95,75   | 100     | 100     |               |
| Capaian           | 408,40%                                                                                       | 159,08% | 159,08% | 159,58% | 159,58% | 117,65% | 117,65% |               |

| Isu Utama dan Implikasi                                                                                                                                   | Tindakan yang telah dilaksanakan                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Isu Utama</b><br>Pemenuhan dokumen untuk tiap-tiap subkomponen yang harus terus dilakukan secara berkala                                               | 1. Telah dilaksanakan kegiatan sesuai dengan sub-komponen implementasi LO<br>2. Telah dipenuhi dokumen terkait implementasi LO |
| <b>Implikasi</b><br>Nilai capaian IKI Tingkat Implementasi LO dapat terpenuhi untuk triwulan I, namun secara keseluruhan belum mendapatkan skor tertinggi |                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                |

| Akar Masalah | Rekomendasi Rencana Aksi | Penanggung jawab | Periode |
|--------------|--------------------------|------------------|---------|
|--------------|--------------------------|------------------|---------|



|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| <p>Pada komponen 2, terdapat dua subkomponen yang tidak bisa didapatkan nilainya dikarenakan periode pelaporan DKI belum dibuka</p> | <p>1. Memenuhi kegiatan dan dokumen sesuai dengan output yang diminta pada panduan implementasi LO sesuai dengan penjelasan<br/>2. Memberikan reminder kepada para peserta pelatihan untuk mengisi EPASPEM serta melakukan upload sertifikat pelatihan</p> | <p>Subbagian Umum</p> | <p>Desember 2023</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|

**LAPORAN CAPAIAN IKU KEMENKEU-THREE VERSI IIAA**

| KPPN<br>GORONTALO | Organisasi dan SDM yang unggul dan adaptif                     |    |       |    |         |         |         |               |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|----|-------|----|---------|---------|---------|---------------|
|                   | 8c-N Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal |    |       |    |         |         |         |               |
| T/R               | Q1                                                             | Q2 | Sm. I | Q3 | s.d. Q3 | Q4      | Y-23    | Pol/ K P      |
| Target            | -                                                              | -  | -     | -  | -       | 86      | 86      | Maximize/TLKV |
| Realisasi         | -                                                              | -  | -     | -  | -       | 91,28   | 91,28   |               |
| Capaian           | -                                                              | -  | -     | -  | -       | 106,14% | 106,14% |               |

| Isu Utama dan Implikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tindakan yang telah dilaksanakan                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Isu Utama</b><br>Pelaporan/evaluasi atas pelaksanaan pemantauan pengendalian intern bersifat dinamis sehingga penyesuaian-penyesuaian terkait dengan format, mekanisme dan periode harus segera dilakukan secara konsisten karena akan berdampak pada hasil penilaian evaluasi.<br>Penilaian hasil evaluasi penerapan PPI dilakukan oleh kanwil DJPb. | Menyusun laporan PPI dengan format baru sesuai KMK Nomor 940 Tahun 2017 tentang Kerangka Kerja Kerangka Kerja Pemantauan Pengendalian Internal dan Pedoman Pemantauan Pengendalian Internal Di Lingkungan Kementerian Keuangan |
| <b>Implikasi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                |
| Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal yang kurang maksimal<br><br><br><br><br>                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                |

| Akar Masalah                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rekomendasi Rencana Aksi    | Penanggung jawab | Periode |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------|
| Penyusunan laporan PPI dengan format sesuai KMK Nomor 940 Tahun 2017 tentang Kerangka Kerja Kerangka Kerja Pemantauan Pengendalian Internal dan Pedoman Pemantauan Pengendalian Internal Di Lingkungan Kementerian Keuangan baru sehingga laporan yang disusun belum dapat dipastikan ketepatan penyusunannya. | Membuat kalender laporan KI | Seksi MSKI       | Tahunan |

**LAPORAN CAPAIAN IKU KEMENKEU-THREE VERSI IIAA**

| KPPN<br>GORONTALO | Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang andal   |         |         |         |         |         |         |               |
|-------------------|-----------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------|
|                   | 9a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN |         |         |         |         |         |         |               |
| T/R               | Q1                                                  | Q2      | Sm. I   | Q3      | s.d. Q3 | Q4      | Y-23    | Pol/ K P      |
| Target            | 95,50%                                              | 95,50%  | 95,50%  | 95,50%  | 95,50%  | 95,50%  | 95,50%  | Maximize/TLKV |
| Realisasi         | 100%                                                | 99,20%  | 99,20%  | 99,60%  | 99,60%  | 99,98%  | 99,98%  |               |
| Capaian           | 104,71%                                             | 103,87% | 103,87% | 104,29% | 104,29% | 104,69% | 104,69% |               |

| Isu Utama dan Implikasi                                                                                                              | Tindakan yang telah dilaksanakan                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Isu Utama</b><br>Mempertahankan nilai capaian IKI Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran KPPN periode triwulan I                | 1. Telah melakukan input data capaian output sebelum batas waktu<br>2. Menjaga persentase realisasi pelaksanaan anggaran<br>3. Menjaga nilai deviasi agar tidak melebihi 5% |
| <b>Implikasi</b><br>Nilai IKPA masih terus mengalami perubahan sampai dengan periode pengisian dan pelaporan capaian output berakhir |                                                                                                                                                                             |

| Akar Masalah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rekomendasi Rencana Aksi                                                                                   | Penanggung jawab | Periode       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| 1. Berdasarkan nota dinas Dit. PA, periode pengisian dan pelaporan capaian output pada aplikasi OMSPAN masih dalam tahapan Open Period sampai dengan 30 April 2023<br>2. Adanya perubahan ketentuan pemutakhiran RPD hal III DIPA sesuai dengan Nota Dinas Dit. PA nomor ND-467/PB.2/2023 Tanggal 3 April 2023 Hal Perubahan Ketentuan Pemutakhiran RPD Hal III DIPA Triwulan II 2023 dan Pengaturan Indikator Kinerja Pengelolaan UP & TUP Sehubungan Dengan Libur dan Cuti Bersama HBK Idul Fitri | 1. Melakukan revisi hal III DIPA sebelum batas waktu<br>2. Melaksanakan belanja sesuai dengan hal III DIPA | Subbagian Umum   | Desember 2023 |

**LAPORAN CAPAIAN IKU KEMENKEU-THREE VERSI IIAA**

| KPPN<br>GORONTALO | Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang andal<br>9b-N Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB |    |       |    |         |         |         |               |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----|---------|---------|---------|---------------|
| T/R               | Q1                                                                                                  | Q2 | Sm. I | Q3 | s.d. Q3 | Q4      | Y-23    | Pol/ K P      |
| Target            | -                                                                                                   | -  | -     | -  | -       | 84      | 84      | Maximize/TLKV |
| Realisasi         | -                                                                                                   | -  | -     | -  | -       | 96      | 96      |               |
| Capaian           | -                                                                                                   | -  | -     | -  | -       | 114,29% | 114,29% |               |

| Isu Utama dan Implikasi                                                                                                                                                                           | Tindakan yang telah dilaksanakan                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Isu Utama</b><br>- Adanya kesalahan pencatatan perolehan KDP<br>- masih ada persediaan yang belum didetailkan pada aplikasi SAKTI                                                              | - Telah diselesaikan to do list pada monsakti secara berkala periode sampai dengan maret 2023<br>- Rekonsiliasi Internal UAKPA-PB<br>- Telah dilakukan Jurnal reklas KDP ke Aset tetap |
| <b>Implikasi</b><br>- Nilai pada variable keakuratan Laporan BMN tidak maksimal<br>- Muncul daftar to-do-list pada aplikasi SAKTI dan MONSAKTI yang berpengaruh pada nilai partisipasi LK UAKPA/B |                                                                                                                                                                                        |

| Akar Masalah                                                                                                                                                      | Rekomendasi Rencana Aksi                             | Penanggung jawab | Periode       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| 1. Aset dan persediaan belum bisa didetailkan jika modul GLP pada bulan sebelumnya belum ditutup<br>2. Penutupan pada modul GLP menunggu arahan dari kantor pusat | membersihkan to-do-list pada MONSAKTI secara berkala | Subbagian Umum   | Desember 2023 |

**LAPORAN CAPAIAN IKU KEMENKEU-THREE VERSI IIAA**

| KPPN<br>GORONTALO | Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang andal      |    |       |    |         |       |       |               |
|-------------------|--------------------------------------------------------|----|-------|----|---------|-------|-------|---------------|
|                   | 9c-N Persentase kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan |    |       |    |         |       |       |               |
| T/R               | Q1                                                     | Q2 | Sm. I | Q3 | s.d. Q3 | Q4    | Y-23  | Pol/ K P      |
| Target            | -                                                      | -  | -     | -  | -       | 100%  | 100%  | Maximize/TLKV |
| Realisasi         | -                                                      | -  | -     | -  | -       |       |       |               |
| Capaian           | -                                                      | -  | -     | -  | -       | 0,00% | 0,00% |               |

| Isu Utama dan Implikasi                                                                                                                                                                                                   | Tindakan yang telah dilaksanakan                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Isu Utama</b><br>Pengelolaan sarana dan prasarana meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap barang bergerak dan tidak bergerak. Strategi pengelolaan BMN secara optimal berpedoman pada SE-32/PB/2016. | - Telah melakukan pengadaan kursi dan pelaksanaan sebagian pagu belanja modal |
| <b>Implikasi</b><br>Nilai Persentase kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan mencapai target                                                                                                                               |                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                           |                                                                               |

| Akar Masalah                                      | Rekomendasi Rencana Aksi                                                             | Penanggung jawab | Periode               |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| Kekurangan jumlah komposisi SDM di Subbagian Umum | - penghapusan BMN<br>- Renovasi Middle Office<br>- Penghapusan Arsip<br>- Sensus BMN | Subbagian Umum   | s.d. 31 Desember 2023 |



## Summary Kinerja dan Risiko KPPN Gorontalo



Kemenkeu-Three KPPN Gorontalo tahun 2023, memiliki 9 Sasaran Strategis (SS) dan 18 Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan rincian:

- 6 (enam) IKU *Cascading Peta* (diturunkan dari *Kemenkeu-Wide*, *Kemenkeu-One*, dan *Kemenkeu-Two*).
- 12 (dua belas) IKU *Non Cascading*



- Pada triwulan IV terdapat 18 (enam belas) IKU dengan *trajectory* target pada triwulan IV dan *seluruhnya* mencapai target.
- Sampai dengan triwulan IV, terdapat 16 (enam belas) IKU yang telah memiliki capaian dan *seluruhnya* melampaui target, sehingga NKO s.d. triwulan IV sebesar 111,39.



Terdapat 3 (tiga) IKU *Kemenkeu-Wide-One* yang akan menjadi tanggung jawab KPPN Gorontalo, yaitu:

- Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L
- Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran KPPN
- Nilai Kinerja Penyaluran Dana Transfer ke Daerah



Pada tahun 2023, terdapat 30 (tiga puluh) *risk events* yang telah ditetapkan pada Piagam Risiko UPR KPPN Gorontalo tahun 2023, dengan rincian 8 Risiko perlu dimitigasi dan 22 Risiko tidak perlu dimitigasi.

Sampai dengan triwulan IV 2023, sudah tidak terdapat risiko pada level tinggi.

### NKO

111,39

Stakeholder (30%) 33.83



Customer (20%) 20.75



Internal Process (25%) 28.79



Learning & Growth (25%) 28.02



\*) NKO menggunakan data capaian cut-off per 04 Januari 2024

### Tren Nilai Kinerja Organisasi



NKO Tahun 2023 mencapai 111,39, Lebih tinggi dibandingkan NKO tahun 2022 sebesar 107,75.



## LAPORAN PELAKSANAAN INISIATIF STRATEGIS

### VERSI IIAA

|            |                                                                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------|
| SS/IKU     | Indeks Kualitas Implementasi <i>Digipay</i>                     |
| IS         | Pemenuhan Indikator Tingkat Implementasi <i>Digipay</i>         |
| Periode IS | s.d. 31 Desember 2023                                           |
| Output     | Peningkatan jumlah satker, vendor, dan transaksi <i>digipay</i> |

| Progres s.d. Triwulan IV                                                                                                                |  | Selesai |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--|
| <b>Penjelasan</b><br>Penandatanganan MoU dengan Satker mitra kerja/perbankan s.d. 30 September 2023 telah dilaksanakan sebanyak 21 kali |  |         |  |
| <b>Kendala/Akar Masalah</b><br>Komunikasi intensif antara Kepala KPPN dan KPA satker menjadi penentu utama                              |  |         |  |
| <b>Output</b><br>Peningkatan jumlah satker, vendor, dan transaksi <i>digipay</i>                                                        |  |         |  |

| Anggaran |           |  |
|----------|-----------|--|
| Pagu     | Realisasi |  |
| -        | -         |  |

| Rencana Aksi                                            | Penanggung-jawab                 | Periode               |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Penandatanganan MoU dengan Satker mitra kerja/perbankan | Kepala Kantor, Kepala Seksi MSKI | s.d. 31 Desember 2023 |

\*) Status penyelesaian IS:

- Selesai, jika pada saat periode pelaporan, IS atau langkah pelaksanan IS dimaksud telah diselesaikan;
- On-Track, jika pada saat periode pelaporan, IS atau langkah pelaksanan IS belum jatuh tempo;
- Off-Track, jika pada saat periode pelaporan, IS atau langkah pelaksanan IS masih dalam proses pelaksanaan tapi telah jatuh tempo.

\*\*) Warna status

- Selesai : Hijau
- On-Track: Kuning
- Off-Track: Merah



## LAPORAN PELAKSANAAN INISIATIF STRATEGIS

### VERSI IIAA

|            |                                                                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SS/IKU     | Tingkat Implementasi Penajaman Tugas <i>Treasury</i> dan <i>Financial Advisory</i>                     |
| IS         | Pemenuhan Indikator Tingkat Implementasi Penajaman Tugas <i>Treasury</i> dan <i>Financial Advisory</i> |
| Periode IS | s.d. 31 Desember 2023                                                                                  |
| Output     | Peningkatan kompetensi SDM penunjang fungsi <i>Treasury</i> dan <i>Financial Advisory</i>              |

| Progres s.d. Triwulan IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Selesai |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <p><b>Penjelasan</b><br/> <i>Forum Group Discussion</i> (FGD) dengan instansi pembina s.d. 31 Desember 2023 telah dilaksanakan sebanyak 3 kali<br/> <i>Forum Group Discussion</i> (FGD) dengan instansi pemerintah daerah s.d. 31 Desember 2023 telah dilaksanakan sebanyak 2 kali</p> <p><b>Kendala/Akar Masalah</b><br/> Volume kegiatan <i>mandatory</i> dalam rangka pemenuhan TREFA yang tinggi dan adanya Standardisasi Kegiatan Manajemen Kegiatan KPPN menyebabkan kerepotan dalam pemenuhan seluruh kegiatan tersebut, sehingga menyebabkan kualitas kegiatan menjadi tidak maksimal (hanya sekedar memenuhi kewajiban tanpa outcome yang sesuai harapan)</p> <p><b>Output</b><br/> Peningkatan kompetensi SDM penunjang fungsi <i>Treasury</i> dan <i>Financial Advisory</i></p> |         |

| Anggaran |           |
|----------|-----------|
| Pagu     | Realisasi |
| -        | -         |

| Rencana Aksi                                                | Penanggung-jawab                                                                   | Periode               |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| FGD dengan instansi pembina<br>FGD dengan pemerintah daerah | Kepala Kantor,<br>Kepala Subbagian Umum, <i>Head of Financial Advisor Division</i> | s.d. 31 Desember 2023 |

\*) Status penyelesaian IS:

- Selesai, jika pada saat periode pelaporan, IS atau langkah pelaksanaan IS dimaksud telah diselesaikan;
- On-Track, jika pada saat periode pelaporan, IS atau langkah pelaksanaan IS belum jatuh tempo;
- Off-Track, jika pada saat periode pelaporan, IS atau langkah pelaksanaan IS masih dalam proses pelaksanaan tapi telah jatuh tempo.

\*\*) Warna status

- Selesai : Hijau
- On-Track: Kuning
- Off-Track: Merah



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA  
TIPE A1 GORONTALO

NOMOR KEP-85/KPN.2901/2023

TENTANG

STRUKTUR MANAJEMEN KINERJA DI LINGKUNGAN KANTOR PELAYANAN  
PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A1 GORONTALO TAHUN 2023

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A1  
GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, setiap Unit Pemilik Kerja (UPK) di lingkungan Kementerian Keuangan memiliki Struktur Manajemen Kinerja untuk mendukung pelaksanaan manajemen kinerja;;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Gorontalo tentang Struktur Manajemen Kinerja di Lingkungan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Gorontalo Tahun 2023;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6349);  
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 30);  
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031);  
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A1 GORONTALO TENTANG STRUKTUR MANAJEMEN KINERJA DI LINGKUNGAN KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A1 GORONTALO TAHUN 2023.

- KESATU : Menunjuk Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini untuk bertugas dan bertanggung jawab dalam Struktur Manajemen Kinerja di Lingkungan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Gorontalo Tahun 2023.
- KEDUA : Struktur Manajemen Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdiri dari:
1. Submanajer Kinerja;
  2. Administrator Kinerja Organisasi (AKO)-*Three*;
  3. Administrator Kinerja Pegawai (AKP)-*Three*;
  4. Pendukung Administrator Kinerja Organisasi (PAKO)-*Three*;
  5. Pendukung Administrator Kinerja Pegawai (PAKP)-*Three*;
  6. *Liaison Officers* (LO) Kinerja Subbagian Umum;
  7. *Liaison Officers* (LO) Kinerja Seksi Pencairan Dana;
  8. *Liaison Officers* (LO) Kinerja Seksi Bank;
  9. *Liaison Officers* (LO) Kinerja Seksi MSKI; dan
  10. *Liaison Officers* (LO) Kinerja Seksi Verifikasi dan Akuntansi.
- KETIGA : Struktur Manajemen Kinerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA melaksanakan tugas dan tanggung jawab mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Gorontalo ini berlaku surut sejak tanggal 26 Agustus 2023.

Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Gorontalo ini disampaikan kepada:

1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal 2 Oktober 2023

KEPALA KANTOR PELAYANAN  
PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A1  
GORONTALO,



Ditandatangani secara elektronik  
ARIEF ROKHMAN



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN  
PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A1 GORONTALO  
NOMOR KEP-85/KPN.2901/2023 TENTANG  
STRUKTUR MANAJEMEN KINERJA DI LINGKUNGAN  
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA  
TIPE A1 GORONTALO TAHUN 2023

**STRUKTUR MANAJEMEN KINERJA  
DI LINGKUNGAN KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA GORONTALO  
TAHUN 2023**

| NO                                                          | NAMA/NIP                                            | PANGKAT/<br>GOL.        | JABATAN                                        |                                                                    |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| UPK-Three: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Gorontalo |                                                     |                         |                                                |                                                                    |
| 1                                                           | Arief Rokhman<br>NIP. 197112181992011001            | Pembina<br>(IV/a)       | Kepala KPPN                                    | Submanajer Kinerja                                                 |
| 2                                                           | Bellatrika Arisnawan<br>NIP. 198307012004121003     | Penata<br>(III/a)       | Kepala Subbagian<br>Umum                       | Administrator Kinerja<br>Organisasi (AKO) UPK-<br>Three            |
| 3                                                           | Bellatrika Arisnawan<br>NIP. 198307012004121003     | Penata<br>(III/a)       | Kepala Subbagian<br>Umum                       | Administrator Kinerja<br>Pegawai (AKP) UPK-Three                   |
| 4                                                           | Agustin Yudi Pratama<br>NIP. 199908202019122002     | Pengatur<br>Muda (II/a) | Pelaksana Subbagian<br>Umum                    | Pendukung Administrator<br>Kinerja Organisasi (PAKO)<br>UPK-Three  |
| 5                                                           | Agustin Yudi Pratama<br>NIP. 199908202019122002     | Pengatur<br>Muda (II/a) | Pelaksana Subbagian<br>Umum                    | Pendukung Administrator<br>Kinerja Pegawai (PAKP)<br>UPK-Three     |
| 6                                                           | Dzikri Angga Elsan Putra<br>NIP. 200008092021011001 | Pengatur<br>(II/c)      | Pelaksana Subbagian<br>Umum                    | Liaison Officers (LO)<br>Kinerja Subbagian Umum                    |
| 7                                                           | Leily Mulyani<br>NIP. 199906242019122001            | Pengatur<br>Muda (II/a) | Pelaksana Seksi<br>Pencairan Dana              | Liaison Officers (LO)<br>Kinerja Seksi Pencairan<br>Dana           |
| 8                                                           | Venda Mutiara Kansya<br>NIP. 199812222022012001     | Pengatur<br>Muda (II/a) | Pelaksana Seksi Bank                           | Liaison Officers (LO)<br>Kinerja Seksi Bank                        |
| 9                                                           | Hasan Ibrahim<br>NIP. 198706062006021001            | Penata<br>(III/a)       | Pelaksana Seksi MSKI                           | Liaison Officers (LO)<br>Kinerja Seksi MSKI                        |
| 10                                                          | Rista Lutfi Irdiana<br>NIP. 200004112019122002      | Pengatur<br>Muda (II/a) | Pelaksana Seksi<br>Verifikasi dan<br>Akuntansi | Liaison Officers (LO)<br>Kinerja Seksi Verifikasi<br>dan Akuntansi |

KEPALA KANTOR PELAYANAN  
PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A1  
GORONTALO,



Ditandatangani secara elektronik  
ARIEF ROKHMAN





**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**  
**PROVINSI GORONTALO**  
**KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A1**  
**GORONTALO**

Jl. Sudirman No. 58, Kota Gorontalo 96128; TELEPON (0435) 821460; FAKSIMILE (0435) 821192; SUREL  
kppn.gorontalo@gmail.com; LAMAN www.djpb.kemenkeu.go.id/kppn/gorontalo

**NOTULA**

**KEGIATAN DIALOG KINERJA ORGANISASI (DKO) PERIODE S.D. DESEMBER DAN RAPAT  
UPR TRIWULAN IV TAHUN 2022**

**A. Dasar**

Nota Dinas Kepala KPPN Gorontalo Nomor ND-9/KPN.2901/2023 tanggal 04 Januari 2023.

**B. Waktu dan Tempat**

Rapat dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2023 pukul 15.30 s.d 17.00 WITA secara daring melalui Teams meeting meeting ID 469 444 785 24, password WxtRwc.

**C. Agenda**

Pada kegiatan Dialog Kinerja Organisasi periode ini, dilakukan pembahasan mengenai capaian seluruh indikator kinerja utama kemenkeu Three beserta Isu, permasalahan, rekomendasi dan tindakan yang telah dilaksanakan untuk pencapaian target IKU. Selain itu pembahasan kinerja, pada kali ini juga dilakukan rapat UPR periode triwulan IV tahun 2022 dan penyusunan profil risiko tahun 2023.

**D. Peserta**

| No. | Nama                        | Jabatan          | Unit Organisasi |
|-----|-----------------------------|------------------|-----------------|
| 1.  | Arief Rokhman               | Kepala Kantor    | KPPN Gorontalo  |
| 2.  | Bellatrika Arisnawan        | Kepala Subbagian | KPPN Gorontalo  |
| 3.  | Rahmat Hidayat              | Kepala Seksi     | KPPN Gorontalo  |
| 4   | Gunawan Prasetya            | Kepala Seksi     | KPPN Gorontalo  |
| 5   | Galihjati Manggalayudha     | Kepala Seksi     | KPPN Gorontalo  |
| 6   | Suranto                     | Kepala Seksi     | KPPN Gorontalo  |
| 7   | Michael Meidi Yohanes Suli  | PTPN Mahir       | KPPN Gorontalo  |
| 8   | Dwi Irfiantiningrum         | Pelaksana        | KPPN Gorontalo  |
| 9   | Vicirio Muh. Altar Mattemmu | Pelaksana        | KPPN Gorontalo  |
| 10  | Hasan Ibrahim               | Pelaksana        | KPPN Gorontalo  |
| 11  | Zulius Suratinoyo           | Pelaksana        | KPPN Gorontalo  |
| 12  | Aswan Karnain Makmur        | Pelaksana        | KPPN Gorontalo  |
| 13  | Ersya Roy K. Usman          | PTPN Terampil    | KPPN Gorontalo  |
| 14  | Kusmiati Muharromah         | Pelaksana        | KPPN Gorontalo  |
| 15  | Dwiana Nur Rahma            | Pelaksana        | KPPN Gorontalo  |
| 16  | Dzikri Angga Elsan Putra    | Pelaksana        | KPPN Gorontalo  |
| 17  | Venda Mutiara Kansya        | Pelaksana        | KPPN Gorontalo  |
| 18  | Agustin Yudi Pratama        | Pelaksana        | KPPN Gorontalo  |
| 19  | Iren Syatifa                | Pelaksana        | KPPN Gorontalo  |
| 20  | Leily Mulyani               | Pelaksana        | KPPN Gorontalo  |
| 21  | Ricky Malik Kurniawan       | Pelaksana        | KPPN Gorontalo  |
| 22  | Rista Lutfi Irdiana         | Pelaksana        | KPPN Gorontalo  |

## E. Pelaksanaan Rapat

### I. Pembukaan

Rapat dibuka oleh PIC Pengelola Kinerja Unit dengan penyampaian informasi Kinerja terkini yaitu terkait himbauan Pengisian realisasi Kinerja dan Upload Dokumen Kinerja, Pengisian hasil Coaching dan Rencana Aksi (Dialog Kinerja Individu). Kemudian pembahasan capaian kinerja dipimpin oleh Bapak Arief Rokhman selaku Kepala Kantor.

### II. Pembahasan

Rapat membahas secara urut realisasi, isu terkini, kendala, hal-hal yang telah dilaksanakan dan rencana aksi seluruh IKU Kemenkeu-Three, sampai akhir periode 2022 seluruh IKU telah mencapai realisasi di atas target, namun ada beberapa IKU yang menjadi perhatian bapak Arief Rokhman untuk lebih ditingkatkan realisasinya pada periode selanjutnya, sebagai berikut:

1. Nilai Kualitas Pengelolaan Kinerja Berbasis Strategy Focused Organization, agar dimaksimalkan dalam hal kelengkapan dokumen bukti pelaksanaan seluruh kegiatan terutama yang berkaitan dengan pengelolaan kinerja berupa, absensi, dokumentasi, notula, undangan, dan lainnya. Nilai SFO dan nilai NKO saling berpengaruh, nilai SFO yang tinggi menyumbang nilai NKO yang tinggi, sebaliknya, nilai NKO yang tinggi, menyumbang nilai SFO lebih tinggi pada tahun berikutnya.
2. Indeks Kepuasan Satker terhadap layanan KPPN perlu ditingkatkan untuk mendukung penilaian WBBM yang akan dilaksanakan pada tahun depan.

Capaian IKU tahun 2022 sebagaimana terlampir

### III. Simpulan

Nilai NKO tahun 2022 sebesar 107.75. Untuk mencapai Nilai Kinerja Organisasi yang maksimal pada periode berikutnya, diperlukan kerja bersama dari seluruh pegawai KPPN Gorontalo, Dialog Kinerja Organisasi menjadi monitoring dan evaluasi realisasi IKU secara bulanan pada KPPN Gorontalo.

Mengetahui,

Kepala Subbagian Umum



Ditandatangani secara elektronik  
Bellatrika Arisnawan

Dibuat di Gorontalo  
Pada tanggal 06 Januari 2023

Notulis

ttd.

Agustin Yudi Pratama





**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**  
**PROVINSI GORONTALO**  
**KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A1**  
**GORONTALO**

Jl. Sudirman No. 58, Kota Gorontalo 96128; TELEPON (0435) 821460; FAKSIMILE (0435) 821192; SUREL  
kppn.gorontalo@gmail.com; LAMAN www.djpb.kemenkeu.go.id/kppn/gorontalo

**NOTULA**  
**PELAKSANAAN KEGIATAN DIALOG KINERJA ORGANISASI (DKO)**

- A. Dasar  
Nota Dinas Nomor ND-65/KPN.2901/2023 tanggal 9 Februari 2023 Ralat atas Nota Dinas Nomor ND-60/KPN.2901/2023.
- B. Waktu dan Tempat  
Rapat dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 09 Februari 2023 pukul 14.00 s.d. 15.30 WITA bertempat di Aula KPPN Gorontalo
- C. Agenda  
Pada kegiatan Dialog Kinerja Organisasi periode ini, dilakukan pembahasan mengenai Konsep Template Peta Strategi, IKU, Inisiatif Strategis, Penetapan target dan Manualnya. Selain itu juga dibahas terkait perekaman SKP pada Aplikasi *e-performance*.
- D. Peserta

| No. | Nama                        | Jabatan          | Unit Organisasi |
|-----|-----------------------------|------------------|-----------------|
| 1   | Arief Rokhman               | Kepala Kantor    | KPPN Gorontalo  |
| 2   | Bellatrika Arisnawan        | Kepala Subbagian | KPPN Gorontalo  |
| 3   | Rahmat Hidayat              | Kepala Seksi     | KPPN Gorontalo  |
| 4   | Gunawan Prasetya            | Kepala Seksi     | KPPN Gorontalo  |
| 5   | Galihjati Manggalayudha     | Kepala Seksi     | KPPN Gorontalo  |
| 6   | Suranto                     | Kepala Seksi     | KPPN Gorontalo  |
| 7   | Michael Meidi Yohanes Suli  | PTPN Mahir       | KPPN Gorontalo  |
| 8   | Vicirio Muh. Altar Mattemmu | Pelaksana        | KPPN Gorontalo  |
| 9   | Hasan Ibrahim               | Pelaksana        | KPPN Gorontalo  |
| 10  | Zulius Suratinoyo           | Pelaksana        | KPPN Gorontalo  |
| 11  | Aswan Karnain Makmur        | Pelaksana        | KPPN Gorontalo  |
| 12  | Ersya Roy K. Usman          | PTPN Terampil    | KPPN Gorontalo  |
| 13  | Kusmiati Muharromah         | Pelaksana        | KPPN Gorontalo  |
| 14  | Dwiana Nur Rahma            | Pelaksana        | KPPN Gorontalo  |
| 15  | Dzikri Angga Elsan Putra    | Pelaksana        | KPPN Gorontalo  |
| 16  | Venda Mutiara Kansya        | Pelaksana        | KPPN Gorontalo  |
| 17  | Agustin Yudi Pratama        | Pelaksana        | KPPN Gorontalo  |
| 18  | Iren Syatifa                | Pelaksana        | KPPN Gorontalo  |
| 19  | Leily Mulyani               | Pelaksana        | KPPN Gorontalo  |
| 20  | Ricky Malik Kurniawan       | Pelaksana        | KPPN Gorontalo  |
| 21  | Rista Lutfi Irdiana         | Pelaksana        | KPPN Gorontalo  |

- E. Pelaksanaan Rapat
- I. Pembukaan

Kegiatan Dialog Kinerja Organisasi (DKO) merupakan komunikasi formal antara pimpinan pemilik peta strategi dengan pejabat dan pegawai di bawahnya untuk mendiskusikan pencapaian strategi, kinerja, risiko, isu-isu permasalahan dan rencana aksi organisasi yang dilaksanakan secara terstruktur dan berkala sesuai dengan periode pelaksanaannya.

Kegiatan DKO periode s.d Januari tahun 2023 dilaksanakan sebagaimana Nota Dinas Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Gorontalo Nomor ND-65/KPN.2901/2023 tanggal 9 Februari 2023 hal Pelaksanaan Kegiatan Dialog Kinerja Organisasi.

Rapat dibuka oleh PIC Pengelola Kinerja Unit dengan penyampaian informasi kinerja terkini yaitu terkait Petunjuk Perekaman Kontrak Kinerja Pegawai dan Upload Dokumen Kinerja. Kemudian pembahasan capaian kinerja dipimpin oleh Bapak Arief Rokhman selaku Kepala Kantor.

## II. Pembahasan

Pada Dialog Kinerja Organisasi kali ini dilakukan pembahasan mengenai Konsep Template Peta Strategi, IKU, Inisiatif Strategis, Penetapan target dan Manualnya. Pada Kontrak Kinerja Kemenkeu-Three KPPN 2023 terdapat 18 (delapan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan rincian capaian sebagai berikut:

| No | Nama IKU                                                                           | Target            | Unit in charge                                           |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|
| 1  | Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L                                             | 90                | Seksi MSKI                                               |
| 2  | Indeks kualitas LK Kuasa BUN KKPN                                                  | 3<br>(Skala 4)    | Seksi Vera                                               |
| 3  | Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN                                       | 4,66<br>(Skala 5) | Seksi PD,<br>Seksi Bank,<br>Seksi MSKI dan<br>Seksi Vera |
| 4  | Persentase tingkat implementasi standarisasi kompetensi pejabat perbendaharaan     | 93%               | Seksi MSKI                                               |
| 5  | Tingkat efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan                   | 89                | Seksi MSKI dan PTPN                                      |
| 6  | Persentase akurasi perencanaan kas                                                 | 80,00%            | Seksi PD,<br>Seksi Bank dan<br>Seksi MSKI                |
| 7  | Tingkat kualitas penyelesaian SP2D                                                 | 3<br>(skala 5)    | Seksi PD dan<br>Seksi Bank                               |
| 8  | Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah                                   | 90                | Seksi Bank dan<br>Seksi Vera                             |
| 9  | Indeks kualitas implementasi <i>Digipay</i>                                        | 3,1<br>(skala 4)  | Seksi MSKI                                               |
| 10 | Indeks kualitas pelaksanaan rekonsiliasi tingkat UAKPA                             | 3,25<br>(skala 4) | Seksi Vera                                               |
| 11 | Indeks kualitas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara K/L                           | 3<br>(skala 4)    | Seksi Vera                                               |
| 12 | Tingkat implementasi penajaman tugas <i>Treasury</i> dan <i>Financial Advisory</i> | 80%               | Seluruh Unit                                             |

|    |                                                                                    |       |                |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|
| 13 | Tingkat kualitas pengelolaan kinerja berbasis <i>Strategy Focused Organization</i> | 85    | Subbagian Umum |
| 14 | Tingkat implementasi <i>Learning Organization</i>                                  | 85    | Subbagian Umum |
| 15 | Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal                          | 86    | Seksi MSKI     |
| 16 | Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN                                      | 95,5% | Subbagian Umum |
| 17 | Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB                                          | 84    | Subbagian Umum |
| 18 | Persentase kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan                                  | 100%  | Subbagian Umum |

Sampai dengan Kegiatan Dialog Kinerja Organisasi periode ini dilaksanakan, Manual IKU dari kantor pusat belum terbit sehingga belum bisa dihitung capaian untuk setiap IKU.

### III. Simpulan

Diperlukan kerja bersama dari seluruh pegawai KPPN Gorontalo untuk mencapai Nilai Kinerja Organisasi yang maksimal pada periode berikutnya, Dialog Kinerja Organisasi menjadi monitoring dan evaluasi realisasi IKU secara bulanan pada KPPN Gorontalo.

### IV. Dokumentasi





Mengetahui,

Kepala Subbagian Umum



Ditandatangani secara elektronik  
Bellatrika Arisnawan

Dibuat di Gorontalo  
Pada tanggal 16 Februari 2023

Notulis

ttd.

Agustin Yudi Pratama





**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**  
**PROVINSI GORONTALO**  
**KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A1**  
**GORONTALO**

Jl. Sudirman No. 58, Kota Gorontalo 96128; TELEPON (0435) 821460; FAKSIMILE (0435) 821192; SUREL  
kppn.gorontalo@gmail.com; LAMAN www.djpb.kemenkeu.go.id/kppn/gorontalo

**NOTULA**

**PELAKSANAAN DIALOG KINERJA ORGANISASI (DKO) PERIODE S.D. BULAN FEBRUARI 2023**

**A. Dasar**

Nota Dinas Kepala KPPN Gorontalo Nomor ND-112/KPN.2901/2023 tanggal 14 Maret 2023 hal Dialog Kinerja Organisasi (DKO) s.d. periode Februari 2023.

**B. Waktu dan Tempat**

Rapat dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 pukul 16.00 s.d 17.30 WITA bertempat di Aula KPPN Gorontalo

**C. Agenda**

Pembahasan Capaian IKI Kemenkeu-Three s.d. periode Februari 2023 beserta upaya pengendalian risiko/mitigasi risiko dan *Current Issues*, Pembahasan Progress Capaian *Inisiatif Strategis* (IS), serta Pembahasan penginputan kinerja pada Aplikasi e-Performance dan INTENSE.

**D. Peserta**

| No. | Nama                        | Jabatan          | Unit Organisasi |
|-----|-----------------------------|------------------|-----------------|
| 1.  | Arief Rokhman               | Kepala Kantor    | KPPN Gorontalo  |
| 2.  | Bellatrika Arisnawan        | Kepala Subbagian | KPPN Gorontalo  |
| 3.  | Rahmat Hidayat              | Kepala Seksi     | KPPN Gorontalo  |
| 4.  | Gunawan Prasetya            | Kepala Seksi     | KPPN Gorontalo  |
| 5.  | Galihjati Manggalayudha     | Kepala Seksi     | KPPN Gorontalo  |
| 6.  | Suranto                     | Kepala Seksi     | KPPN Gorontalo  |
| 7.  | Michael Meidi Yohanes Suli  | PTPN Mahir       | KPPN Gorontalo  |
| 8.  | Ersya Roy K. Usman          | PTPN Terampil    | KPPN Gorontalo  |
| 9.  | Affifah Nurviana Assyayuti  | Pelaksana        | KPPN Gorontalo  |
| 10. | Vicirio Muh. Altar Mattemmu | Pelaksana        | KPPN Gorontalo  |
| 11. | Aswan Karnain Makmur        | Pelaksana        | KPPN Gorontalo  |
| 12. | Hasan Ibrahim               | Pelaksana        | KPPN Gorontalo  |
| 13. | Kusmiati Muharromah         | Pelaksana        | KPPN Gorontalo  |
| 14. | Dwiana Nur Rahma            | Pelaksana        | KPPN Gorontalo  |
| 15. | Dzikri Angga Elsan Putra    | Pelaksana        | KPPN Gorontalo  |
| 16. | Agustin Yudi Pratama        | Pelaksana        | KPPN Gorontalo  |
| 17. | Iren Syatifa                | Pelaksana        | KPPN Gorontalo  |
| 18. | Leily Mulyani               | Pelaksana        | KPPN Gorontalo  |
| 19. | Ricky Malik Kurniawan       | Pelaksana        | KPPN Gorontalo  |
| 20. | Rista Lutfi Irdiana         | Pelaksana        | KPPN Gorontalo  |

**E. Pelaksanaan Rapat**

**I. Pembukaan**

Kegiatan Dialog Kinerja Organisasi (DKO) merupakan komunikasi formal antara pimpinan pemilik peta strategi dengan pejabat dan pegawai di bawahnya untuk mendiskusikan pencapaian strategi, kinerja, risiko, isu-isu permasalahan dan rencana aksi organisasi yang dilaksanakan secara terstruktur dan berkala sesuai dengan periode pelaksanaannya.

Kegiatan DKO periode s.d Februari tahun 2023 dilaksanakan sebagaimana Nota Dinas Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Gorontalo Nomor ND-112/KPN.2901/2023 tanggal 14 Maret 2023 hal Dialog Kinerja Organisasi (DKO) s.d. periode Februari 2023. Rapat dipimpin oleh Bapak Arief Rokhman selaku Kepala Kantor.

## II. Pembahasan

Pada Dialog Kinerja Organisasi kali ini dilakukan evaluasi realisasi capaian IKU, pembahasan isu terkini, permasalahan serta rencana aksi capaian IKU Kemenkeu-Three s.d Februari 2023. Pada Kontrak Kinerja Kemenkeu-Three KPPN 2023 terdapat 18 (Delapan Belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan rincian capaian sebagai berikut:

| No | Nama IKU                                                                        | Target Y23        | Target Q1         | Capaian |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------|
| 1  | Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L                                          | 90                | 90                | 70,31   |
| 2  | Indeks kualitas LK Kuasa BUN KKPN                                               | 3<br>(Skala 4)    | -                 | -       |
| 3  | Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN                                    | 4,66<br>(Skala 5) | -                 | -       |
| 4  | Persentase tingkat implementasi standardisasi kompetensi pejabat perbendaharaan | 93%               | -                 | -       |
| 5  | Tingkat efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan                | 89                | -                 | -       |
| 6  | Persentase akurasi perencanaan kas                                              | 80,00%            | 80,00%            | 100,00% |
| 7  | Tingkat kualitas penyelesaian SP2D                                              | 3<br>(skala 5)    | 3<br>(skala 5)    | 5       |
| 8  | Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah                                | 90                | 90                | -       |
| 9  | Indeks kualitas implementasi <i>Digipay</i>                                     | 3,1<br>(skala 4)  | 3,1<br>(skala 4)  | 4       |
| 10 | Indeks kualitas pelaksanaan rekonsiliasi tingkat UAKPA                          | 3,25<br>(skala 4) | 3,25<br>(skala 4) | 4       |
| 11 | Indeks kualitas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara K/L                        | 3<br>(skala 4)    | 3<br>(skala 4)    | 4       |

|    |                                                                                    |       |       |        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|
| 12 | Tingkat implementasi penajaman tugas <i>Treasury</i> dan <i>Financial Advisory</i> | 80%   | 80%   | 75%    |
| 13 | Tingkat kualitas pengelolaan kinerja berbasis <i>Strategy Focused Organization</i> | 85    | -     | -      |
| 14 | Tingkat implementasi <i>Learning Organization</i>                                  | 85    | 10    | -      |
| 15 | Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal                          | 86    | -     | -      |
| 16 | Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN                                      | 95,5% | 95,5% | 80,52% |
| 17 | Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB                                          | 84    | -     | -      |
| 18 | Persentase kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan                                  | 100%  | -     | -      |

Sampai dengan Februari 2023, dari 18 IKU Kemenkeu-Three di KPPN Gorontalo terdapat 5 IKU yang telah mencapai target, 3 IKU yang belum final karena periode masih berjalan, 10 IKU yang belum ada informasi capaiannya dan/atau belum memasuki periode pelaporan.

*Current Issue* pada pembahasan DKO kali ini yaitu penyelesaian *e-Learning* Manajemen Keberlangsungan Bisnis Kementerian Keuangan sampai dengan 31 Maret 2023.

### III. Simpulan

Diperlukan kerja sama dari seluruh pegawai KPPN Gorontalo untuk mencapai Nilai Kinerja Organisasi yang maksimal pada periode berikutnya, Dialog Kinerja Organisasi menjadi monitoring dan evaluasi realisasi IKU secara bulanan pada KPPN Gorontalo.

### IV. Dokumentasi



Mengetahui,

Kepala Subbagian Umum



Ditandatangani secara elektronik  
Bellatrika Arisnawan

Dibuat di Gorontalo  
Pada tanggal 20 Maret 2023

Notulis

ttd.

Agustin Yudi Pratama



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**  
**PROVINSI GORONTALO**  
**KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A1**  
**GORONTALO**

Jl. Sudirman No. 58, Kota Gorontalo 96128; TELEPON (0435) 821460; FAKSIMILE (0435) 821192; SUREL  
kppn.gorontalo@gmail.com; LAMAN www.djpb.kemenkeu.go.id/kppn/gorontalo

**NOTULA**

**PELAKSANAAN DIALOG KINERJA ORGANISASI (DKO) DAN RAPAT UPR PERIODE S.D.  
TRIWULAN I 2023**

**A. Dasar**

Nota Dinas Kepala KPPN Gorontalo Nomor ND-147/KPN.2901/2023 tanggal 5 April 2023 hal Dialog Kinerja Organisasi (DKO) dan Rapat UPR periode s.d. Triwulan I 2023.

**B. Waktu dan Tempat**

Rapat dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 05 April 2023 pukul 14.00 WITA s.d selesai melalui *Teams Meeting* dengan link: <https://bit.ly/DKOperiodeMaret2023>.

**C. Agenda**

Pembahasan Capaian IKI Kemenkeu-Three dan Rapat UPR s.d. periode Triwulan I 2023 beserta upaya pengendalian risiko/mitigasi risiko dan *Current Issues*, serta Pembahasan Progress Capaian *Inisiatif Strategis* (IS), Pembahasan Review SOP dan rekomendasinya.

**D. Peserta**

| No. | Nama                        | Jabatan          | Unit Organisasi |
|-----|-----------------------------|------------------|-----------------|
| 1.  | Arief Rokhman               | Kepala Kantor    | KPPN Gorontalo  |
| 2.  | Bellatrika Arisnawan        | Kepala Subbagian | KPPN Gorontalo  |
| 3.  | Rahmat Hidayat              | Kepala Seksi     | KPPN Gorontalo  |
| 4.  | Gunawan Prasetya            | Kepala Seksi     | KPPN Gorontalo  |
| 5.  | Galihjati Manggalayudha     | Kepala Seksi     | KPPN Gorontalo  |
| 6.  | Suranto                     | Kepala Seksi     | KPPN Gorontalo  |
| 7.  | Michael Meidi Yohanes Suli  | PTPN Mahir       | KPPN Gorontalo  |
| 8.  | Ersya Roy K. Usman          | PTPN Terampil    | KPPN Gorontalo  |
| 9.  | Affifah Nurviana Assyayuti  | Pelaksana        | KPPN Gorontalo  |
| 10. | Vicirio Muh. Altar Mattemmu | Pelaksana        | KPPN Gorontalo  |
| 11. | Aswan Karnain Makmur        | Pelaksana        | KPPN Gorontalo  |
| 12. | Hasan Ibrahim               | Pelaksana        | KPPN Gorontalo  |
| 13. | Kusmiati Muharromah         | Pelaksana        | KPPN Gorontalo  |
| 14. | Dwiana Nur Rahma            | Pelaksana        | KPPN Gorontalo  |
| 15. | Dzikri Angga Elsan Putra    | Pelaksana        | KPPN Gorontalo  |
| 16. | Agustin Yudi Pratama        | Pelaksana        | KPPN Gorontalo  |
| 17. | Iren Syatifa                | Pelaksana        | KPPN Gorontalo  |
| 18. | Leily Mulyani               | Pelaksana        | KPPN Gorontalo  |
| 19. | Ricky Malik Kurniawan       | Pelaksana        | KPPN Gorontalo  |
| 20. | Rista Lutfi Irdiana         | Pelaksana        | KPPN Gorontalo  |
| 21. | Venda Mutiara Kansya        | Pelaksana        | KPPN Gorontalo  |
| 22. | Zulius Suratinoyo           | Pelaksana        | KPPN Gorontalo  |

**E. Pelaksanaan Rapat**

**I. Pembukaan**

Kegiatan Dialog Kinerja Organisasi (DKO) merupakan komunikasi formal antara pimpinan pemilik peta strategi dengan pejabat dan pegawai di bawahnya untuk mendiskusikan pencapaian strategi, kinerja, risiko, isu-isu permasalahan dan rencana aksi organisasi yang dilaksanakan secara terstruktur dan berkala sesuai dengan periode pelaksanaannya.

Kegiatan DKO periode s.d Triwulan I tahun 2023 dilaksanakan sebagaimana Nota Dinas Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Gorontalo Nomor ND-147/KPN.2901/2023 tanggal 5 April 2023 hal Dialog Kinerja Organisasi (DKO) dan Rapat UPR periode s.d. Triwulan I 2023. Rapat dipimpin oleh Bapak Arief Rokhman selaku Kepala Kantor.

## II. Pembahasan

Pada Dialog Kinerja Organisasi kali ini dilakukan evaluasi realisasi capaian IKU, pembahasan isu terkini, permasalahan serta rencana aksi capaian IKU Kemenkeu-Three s.d Triwulan I 2023. Pada Kontrak Kinerja Kemenkeu-Three KPPN 2023 terdapat 18 (Delapan Belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan rincian capaian sebagai berikut:

| No | Nama IKU                                                                       | Target Y23        | Target Q1         | Capaian |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------|
| 1  | Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L                                         | 90                | 90                | 90,81   |
| 2  | Indeks kualitas LK Kuasa BUN KKPN                                              | 3<br>(Skala 4)    | -                 | -       |
| 3  | Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN                                   | 4,66<br>(Skala 5) | -                 | -       |
| 4  | Persentase tingkat implementasi standarisasi kompetensi pejabat perbendaharaan | 93%               | -                 | -       |
| 5  | Tingkat efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan               | 89                | -                 | -       |
| 6  | Persentase akurasi perencanaan kas                                             | 80,00%            | 80,00%            | 100,00% |
| 7  | Tingkat kualitas penyelesaian SP2D                                             | 3<br>(skala 5)    | 3<br>(skala 5)    | 5       |
| 8  | Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah                               | 90                | 90                | 99,38   |
| 9  | Indeks kualitas implementasi <i>Digipay</i>                                    | 3,1<br>(skala 4)  | 3,1<br>(skala 4)  | 4       |
| 10 | Indeks kualitas pelaksanaan rekonsiliasi tingkat UAKPA                         | 3,25<br>(skala 4) | 3,25<br>(skala 4) | 4       |
| 11 | Indeks kualitas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara K/L                       | 3<br>(skala 4)    | 3<br>(skala 4)    | 4       |



|    |                                                                                    |       |       |        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|
| 12 | Tingkat implementasi penajaman tugas <i>Treasury</i> dan <i>Financial Advisory</i> | 80%   | 80%   | 99,17% |
| 13 | Tingkat kualitas pengelolaan kinerja berbasis <i>Strategy Focused Organization</i> | 85    | -     | -      |
| 14 | Tingkat implementasi <i>Learning Organization</i>                                  | 85    | 10    | 40,84  |
| 15 | Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal                          | 86    | -     | -      |
| 16 | Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN                                      | 95,5% | 95,5% | 100%   |
| 17 | Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB                                          | 84    | -     | -      |
| 18 | Persentase kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan                                  | 100%  | -     | -      |

Sampai dengan Februari 2023, dari 18 IKU Kemenkeu-Three di KPPN Gorontalo terdapat 10 IKU yang telah mencapai target, 8 IKU yang belum ada informasi capaiannya dan/atau belum memasuki periode pelaporan.

Nilai NKO KPPN Gorontalo 113.94, dengan rincian perspektif Stakeholder: 41.03, Internal Process: 37.00, Learning and Growth: 35.91

*Current Issue* pada pembahasan DKO kali ini yaitu penyelesaian pemenuhan tugas pada Implementasi Trefa sesuai petunjuk, *Update* hal III DIPA, Penyelesaian THR, Penyelesaian Retur, Pemenuhan Dokumen WBBM, dan Penyusunan LK UAKBUN-D *Audited*.

Pembahasan Review SOP terkait pengajuan SPM ke Banyak Penerima. Sehubungan dengan maraknya retur atas rekening penerima pada proses pencairan SP2D KPPN Gorontalo, terutama pada pengajuan SPM ke Banyak Penerima. Retur tersebut disebabkan oleh beberapa kondisi, yaitu rekening tidak aktif, rekening tidak ditemukan, dan terjadi *offline system* di pihak perbankan. Untuk meminimalisasi kejadian tersebut terjadi kembali, kami melakukan review untuk usulan perbaikan SOP pengajuan SPM di mana satuan kerja wajib melakukan verifikasi daftar rekening kepada pihak perbankan supaya memastikan bahwa rekening yang diajukan ke KPPN telah valid.

### III. Simpulan

Diperlukan kerja sama dari seluruh pegawai KPPN Gorontalo untuk mencapai Nilai Kinerja Organisasi yang maksimal pada periode berikutnya, Dialog Kinerja Organisasi menjadi monitoring dan evaluasi realisasi IKU secara bulanan pada KPPN Gorontalo.

### IV. Dokumentasi

The image shows a Zoom meeting interface. At the top, there's a toolbar with icons for Stop sharing, Layout, Private view, Pop-out, Chat, People, Raise, React, View, Rooms, Apps, More, Camera, Mic, Share, and Leave. Below the toolbar, the main window displays a presentation slide titled "DIALOG KINERJA ORGANISASI TRIWULAN I 2023" for Gorontalo, dated 5 April 2023. The slide features a blue background with a coral reef image. To the right of the main window, there's a "No Notes" section. Below the main window, there's a row of thumbnails for other slides. On the far right, there's a vertical strip showing a list of participants, including "Dian Angga Dian Putra" and "Ihsan Syarif".

[illegible]

Mengetahui,  
Kepala Subbagian Umum

Dibuat di Gorontalo  
Pada tanggal 10 April 2023  
Notulis



Ditandatangani secara elektronik  
Bellatrika Arisnawan



Ditandatangani secara elektronik  
Agustin Yudi Pratama





**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL**  
**PERBENDAHARAAN PROVINSI GORONTALO**  
**KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A1**  
**GORONTALO**

Jl. Sudirman No. 58, Kota Gorontalo 96128; TELEPON (0435) 821460; FAKSIMILE (0435) 821192;  
SUREL  
kppn.gorontalo@gmail.com; LAMAN www.djpb.kemenkeu.go.id/kppn/gorontalo

---

**NOTULA**  
**PELAKSANAAN DKO PERIODE S.D. BULAN APRIL 2023 DAN RAPAT UPR**  
**KPPN GORONTALO**

- A. Dasar  
Nota Dinas Kepala KPPN Gorontalo Nomor ND-198/KPN.2901/2023 tanggal 11 Mei 2023 hal Pelaksanaan DKO Periode s.d. Bulan April 2023 dan Rapat UPR KPPN Gorontalo.
- B. Waktu dan Tempat  
Rapat dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023 pukul 14.00 s.d 16.00 WITA bertempat di Aula KPPN Gorontalo
- C. Agenda  
Pembahasan Capaian IKI Kemenkeu-Three s.d. periode April 2023 beserta upaya pengendalian risiko/mitigasi risiko dan *Current Issues*, Internalisasi dalam rangka pemberian pemahaman terkait strategi organisasi berdasarkan STEP SWOT, dan TOWS, Internalisasi Strategi Organisasi, Peta Strategi, IKU, Inisiatif Strategis, Matriks Ketercapaian IKU, Action Plan Pencapaian IKU, serta Isu Strategis Terkini.
- D. Peserta

| No. | Nama                        | Jabatan          | Unit Organisasi |
|-----|-----------------------------|------------------|-----------------|
| 1.  | Arief Rokhman               | Kepala Kantor    | KPPN Gorontalo  |
| 2.  | Bellatrika Arisnawan        | Kepala Subbagian | KPPN Gorontalo  |
| 3.  | Rahmat Hidayat              | Kepala Seksi     | KPPN Gorontalo  |
| 4.  | Gunawan Prasetya            | Kepala Seksi     | KPPN Gorontalo  |
| 5.  | Galihjati Manggalayudha     | Kepala Seksi     | KPPN Gorontalo  |
| 6.  | Suranto                     | Kepala Seksi     | KPPN Gorontalo  |
| 7.  | Michael Meidi Yohanes Suli  | PTPN Mahir       | KPPN Gorontalo  |
| 8.  | Ersya Roy K. Usman          | PTPN Terampil    | KPPN Gorontalo  |
| 9.  | Affifah Nurviana Assyayuti  | Pelaksana        | KPPN Gorontalo  |
| 10. | Vicirio Muh. Altar Mattemmu | Pelaksana        | KPPN Gorontalo  |
| 11. | Aswan Karnain Makmur        | Pelaksana        | KPPN Gorontalo  |
| 12. | Hasan Ibrahim               | Pelaksana        | KPPN Gorontalo  |
| 13. | Kusmiati Muharromah         | Pelaksana        | KPPN Gorontalo  |
| 14. | Dwiana Nur Rahma            | Pelaksana        | KPPN Gorontalo  |
| 15. | Dzikri Angga Elsan Putra    | Pelaksana        | KPPN Gorontalo  |
| 16. | Agustin Yudi Pratama        | Pelaksana        | KPPN Gorontalo  |
| 17. | Iren Syatifa                | Pelaksana        | KPPN Gorontalo  |

|     |                       |           |                |
|-----|-----------------------|-----------|----------------|
| 18. | Leily Mulyani         | Pelaksana | KPPN Gorontalo |
| 19. | Ricky Malik Kurniawan | Pelaksana | KPPN Gorontalo |
| 20. | Rista Lutfi Irdiana   | Pelaksana | KPPN Gorontalo |
| 21. | Venda Mutiara Kansya  | Pelaksana | KPPN Gorontalo |
| 22. | Zulius Suratinoyo     | Pelaksana | KPPN Gorontalo |

## E. Pelaksanaan Rapat

### I. Pembukaan

Kegiatan Dialog Kinerja Organisasi (DKO) merupakan komunikasi formal antara pimpinan pemilik peta strategi dengan pejabat dan pegawai di bawahnya untuk mendiskusikan pencapaian strategi, kinerja, risiko, isu-isu permasalahan dan rencana aksi organisasi yang dilaksanakan secara terstruktur dan berkala sesuai dengan periode pelaksanaannya.

Kegiatan DKO periode s.d April tahun 2023 dilaksanakan sebagaimana Nota Dinas Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Gorontalo Nomor ND-198/KPN.2901/2023 tanggal 11 Mei 2023 hal Pelaksanaan DKO Periode s.d. Bulan April 2023 dan Rapat UPR KPPN Gorontalo. Rapat dipimpin oleh Bapak Arief Rokhman selaku Kepala Kantor.

### II. Pembahasan

Pada Dialog Kinerja Organisasi kali ini dilakukan evaluasi realisasi capaian IKU, pembahasan isu terkini, permasalahan serta rencana aksi capaian IKU Kemenkeu- Three s.d April 2023. Pada Kontrak Kinerja Kemenkeu-Three KPPN 2023 terdapat 18 (Delapan Belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan rincian capaian sebagai berikut:

| No | Nama IKU                                                                        | Target Y23        | Target Q1 | Capaian |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------|
| 1  | Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L                                          | 90                | 90        | 87,60   |
| 2  | Indeks kualitas LK Kuasa BUN KKPN                                               | 3<br>(Skala 4)    | -         | -       |
| 3  | Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN                                    | 4,66<br>(Skala 5) | -         | -       |
| 4  | Persentase tingkat implementasi standardisasi kompetensi pejabat perbendaharaan | 93%               | -         | -       |
| 5  | Tingkat efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan                | 89                | -         | -       |
| 6  | Persentase akurasi perencanaan kas                                              | 80,00%            | 80,00%    | 98,51%  |

|    |                                                                             |                   |                   |        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------|
| 7  | Tingkat kualitas penyelesaian SP2D                                          | 3<br>(skala 5)    | 3<br>(skala 5)    | 5      |
| 8  | Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah                            | 90                | 90                | 99,38  |
| 9  | Indeks kualitas implementasi <i>Digipay</i>                                 | 3,1<br>(skala 4)  | 3,1<br>(skala 4)  | 4      |
| 10 | Indeks kualitas pelaksanaan rekonsiliasi tingkat UAKPA                      | 3,25<br>(skala 4) | 3,25<br>(skala 4) | 4      |
| 11 | Indeks kualitas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara K/L                    | 3<br>(skala 4)    | 3<br>(skala 4)    | 4      |
| 12 | Tingkat implementasi penajaman tugas Treasury dan Financial Advisory        | 80%               | 80%               | 98,86% |
| 13 | Tingkat kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization | 85                | -                 | -      |
| 14 | Tingkat implementasi Learning Organization                                  | 85                | 10                | 53,9   |
| 15 | Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal                   | 86                | -                 | -      |
| 16 | Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN                               | 95,5%             | 95,5%             | 87,95% |
| 17 | Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB                                   | 84                | -                 | -      |
| 18 | Persentase kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan                           | 100%              | -                 | -      |
|    |                                                                             |                   |                   |        |

Sampai dengan Februari 2023, dari 18 IKU Kemenkeu-Three di KPPN Gorontalo terdapat 8 IKU yang telah mencapai target, 2 IKU yang belum final karena periode masih berjalan, 8 IKU yang belum ada informasi capaiannya dan/atau belum memasuki periode pelaporan.

*Current Issue* pada pembahasan DKO kali ini yaitu Implementasi *Treasury dan Financial Advisory*, Tanggapan Evaluasi SP2D 1 Jam, FGD Penyaluran DAK FISIK dan Dana Desa, Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah, Penyelesaian Verifikasi LPJ dan Rekonsiliasi.

Kesimpulan Strategi Organisasi yang dapat dirumuskan dari analisis berdasarkan STEP SWOT, dan TOWS, yaitu:

**Strategi SO: MAXI-MAXI (Menggunakan kekuatan untuk menangkap peluang)**

1. Mengoptimalkan layanan yang didukung sistem dan proses bisnis yang handal
2. Memberikan tantangan kepada pegawai untuk melanjutkan dan meningkatkan prestasi
3. Pendampingan kepada instansi pemerintah untuk tata kelola keuangan yang lebih baik
4. Peningkatan pertumbuhan perekonomian masyarakat melalui kredit program

**Strategi WO: MINI-MAXI (Mengurangi kelemahan untuk menangkap peluang)**

1. Melanjutkan hubungan kemitraan dengan stakeholders untuk memperkuat brand image
2. Melengkapi sarana-prasarana sesuai dengan standar untuk mendukung pelayanan dan kebutuhan PUG
3. Memberikan tantangan kepada pegawai untuk berinovasi dalam mengatasi keterbatasan sumber daya
4. Internalisasi PUG dengan cara cara yang populis
5. Mengoptimalkan kanal-kanal informasi melalui media masa dan media sosial

**Strategi ST: MAXI-MINI (Memanfaatkan kekuatan untuk menanggulangi ancaman)**

1. Menggunakan program program filantropi untuk mengenalkan peranstrategis organisasi
2. Sosialisasi regulasi baru dan menyusun strategi untuk membantu satker menghadapi regulasi baru
3. Mengoptimalkan layanan IT dalam mengedukasi stakeholders melalui penggunaan media digital seperti videografi
4. Mengoptimalkan peran organisasi dalam mengurangi tingkat kemiskinan melalui program UMi, serta penyaluran DAK dan Dana Desa

**Strategi WT: MINI-MINI (Mengurangi kelemahan untuk menanggulangi ancaman)**

1. Mengidentifikasi dan memetakan hambatan hambatan pelaksanaan APBN dan merumuskan strategi komprehensif
2. Merumuskan prioritas kegiatan-kegiatan strategis
3. Menginisiasi pola pembinaan yang komprehensif
4. Penguatan peran unit pengelola kinerja yang didukung dengan sistem reward and punishment yang lebih baik

III. Simpulan

Diperlukan kerja sama dari seluruh pegawai KPPN Gorontalo untuk mencapai Nilai Kinerja Organisasi yang maksimal pada periode berikutnya, Dialog Kinerja Organisasi menjadi monitoring dan evaluasi realisasi IKU secara bulanan pada KPPN Gorontalo.

## IV. Dokumentasi



Mengetahui,

Kepala Subbagian Umum

Dibuat di Gorontalo  
Pada tanggal 17 Mei 2023

Notulis



Ditandatangani secara elektronik  
Bellatrika Arisnawan



Ditandatangani secara elektronik  
Agustin Yudi Pratama





**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**  
**PROVINSI GORONTALO**  
**KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A1**  
**GORONTALO**

Jl. Sudirman No. 58, Kota Gorontalo 96128; TELEPON (0435) 821460; FAKSIMILE (0435) 821192; SUREL  
kppn.gorontalo@gmail.com; LAMAN www.djpb.kemenkeu.go.id/kppn/gorontalo

**NOTULA**  
**PELAKSANAAN DKO PERIODE S.D. BULAN APRIL 2023 DAN RAPAT UPR KPPN**  
**GORONTALO**

**A. Dasar**

Nota Dinas Kepala KPPN Gorontalo Nomor ND-235/KPN.2901/2023 tanggal 15 Juni 2023 hal Pelaksanaan DKO s.d. periode bulan Mei 2023 serta Rapat UPR, Evaluasi Kepatuhan Internal, Kinerja, Pengelolaan SDM, Jafung, Kerumahtanggaan dan Kinerja KPPN.

**B. Waktu dan Tempat**

Rapat dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023 pukul 14.00 s.d 16.00 WITA bertempat di Aula KPPN Gorontalo

**C. Agenda**

Pembahasan Capaian IKU dan Rapat UPR periode s.d. Mei 2023, Pembahasan Isu Strategis Terkini, Mitigasi Risiko, dan Inisiatif Strategis, Evaluasi Kepatuhan Internal dan Kinerja, Evaluasi Pengelolaan SDM, Jafung, dan Kerumahtanggaan, Evaluasi Kinerja KPPN

**D. Peserta**

| No. | Nama                        | Jabatan          | Unit Organisasi |
|-----|-----------------------------|------------------|-----------------|
| 1.  | Arief Rokhman               | Kepala Kantor    | KPPN Gorontalo  |
| 2.  | Bellatrika Arisnawan        | Kepala Subbagian | KPPN Gorontalo  |
| 3.  | Rahmat Hidayat              | Kepala Seksi     | KPPN Gorontalo  |
| 4.  | Gunawan Prasetya            | Kepala Seksi     | KPPN Gorontalo  |
| 5.  | Galihjati Manggalayudha     | Kepala Seksi     | KPPN Gorontalo  |
| 6.  | Suranto                     | Kepala Seksi     | KPPN Gorontalo  |
| 7.  | Michael Meidi Yohanes Suli  | PTPN Mahir       | KPPN Gorontalo  |
| 8.  | Ersya Roy K. Usman          | PTPN Terampil    | KPPN Gorontalo  |
| 9.  | Affifah Nurviana Assyayuti  | Pelaksana        | KPPN Gorontalo  |
| 10. | Vicirio Muh. Altar Mattemmu | Pelaksana        | KPPN Gorontalo  |
| 11. | Aswan Karnain Makmur        | Pelaksana        | KPPN Gorontalo  |
| 12. | Hasan Ibrahim               | Pelaksana        | KPPN Gorontalo  |
| 13. | Kusmiati Muharromah         | Pelaksana        | KPPN Gorontalo  |
| 14. | Dwiana Nur Rahma            | Pelaksana        | KPPN Gorontalo  |
| 15. | Dzikri Angga Elsan Putra    | Pelaksana        | KPPN Gorontalo  |
| 16. | Agustin Yudi Pratama        | Pelaksana        | KPPN Gorontalo  |
| 17. | Iren Syatifa                | Pelaksana        | KPPN Gorontalo  |
| 18. | Leily Mulyani               | Pelaksana        | KPPN Gorontalo  |
| 19. | Ricky Malik Kurniawan       | Pelaksana        | KPPN Gorontalo  |
| 20. | Rista Lutfi Irdiana         | Pelaksana        | KPPN Gorontalo  |
| 21. | Venda Mutiara Kansya        | Pelaksana        | KPPN Gorontalo  |
| 22. | Zulius Suratinoyo           | Pelaksana        | KPPN Gorontalo  |

**E. Pelaksanaan Rapat**

**I. Pembukaan**



Kegiatan Dialog Kinerja Organisasi (DKO) merupakan komunikasi formal antara pimpinan pemilik peta strategi dengan pejabat dan pegawai di bawahnya untuk mendiskusikan pencapaian strategi, kinerja, risiko, isu-isu permasalahan dan rencana aksi organisasi yang dilaksanakan secara terstruktur dan berkala sesuai dengan periode pelaksanaannya.

Kegiatan DKO periode s.d Mei tahun 2023 dilaksanakan sebagaimana Nota Dinas Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Gorontalo Nomor ND-235/KPN.2901/2023 tanggal 15 Juni 2023 hal Pelaksanaan DKO s.d. periode bulan Mei 2023 serta Rapat UPR, Evaluasi Kepatuhan Internal, Kinerja, Pengelolaan SDM, Jafung, Kerumahtanggaan dan Kinerja KPPN. Rapat dipimpin oleh Bapak Arief Rokhman selaku Kepala Kantor.

## II. Pembahasan

Pada Dialog Kinerja Organisasi kali ini dilakukan evaluasi realisasi capaian IKU, pembahasan isu terkini, permasalahan serta rencana aksi capaian IKU Kemenkeu-Three s.d Mei 2023. Pada Kontrak Kinerja Kemenkeu-Three KPPN 2023 terdapat 18 (Delapan Belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan rincian capaian sebagai berikut:

| No | Nama IKU                                                                       | Target Y23        | Target Q2         | Capaian |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------|
| 1  | Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L                                         | 90                | 90                | 91.10   |
| 2  | Indeks kualitas LK Kuasa BUN KPPN                                              | 3<br>(Skala 4)    | -                 | -       |
| 3  | Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN                                   | 4,66<br>(Skala 5) | 4,66<br>(Skala 5) | -       |
| 4  | Persentase tingkat implementasi standarisasi kompetensi pejabat perbendaharaan | 93%               | 93%               | -       |
| 5  | Tingkat efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan               | 89                | 89                | -       |
| 6  | Persentase akurasi perencanaan kas                                             | 80,00%            | 80,00%            | 100,00% |
| 7  | Tingkat kualitas penyelesaian SP2D                                             | 3<br>(skala 5)    | 3<br>(skala 5)    | 5       |
| 8  | Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah                               | 90                | 90                | 99.38   |
| 9  | Indeks kualitas implementasi <i>Digipay</i>                                    | 3,1<br>(skala 4)  | 3,1<br>(skala 4)  | 4       |
| 10 | Indeks kualitas pelaksanaan rekonsiliasi tingkat UAKPA                         | 3,25<br>(skala 4) | 3,25<br>(skala 4) | 4       |
| 11 | Indeks kualitas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara K/L                       | 3<br>(skala 4)    | 3<br>(skala 4)    | 4       |

|    |                                                                                    |       |       |        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|
| 12 | Tingkat implementasi penajaman tugas <i>Treasury</i> dan <i>Financial Advisory</i> | 80%   | 80%   | 98.86% |
| 13 | Tingkat kualitas pengelolaan kinerja berbasis <i>Strategy Focused Organization</i> | 85    | -     | -      |
| 14 | Tingkat implementasi <i>Learning Organization</i>                                  | 85    | 40    | 55.22  |
| 15 | Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal                          | 86    | -     | -      |
| 16 | Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN                                      | 95,5% | 95,5% | 95.13% |
| 17 | Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB                                          | 84    | -     | -      |
| 18 | Persentase kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan                                  | 100%  | -     | -      |

Sampai dengan Mei 2023, dari 18 IKU Kemenkeu-Three di KPPN Gorontalo terdapat 9 IKU yang telah mencapai target, 1 IKU yang belum final karena periode masih berjalan, 8 IKU yang belum ada informasi capaiannya dan/atau belum memasuki periode pelaporan.

*Current Issue* pada pembahasan DKO kali ini yaitu Kendala pada Aplikasi SIMAN, Perpindahan Server SPAN Pusat, Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, Penyaluran Kartu Kredit Pemerintah, serta Penyelesaian Verifikasi LPJ dan Rekonsiliasi.

### III. Simpulan

Tindak lanjut yang telah diupayakan yaitu melaksanakan FGD penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, melaksanakan realisasi anggaran untuk kegiatan pada seksi teknis, melakukan monitoring penyelesaian SPM melalui OM SPAN untuk memastikan akurasi penyelesaian SPM 1 jam, bekerja sama dengan Bank untuk memperbanyak vendor yang bisa bertransaksi dengan KKP, menyelesaikan proses rekonsiliasi dan verifikasi LPJ Bendahara Satker. Diperlukan kerja sama dari seluruh pegawai KPPN Gorontalo untuk mencapai Nilai Kinerja Organisasi yang maksimal pada periode berikutnya, Dialog Kinerja Organisasi menjadi monitoring dan evaluasi realisasi IKU secara bulanan pada KPPN Gorontalo.

### IV. Dokumentasi





Mengetahui,  
Kepala Subbagian Umum



Ditandatangani secara elektronik  
Bellatrika Arisnawan



Dibuat di Gorontalo  
Pada tanggal 20 Juni 2023

Notulis



Ditandatangani secara elektronik  
Agustin Yudi Pratama



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**  
**PROVINSI GORONTALO**  
**KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A1**  
**GORONTALO**

Jl. Sudirman No. 58, Kota Gorontalo 96128; TELEPON (0435) 821460; FAKSIMILE (0435) 821192; SUREL  
kppn.gorontalo@gmail.com; LAMAN www.djpb.kemenkeu.go.id/kppn/gorontalo

**NOTULA**  
**PELAKSANAAN DKO PERIODE S.D. BULAN JUNI 2023 DAN RAPAT UPR**  
**KPPN GORONTALO**

**A. Dasar**

Nota Dinas Kepala KPPN Gorontalo Nomor ND-266/KPN.2901/2023 tanggal 3 Juli 2023 hal Pelaksanaan DKO Periode s.d. Bulan Juni 2023 dan Rapat UPR KPPN Gorontalo.

**B. Waktu dan Tempat**

Rapat dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2023 pukul 14.00 s.d 16.00 WITA daring melalui *Microsoft Teams* (Meeting ID: 489 670 137 785, Passcode: Fbjd3v)

**C. Agenda**

Pembahasan Capaian IKU dan Rapat UPR periode s.d. Juni 2023, Pembahasan Isu Strategis Terkini, Mitigasi Risiko, dan Inisiatif Strategis, Evaluasi Kepatuhan Internal dan Kinerja, Evaluasi Pengelolaan SDM, Jafung, dan Kerumahtanggaan, Evaluasi Kinerja Anggaran KPPN selaku Satker

**D. Peserta**

| No. | Nama                        | Jabatan          | Unit Organisasi |
|-----|-----------------------------|------------------|-----------------|
| 1.  | Arief Rokhman               | Kepala Kantor    | KPPN Gorontalo  |
| 2.  | Bellatrika Arisnawan        | Kepala Subbagian | KPPN Gorontalo  |
| 3.  | Rahmat Hidayat              | Kepala Seksi     | KPPN Gorontalo  |
| 4.  | Gunawan Prasetya            | Kepala Seksi     | KPPN Gorontalo  |
| 5.  | Galihjati Manggalayudha     | Kepala Seksi     | KPPN Gorontalo  |
| 6.  | Suranto                     | Kepala Seksi     | KPPN Gorontalo  |
| 7.  | Michael Meidi Yohanes Suli  | PTPN Mahir       | KPPN Gorontalo  |
| 8.  | Ersya Roy K. Usman          | PTPN Terampil    | KPPN Gorontalo  |
| 9.  | Affifah Nurviana Assyayuti  | Pelaksana        | KPPN Gorontalo  |
| 10. | Vicirio Muh. Altar Mattemmu | Pelaksana        | KPPN Gorontalo  |
| 11. | Aswan Karnain Makmur        | Pelaksana        | KPPN Gorontalo  |
| 12. | Hasan Ibrahim               | Pelaksana        | KPPN Gorontalo  |
| 13. | Kusmiati Muharromah         | Pelaksana        | KPPN Gorontalo  |
| 14. | Dwiana Nur Rahma            | Pelaksana        | KPPN Gorontalo  |
| 15. | Dzikri Angga Elsan Putra    | Pelaksana        | KPPN Gorontalo  |
| 16. | Agustin Yudi Pratama        | Pelaksana        | KPPN Gorontalo  |
| 17. | Iren Syatifa                | Pelaksana        | KPPN Gorontalo  |
| 18. | Leily Mulyani               | Pelaksana        | KPPN Gorontalo  |
| 19. | Ricky Malik Kurniawan       | Pelaksana        | KPPN Gorontalo  |
| 20. | Rista Lutfi Irdiana         | Pelaksana        | KPPN Gorontalo  |
| 21. | Venda Mutiara Kansya        | Pelaksana        | KPPN Gorontalo  |
| 22. | Zulius Suratinoyo           | Pelaksana        | KPPN Gorontalo  |

**E. Pelaksanaan Rapat**

**I. Pembukaan**

Kegiatan Dialog Kinerja Organisasi (DKO) merupakan komunikasi formal antara pimpinan pemilik peta strategi dengan pejabat dan pegawai di bawahnya untuk mendiskusikan pencapaian strategi, kinerja, risiko, isu-isu permasalahan dan rencana aksi organisasi yang dilaksanakan secara terstruktur dan berkala sesuai dengan periode pelaksanaannya.

Kegiatan DKO periode s.d Juni tahun 2023 dilaksanakan sebagaimana Nota Dinas Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Gorontalo Nomor ND-266/KPN.2901/2023 tanggal 3 Juli 2023 hal Pelaksanaan DKO Periode s.d. Bulan Juni 2023 dan Rapat UPR KPPN Gorontalo. Rapat dipimpin oleh Bapak Arief Rokhman selaku Kepala Kantor.

## II. Pembahasan

Pada Dialog Kinerja Organisasi kali ini dilakukan evaluasi realisasi capaian IKU, pembahasan isu terkini, permasalahan serta rencana aksi capaian IKU Kemenkeu-Three s.d Juni 2023. Pada Kontrak Kinerja Kemenkeu-Three KPPN 2023 terdapat 18 (Delapan Belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan rincian capaian sebagai berikut:

| No | Nama IKU                                                                       | Target Y23        | Target Q2         | Capaian |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------|
| 1  | Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L                                         | 90                | 90                | 92,38   |
| 2  | Indeks kualitas LK Kuasa BUN KPPN                                              | 3<br>(Skala 4)    | -                 | -       |
| 3  | Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN                                   | 4,66<br>(Skala 5) | 4,66<br>(Skala 5) | 4,76    |
| 4  | Persentase tingkat implementasi standarisasi kompetensi pejabat perbendaharaan | 93%               | 93%               | 98%     |
| 5  | Tingkat efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan               | 89                | 89                | 92,28   |
| 6  | Persentase akurasi perencanaan kas                                             | 80,00%            | 80,00%            | 97,10%  |
| 7  | Tingkat kualitas penyelesaian SP2D                                             | 3<br>(skala 5)    | 3<br>(skala 5)    | 5       |
| 8  | Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah                               | 90                | 90                | 99.38   |
| 9  | Indeks kualitas implementasi <i>Digipay</i>                                    | 3,1<br>(skala 4)  | 3,1<br>(skala 4)  | 4       |
| 10 | Indeks kualitas pelaksanaan rekonsiliasi tingkat UAKPA                         | 3,25<br>(skala 4) | 3,25<br>(skala 4) | 4       |
| 11 | Indeks kualitas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara K/L                       | 3<br>(skala 4)    | 3<br>(skala 4)    | 4       |

|    |                                                                                    |       |       |        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|
| 12 | Tingkat implementasi penajaman tugas <i>Treasury</i> dan <i>Financial Advisory</i> | 80%   | 80%   | 100%   |
| 13 | Tingkat kualitas pengelolaan kinerja berbasis <i>Strategy Focused Organization</i> | 85    | -     | -      |
| 14 | Tingkat implementasi <i>Learning Organization</i>                                  | 85    | 40    | 63.63  |
| 15 | Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal                          | 86    | -     | -      |
| 16 | Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN                                      | 95,5% | 95,5% | 99.20% |
| 17 | Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB                                          | 84    | -     | -      |
| 18 | Persentase kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan                                  | 100%  | -     | -      |

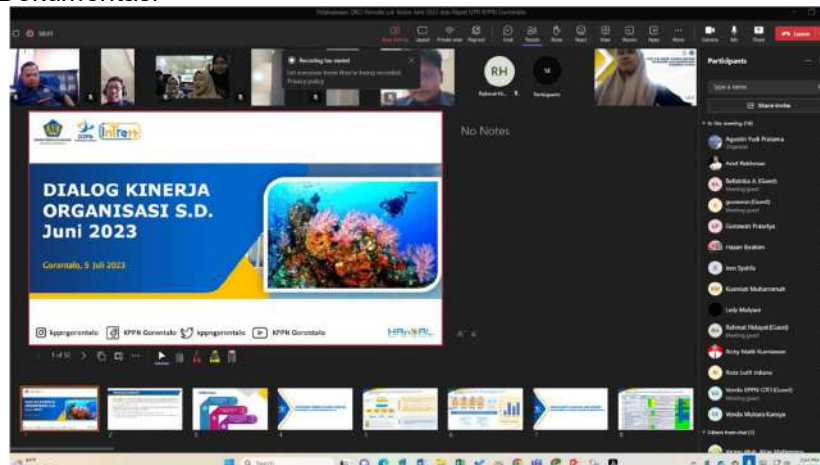
Sampai dengan Juni 2023, dari 18 IKU Kemenkeu-Three di KPPN Gorontalo terdapat 13 IKU yang telah mencapai target dan 5 IKU yang belum ada informasi capaiannya dan/atau belum memasuki periode pelaporan.

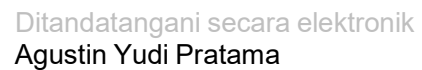
*Current Issue* pada pembahasan DKO kali ini yaitu Kendala pada Aplikasi SIMAN, Perpindahan Server SPAN Pusat, Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, Penyaluran Kartu Kredit Pemerintah, serta Penyelesaian Verifikasi LPJ dan Rekonsiliasi.

### III. Simpulan

Tindak lanjut yang telah diupayakan yaitu melaksanakan FGD penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, melaksanakan realisasi anggaran untuk kegiatan pada seksi teknis, melakukan monitoring penyelesaian SPM melalui OM SPAN untuk memastikan akurasi penyelesaian SPM 1 jam, bekerja sama dengan Bank untuk memperbanyak vendor yang bisa bertransaksi dengan KKP, menyelesaikan proses rekonsiliasi dan verifikasi LPJ Bendahara Satker. Diperlukan kerja sama dari seluruh pegawai KPPN Gorontalo untuk mencapai Nilai Kinerja Organisasi yang maksimal pada periode berikutnya, Dialog Kinerja Organisasi menjadi monitoring dan evaluasi realisasi IKU secara bulanan pada KPPN Gorontalo.

### IV. Dokumentasi







**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**  
**PROVINSI GORONTALO**  
**KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A1**  
**GORONTALO**

Jl. Sudirman No. 58, Kota Gorontalo 96128; TELEPON (0435) 821460; FAKSIMILE (0435) 821192; SUREL  
kppn.gorontalo@gmail.com; LAMAN www.djpb.kemenkeu.go.id/kppn/gorontalo

**NOTULA**  
**PELAKSANAAN DKO PERIODE S.D. BULAN JULI 2023 DAN RAPAT UPR**  
**KPPN GORONTALO**

**A. Dasar**

Nota Dinas Kepala KPPN Gorontalo Nomor ND-324/KPN.2901/2023 tanggal 14 Agustus 2023 hal Pelaksanaan DKO Periode s.d. Bulan Juli 2023 dan Rapat UPR KPPN Gorontalo.

**B. Waktu dan Tempat**

Rapat dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023 pukul 14.00 s.d 16.00 WITA daring melalui *Microsoft Teams* (Meeting ID: 473 252 250 654, Passcode: dkVCbZ)

**C. Agenda**

Pembahasan Capaian IKU dan Rapat UPR periode s.d. Juli 2023, Pembahasan Isu Strategis Terkini, Mitigasi Risiko, dan Inisiatif Strategis, Evaluasi Kepatuhan Internal dan Kinerja, Evaluasi Pengelolaan SDM, Jafung, dan Kerumahtanggaan, Evaluasi Kinerja Anggaran KPPN selaku Satker

**D. Peserta**

| No. | Nama                        | Jabatan          | Unit Organisasi |
|-----|-----------------------------|------------------|-----------------|
| 1.  | Arief Rokhman               | Kepala Kantor    | KPPN Gorontalo  |
| 2.  | Bellatrika Arisnawan        | Kepala Subbagian | KPPN Gorontalo  |
| 3.  | Rahmat Hidayat              | Kepala Seksi     | KPPN Gorontalo  |
| 4.  | Gunawan Prasetya            | Kepala Seksi     | KPPN Gorontalo  |
| 5.  | Galihjati Manggalayudha     | Kepala Seksi     | KPPN Gorontalo  |
| 6.  | Suranto                     | Kepala Seksi     | KPPN Gorontalo  |
| 7.  | Michael Meidi Yohanes Suli  | PTPN Mahir       | KPPN Gorontalo  |
| 8.  | Ersya Roy K. Usman          | PTPN Terampil    | KPPN Gorontalo  |
| 9.  | Vicirio Muh. Altar Mattemmu | Pelaksana        | KPPN Gorontalo  |
| 10. | Aswan Karnain Makmur        | Pelaksana        | KPPN Gorontalo  |
| 11. | Hasan Ibrahim               | Pelaksana        | KPPN Gorontalo  |
| 12. | Kusmiati Muharromah         | Pelaksana        | KPPN Gorontalo  |
| 13. | Dwiana Nur Rahma            | Pelaksana        | KPPN Gorontalo  |
| 14. | Dzikri Angga Elsan Putra    | Pelaksana        | KPPN Gorontalo  |
| 15. | Agustin Yudi Pratama        | Pelaksana        | KPPN Gorontalo  |
| 16. | Iren Syatifa                | Pelaksana        | KPPN Gorontalo  |
| 17. | Leily Mulyani               | Pelaksana        | KPPN Gorontalo  |
| 18. | Ricky Malik Kurniawan       | Pelaksana        | KPPN Gorontalo  |
| 19. | Rista Lutfi Irdiana         | Pelaksana        | KPPN Gorontalo  |
| 20. | Venda Mutiara Kansya        | Pelaksana        | KPPN Gorontalo  |
| 21. | Zulius Suratinoyo           | Pelaksana        | KPPN Gorontalo  |

**E. Pelaksanaan Rapat**

**I. Pembukaan**



Kegiatan Dialog Kinerja Organisasi (DKO) merupakan komunikasi formal antara pimpinan pemilik peta strategi dengan pejabat dan pegawai di bawahnya untuk mendiskusikan pencapaian strategi, kinerja, risiko, isu-isu permasalahan dan rencana aksi organisasi yang dilaksanakan secara terstruktur dan berkala sesuai dengan periode pelaksanaannya.

Kegiatan DKO periode s.d Juli tahun 2023 dilaksanakan sebagaimana Nota Dinas Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Gorontalo Nomor ND-324/KPN.2901/2023 tanggal 14 Agustus 2023 hal Pelaksanaan DKO Periode s.d. Bulan Juli 2023 dan Rapat UPR KPPN Gorontalo. Rapat dipimpin oleh Bapak Arief Rokhman selaku Kepala Kantor.

## II. Pembahasan

Pada Dialog Kinerja Organisasi kali ini dilakukan evaluasi realisasi capaian IKU, pembahasan isu terkini, permasalahan serta rencana aksi capaian IKU Kemenkeu-Three s.d Juli 2023. Pada Kontrak Kinerja Kemenkeu-Three KPPN 2023 terdapat 18 (Delapan Belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan rincian capaian sebagai berikut:

| No | Nama IKU                                                                       | Target Y23        | Target Q2         | Capaian |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------|
| 1  | Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L                                         | 90                | 90                | 93,17   |
| 2  | Indeks kualitas LK Kuasa BUN KPPN                                              | 3<br>(Skala 4)    | -                 | -       |
| 3  | Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN                                   | 4,66<br>(Skala 5) | 4,66<br>(Skala 5) | 4,82    |
| 4  | Persentase tingkat implementasi standarisasi kompetensi pejabat perbendaharaan | 93%               | 93%               | 98%     |
| 5  | Tingkat efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan               | 89                | 89                | 95,59   |
| 6  | Persentase akurasi perencanaan kas                                             | 80,00%            | 80,00%            | 97,10%  |
| 7  | Tingkat kualitas penyelesaian SP2D                                             | 3<br>(skala 5)    | 3<br>(skala 5)    | 5       |
| 8  | Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah                               | 90                | 90                | 99.38   |
| 9  | Indeks kualitas implementasi <i>Digipay</i>                                    | 3,1<br>(skala 4)  | 3,1<br>(skala 4)  | 4       |
| 10 | Indeks kualitas pelaksanaan rekonsiliasi tingkat UAKPA                         | 3,25<br>(skala 4) | 3,25<br>(skala 4) | 4       |
| 11 | Indeks kualitas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara K/L                       | 3<br>(skala 4)    | 3<br>(skala 4)    | 4       |

|    |                                                                                    |       |       |        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|
| 12 | Tingkat implementasi penajaman tugas <i>Treasury</i> dan <i>Financial Advisory</i> | 80%   | 80%   | 100%   |
| 13 | Tingkat kualitas pengelolaan kinerja berbasis <i>Strategy Focused Organization</i> | 85    | -     | -      |
| 14 | Tingkat implementasi <i>Learning Organization</i>                                  | 85    | 40    | 63.63  |
| 15 | Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal                          | 86    | -     | -      |
| 16 | Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN                                      | 95,5% | 95,5% | 97,97% |
| 17 | Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB                                          | 84    | -     | -      |
| 18 | Persentase kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan                                  | 100%  | -     | -      |

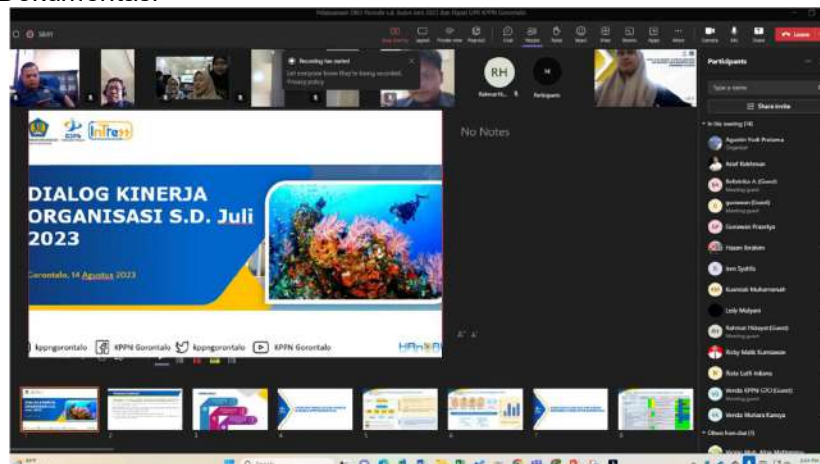
Sampai dengan Juni 2023, dari 18 IKU Kemenkeu-Three di KPPN Gorontalo terdapat 10 IKU yang telah mencapai target dan 8 IKU yang belum ada informasi capaiannya dan/atau belum memasuki periode pelaporan.

*Current Issue* pada pembahasan DKO kali ini yaitu Kendala pada Aplikasi SIMAN, Pencairan Dana Proyek yang dibiayai SBSN, Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, Penilaian Jabfung, serta Penyelesaian Verifikasi LPJ dan Rekonsiliasi.

### III. Simpulan

Tindak lanjut yang telah diupayakan yaitu melaksanakan FGD penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, melakukan koordinasi dengan Bidang PPA I Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo untuk memonitor proyeksi RPD bulanan para satker tersebut khususnya untuk semester II tahun 2023, meningkatkan fungsi check and re-check terhadap proses penyelesaian SPM SBSN diinternal KPPN Gorontalo, melakukan pendampingan terhadap jabfung pada satker serta memberikan layanan konsultasi secara langsung maupun konsultasi online terhadap satker yang membutuhkan, menyelesaikan proses rekonsiliasi dan verifikasi LPJ Bendahara Satker. Diperlukan kerja sama dari seluruh pegawai KPPN Gorontalo untuk mencapai Nilai Kinerja Organisasi yang maksimal pada periode berikutnya, Dialog Kinerja Organisasi menjadi monitoring dan evaluasi realisasi IKU secara bulanan pada KPPN Gorontalo.

### IV. Dokumentasi





Mengetahui,

Kepala Subbagian Umum

Dibuat di Gorontalo  
Pada tanggal 18 Agustus 2023

Notulis



Ditandatangani secara elektronik  
Bellatrika Arisnawan



Ditandatangani secara elektronik  
Agustin Yudi Pratama



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**  
**PROVINSI GORONTALO**  
**KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A1**  
**GORONTALO**

Jl. Sudirman No. 58, Kota Gorontalo 96128; TELEPON (0435) 821460; FAKSIMILE (0435) 821192; SUREL  
kppn.gorontalo@gmail.com; LAMAN www.djpb.kemenkeu.go.id/kppn/gorontalo

**NOTULA**

**PELAKSANAAN KEGIATAN DKO, RAPAT UPR, EVALUASI KEPATUHAN INTERNAL,  
KINERJA, PENGELOLAAN SDM, JAFUNG, KERUMAHTANGGAAN DAN KINERJA  
ANGGARAN KPPN  
KPPN GORONTALO**

**A. Dasar**

Nota Dinas Kepala KPPN Gorontalo Nomor ND-357/KPN.2901/2023 tanggal 8 September 2023 hal Pelaksanaan Kegiatan DKO, Rapat UPR, Evaluasi Kepatuhan Internal, Kinerja, Pengelolaan SDM, Jafung, Kerumahtanggaan dan Kinerja Anggaran KPPN.

**B. Waktu dan Tempat**

Rapat dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 11 September 2023 pukul 14.00 s.d 16.00 WITA daring melalui *Microsoft Teams* (Meeting ID: 473 252 250 654, *Passcode*: dkVCbZ)

**C. Agenda**

Pembahasan Capaian IKU dan Rapat UPR periode s.d. Agustus 2023, Pembahasan Isu Strategis Terkini, Mitigasi Risiko, dan Inisiatif Strategis, Evaluasi Kepatuhan Internal dan Kinerja, Evaluasi Pengelolaan SDM, Jafung, dan Kerumahtanggaan, Evaluasi Kinerja Anggaran KPPN selaku Satker

**D. Peserta**

| No. | Nama                        | Jabatan          | Unit Organisasi |
|-----|-----------------------------|------------------|-----------------|
| 1.  | Arief Rokhman               | Kepala Kantor    | KPPN Gorontalo  |
| 2.  | Bellatrika Arisnawan        | Kepala Subbagian | KPPN Gorontalo  |
| 3.  | Rahmat Hidayat              | Kepala Seksi     | KPPN Gorontalo  |
| 4.  | Gunawan Prasetya            | Kepala Seksi     | KPPN Gorontalo  |
| 5.  | Galihjati Manggalayudha     | Kepala Seksi     | KPPN Gorontalo  |
| 6.  | Suranto                     | Kepala Seksi     | KPPN Gorontalo  |
| 7.  | Michael Meidi Yohanes Suli  | PTPN Mahir       | KPPN Gorontalo  |
| 8.  | Ersya Roy K. Usman          | PTPN Mahir       | KPPN Gorontalo  |
| 9.  | Vicirio Muh. Altar Mattemmu | Pelaksana        | KPPN Gorontalo  |
| 10. | Aswan Karnain Makmur        | Pelaksana        | KPPN Gorontalo  |
| 11. | Hasan Ibrahim               | Pelaksana        | KPPN Gorontalo  |
| 12. | Kusmiati Muharromah         | Pelaksana        | KPPN Gorontalo  |
| 13. | Dwiana Nur Rahma            | Pelaksana        | KPPN Gorontalo  |
| 14. | Dzikri Angga Elsan Putra    | Pelaksana        | KPPN Gorontalo  |
| 15. | Agustin Yudi Pratama        | Pelaksana        | KPPN Gorontalo  |
| 16. | Iren Syatifa                | Pelaksana        | KPPN Gorontalo  |
| 17. | Leily Mulyani               | Pelaksana        | KPPN Gorontalo  |
| 18. | Ricky Malik Kurniawan       | Pelaksana        | KPPN Gorontalo  |
| 19. | Rista Lutfi Irdiana         | Pelaksana        | KPPN Gorontalo  |
| 20. | Venda Mutiara Kansya        | Pelaksana        | KPPN Gorontalo  |
| 21. | Zulius Suratinoyo           | Pelaksana        | KPPN Gorontalo  |

**E. Pelaksanaan Rapat**

**I. Pembukaan**

Kegiatan Dialog Kinerja Organisasi (DKO) merupakan komunikasi formal antara pimpinan pemilik peta strategi dengan pejabat dan pegawai di bawahnya untuk mendiskusikan pencapaian strategi, kinerja, risiko, isu-isu permasalahan dan rencana aksi organisasi yang dilaksanakan secara terstruktur dan berkala sesuai dengan periode pelaksanaannya.

Kegiatan DKO periode s.d Agustus tahun 2023 dilaksanakan sebagaimana Nota Dinas Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Nomor ND-357/KPN.2901/2023 tanggal 8 September 2023 hal Pelaksanaan Kegiatan DKO, Rapat UPR, Evaluasi Kepatuhan Internal, Kinerja, Pengelolaan SDM, Jafung, Kerumahtanggaan dan Kinerja Anggaran KPPN. Rapat dipimpin oleh Bapak Arief Rokhman selaku Kepala Kantor.

## II. Pembahasan

Pada Dialog Kinerja Organisasi kali ini dilakukan evaluasi realisasi capaian IKU, pembahasan isu terkini, permasalahan serta rencana aksi capaian IKU Kemenkeu-Three s.d Agustus 2023. Pada Kontrak Kinerja Kemenkeu-Three KPPN 2023 terdapat 18 (Delapan Belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan rincian capaian sebagai berikut:

| No | Nama IKU                                                                       | Target Y23        | Target Q3         | Capaian |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------|
| 1  | Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L                                         | 90                | 90                | 93,17   |
| 2  | Indeks kualitas LK Kuasa BUN KPPN                                              | 3<br>(Skala 4)    | -                 | -       |
| 3  | Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN                                   | 4,66<br>(Skala 5) | -                 | -       |
| 4  | Persentase tingkat implementasi standarisasi kompetensi pejabat perbendaharaan | 93%               | -                 | -       |
| 5  | Tingkat efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan               | 89                | -                 | -       |
| 6  | Persentase akurasi perencanaan kas                                             | 80,00%            | 80,00%            | 97,10%  |
| 7  | Tingkat kualitas penyelesaian SP2D                                             | 3<br>(skala 5)    | 3<br>(skala 5)    | 5       |
| 8  | Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah                               | 90                | 90                | 99.38   |
| 9  | Indeks kualitas implementasi <i>Digipay</i>                                    | 3,1<br>(skala 4)  | 3,1<br>(skala 4)  | 4       |
| 10 | Indeks kualitas pelaksanaan rekonsiliasi tingkat UAKPA                         | 3,25<br>(skala 4) | 3,25<br>(skala 4) | 4       |
| 11 | Indeks kualitas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara K/L                       | 3<br>(skala 4)    | 3<br>(skala 4)    | 4       |

|    |                                                                                    |       |       |        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|
| 12 | Tingkat implementasi penajaman tugas <i>Treasury</i> dan <i>Financial Advisory</i> | 80%   | 80%   | 100%   |
| 13 | Tingkat kualitas pengelolaan kinerja berbasis <i>Strategy Focused Organization</i> | 85    | -     | -      |
| 14 | Tingkat implementasi <i>Learning Organization</i>                                  | 85    | 40    | 85.75  |
| 15 | Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal                          | 86    | -     | -      |
| 16 | Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN                                      | 95,5% | 95,5% | 97,97% |
| 17 | Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB                                          | 84    | -     | -      |
| 18 | Persentase kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan                                  | 100%  | -     | -      |

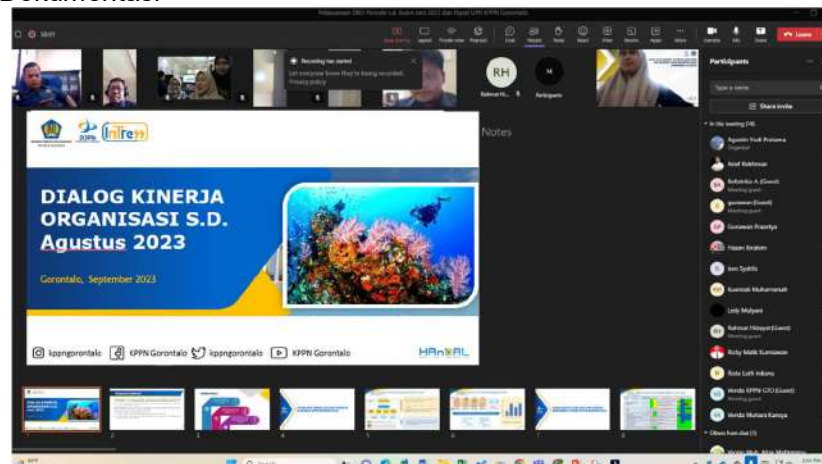
Sampai dengan Agustus 2023, dari 18 IKU Kemenkeu-Three di KPPN Gorontalo terdapat 10 IKU yang telah mencapai target dan 8 IKU yang belum ada informasi capaiannya dan/atau belum memasuki periode pelaporan.

*Current Issue* pada pembahasan DKO kali ini yaitu Kendala pada Aplikasi SIMAN, Pencairan Dana Proyek yang dibiayai SBSN, Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, Penilaian Jabfung, serta Penyelesaian Verifikasi LPJ dan Rekonsiliasi.

### III. Simpulan

Tindak lanjut yang telah diupayakan yaitu melaksanakan FGD penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, melakukan koordinasi dengan Bidang PPA I Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo untuk memonitor proyeksi RPD bulanan para satker tersebut khususnya untuk semester II tahun 2023, meningkatkan fungsi check and re-check terhadap proses penyelesaian SPM SBSN diinternal KPPN Gorontalo, melakukan pendampingan terhadap jabfung pada satker serta memberikan layanan konsultasi secara langsung maupun konsultasi online terhadap satker yang membutuhkan, menyelesaikan proses rekonsiliasi dan verifikasi LPJ Bendahara Satker. Diperlukan kerja sama dari seluruh pegawai KPPN Gorontalo untuk mencapai Nilai Kinerja Organisasi yang maksimal pada periode berikutnya, Dialog Kinerja Organisasi menjadi monitoring dan evaluasi realisasi IKU secara bulanan pada KPPN Gorontalo.

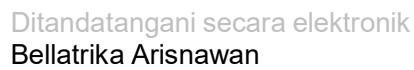
### IV. Dokumentasi



Mengetahui,

Dibuat di Gorontalo  
Pada tanggal 22 September 2023

## Notulis





**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**  
**PROVINSI GORONTALO**  
**KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A1**  
**GORONTALO**

Jl. Sudirman No. 58, Kota Gorontalo 96128; TELEPON (0435) 821460; FAKSIMILE (0435) 821192; SUREL  
kppn.gorontalo@gmail.com; LAMAN www.djpb.kemenkeu.go.id/kppn/gorontalo

**NOTULA**

**PELAKSANAAN DKO S.D. PERIODE BULAN TRIWULAN III 2023 SERTA RAPAT UPR,  
EVALUASI KEPATUHAN INTERNAL, KINERJA, PENGELOLAAN SDM, JAFUNG,  
KERUMAHTANGGAAN DAN KINERJA  
KPPN GORONTALO**

**A. Dasar**

Nota Dinas Kepala KPPN Gorontalo Nomor ND-381/KPN.2901/2023 tanggal 3 Oktober 2023 hal Pelaksanaan DKO s.d. periode bulan Triwulan III 2023 serta Rapat UPR, Evaluasi Kepatuhan Internal, Kinerja, Pengelolaan SDM, Jafung, Kerumahtanggaan dan Kinerja KPPN.

**B. Waktu dan Tempat**

Rapat dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 6 Oktober 2023 pukul 14.00 s.d 16.00 WITA bertempat di Aula KPPN Gorontalo.

**C. Agenda**

Pembahasan Capaian IKU dan Rapat UPR periode s.d. September 2023, Pembahasan Isu Strategis Terkini, Mitigasi Risiko, dan Inisiatif Strategis, Evaluasi Kepatuhan Internal dan Kinerja, Evaluasi Pengelolaan SDM, Jafung, dan Kerumahtanggaan, Evaluasi Kinerja Anggaran KPPN selaku Satker

**D. Peserta**

| No. | Nama                        | Jabatan          | Unit Organisasi |
|-----|-----------------------------|------------------|-----------------|
| 1.  | Arief Rokhman               | Kepala Kantor    | KPPN Gorontalo  |
| 2.  | Bellatrika Arisnawan        | Kepala Subbagian | KPPN Gorontalo  |
| 3.  | Rahmat Hidayat              | Kepala Seksi     | KPPN Gorontalo  |
| 4.  | Gunawan Prasetya            | Kepala Seksi     | KPPN Gorontalo  |
| 5.  | Galihjati Manggalayudha     | Kepala Seksi     | KPPN Gorontalo  |
| 6.  | Suranto                     | Kepala Seksi     | KPPN Gorontalo  |
| 7.  | Michael Meidi Yohanes Suli  | PTPN Mahir       | KPPN Gorontalo  |
| 8.  | Ersya Roy K. Usman          | PTPN Mahir       | KPPN Gorontalo  |
| 9.  | Vicirio Muh. Altar Mattemmu | Pelaksana        | KPPN Gorontalo  |
| 10. | Aswan Karnain Makmur        | Pelaksana        | KPPN Gorontalo  |
| 11. | Hasan Ibrahim               | Pelaksana        | KPPN Gorontalo  |
| 12. | Kusmiati Muharromah         | Pelaksana        | KPPN Gorontalo  |
| 13. | Dwiana Nur Rahma            | Pelaksana        | KPPN Gorontalo  |
| 14. | Dzikri Angga Elsan Putra    | Pelaksana        | KPPN Gorontalo  |
| 15. | Agustin Yudi Pratama        | Pelaksana        | KPPN Gorontalo  |
| 16. | Iren Syatifa                | Pelaksana        | KPPN Gorontalo  |
| 17. | Leily Mulyani               | Pelaksana        | KPPN Gorontalo  |
| 18. | Ricky Malik Kurniawan       | Pelaksana        | KPPN Gorontalo  |
| 19. | Rista Lutfi Irdiana         | Pelaksana        | KPPN Gorontalo  |
| 20. | Venda Mutiara Kansya        | Pelaksana        | KPPN Gorontalo  |
| 21. | Zulius Suratinoyo           | Pelaksana        | KPPN Gorontalo  |

**E. Pelaksanaan Rapat**

**I. Pembukaan**



Kegiatan Dialog Kinerja Organisasi (DKO) merupakan komunikasi formal antara pimpinan pemilik peta strategi dengan pejabat dan pegawai di bawahnya untuk mendiskusikan pencapaian strategi, kinerja, risiko, isu-isu permasalahan dan rencana aksi organisasi yang dilaksanakan secara terstruktur dan berkala sesuai dengan periode pelaksanaannya.

Kegiatan DKO periode s.d September tahun 2023 dilaksanakan sebagaimana Nota Dinas Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Nomor ND-381/KPN.2901/2023 tanggal 3 Oktober 2023 hal Pelaksanaan DKO s.d. periode bulan Triwulan III 2023 serta Rapat UPR, Evaluasi Kepatuhan Internal, Kinerja, Pengelolaan SDM, Jafung, Kerumahtanggaan dan Kinerja KPPN. Rapat dipimpin oleh Bapak Arief Rokhman selaku Kepala Kantor.

## II. Pembahasan

Pada Dialog Kinerja Organisasi kali ini dilakukan evaluasi realisasi capaian IKU, pembahasan isu terkini, permasalahan serta rencana aksi capaian IKU Kemenkeu-Three s.d September 2023. Pada Kontrak Kinerja Kemenkeu-Three KPPN 2023 terdapat 18 (Delapan Belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan rincian capaian sebagai berikut:

| No | Nama IKU                                                                       | Target Y23        | Target Q3         | Capaian |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------|
| 1  | Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L                                         | 90                | 90                | 93,36   |
| 2  | Indeks kualitas LK Kuasa BUN KPPN                                              | 3<br>(Skala 4)    | -                 | -       |
| 3  | Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN                                   | 4,66<br>(Skala 5) | -                 | -       |
| 4  | Persentase tingkat implementasi standarisasi kompetensi pejabat perbendaharaan | 93%               | -                 | -       |
| 5  | Tingkat efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan               | 89                | -                 | -       |
| 6  | Persentase akurasi perencanaan kas                                             | 80,00%            | 80,00%            | 95,92%  |
| 7  | Tingkat kualitas penyelesaian SP2D                                             | 3<br>(skala 5)    | 3<br>(skala 5)    | 5       |
| 8  | Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah                               | 90                | 90                | 99.38   |
| 9  | Indeks kualitas implementasi <i>Digipay</i>                                    | 3,1<br>(skala 4)  | 3,1<br>(skala 4)  | 4       |
| 10 | Indeks kualitas pelaksanaan rekonsiliasi tingkat UAKPA                         | 3,25<br>(skala 4) | 3,25<br>(skala 4) | 4       |
| 11 | Indeks kualitas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara K/L                       | 3<br>(skala 4)    | 3<br>(skala 4)    | 4       |

|    |                                                                                    |       |       |        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|
| 12 | Tingkat implementasi penajaman tugas <i>Treasury</i> dan <i>Financial Advisory</i> | 80%   | 80%   | 100%   |
| 13 | Tingkat kualitas pengelolaan kinerja berbasis <i>Strategy Focused Organization</i> | 85    | -     | -      |
| 14 | Tingkat implementasi <i>Learning Organization</i>                                  | 85    | 40    | 95.75  |
| 15 | Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal                          | 86    | -     | -      |
| 16 | Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN                                      | 95,5% | 95,5% | 99.98% |
| 17 | Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB                                          | 84    | -     | -      |
| 18 | Persentase kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan                                  | 100%  | -     | -      |

Sampai dengan September 2023, dari 18 IKU Kemenkeu-Three di KPPN Gorontalo terdapat 10 IKU yang telah mencapai target dan 8 IKU yang belum ada informasi capaiannya dan/atau belum memasuki periode pelaporan.

*Current Issue* pada pembahasan DKO kali ini yaitu Implementasi Treasury dan Financial Advisory, Persiapan Langkah-Langkah Akhir Tahun, Pemenuhan Syarat DAK FISIK Tahap II, Pencapaian Nilai IKPA, serta Penyelesaian Verifikasi LPJ dan Rekonsiliasi.

### III. Simpulan

Tindak lanjut yang telah diupayakan yaitu Menyelesaikan pemenuhan tugas pada Implementasi Trefa sesuai petunjuk, berkoordinasi dengan STA Kanwil dan Direktorat SITP untuk memitigasi potensi risiko permasalahan pada Tanda Tangan Elektronik yg mengakibatkan satker tidak bisa mengirimkan SPM melalui SAKTI, mengadakan FGD penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melalui aplikasi ZOOM/Teams, Bersama dengan kanwil memberikan layanan terkait pencapaian indikator-indikator IKPA atau permasalahan yang timbul terkait pencapaian IKPA. Diperlukan kerja sama dari seluruh pegawai KPPN Gorontalo untuk mencapai Nilai Kinerja Organisasi yang maksimal pada periode berikutnya, Dialog Kinerja Organisasi menjadi monitoring dan evaluasi realisasi IKU secara bulanan pada KPPN Gorontalo.

### IV. Dokumentasi





Mengetahui,

Kepala Subbagian Umum

Dibuat di Gorontalo  
Pada tanggal 12 Oktober 2023

Notulis



Ditandatangani secara elektronik  
Bellatrika Arisnawan



Ditandatangani secara elektronik  
Agustin Yudi Pratama

**NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO)**  
**KPPN Gorontalo**  
**Periode s.d. Bulan Desember Tahun 2023**

| Kode SS/IKU                                                                      | Sasaran Strategis/IKU                                                           | Target | Realisasi | Pol      | V/C*           | Bobot  | Bobot Tertimbang | Indeks Capaian IKU/NSS/Np |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------|----------------|--------|------------------|---------------------------|
| Stakeholder (30.00)                                                              |                                                                                 |        |           |          |                |        |                  | <b>112.78</b>             |
| Perbendaharaan Negara yang optimal dan akuntabel                                 |                                                                                 |        |           |          |                |        |                  | 112.78                    |
| 1a-CP                                                                            | Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L                                          | 90.00  | 95.00     | Maximize | Proxy Moderate | 14.00% | 50.00%           | 105.56                    |
| 1b-N                                                                             | Indeks Kualitas LK Kuasa BUN KPPN                                               | 3.00   | 4.00      | Maximize | Proxy Moderate | 14.00% | 50.00%           | 120.00                    |
| Customer (20.00)                                                                 |                                                                                 |        |           |          |                |        |                  | <b>103.76</b>             |
| Dukungan manajemen yang efektif                                                  |                                                                                 |        |           |          |                |        |                  | 103.76                    |
| 2a-N                                                                             | Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN                                    | 4.66   | 4.84      | Maximize | Proxy Moderate | 14.00% | 100.00%          | 103.76                    |
| Internal Process (25.00)                                                         |                                                                                 |        |           |          |                |        |                  | <b>115.15</b>             |
| Komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang berkesinambungan                     |                                                                                 |        |           |          |                |        |                  | 105.32                    |
| 3a-N                                                                             | Persentase tingkat implementasi standardisasi kompetensi pejabat perbendaharaan | 93.00  | 95.00     | Maximize | Proxy Moderate | 14.00% | 50.00%           | 102.15                    |
| 3b-N                                                                             | Tingkat efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan                | 89.00  | 96.55     | Maximize | Proxy Moderate | 14.00% | 50.00%           | 108.48                    |
| Pengelolaan pengeluaran negara yang prudent, efektif dan efisien                 |                                                                                 |        |           |          |                |        |                  | 120.00                    |
| 4a-CP                                                                            | Persentase akurasi perencanaan kas                                              | 80.00  | 97.97     | Maximize | Proxy Moderate | 14.00% | 50.00%           | 120.00                    |
| 4b-N                                                                             | Tingkat kualitas penyelesaian SP2D                                              | 3.00   | 5.00      | Maximize | Proxy Moderate | 14.00% | 50.00%           | 120.00                    |
| Pelaksanaan anggaran yang optimal                                                |                                                                                 |        |           |          |                |        |                  | 115.28                    |
| 5a-CP                                                                            | Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa                  | 90.00  | 99.51     | Maximize | Proxy Moderate | 14.00% | 50.00%           | 110.56                    |
| 5b-N                                                                             | Indeks kualitas Implementasi Digipay                                            | 3.10   | 4.00      | Maximize | Proxy Moderate | 14.00% | 50.00%           | 120.00                    |
| Pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan dan akuntabel                 |                                                                                 |        |           |          |                |        |                  | 120.00                    |
| 6a-CP                                                                            | Indeks Kualitas Pelaksanaan Rekonsiliasi tingkat UAKPA                          | 3.25   | 4.00      | Maximize | Proxy Moderate | 14.00% | 50.00%           | 120.00                    |
| 6b-N                                                                             | Indeks kualitas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara K/L                        | 3.00   | 4.00      | Maximize | Proxy Moderate | 14.00% | 50.00%           | 120.00                    |
| Learning and Growth (25.00)                                                      |                                                                                 |        |           |          |                |        |                  | <b>113.82</b>             |
| Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif |                                                                                 |        |           |          |                |        |                  | 120.00                    |
| 7a-CP                                                                            | Tingkat implementasi penajaman tugas Treasury dan Financial Advisory            | 80.00  | 99.72     | Maximize | Proxy Moderate | 14.00% | 100.00%          | 120.00                    |
| Organisasi dan SDM yang unggul dan adaptif                                       |                                                                                 |        |           |          |                |        |                  | 109.59                    |
| 8b-N                                                                             | Tingkat Implementasi Learning Organization                                      | 85.00  | 100.00    | Maximize | Proxy Moderate | 14.00% | 33.33%           | 117.65                    |
| 8a-N                                                                             | Tingkat kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization     | 85.00  | 89.26     | Maximize | Proxy Moderate | 14.00% | 33.33%           | 105.01                    |
| 8c-N                                                                             | Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal                       | 86.00  | 91.28     | Maximize | Proxy Moderate | 14.00% | 33.33%           | 106.14                    |
| Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang andal                                |                                                                                 |        |           |          |                |        |                  | 111.87                    |
| 9a-CP                                                                            | Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN                                   | 95.50  | 96.79     | Maximize | Proxy Moderate | 14.00% | 33.33%           | 101.35                    |
| 9b-N                                                                             | Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB                                       | 84.00  | 96.00     | Maximize | Proxy Moderate | 14.00% | 33.33%           | 114.29                    |
| 9c-N                                                                             | Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan                               | 100.00 | 120.00    | Maximize | Proxy Moderate | 14.00% | 33.33%           | 120.00                    |
| <b>NILAI KINERJA ORGANISASI</b>                                                  |                                                                                 |        |           |          |                |        |                  | <b>111.83</b>             |

Tanggal pembuatan 17-01-2024 10:26:06

Gorontalo, 29-12-2023  
Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara  
Gorontalo

Ditandatangani secara digital

Arief Rokhman, S.E., M.M.  
NIP. 197112181992011001

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB  
UNIT ORG  
UNIT KERJA  
ALOKASI

(015)  
(08)  
(528281)  
Rp. 1,947,824,000

KEMENTERIAN KEUANGAN  
Ditjen Perbendaharaan  
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA GORONTALO

| KODE         | PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/<br>SUBKOMP/ DETIL         | PERHITUNGAN TAHUN 2024              |              |              | SD/<br>CP |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|-----------|
|              |                                                                 | VOLUME                              | HARGA SATUAN | JUMLAH BIAYA |           |
| (1)          | (2)                                                             | (3)                                 | (4)          | (5)          | (6)       |
| 015.08.CD    | Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko  |                                     |              | 202,080,000  |           |
| 4803         | Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko               |                                     |              | 5,044,000    |           |
| 4803.FAE     | Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan[Base Line]              | 2.0 Laporan, Rekomendasi            |              | 5,044,000    |           |
| -----        |                                                                 |                                     |              |              |           |
|              | Lokasi : KOTA GORONTALO                                         |                                     |              |              |           |
| 4803.FAE.001 | Rekomendasi atas Kinerja Investasi Pemerintah                   | 2.0 Rekomendasi                     |              | 5,044,000    |           |
| 100          | Tidak ada komponen                                              |                                     |              | 5,044,000    | U         |
| A            | TANPA SUB KOMPONEN                                              |                                     |              | 4,894,000    |           |
| 524111       | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                  |                                     |              | 3,694,000    | RM        |
|              | (KPPN.050-Gorontalo )                                           |                                     |              |              |           |
|              | - Transport [1 KAB x 2 ORG x 1 KL]                              | 2.0 OK                              | 300,000      | 600,000      |           |
|              | - Akomodasi [1 KAB x 2 ORG x 1 KL x 1 HR                        | 2.0 OH                              | 955,000      | 1,910,000    |           |
|              | - Uang Harian [1 KAB x 2 ORG x 2 KL x 1 HR                      | 4.0 OH                              | 296,000      | 1,184,000    |           |
| 524113       | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                             |                                     |              | 1,200,000    | RM        |
|              | (KPPN.050-Gorontalo )                                           |                                     |              |              |           |
|              | - Transport Lokal [2 ORG x 2 HR x 2 KL]                         | 8.0 OK                              | 150,000      | 1,200,000    |           |
| B            | BimtekMou Pelaksanaan KUR di Kanwil (Cross Program)             |                                     |              | 150,000      |           |
| 524113       | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                             |                                     |              | 150,000      | RM        |
|              | (KPPN.050-Gorontalo )                                           |                                     |              |              |           |
|              | - Transport Lokal [1 ORG x 1 HR x 1 KL]                         | 1.0 OK                              | 150,000      | 150,000      |           |
| 6212         | Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi                          |                                     |              | 172,988,000  |           |
| 6212.FAC     | Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara[Base Line]                | 225.0 Orang, KL, Daerah, Unit Kerja |              | 37,040,000   |           |
| -----        |                                                                 |                                     |              |              |           |
|              | Lokasi : KOTA GORONTALO                                         |                                     |              |              |           |
| 6212.FAC.001 | Komunikasi dan Edukasi Implementasi Aplikasi                    | 225.0 Unit Kerja                    |              | 37,040,000   |           |
| 100          | Tidak Ada Komponen                                              |                                     |              | 37,040,000   | U         |
| A            | Training Modul Aplikasi SAKTI                                   |                                     |              | 27,880,000   |           |
| 521211       | Belanja Bahan                                                   |                                     |              | 27,880,000   | RM        |
|              | (KPPN.050-Gorontalo )                                           |                                     |              |              |           |
|              | - Konsumsi Peserta Satker [220 SATKR x 1 ORG x 2 MODUL x 1 FREK | 440.0 OK                            | 60,000       | 26,400,000   |           |
|              | - Konsumsi Panitia [4 ORG x 2 MODUL]                            | 8.0 OK                              | 60,000       | 480,000      |           |
|              | - Spanduk, Banner, Pencetakan                                   | 1.0 PKT                             | 1,000,000    | 1,000,000    |           |
| B            | FGD dan Bimtek Transfer Keuangan Daerah                         |                                     |              | 9,160,000    |           |
| 521211       | Belanja Bahan                                                   |                                     |              | 9,160,000    | RM        |
|              | (KPPN.050-Gorontalo )                                           |                                     |              |              |           |
|              | - Konsumsi Peserta Pemda [5 PEMDA x 6 BIDG x 1 ORG x 4 FREK     | 120.0 OK                            | 60,000       | 7,200,000    |           |
|              | - Konsumsi Panitia [4 ORG x 4 FREK]                             | 16.0 OK                             | 60,000       | 960,000      |           |
|              | - Spanduk, Banner, Pencetakan                                   | 1.0 PKT                             | 1,000,000    | 1,000,000    |           |
| 6212.FAH     | Pengelolaan Keuangan Negara[Base Line]                          | 4.0 Laporan                         |              | 58,240,000   |           |
| -----        |                                                                 |                                     |              |              |           |
|              | Lokasi : KOTA GORONTALO                                         |                                     |              |              |           |
| 6212.FAH.001 | Edukasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan                | 4.0 Laporan                         |              | 58,240,000   |           |

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB  
UNIT ORG  
UNIT KERJA  
ALOKASI

(015)  
(08)  
(528281)  
Rp. 1,947,824,000

KEMENTERIAN KEUANGAN  
Ditjen Perbendaharaan  
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA GORONTALO

| KODE         | PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/<br>SUBKOMP/ DETIL    | PERHITUNGAN TAHUN 2024 |              |              | SD/<br>CP |
|--------------|------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|--------------|-----------|
|              |                                                            | VOLUME                 | HARGA SATUAN | JUMLAH BIAYA |           |
| (1)          | (2)                                                        | (3)                    | (4)          | (5)          | (6)       |
| 6212.FAH.001 | Tingkat Kuasa BUN                                          | 4.0 Laporan            |              |              |           |
| 100          | Tidak ada komponen                                         |                        |              | 58,240,000   | U         |
| A            | TANPA SUB KOMPONEN                                         |                        |              | 58,240,000   |           |
| 521211       | Belanja Bahan                                              |                        |              | 58,240,000   | RM        |
|              | (KPPN.050-Gorontalo )                                      |                        |              |              |           |
|              | - Konsumsi Peserta Satker [220 SATKR x 2 ORG x 2 KEG]      | 880.0 OK               | 60,000       | 52,800,000   |           |
|              | - Konsumsi Narasumber dan Panitia [12 ORG x 2 KEG]         | 24.0 OK                | 60,000       | 1,440,000    |           |
|              | - ATK dan Bahan Habis Pakai                                | 2.0 KEG                | 2,000,000    | 4,000,000    |           |
| 6212.FAL     | Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran dan Pembiayaan[Base Line] | 10.0 Dokumen, Kegiatan |              | 77,708,000   |           |
| -----        |                                                            |                        |              |              |           |
| 6212.FAL.004 | Konsultasi Pencairan Dana                                  | 10.0 Kegiatan          |              | 77,708,000   |           |
| 100          | Tidak ada komponen                                         |                        |              | 77,708,000   | U         |
| A            | Konsultasi                                                 |                        |              | 8,040,000    |           |
| 521211       | Belanja Bahan                                              |                        |              | 8,040,000    | RM        |
|              | (KPPN.050-Gorontalo )                                      |                        |              |              |           |
|              | - Konsumsi Peserta Pemda [5 PEMDA x 3 ORG x 2 KEG]         | 30.0 OK                | 60,000       | 1,800,000    |           |
|              | - Konsumsi Peserta LKBB [3 LKBB x 1 ORG x 2 KEG]           | 6.0 OK                 | 60,000       | 360,000      |           |
|              | - Konsumsi Peserta Bank Pos [24 BANK x 2 ORG x 1 KEG]      | 48.0 OK                | 60,000       | 2,880,000    |           |
|              | - Konsumsi Peserta KPPN [10 ORG x 5 KEG]                   | 50.0 OK                | 60,000       | 3,000,000    |           |
| B            | Sosialisasi dan Bimbingan Teknis                           |                        |              | 29,120,000   |           |
| 521211       | Belanja Bahan                                              |                        |              | 29,120,000   | RM        |
|              | (KPPN.050-Gorontalo )                                      |                        |              |              |           |
|              | - Konsumsi Peserta Satker [220 SATKR x 2 ORG x 1 KEG]      | 440.0 OK               | 60,000       | 26,400,000   |           |
|              | - Konsumsi Narasumber dan Panitia [12 ORG x 1 KEG]         | 12.0 OK                | 60,000       | 720,000      |           |
|              | - ATK dan Bahan Habis Pakai                                | 1.0 KEG                | 2,000,000    | 2,000,000    |           |
| C            | Pembinaan Satker                                           |                        |              | 8,596,000    |           |
| 524111       | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                             |                        |              | 6,196,000    | RM        |
|              | (KPPN.050-Gorontalo )                                      |                        |              |              |           |
|              | - Transport [1 KAB x 2 ORG]                                | 2.0 OK                 | 300,000      | 600,000      |           |
|              | - Akomodasi [1 KAB x 2 ORG x 2 HR]                         | 4.0 OH                 | 955,000      | 3,820,000    |           |
|              | - Uang Harian [1 KAB x 2 ORG x 3 HR]                       | 6.0 OH                 | 296,000      | 1,776,000    |           |
| 524113       | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                        |                        |              | 2,400,000    | RM        |
|              | (KPPN.050-Gorontalo )                                      |                        |              |              |           |
|              | - Transport Lokal [4 KL x 2 ORG x 2 HR]                    | 16.0 OK                | 150,000      | 2,400,000    |           |
| D            | Pembinaan Pemda, TKD, dan Penandatanganan BAR              |                        |              | 31,952,000   |           |

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB  
UNIT ORG  
UNIT KERJA  
ALOKASI

(015)  
(08)  
(528281)  
Rp. 1,947,824,000

KEMENTERIAN KEUANGAN  
Ditjen Perbendaharaan  
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA GORONTALO

| KODE         | PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/<br>SUBKOMP/ DETIL                                                                                                                                 | PERHITUNGAN TAHUN 2024                |                               |                                                    | SD/<br>CP |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|
|              |                                                                                                                                                                                         | VOLUME                                | HARGA SATUAN                  | JUMLAH BIAYA                                       |           |
| (1)          | (2)                                                                                                                                                                                     | (3)                                   | (4)                           | (5)                                                | (6)       |
| 524111       | Belanja Perjalanan Dinas Biasa<br>(KPPN.050-Gorontalo )<br>- Transport [4 KAB x 2 ORG x 2 KL]<br>- Akomodasi [4 KAB x 2 ORG x 2 KL x 1 HR<br>- Uang Harian [4 KAB x 2 ORG x 2 KL x 2 HR | 16.0 OK<br>16.0 OH<br>32.0 OH         | 300,000<br>955,000<br>296,000 | 29,552,000<br>4,800,000<br>15,280,000<br>9,472,000 | RM        |
| 524113       | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota<br>(KPPN.050-Gorontalo )<br>- Transport Lokal [4 KL x 2 ORG x 2 HR]                                                                                 | 16.0 OK                               | 150,000                       | 2,400,000                                          |           |
| 6213         | Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko                                                                                                                                       |                                       |                               | 14,948,000                                         |           |
| 6213.FAC     | Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara[Base Line]                                                                                                                                        | 10.0 Orang, KL,<br>Daerah, Unit Kerja |                               | 2,760,000                                          |           |
| -----        |                                                                                                                                                                                         |                                       |                               |                                                    |           |
| 6213.FAC.001 | Lokasi : KOTA GORONTALO<br>Monev Pengembangan Kompetensi KPA, PPK, PPSPM, Bendahara dan Pengelola Perbendaharaan                                                                        | 10.0 Orang                            |                               | 2,760,000                                          | U         |
| 100          | Tidak ada komponen                                                                                                                                                                      |                                       |                               | 2,760,000                                          |           |
| A            | Pembinaan Jabatan Fungsional Perbendaharaan                                                                                                                                             |                                       |                               | 2,760,000                                          |           |
| 521211       | Belanja Bahan<br>(KPPN.050-Gorontalo )<br>- Konsumsi Peserta [15 ORG x 2 KL]<br>- Konsumsi Panitia [3 ORG x 2 KL]                                                                       | 30.0 OK<br>6.0 OK                     | 60,000<br>60,000              | 2,160,000<br>1,800,000<br>360,000                  | RM        |
| 524113       | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota<br>(KPPN.050-Gorontalo )<br>- Transport Lokal [2 ORG x 2 KL]                                                                                        | 4.0 OK                                | 150,000                       | 600,000                                            | RM        |
| 6213.FAL     | Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran dan Pembiayaan[Base Line]                                                                                                                              | 2.0 Dokumen, Kegiatan                 |                               | 12,188,000                                         |           |
| -----        |                                                                                                                                                                                         |                                       |                               |                                                    |           |
| 6213.FAL.001 | Lokasi : KOTA GORONTALO<br>Monev Penerimaan dan Pengeluaran Kas                                                                                                                         | 1.0 Kegiatan                          |                               | 6,094,000                                          | U         |
| 100          | Tidak Ada Komponen                                                                                                                                                                      |                                       |                               | 6,094,000                                          |           |
| A            | Monev Bank/Pos                                                                                                                                                                          |                                       |                               | 6,094,000                                          |           |
| 524111       | Belanja Perjalanan Dinas Biasa<br>(KPPN.050-Gorontalo )<br>- Transport [1 KAB x 2 ORG]<br>- Akomodasi [1 KAB x 2 ORG x 1 HR]<br>- Uang Harian [1 KAB x 2 ORG x 2 HR]                    | 2.0 OK<br>2.0 OH<br>4.0 OH            | 300,000<br>955,000<br>296,000 | 3,694,000<br>600,000<br>1,910,000<br>1,184,000     | RM        |
| 524113       | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota<br>(KPPN.050-Gorontalo )<br>- Transport Lokal [4 KL x 2 ORG x 2 HR]                                                                                 | 16.0 OK                               | 150,000                       | 2,400,000                                          | RM        |
| 6213.FAL.003 | Reviu Belanja Pemerintah                                                                                                                                                                | 1.0 Dokumen                           |                               | 6,094,000                                          | U         |
| 100          | Tidak ada komponen                                                                                                                                                                      |                                       |                               | 6,094,000                                          |           |
| A            | Monev Pelaksanaan Anggaran                                                                                                                                                              |                                       |                               | 6,094,000                                          |           |



RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB  
UNIT ORG  
UNIT KERJA  
ALOKASI

(015)  
(08)  
(528281)  
Rp. 1,947,824,000

KEMENTERIAN KEUANGAN  
Ditjen Perbendaharaan  
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA GORONTALO

| KODE         | PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/<br>SUBKOMP/ DETIL                                                                                                                                            | PERHITUNGAN TAHUN 2024                   |                                        |                                                | SD/<br>CP |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|
|              |                                                                                                                                                                                                    | VOLUME                                   | HARGA SATUAN                           | JUMLAH BIAYA                                   |           |
| (1)          | (2)                                                                                                                                                                                                | (3)                                      | (4)                                    | (5)                                            | (6)       |
| 524111       | Belanja Perjalanan Dinas Biasa<br>(KPPN.050-Gorontalo )<br>- Transport [1 KAB x 2 ORG]<br>- Akomodasi [1 KAB x 2 ORG x 1 HR]<br>- Uang Harian [1 KAB x 2 ORG x 2 HR]                               | 2.0 OK<br>2.0 OH<br>4.0 OH               | 300,000<br>955,000<br>296,000          | 3,694,000<br>600,000<br>1,910,000<br>1,184,000 | RM        |
| 524113       | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota<br>(KPPN.050-Gorontalo )<br>- Transport Lokal [4 KL x 2 ORG x 2 HR]                                                                                            | 16.0 OK                                  | 150,000                                | 2,400,000                                      | RM        |
| 6214         | Pengelolaan Kas dan Pembiayaan Negara                                                                                                                                                              |                                          |                                        | 6,800,000                                      |           |
| 6214.FAL     | Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran dan Pembiayaan[Base Line]                                                                                                                                         | 5281.0 Dokumen, Kegiatan                 |                                        | 6,800,000                                      |           |
| 6214.FAL.001 | Lokasi : KOTA GORONTALO<br>Koordinasi dan Rekonsiliasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas                                                                                                              | 1.0 Dokumen                              |                                        | 2,800,000                                      |           |
| 100          | Tidak ada komponen                                                                                                                                                                                 |                                          |                                        | 2,800,000                                      | U         |
| A            | Rekonsiliasi Pajak Pusat                                                                                                                                                                           |                                          |                                        | 2,800,000                                      |           |
| 521211       | Belanja Bahan<br>(KPPN.050-Gorontalo )<br>- Konsumsi Peserta Rapat Rekonsiliasi Pajak Pusat [5 PEMDA x 2 ORG x 2 KL]<br>- Konsumsi Panitia [5 ORG x 2 KL]<br>- ATK<br>- Pencetakan dan Penggandaan | 20.0 OK<br>10.0 OK<br>1.0 THN<br>1.0 THN | 60,000<br>60,000<br>500,000<br>500,000 | 1,200,000<br>600,000<br>500,000<br>500,000     | RM        |
| 6214.FAL.002 | Surat Perintah<br>Pencairan/Penarikan/Repayment/Pengesahan Dana                                                                                                                                    | 5280.0 Dokumen                           |                                        | 4,000,000                                      |           |
| 100          | Tidak ada komponen                                                                                                                                                                                 |                                          |                                        | 4,000,000                                      | U         |
| A            | Pelaksanaan Pencairan/PenarikanPengesahan Dana                                                                                                                                                     |                                          |                                        | 2,000,000                                      |           |
| 521211       | Belanja Bahan<br>(KPPN.050-Gorontalo )<br>- Pelaksanaan Kearsipan dan Dokumentasi                                                                                                                  | 1.0 THN                                  | 2,000,000                              | 2,000,000                                      | RM        |
| B            | Penerbitan/Persetujuan/Rekonsiliasi Rekening/SKPP/Konfirmasi Penerimaan Negara, dll                                                                                                                |                                          |                                        | 2,000,000                                      |           |
| 521211       | Belanja Bahan<br>(KPPN.050-Gorontalo )<br>- Dokumentasi/Pencetakan/Penggandaan                                                                                                                     | 1.0 THN                                  | 2,000,000                              | 2,000,000                                      | RM        |
| 6215         | Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara                                                                                                                                            |                                          |                                        | 2,300,000                                      |           |
| 6215.FAH     | Pengelolaan Keuangan Negara[Base Line]                                                                                                                                                             | 4.0 Laporan                              |                                        | 2,300,000                                      |           |
| 6215.FAH.003 | Lokasi : KOTA GORONTALO<br>Laporan Keuangan BUN                                                                                                                                                    | 4.0 Laporan                              |                                        | 2,300,000                                      |           |
| 100          | Tidak ada komponen                                                                                                                                                                                 |                                          |                                        | 2,300,000                                      | U         |
| A            | Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN di Daerah                                                                                                                                            |                                          |                                        | 2,000,000                                      |           |

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB  
UNIT ORG  
UNIT KERJA  
ALOKASI

(015)  
(08)  
(528281)  
Rp. 1,947,824,000

KEMENTERIAN KEUANGAN  
Ditjen Perbendaharaan  
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA GORONTALO

| KODE         | PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/<br>SUBKOMP/ DETIL | PERHITUNGAN TAHUN 2024                                       |              |               | SD/<br>CP |
|--------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|
|              |                                                         | VOLUME                                                       | HARGA SATUAN | JUMLAH BIAYA  |           |
| (1)          | (2)                                                     | (3)                                                          | (4)          | (5)           | (6)       |
| 521211       | Belanja Bahan                                           |                                                              |              | 2,000,000     | RM        |
|              | (KPPN.050-Gorontalo )                                   |                                                              |              |               |           |
|              | - Pencetakan Laporan Keuangan                           | 1.0 THN                                                      | 2,000,000    | 2,000,000     |           |
| B            | Koordinasi UAKBUND KPPN di Kanwil                       |                                                              |              | 300,000       | RM        |
| 524113       | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                     |                                                              |              | 300,000       |           |
|              | (KPPN.050-Gorontalo )                                   |                                                              |              |               |           |
|              | - Transport Lokal [2 ORG x 1 KL]                        | 2.0 OK                                                       | 150,000      | 300,000       |           |
| 015.08.WA    | Program Dukungan Manajemen                              |                                                              |              | 1,745,744,000 |           |
| 4715         | Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum                     |                                                              |              | 1,418,212,000 |           |
| 4715.EBA     |                                                         |                                                              |              | 1,412,462,000 |           |
|              | Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]          | 3.0 Layanan,<br>Laporan,<br>Dokumen,<br>Rekomendasi,<br>Unit |              |               |           |
|              |                                                         |                                                              |              |               |           |
|              | Lokasi : KOTA GORONTALO                                 |                                                              |              |               |           |
| 4715.EBA.001 | Kerumahtanggaan                                         | 1.0 Layanan                                                  |              | 71,600,000    | U         |
| 100          | Tidak Ada Komponen                                      |                                                              |              | 71,600,000    |           |
| A            | TANPA SUB KOMPONEN                                      |                                                              |              | 71,600,000    |           |
| 521811       | Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi               |                                                              |              | 71,600,000    | RM        |
|              | (KPPN.050-Gorontalo )                                   |                                                              |              |               |           |
|              | - ATK dan Supplies Komputer                             | 1.0 THN                                                      | 71,600,000   | 71,600,000    |           |
| 4715.EBA.002 | Dukungan Pimpinan dan Keprotokoleran                    | 1.0 Layanan                                                  |              | 21,588,000    | U         |
| 100          | Tidak Ada Komponen                                      |                                                              |              | 21,588,000    |           |
| A            | TANPA SUB KOMPONEN                                      |                                                              |              | 21,588,000    |           |
| 524111       | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                          |                                                              |              | 18,588,000    | RM        |
|              | (KPPN.050-Gorontalo )                                   |                                                              |              |               |           |
|              | - Transport [2 ORG x 3 KL]                              | 6.0 OK                                                       | 300,000      | 1,800,000     |           |
|              | - Akomodasi [2 ORG x 3 KL x 2 HR]                       | 12.0 OH                                                      | 955,000      | 11,460,000    | RM        |
|              | - Uang Harian [2 ORG x 3 KL x 3 HR]                     | 18.0 OH                                                      | 296,000      | 5,328,000     |           |
| 524113       | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                     |                                                              |              | 3,000,000     |           |
|              | (KPPN.050-Gorontalo )                                   |                                                              |              |               |           |
|              | - Transport Lokal [2 ORG x 5 KL x 2 HR]                 | 20.0 OK                                                      | 150,000      | 3,000,000     |           |
| 4715.EBA.994 | Layanan Perkantoran                                     | 1.0 Layanan                                                  |              | 1,319,274,000 |           |
| 002          | Operasional dan Pemeliharaan Kantor                     |                                                              |              | 1,319,274,000 | U         |
| A            | Keperluan Sehari-hari perkantoran                       |                                                              |              | 514,891,000   |           |
|              |                                                         |                                                              |              |               |           |

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB  
UNIT ORG  
UNIT KERJA  
ALOKASI

(015)  
(08)  
(528281)  
Rp. 1,947,824,000

KEMENTERIAN KEUANGAN  
Ditjen Perbendaharaan  
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA GORONTALO

| KODE   | PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/<br>SUBKOMP/ DETIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PERHITUNGAN TAHUN 2024                                                           |                                                                                        |                                                                                                                                   | SD/<br>CP |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | VOLUME                                                                           | HARGA SATUAN                                                                           | JUMLAH BIAYA                                                                                                                      |           |
| (1)    | (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (3)                                                                              | (4)                                                                                    | (5)                                                                                                                               | (6)       |
| 521111 | <u>Belanja Keperluan Perkantoran</u><br>(KPPN.050-Gorontalo )<br>- Keperluan Sehari-hari Perkantoran<br>- Kertas Berharga/Materai<br>> Honorarium PPNPN<br>- Honor Satpam [4 ORG x 13 BLN]<br>- Honor Pengemudi [2 ORG x 13 BLN]<br>- Honor Pramubakti [3 ORG x 13 BLN]<br>- Uang Lembur PPNPN [9 ORG x 2 JAM x 60 HR]<br>- Uang Makan Lembur [9 ORG x 60 HR] | 1.0 THN<br>1.0 THN<br><br>52.0 OB<br>26.0 OB<br>39.0 OB<br>1080.0 OJ<br>540.0 OJ | 60,870,000<br>3,000,000<br><br>3,654,000<br>3,654,000<br>3,321,000<br>13,000<br>30,000 | 508,641,000<br><br>60,870,000<br>3,000,000<br>444,771,000<br>190,008,000<br>95,004,000<br>129,519,000<br>14,040,000<br>16,200,000 | RM        |
| 521119 | <u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u><br>(KPPN.050-Gorontalo )<br>- Dokumentasi/Pencetakan/Penggandaan/Laminasi<br>- Pelaksanaan Kearsipan dan Perpustakaan                                                                                                                                                                                               | 1.0 THN<br>1.0 THN                                                               | 3,000,000<br>3,250,000                                                                 | 6,250,000<br>3,000,000<br>3,250,000                                                                                               | RM        |
| B      | <u>Langganan Daya dan Jasa</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                        | 256,578,000                                                                                                                       |           |
| 521114 | <u>Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat</u><br>(KPPN.050-Gorontalo )<br>- Pos/Pengepakan/Pengiriman/Pengangkutan                                                                                                                                                                                                                                          | 1.0 THN                                                                          | 284,000                                                                                | 284,000                                                                                                                           | RM        |
| 522111 | <u>Belanja Langganan Listrik</u><br>(KPPN.050-Gorontalo )<br>- Langganan Listrik                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.0 THN                                                                          | 236,439,000                                                                            | 236,439,000                                                                                                                       | RM        |
| 522112 | <u>Belanja Langganan Telepon</u><br>(KPPN.050-Gorontalo )<br>- Langganan Telepon                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.0 THN                                                                          | 13,384,000                                                                             | 13,384,000                                                                                                                        | RM        |
| 522113 | <u>Belanja Langganan Air</u><br>(KPPN.050-Gorontalo )<br>- Langganan Air                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.0 THN                                                                          | 6,471,000                                                                              | 6,471,000                                                                                                                         | RM        |
| C      | <u>Pelaksanaan Operasional Kantor</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                  |                                                                                        | 176,470,000                                                                                                                       |           |
| 521113 | <u>Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh</u><br>(KPPN.050-Gorontalo )<br>> Penambah Daya Tahan Tubuh<br>- Obat-obatan<br>- Dokter [1 ORG x 12 BLN]<br>- Peningkatan Kebugaran [1 ORG x 12 BLN]<br>- Penambah Data Tahan Tubuh Akhir Tahun Anggaran [22 ORG x 15 HR]                                                                                               | 22.0 PEG<br>12.0 OB<br>12.0 BLN<br>330.0 OH                                      | 200,000<br>1,250,000<br>250,000<br>19,000                                              | 28,670,000<br>4,400,000<br>15,000,000<br>3,000,000<br>6,270,000                                                                   | RM        |

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB  
UNIT ORG  
UNIT KERJA  
ALOKASI

(015)  
(08)  
(528281)  
Rp. 1,947,824,000

KEMENTERIAN KEUANGAN  
Ditjen Perbendaharaan  
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA GORONTALO

| KODE   | PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/<br>SUBKOMP/ DETIL                  | PERHITUNGAN TAHUN 2024 |              |              | SD/<br>CP |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|--------------|-----------|
|        |                                                                          | VOLUME                 | HARGA SATUAN | JUMLAH BIAYA |           |
| (1)    | (2)                                                                      | (3)                    | (4)          | (5)          | (6)       |
| 521115 | <u>Belanja Honor Operasional Satuan Kerja</u><br>(KPPN.050-Gorontalo )   |                        |              | 84,336,000   | RM        |
|        | > Honor Pengelola Keuangan                                               |                        |              | 41,904,000   |           |
|        | - KPA [1 ORG x 12 BLN]                                                   | 12.0 OB                | 1,182,000    | 14,184,000   |           |
|        | - PPK [1 ORG x 12 BLN]                                                   | 12.0 OB                | 1,146,000    | 13,752,000   |           |
|        | - PPSPM [1 ORG x 12 BLN]                                                 | 12.0 OB                | 462,000      | 5,544,000    |           |
|        | - Bendahara [1 ORG x 12 BLN]                                             | 12.0 OB                | 402,000      | 4,824,000    |           |
|        | - Staf Pengelola Keuangan [1 ORG x 12 BLN]                               | 12.0 OB                | 300,000      | 3,600,000    |           |
|        | > Honor TIM SAI                                                          |                        |              | 6,480,000    |           |
|        | - Penanggung Jawab [1 ORG x 12 BLN]                                      | 12.0 OB                | 180,000      | 2,160,000    |           |
|        | - Koordinator [1 ORG x 12 BLN]                                           | 12.0 OB                | 150,000      | 1,800,000    |           |
|        | - Ketua [1 ORG x 12 BLN]                                                 | 12.0 OB                | 120,000      | 1,440,000    |           |
|        | - Anggota [1 ORG x 12 BLN]                                               | 12.0 OB                | 90,000       | 1,080,000    |           |
|        | > Honor Pengelola Keuangan BA BUN Dana Desa dan DAK Fisik                |                        |              | 25,632,000   |           |
|        | - KPA [1 ORG x 12 BLN]                                                   | 12.0 OB                | 750,000      | 9,000,000    |           |
|        | - PPK [1 ORG x 12 BLN]                                                   | 12.0 OB                | 726,000      | 8,712,000    |           |
|        | - PPSPM [1 ORG x 12 BLN]                                                 | 12.0 OB                | 288,000      | 3,456,000    |           |
|        | - Staf Pengelola Keuangan [2 ORG x 12 BLN]                               | 24.0 OB                | 186,000      | 4,464,000    |           |
|        | > Honor Output Kegiatan                                                  |                        |              | 10,320,000   |           |
|        | - Honor Pejabat PBJ [1 ORG x 12 BLN]                                     | 12.0 OB                | 680,000      | 8,160,000    |           |
|        | - Honor Penyimpan dan Pengurus BMN [1 ORG x 12 BLN]                      | 12.0 OB                | 180,000      | 2,160,000    |           |
| 521119 | <u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u><br>(KPPN.050-Gorontalo )       |                        |              | 63,464,000   | RM        |
|        | > Pengadaan Seragam                                                      |                        |              | 43,304,000   |           |
|        | - Seragam Pegawai [22 ORG x 2 STEL]                                      | 44.0 STEL              | 745,000      | 32,780,000   |           |
|        | - Seragam Satpam [4 ORG x 1 STEL]                                        | 4.0 STEL               | 1,881,000    | 7,524,000    |           |
|        | - Seragam Pengemudi [2 ORG x 1 STEL]                                     | 2.0 STEL               | 600,000      | 1,200,000    |           |
|        | - Seragam Pramubakti [3 ORG x 1 STEL]                                    | 3.0 STEL               | 600,000      | 1,800,000    |           |
|        | > Penyelenggaraan Rapat                                                  |                        |              | 20,160,000   |           |
|        | - Konsumsi rapat/jamuan tamu                                             | 12.0 BLN               | 1,680,000    | 20,160,000   |           |
| D      | <u>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u>                                  |                        |              | 151,165,000  | RM        |
| 523121 | <u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u><br>(KPPN.050-Gorontalo ) |                        |              | 151,165,000  |           |
|        | - Kendaraan Roda 4                                                       | 3.0 UNIT               | 31,458,500   | 94,375,000   |           |
|        | - Kendaraan Roda 2                                                       | 4.0 UNIT               | 4,990,000    | 19,960,000   |           |
|        | - Inventaris Kantor                                                      | 22.0 PEG               | 80,000       | 1,760,000    |           |
|        | - Tabung Pemadam Api                                                     | 10.0 UNIT              | 300,000      | 3,000,000    |           |
|        | - AC Split/Window/Standing Floor                                         | 29.0 UNIT              | 610,000      | 17,690,000   |           |
|        | - Genset s.d 50 KVA                                                      | 2.0 UNIT               | 7,190,000    | 14,380,000   |           |

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB  
UNIT ORG  
UNIT KERJA  
ALOKASI

(015)  
(08)  
(528281)  
Rp. 1,947,824,000

KEMENTERIAN KEUANGAN  
Ditjen Perbendaharaan  
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA GORONTALO

| KODE         | PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/<br>SUBKOMP/ DETIL               | PERHITUNGAN TAHUN 2024                           |              |              | SD/<br>CP |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|
|              |                                                                       | VOLUME                                           | HARGA SATUAN | JUMLAH BIAYA |           |
| (1)          | (2)                                                                   | (3)                                              | (4)          | (5)          | (6)       |
| E            | Pemeliharaan Gedung dan Bangunan                                      |                                                  |              | 195,920,000  |           |
| 523111       | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan<br>(KPPN.050-Gorontalo )     |                                                  |              | 195,920,000  | RM        |
|              | - Pemeliharaan Bangunan Kantor Tidak Bertingkat                       | 1392.0 M2                                        | 110,400      | 153,676,000  |           |
|              | - Pemeliharaan Bangunan Lainnya Tidak Bertingkat                      | 113.0 M2                                         | 110,400      | 12,475,000   |           |
|              | - Pemeliharaan Halaman Kantor                                         | 2658.0 M2                                        | 11,200       | 29,769,000   |           |
| TJ           | Jasa Pemeliharaan/ Annual Technical Support (ATS)                     |                                                  |              | 24,250,000   |           |
| 523121       | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin<br>(KPPN.050-Gorontalo )     |                                                  |              | 24,250,000   | RM        |
|              | - PC/Laptop                                                           | 22.0 UNIT                                        | 730,000      | 16,060,000   |           |
|              | - Printer                                                             | 11.0 UNIT                                        | 690,000      | 7,590,000    |           |
|              | - UPS 10 KVA                                                          | 3.0 UNIT                                         | 200,000      | 600,000      |           |
| 4715.EBD     | Layanan Manajemen Kinerja Internal[Base Line]                         | 3.0 Dokumen,<br>Layanan, Laporan,<br>Rekomendasi |              | 5,750,000    |           |
| -----        |                                                                       |                                                  |              |              |           |
| 4715.EBD.001 | Rencana Kerja dan Anggaran Unit                                       | 1.0 Dokumen                                      |              | 2,700,000    |           |
| 100          | Tidak Ada Komponen                                                    |                                                  |              | 2,700,000    | U         |
| A            | Pengelolaan Keuangan                                                  |                                                  |              | 2,700,000    |           |
| 521211       | Belanja Bahan<br>(KPPN.050-Gorontalo )                                |                                                  |              | 1,500,000    | RM        |
|              | - Penyelesaian LHP/LAKIN/RKAKL/SAI (Pencetakan LAKIN Tahunan)         | 1.0 THN                                          | 1,500,000    | 1,500,000    |           |
| 522151       | Belanja Jasa Profesi<br>(KPPN.050-Gorontalo )                         |                                                  |              | 900,000      | RM        |
|              | - Honor Narasumber (Dinas PU) [1 ORG x 1 JAM]                         | 1.0 OJ                                           | 900,000      | 900,000      |           |
| 524113       | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota<br>(KPPN.050-Gorontalo )          |                                                  |              | 300,000      | RM        |
|              | - Transport Penilai [2 ORG x 1 KL x 1 HR]                             | 2.0 OK                                           | 150,000      | 300,000      |           |
| 4715.EBD.003 | Dokumen Pengelolaan Kinerja Organisasi                                | 2.0 Dokumen                                      |              | 3,050,000    |           |
| 100          | Tidak Ada Komponen                                                    |                                                  |              | 3,050,000    | U         |
| A            | Perumusan Kebijakan Pengelolaan Kinerja Organisasi                    |                                                  |              | 2,000,000    |           |
| 521211       | Belanja Bahan<br>(KPPN.050-Gorontalo )                                |                                                  |              | 2,000,000    | RM        |
|              | - Dokumentasi/Pencetakan/Penggandaan dalam rangka Kepatuhan Internal  | 1.0 KEG                                          | 1,000,000    | 1,000,000    |           |
|              | - Dokumentasi/Pencetakan/Penggandaan dalam rangka pengelolaan kinerja | 1.0 KEG                                          | 1,000,000    | 1,000,000    |           |
| B            | Pelaksanaan Manajemen Kinerja, Resiko dan Kepatuhan Internal          |                                                  |              | 1,050,000    |           |

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB  
UNIT ORG  
UNIT KERJA  
ALOKASI

(015)  
(08)  
(528281)  
Rp. 1,947,824,000

KEMENTERIAN KEUANGAN  
Ditjen Perbendaharaan  
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA GORONTALO

| KODE                     | PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/<br>SUBKOMP/ DETIL                                                                                                                                                        | PERHITUNGAN TAHUN 2024                           |                             |                                                  | SD/<br>CP |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|-----------|
|                          |                                                                                                                                                                                                                | VOLUME                                           | HARGA SATUAN                | JUMLAH BIAYA                                     |           |
| (1)                      | (2)                                                                                                                                                                                                            | (3)                                              | (4)                         | (5)                                              | (6)       |
| 524113                   | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota<br>(KPPN.050-Gorontalo )<br>- Transport Lokal Penyusunan Profil Risiko di Kanwil [2 ORG x 2 KL]<br>- Transport Lokal Pelaksanaan WBK/WBBM dan DKO di Kanwil [1 ORG x 3 KL] | 4.0 OK<br>3.0 OK                                 | 150,000<br>150,000          | 1,050,000<br>600,000<br>450,000                  | RM        |
| 4718<br>4718.BMB         | Pengelolaan komunikasi dan informasi publik<br>Komunikasi Publik[Base Line]                                                                                                                                    | 3.0 layanan, kegiatan, Media, Orang, Volume      |                             | 10,400,000<br>10,400,000                         |           |
| 4718.BMB.001<br>100<br>A | Lokasi : KOTA GORONTALO<br>Pembinaan/Edukasi Publik<br>Tidak ada komponen<br>TANPA SUB KOMPONEN                                                                                                                | 2.0 kegiatan                                     |                             | 5,400,000<br>5,400,000<br>5,400,000              | U         |
| 521211                   | Belanja Bahan<br>(KPPN.050-Gorontalo )<br>- Konsumsi Peserta [20 ORG x 2 KEG]<br>- Perlengkapan Peserta [20 ORG x 2 KEG x 1 PKT]<br>- Spanduk/Banner [2 ORG x 1 PKT]                                           | 40.0 OK<br>40.0 PKT<br>2.0 PKT                   | 60,000<br>50,000<br>500,000 | 5,400,000<br>2,400,000<br>2,000,000<br>1,000,000 | RM        |
| 4718.BMB.002<br>100<br>A | Kehumasan<br>Tidak Ada Komponen<br>TANPA SUB KOMPONEN                                                                                                                                                          | 1.0 kegiatan                                     |                             | 5,000,000<br>5,000,000<br>5,000,000              | U         |
| 521219                   | Belanja Barang Non Operasional Lainnya<br>(KPPN.050-Gorontalo )<br>- Kehumasan                                                                                                                                 | 1.0 KEG                                          | 5,000,000                   | 5,000,000                                        | RM        |
| 4719<br>4719.EBA         | Pengelolaan Organisasi dan SDM<br>Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]                                                                                                                               | 3.0 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit |                             | 317,132,000<br>306,992,000                       |           |
| 4719.EBA.004<br>100<br>A | Lokasi : KOTA GORONTALO<br>Hasil Survey/Rekomendasi Kepuasan Pengguna Layanan<br>Tidak Ada Komponen<br>Survey Kepuasan Pengguna Layanan                                                                        | 2.0 Laporan                                      |                             | 2,000,000<br>2,000,000<br>2,000,000              | U         |
| 521211                   | Belanja Bahan<br>(KPPN.050-Gorontalo )<br>- Belanja Bahan                                                                                                                                                      | 1.0 KEG                                          | 2,000,000                   | 2,000,000                                        | RM        |
| 4719.EBA.994<br>001<br>A | Layanan Perkantoran<br>Gaji dan Tunjangan<br>TANPA SUB KOMPONEN                                                                                                                                                | 1.0 Layanan                                      |                             | 304,992,000<br>304,992,000<br>304,992,000        | U         |

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB  
UNIT ORG  
UNIT KERJA  
ALOKASI

(015)  
(08)  
(528281)  
Rp. 1,947,824,000

KEMENTERIAN KEUANGAN  
Ditjen Perbendaharaan  
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA GORONTALO

| KODE         | PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/<br>SUBKOMP/ DETIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PERHITUNGAN TAHUN 2024                                                |                                                          |                                                                                                | SD/<br>CP |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VOLUME                                                                | HARGA SATUAN                                             | JUMLAH BIAYA                                                                                   |           |
| (1)          | (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (3)                                                                   | (4)                                                      | (5)                                                                                            | (6)       |
| 511129       | Belanja Uang Makan PNS<br>(KPPN.050-Gorontalo )<br>- Uang Makan Golongan II [11 ORG x 19 HR x 12 BLN]<br>- Uang Makan Golongan III [8 ORG x 19 HR x 12 BLN]<br>- Uang Makan Golongan IV [3 ORG x 19 HR x 12 BLN]                                                                                                                                                                                | 2508.0 OH<br>1824.0 OH<br>684.0 OH                                    | 35,000<br>37,000<br>41,000                               | 183,312,000<br>87,780,000<br>67,488,000<br>28,044,000                                          | RM        |
| 512211       | Belanja Uang Lembur<br>(KPPN.050-Gorontalo )<br>- Uang Lembur Golongan II [11 ORG x 2 JAM x 60 HR]<br>- Uang Lembur Golongan III [8 ORG x 2 JAM x 60 HR]<br>- Uang Lembur Golongan IV [3 ORG x 2 JAM x 60 HR]<br>- Uang Makan Lembur Golongan II [11 ORG x 1 KL x 60 HR]<br>- Uang Makan Lembur Golongan III [8 ORG x 1 JAM x 60 HR]<br>- Uang Makan Lembur Golongan IV [3 ORG x 1 JAM x 60 HR] | 1320.0 OJ<br>960.0 OJ<br>360.0 OJ<br>660.0 OK<br>480.0 OK<br>180.0 OK | 24,000<br>30,000<br>36,000<br>35,000<br>37,000<br>41,000 | 121,680,000<br>31,680,000<br>28,800,000<br>12,960,000<br>23,100,000<br>17,760,000<br>7,380,000 | RM        |
| 4719.EBC     | Layanan Manajemen SDM Internal[Base Line]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 22.0 Orang,<br>Layanan,<br>Rekomendasi                                |                                                          | 10,140,000                                                                                     |           |
| 4719.EBC.001 | Lokasi : KOTA GORONTALO<br>Pengembangan SDM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 22.0 Orang                                                            |                                                          | 10,140,000                                                                                     |           |
| 100          | Tidak Ada Komponen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                       |                                                          | 10,140,000                                                                                     | U         |
| XC           | Penyelenggaraan Capacity Building                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                       |                                                          | 10,140,000                                                                                     |           |
| 521211       | Belanja Bahan<br>(KPPN.050-Gorontalo )<br>> In House Training<br>- Konsumsi [27 ORG x 1 KL]<br>- Barang Habis Pakai [27 ORG x 1 KL]<br>> Data Analitik<br>- Konsumsi [11 ORG x 2 KL]                                                                                                                                                                                                            | 27.0 OK<br>27.0 OK<br>22.0 OK                                         | 60,000<br>50,000<br>60,000                               | 4,290,000<br>2,970,000<br>1,620,000<br>1,350,000<br>1,320,000<br>1,320,000                     | RM        |
| 522151       | Belanja Jasa Profesi<br>(KPPN.050-Gorontalo )<br>> Peningkatan Kapasitas SDM<br>- Honor Narasumber [1 ORG x 2 JAM x 3 KL]                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.0 OJ                                                                | 900,000                                                  | 5,400,000<br>5,400,000                                                                         | RM        |
| 524113       | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota<br>(KPPN.050-Gorontalo )<br>> Perjalanan Dinas dalam rangka Peningkatan Kapasitas SDM<br>- Transport Narasumber [1 ORG x 3 KL]                                                                                                                                                                                                                              | 3.0 OK                                                                | 150,000                                                  | 450,000<br>450,000<br>450,000                                                                  | RM        |

Catatan : 1. U = Komponen Utama  
2. P = Komponen Penunjang  
3. \* = Blokir

**Format *Checklist* Kelengkapan Narasi IKU**

| Perbendaharaan Negara yang optimal dan akuntabel |                                                                                                                                       |                                 |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L           |                                                                                                                                       |                                 |
| No.                                              | Kelengkapan                                                                                                                           | Checklist                       |
| 1                                                | Data diyakini keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2023)                                                               | v                               |
| 2                                                | Tujuan/sasaran/indikator sesuai Renstra/Renja                                                                                         | v                               |
| 3                                                | Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini                                                        | v                               |
| 4                                                | Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan:                                                                                |                                 |
|                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir</li> </ul>                 | v                               |
|                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi</li> </ul> | v                               |
|                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Target pada Renja Kemenkeu Tahun 2023</li> </ul>                                               | v                               |
|                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Standar Nasional (jika ada)</li> </ul>                                                         | Tidak ada dan sudah dinarasikan |
| 5                                                | Kaitan pencapaian target tahun 2023 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2020-2024 dan/atau Renja 2023                        | v                               |
| 6                                                | Menjelaskan upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja                                            | v                               |
| 7                                                | Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan   | v                               |
| 8                                                | Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya                                                                             | v                               |
| 9                                                | Menyajikan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan dalam pernyataan kinerja                           | v                               |
| 10                                               | Menyajikan analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja (dengan            | v                               |



|    |                                                                                                  |   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|    | memperhatikan rencana aksi 2023 yang telah di-upload ke aplikasi e-sakip)                        |   |
| 11 | Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala | v |
| 12 | Mencantumkan rencana aksi ke depan                                                               | v |



Jl. Jenderal Sudirman No. 58 - Kota Gorontalo - 96128  
Telpon : (0435) 821460, 824003  
Email : [kppn050@kemenkeu.go.id](mailto:kppn050@kemenkeu.go.id) , [kppn.gorontalo@gmail.com](mailto:kppn.gorontalo@gmail.com)  
Situs : [www.djpbk.kemenkeu.go.id/kppn/gorontalo](http://www.djpbk.kemenkeu.go.id/kppn/gorontalo)

